Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur

LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



Kata Pengantar



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan LKIP ini mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 serta RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029.

LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan menggambarkan pencapaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Cianjur Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah di tengah masa transisi perencanaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pada periode perencanaan berikutnya. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur, sinergi antar Perangkat Daerah, serta upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

LKIP Kabupaten Cianjur Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah serta menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cianjur, Maret 2026
Bupati Cianjur

ttd

Mohammad Wahyu Ferdian

Ikhtisar Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD 2021–2026 dengan 14 (empat belas) sasaran strategis dan total 16 (enam belas) indikator kinerja, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD 2025–2029 dengan 16 (enam belas) sasaran strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap target dari masing-masing indikator tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026)
    a. terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100 persen;
    b. terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target kinerja atau capaiannya di bawah 100 persen.
2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029)
    a. terdapat 19 (sembilan belas) indikator kinerja telah mencapai target atau dengan capaian lebih dari 100 persen;
    b. terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang tidak mencapai target kinerja atau capaiannya di bawah 100 persen;
    c. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang realisasi kinerjanya belum tersedia.

Rincian realisasi masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,85	75,05	100,27%
Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,37	7,62	101,44%
	3	Angka Harapan Sekolah (tahun)	12,05	12,31	102,16%
Menurunnya angka kemiskinan	4	Persentase penduduk miskin (%)	10,07	9,82	102,55%
Menurunnya tingkat pengangguran	5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,92	6,17	128,36%
Meningkatnya sumber daya manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia	6	Indeks Kesalehan Sosial (nilai)	85,65	90,38	105,52%
Meningkatnya PDRB sektor pertanian	7	PDRB sektor pertanian	10.876,95	11.209,19	103,05%
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian	8	Tingkat Koperasi yang berkualitas (%)	10,13	44,11	435,44%
	9	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	15,27	46,22	302,68%
Meningkatnya nilai investasi	10	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	1	26,35	2.635%
Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (miliar)	2.627,85	3.077,47	117,11%
Meningkatnya PDRB sektor perindustrian	12	PDRB sektor perindustrian (miliar)	2.475,31	2.837,15	114,62%
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	13	PDRB sektor perdagangan (miliar)	7.093,00	6.303,37	88,86%
Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	14	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (nilai)	57,84	68,12	117,78%
Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	67,67	72,85	107,66%
Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas	16	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	74,60	88,02*	117,99%

Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target PK Perubahan 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing	1	Persentase Penduduk Miskin	9,8	9,82	99,79%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,91	75,05	100,18%
	3	Angka Prevalensi Stunting (persen)	6,8	7,3*	*Data Belum Rilis
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,39	7,62	103,11%
	5	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,05	12,31	102,16%
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,71	6,17	92,54%
	7	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta rupiah)	9,27	9,173	98,95%
Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan berorientasi penduduk, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga	8	Indeks Ketimpangan Gender (poin)	0,529	0,544*	*Data Belum Rilis
	9	Indeks Pembangunan Keluarga (poin)	57,67	51,9	89,99%
	10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (poin)	59,2	54,5	92,06%
Meningkatnya pelestarian budaya daerah	11	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Berkembang (objek)	86	96	111,63%
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama serta kehidupan masyarakat aman, tentram, dan kondusit	12	Indeks Kesalehan Sosial (poin)	79,52	90,38	113,65%
	13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	77,52	87,72	113,16%
	14	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (poin)	66	64	96,97%
Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	15	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (persen)	6.48	7.6	117,28%
Meningkatnya koerasi dan UMKM yang berdaya saing	16	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	1.94	2.1	108,25%
	17	Tingkat Koperasi yang berkualitas (persen)	44	44.11	100,25%
Meningkatnya produktivitas sektor perindustrian	18	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	7.31	7.02	96,03%
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	19	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (miliar rupiah)	10.051	10.055,67	100,04%
Meningkatnya investasi	20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)	25	25,37	101,48%
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	21	Nilai PDRB Pertanian (miliar rupiah)	10.955,40	11.209,19	102,31%
	22	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	74,9	78,58	104,91%
Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang	23	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar (poin)	80,28	80,68	100,5%
	24	Rasio Konektivitas (persen)	0,74	0,74	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	67,54	72,85	107,86%
	26	Indeks Risiko Bencana (poin)	164	136,31	120,31%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	27	Indeks Reformasi Birokrasi General (poin)	73,93	76,31	101,19%
	28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	79,22	72,0414	90,93%
Meningkatnya kemandirian desa	29	Persentase Desa Mandiri (persen)	29,94	31,07	104%

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp4.718.434.122.435,10 atau 93,48 persen dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp5.047.290.553.811,61.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani. Birokrasi merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi menerjemahkan keputusan politik ke dalam kebijakan publik serta menjamin pelaksanaannya secara operasional, khususnya dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan agenda pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas, yang dimulai dari aparatur pemerintah itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diukur dan dinilai kinerjanya melalui indikator yang selaras dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, partisipasi masyarakat, serta perhatian terhadap pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, reformasi birokrasi menjadi prasyarat utama yang harus dilaksanakan secara komprehensif, disertai rencana tindak (action plan) yang jelas dan implementasi yang konsisten, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, khususnya dalam penggunaan anggaran, wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Maksud & Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, khususnya dalam penggunaan anggaran. Substansi utama dalam penyusunan laporan kinerja adalah proses pengukuran, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil analisis capaian kinerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan implementasi rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi sarana penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

LKIP Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mengingat Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, maka pengukuran dan pelaporan kinerja didasarkan pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 sebagai akhir periode perencanaan sebelumnya, serta mulai mengacu pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan yang baru. Dengan demikian, LKIP Tahun 2025 tidak hanya merefleksikan capaian kinerja pada akhir periode RPJMD 2021–2026, tetapi juga menjadi fondasi awal pencapaian target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.

LKIP ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur atas pencapaian sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, serta sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pencapaian target kinerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan langkah perbaikan guna mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel, serta dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Cianjur

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Cianjur disusun untuk memberikan konteks terhadap dinamika pembangunan yang berlangsung, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Pemahaman terhadap kondisi objektif daerah menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis capaian kinerja serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi. Dengan penyajian gambaran umum ini, diharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Cianjur dapat dirumuskan secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis.

Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak antara koordinat 106°42'-107°25' Bujur Timur dan 6°21'-7°25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7 sampai 2.962 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan memiliki kemiringan lahan antara 0-40%. Berdasarkan posisi geografis tersebut, Kabupaten Cianjur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; serta
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Secara administratif, Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan, 354 desa, dan 6 kelurahan, dengan luas wilayah 363.191,54 ha. Wilayah ini juga memiliki Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat, dengan total 2.825 RW dan 10.748 RT. Kecamatan Cidaun merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas 29.773,77 ha sedangkan Kecamatan Cianjur menjadi wilayah terkecil dengan luas 2.646,48 ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di pantai selatan yang memiliki dataran rendah. Aktivitas utama masyarakat setempat meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Semua ini didukung oleh banyaknya sungai besar dan kecil yang menjadi sumber pengairan untuk pertanian, diantaranya Sungai Cibuni, yang merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Cianjur dan bermuara di Samudra Hindia. Selanjutnya, berikut luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Cianjur menurut data terakhir, tahun 2024.

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (ha)	Persentase (%)
1	Agrabinta	Mekarsari	19.635,28	5,41
2	Leles	Pusakasari	11.478,69	3,16
3	Sindangbarang	Saganten	15.859,59	4,37
4	Cidaun	Kertajadi	29.773,77	8,20
5	Naringgul	Wangunjaya	28.763,80	7,92
6	Cibinong	Sukajadi	24.027,15	6,62
7	Cikadu	Mekarlaksana	19.500,36	5,37
8	Tanggeung	Tanggeung	6.596,09	1,82
9	Pasirkuda	Kalibaru	10.517,72	2,90
10	Kadupandak	Kadupandak	10.427,90	2,87
11	Cijati	Cijati	4.869,58	1,34
12	Takokak	Pasawahan	14.549,86	4,01
13	Sukanagara	Sukanagara	17.016,37	4,69
14	Pagelaran	Pagelaran	20.139,59	5,55
15	Campaka	Cidadap	14.163,06	3,90
16	Campakamulya	Campakamulya	7.435,83	2,05
17	Cibeber	Cihaur	12.334,59	3,40
18	Warungkondang	Jambudipa	4.569,77	1,26
19	Gekbrong	Gekbrong	5.030,39	1,39
20	Cilaku	Sukasari	5.288,48	1,46
21	Sukaluyu	Sukamulya	4.776,75	1,32
22	Bojongpicung	Bojongpicung	8.954,02	2,47
23	Haurwangi	Kertasari	4.590,97	1,26
24	Ciranjang	Cibiuk	3.409,62	0,94
25	Mande	Mulyasari	9.431,73	2,60
26	Karangtengah	Hegarmanah	4.847,71	1,33
27	Cianjur	Pamoyanan	2.646,48	0,73
28	Cugenang	Mangunkerta	7.647,78	2,11
29	Pacet	Cipendawa	4.167,32	1,15
30	Cipanas	Cipanas	6.819,12	1,88
31	Sukaresmi	Cikanyere	9.605,04	2,64
32	Cikalongkulon	Sukagalih	14.317,13	3,94
Kabupaten Cianjur		**Cianjur**	**363.191,54**	**100**

Kabupaten Cianjur memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2024, Cianjur tercatat sebagai salah satu dari 5 (lima) daerah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Barat, dengan hasil 630.847,78 ton. Selain itu, Cianjur juga termasuk dalam 5 (lima) daerah dengan produksi beras terbesar di Provinsi Jawa Barat, menghasilkan 364.303,3 ton. Keberadaan lahan pertanian yang subur menjadikan Cianjur sebagai salah satu penyumbang utama pasokan beras, dengan sektor pertanian khususnya padi mendominasi perekonomian daerah. Kontribusi Cianjur sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain sektor pertanian, Cianjur juga berperan penting di sektor pariwisata, dengan keindahan alam yang meliputi pegunungan dan pantai. Kawasan ini telah menjadi tujuan wisata terkemuka di Jawa Barat, sehingga berdampak positif bagi perekonomian lokal melalui adanya perhotelan, restoran, cinderamata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan barang maupun jasa dalam bidang pariwisata. Selain itu, pariwisata juga menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu hal yang diunggulkan oleh suatu daerah. Apabila SDA dapat dioptimalkan dengan baik, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi untuk memajukan wilayah. Hal tersebut tentu dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. SDA menjadi salah satu faktor pendorong bagi para investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah. Maka dari itu, identifikasi potensi sumber daya alam sangat penting untuk dilakukan.

Proses identifikasi tersebut tentu diawali dengan menganalisis sektor potensial, kemudian analisis PDRB potensial, dan akhirnya rencana pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044. Berdasarkan analisis terhadap tiga hal tersebut, diperoleh prioritas di Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 5 (lima) kawasan yaitu kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman dan kawasan pariwisata. Secara lebih rinci, hasil identifikasi potensi prioritas Kabupaten Cianjur dijelaskan sebagai berikut.

Kecamatan Potensi Tanaman Pangan di Kabupaten Cianjur



Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2022

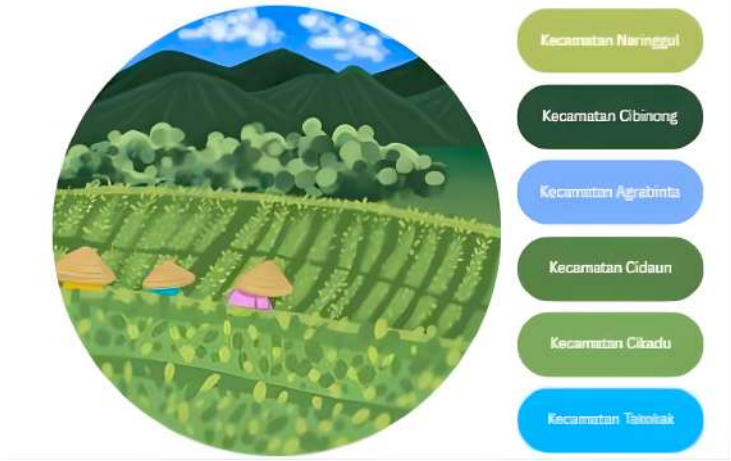
1. Potensi Tanaman Pangan

Potensi wilayah untuk tanaman pangan menurut pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044, berdasarkan identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial, menunjukkan bahwa dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan di Kabupaten Cianjur, terdapat 13 (tiga belas) kecamatan yang menjadi prioritas untuk potensi investasi.

2. Perkebunan

Potensi wilayah perkebunan menurut pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044, berdasarkan identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial, menunjukkan bahwa dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan di Kabupaten Cianjur, terdapat 6 (enam) kecamatan yang menjadi prioritas untuk potensi investasi.

Kecamatan Potensi Perkebunan di Kabupaten Cianjur

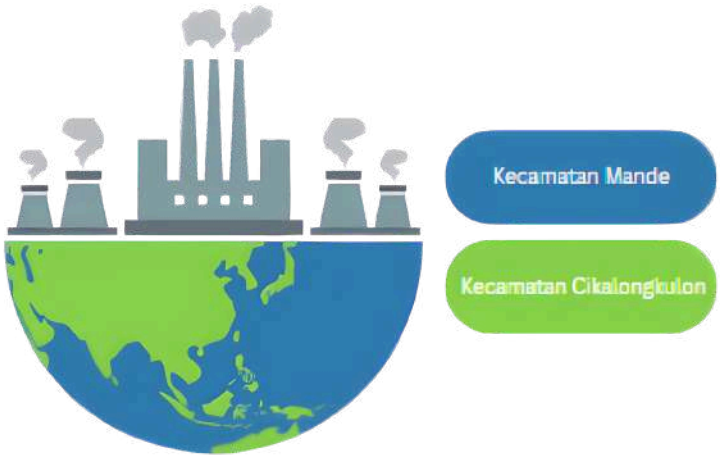


Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2022

3. Potensi Industri

Potensi wilayah untuk peruntukan industri berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044, yang didasarkan pada identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial, menunjukkan bahwa dari 9 kecamatan di Kabupaten Cianjur, terdapat 2 kecamatan yang menjadi prioritas lokasi.

Kecamatan Potensi Industri di Kabupaten Cianjur



Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2022

4. Potensi Pengembangan Permukiman

Potensi pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044, dengan hasil identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial, menunjukkan bahwa dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, terdapat 9 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan permukiman.

Kecamatan Potensi Pengembangan Permukiman di Kabupaten Cianjur



Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2022

5. Potensi Pariwisata

Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044, dengan hasil identifikasi sektor potensial dan PDRB potensial, menunjukkan bahwa lokasi untuk potensi ODTW terletak di 12 lokasi/kecamatan yang tersebar di wilayah bagian utara, tengah, dan selatan Kabupaten Cianjur.

Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Cianjur

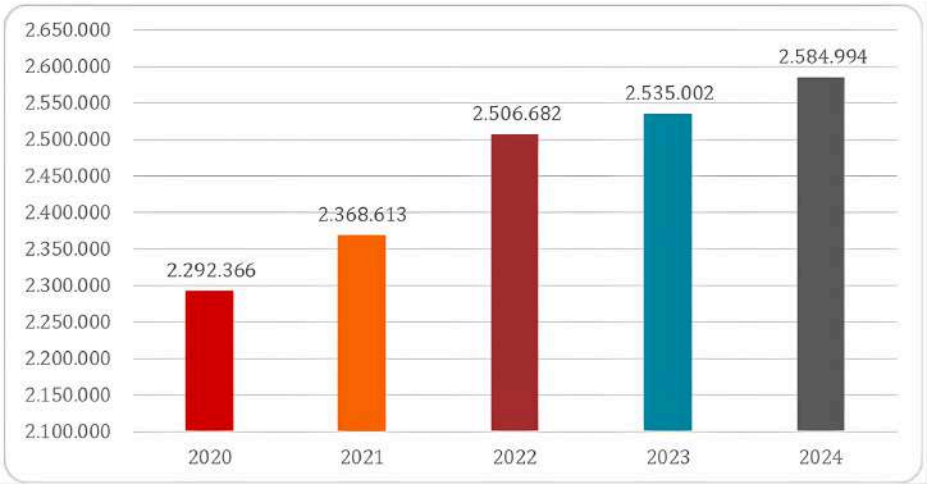


Sumber: Kajian Identifikasi Potensi Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2022

Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan, karena jumlah, distribusi, dan pertumbuhannya berpengaruh terhadap berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur memiliki kecenderungan bertambah setiap tahunnya dimana dalam rentang waktu tahun 2020-2024, pada tahun 2022 mengalami lonjakan yang cukup signifikan sebanyak 138.069 jiwa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Cianjur pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.584.994 jiwa dimana dalam waktu lima tahun meningkat sebanyak 292.628 jiwa atau 12,76 persen dari tahun 2020 sebanyak 2.292.366 jiwa. Peningkatan ini mencerminkan dinamika demografi yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, migrasi, serta perkembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Cianjur.

Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 2.584.994 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,14% per tahun. Pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan bervariasi. Beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti Leles (4,05%), Cidaun (2,96%), dan Naringgul (2,66%) yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Di sisi lain, terdapat kecamatan dengan pertumbuhan negatif atau stagnan, seperti Cianjur (-0,39) yang menandakan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi dinamika kependudukan, seperti urbanisasi, migrasi, atau perubahan struktur ekonomi wilayah.

Persentase Penduduk menunjukkan proporsi jumlah penduduk di masing-masing kecamatan terhadap total populasi Kabupaten Cianjur. Kecamatan dengan persentase penduduk tertinggi adalah Cianjur dan Karangtengah, masing-masing dengan 6,88 persen dan 6,81 persen dari total penduduk. Sementara itu, Campakamulya memiliki persentase penduduk terendah, yaitu 0,92 persen.

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km²)
1	Agrabinta	1,61	212
2	Leles	1,22	275
3	Sindangbarang	2,35	383
4	Cidaun	2,75	239
5	Naringgul	1,86	167
6	Cibinong	2,56	275
7	Cikadu	1,46	193
8	Tanggeung	2,02	791
9	Pasirkuda	1,52	373
10	Kadupandak	2,09	519
11	Cijati	1,35	715
12	Takokak	2,01	358
13	Sukanagara	2,25	342
14	Pagelaran	3,02	388
15	Campaka	2,76	505
16	Campakamulya	0,92	321
17	Cibeber	5,42	1136
18	Warungkondang	3,20	1808
19	Gekbrong	2,50	1285
20	Cilaku	4,86	2376
21	Sukaluyu	3,77	2041
22	Bojongpicung	3,40	983
23	Haurwangi	2,62	1473
24	Ciranjang	3,64	2760
25	Mande	3,33	913
26	Karangtengah	6,81	3632
27	Cianjur	6,88	6719
28	Cugenang	4,78	1617
29	Pacet	4,49	2782
30	Cipanas	4,51	1708
31	Sukaresmi	3,68	992
32	Cikalongkulon	4,35	786
	Kabupaten Cianjur	**100,00**	**712**

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2025

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya penduduk pada suatu wilayah per satuan luas. Kecamatan Cianjur memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 6.719 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Naringgul, yaitu 167 jiwa/km². Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan penduduk rata-rata 712 jiwa/km². Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi umumnya berada di sekitar pusat perkotaan seperti Ciranjang (2.760 jiwa/km²), Pacet (2.782 jiwa/km²), dan Cilaku (2.376 jiwa/km²). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan rendah seperti Naringgul, Agrabinta, Cikadu dan Cidaun cenderung merupakan wilayah pedesaan dengan luas lahan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduknya.

Isu Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur, karena berada pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 sekaligus menjadi awal periode RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menempatkan Tahun 2025 sebagai fase penghubung yang menuntut kesinambungan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu memastikan agar capaian kinerja pada akhir periode RPJMD 2021–2026 tetap terjaga, sekaligus selaras dengan arah pembangunan dan isu prioritas yang akan dilaksanakan pada RPJMD 2025–2029.

Oleh karena itu, isu strategis dalam LKIP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 serta mempertimbangkan arah kebijakan dan fokus pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029, guna menjamin konsistensi, keberlanjutan, dan sinkronisasi pencapaian kinerja pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021 – 2026, dan Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan, isu nasional, Provinsi Jawa Barat, RPJPD dan RTRW Kabupaten Cianjur, dan KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, maka rumusan isu strategis Kabupaten Cianjur disandingkan dengan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang akan memberi gambaran common issues, sehingga memudahkan untuk merancang strategi dan arah kebijakan sebagaimana pada tabel di bawah.

Keterkaitan Isu strategis Kabupaten Cianjur 2021-2026,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Kabupaten Cianjur 2021-2026			Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Isu strategis Nasional RPJMN Tahun 2019-2024
Permasalahan Pokok	**Isu Strategis**	**Tujuan**		
1. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. 2. Angka kematian ibu (AKI) masih tinggi, mencapai 33/100.000 kelahiran pada tahun 2020 3. Angka kematian bayi (AKB) masih tinggi, mencapai 173/1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 4. Masih tingginya angka kesakitan 5. Masih rendahnya Desa yang bebas dari buang air besar sembarangan (ODF) baru mencapai 46,11 persen pada tahun 2020 6. Belum optimalnya database PPKS 7. Masih tingginya angka PPKS 8. Tingginya angka penduduk miskin yang mencapai 10,36 persen tahun 2020 dan di atas Provinsi Jawa Barat 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang rendah yaitu 60,32 persen pada tahun 2020 10. Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi yaitu 11,05 persen pada tahun 2020. 11. 11. Masih rendahnya daya serap tenaga kerja (35,8 persen)	1. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia 2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius	1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing SDM 2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Karakter bangsa 4. Tenaga Kerja
1. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas 2. Masih terhambatnya pertumbuhan UMKM 3. Masih rendahnya kapasitas BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi perdesaan 4. Belum optimalnya upaya promosi peluang penanaman modal yang ada di Kabupaten Cianjur 5. Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi 6. Terjadinya penurunan angka ketersediaan pangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir 7. Masih rendahnya skor pola pangan harapan dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat	3. Daya Saing dan kemandirian ekonomi daerah	Meningkatnya perekonomian daerah	3. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 6. Investasi 7. Perdagangn
1. Rendahnya pemenuhan kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah (kondisi jalan mantap kabupaten mencapai 63,28 persen) 2. Belum optimalnya pelayanan air bersih (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/air bersih mencapai 85,09 persen tahun 2020) 3. Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan pengolahan air limbah (rumah tangga bersanitasi mencapai 83,75 persen tahun 2020) 4. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. 5. Bertambahnya luasan permukiman kumuh (luas kawasan kumuh yang ditangani baru mencapai 84,4 persen tahun 2020) 6. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Akses Permukiman Masyarakat Berupa Jalan Lingkungan dan Jembatan Gantung/Plat. 7. Belum optimalnya pelayanan terminal 8. Belum optimalnya kelaikan angkutan umum.	4. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	4. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	8. Infrastruktur
1. Menurunnya indeks kualitas air pada cemar ringan 2. Menurunnya indeks kualitas udara 3. Rendahnya capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan/penanganan lahan kritis 4. Belum terpenuhinya RTH sebesar 20 % (RTH mencapai 14,77 persen).	5. Sumber daya Alam, Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan		9. Lingkungan Hidup dan Bencana
1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Belum optimalnya kualitas layanan publik	6. Tata Kelola Pemerintahan dan Penerapan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas		
2. Belum meratanya pembangunan dan masih rendahnya kepuasan masyarakat atas kualitas layanan publik kepada masyarakat	7. Penataan Daerah		5. Reformasi birokrasi.	10. Institusi 11. Kewilayahan 12. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2025

Berdasarkan dari matrik Keterkaitan Isu strategis Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, secara rincian penjelasan isu strategis Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia

Sebagai kelanjutan dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, kehendak kuat untuk terus memperbaiki kondisi yang ada pada masyarakat untuk mencapai kemakmuran seluruh lapisan masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2016–2020, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Cianjur sebesar 0,96 poin. IPM Cianjur dalam lima tahun terakhir (tahun 2016 - 2020) sudah berada pada kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), dan mampu tumbuh positif rata-rata 0,96% melebihi pertumbuhan Provinsi Jawa Barat (rata-rata 0,72%) melebihi pertumbuhan nasional (rata-rata 0,62%). Namun rata-rata IPM Kabupaten Cianjur (64,40) masih belum melampaui rata-rata IPM Jawa Barat (71,23) maupun rata-rata IPM Nasional (71,25). Sejak Tahun 2019, IPM Provinsi Jawa Barat sudah melampaui IPM Nasional. IPM Jawa Barat Tahun 2020 yaitu 72,09 sedangkan IPM Nasional yaitu 71,94. IPM keduanya tumbuh positif pada Tahun 2020, IPM Jabar tumbuh 0,08% sedangkan IPM Nasional tumbuh 0,03%. Kebalikannya, IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2020 menjadi 65,36, turun sebesar -0,03% dari tahun 2019 (65,38). Penurunan IPM juga dialami oleh lebih dari separuh Kabupaten/Kota di Jawa Barat akibat pandemi COVID-19. Isu Strategis peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Peningkatan kualitas SDM dengan komponen pembentuk adalah Indeks Pendidikan, kesehatan dan daya beli. Untuk bidang pendidikan permasalahan pokok adalah rendahnya rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah sedangkan pada bidang kesehatan diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi yang mencapai 33/100.000 kelahiran pada tahun 2020. Selanjutnya Angka kematian bayi (AKB) masih tinggi, mencapai 173/1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 serta masih tingginya angka kesakitan. Oleh karena itu, hal yang perlu ditekankan dalam upaya pencapaian nilai IPM dimaksud adalah bukan sekedar meningkatkan nilainya setiap tahun, tetapi juga meningkatkan pertambahan nilainya setiap tahun. Selain permasalahan pada bidang Pendidikan dan kesehatan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, bahwa untuk mewujudkan masyarakat berbudaya luhur dan berakhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan dalam rangka mengembangkan masyarakat yang berdaya saing adalah mewujudkan masyarakat Cianjur yang memiliki jati diri, berpengetahuan tinggi, halus budi bahasa, dan memiliki kualitas jasmani yang baik. Mewujudkan masyarakat Cianjur yang berkomitmen dengan karakteristik akhlak mulia sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan, sehingga peningkatan nilai IPM diharapkan meningkatkan kualitas hidup manusia di Kabupaten Cianjur. Karakteristik akhlak mulia dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan baik aspek pendidikan, kesehatan maupun ekonomi sehingga tercapainya tujuan pembangunan manusia, sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia.

Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26.920 jiwa atau 10,30 persen. Kondisi ini cenderung membaik dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, walaupun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat 27.400 jiwa dari tahun 2019 sebagai dampak Pandemi COVID-19. Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah, namun dimensi lain seperti persentase penduduk miskin juga mesti diperhatikan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur yang terus menunjukkan tren turun dari tahun 2013 sampai tahun tahun 2019. Hal ini sama dialami oleh Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin.

Melihat kondisi penduduk miskin Kabupaten Cianjur masih tergolong tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,88% di tahun 2020.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, tingginya angka kemiskinan adalah kelompok isu yang menjadi akar sekaligus muara dari berbagai kelompok isu lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 941.358 jiwa yang terbagi dalam dua kategori yaitu yang bekerja sebanyak 846.258 jiwa dan yang berstatus pengangguran terbuka yaitu sebanyak 95.100 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2020, angkatan kerja sebanyak 1.185.595 jiwa atau meningkat 25,94 persen. Angkatan kerja terbanyak bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel sebanyak 28,25 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan mencapai 26,08 persen.

Dengan demikian sektor perdagangan mendominasi penyerapan tenaga kerja terbesar dan disusul oleh sektor pertanian.
Kurangnya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan daya serap tenaga kerja ditandai oleh adanya kekurangan kesempatan kerja secara umum dan bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun sehubungan dengan pertambahan penduduk. Tersedianya lapangan kerja dan tingkat penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh dua besaran yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di pihak lain. Dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar juga. Salah satu sasaran yang perlu dipertimbangkan untuk keperluan tersebut adalah terjaminnya upaya peningkatan produksi sebagai usaha yang terpadu dengan langkah-langkah untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Isu strategis pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta perluasan kesempatan kerja di masa pandemi, penanganan serta pemulihan dampak pandemic COVID-19, perlu dukungan dari berbagai pihak agar selain pemerintah, stakeholder juga berkomitmen bekerjasama untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah diantaranya merupakan integrasi dari pengembangan ekonomi lokal di seluruh wilayah. Pengembangan ekonomi lokal sendiri adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan pelaku-pelaku ekonomi yang merupakan kelompok-kelompok berbasis masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengelola sumberdaya tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi lokal dapat diarahkan untuk tujuan penciptaan pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan terciptanya kehidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemetaan masalah pokok dan isu strategis, daya saing ekonomi daerah diukur dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten Cianjur sebesar 1,89 persen dan meningkat menjadi 4,64 persen pada tahun 2019 atau meningkat 2,75 persen. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan akibat adanya Pandemi COVID-19 yang mencapai -.1,18 persen. Jika dilihat dari capaian besarannya, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2020 mencapai Rp.14.039.069,25 turun 0,64 dari tahun 2019 seiring dengan Pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat PDRB per kapita Kabupaten masih di bawah yang mencapai sekitar 30 juta, sehingga perlu akselerasi dalam peningkatan komponen pembentuk PDRB.

Kemandirian ekonomi bagi suatu daerah sangat penting dan menjadi tuntutan riil. Mandiri secara ekonomi adalah mampu berdiri sendiri dengan struktur ekonomi pembentuknya. Kemandirian ekonomi dengan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dilakukan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan, dimana memberdayakan sumber daya lokal dan terutama tenaga kerja lokal dan pembinaan pelaku UMKM dalam menghadapi tuntutan era 4.0.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi/digital untuk menambah efisiensi dan daya saing sesuai dengan tuntutan era industri 4.0. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut fokus strategi perlu dilakukan terutama melalui strategi peningkatan daya saing, selain strategi mengembangkan daya tarik dan daya tahan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Beberapa indikator dalam pengembangan daya saing ekonomi daerah diantaranya perekonomian daerah, sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, lingkungan usaha produktif, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan, serta perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu perlunya kebijakan restrukturisasi untuk mengatasi ketimpangan struktural dan setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilikan bukan sekadar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.

Restrukturisasi yang menjadi tujuan dalam menuju kemandirian ekonomi daerah selain pengembangan ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: 1) restrukturisasi alokatif yang menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional maupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun dari lembaga-lembaga non-bank. Bank Bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank harus tetap memelihara perannya sebagai agen pembangunan, agen reformasi dan agen restrukturisasi ke arah tercapainya keseimbangan struktural yang lebih baik; 2) restrukturisasi spasial (spatial): Restrukturisasi ini diperlukan antara lain untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara perkotaan dan perdesaan; 3) Restrukturisasi sektoral: Hal ini diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan dinamis antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor formal-modern dan sektor informal-tradisional, antara sektor-sektor yang grassroots-based dan yang non grassroots-based, menuju kukuhnya perekonomian rakyat (dengan wadah koperasi) sebagai sokoguru perekonomian nasional; 4) restrukturisasi perpajakan: Selain berperan sebagai sumber penerimaan daerah, pajak adalah sarana redistribusi dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur; 6) Restrukturisasi strategis: Restrukturisasi ini untuk memperkukuh kemandirian ekonomi, mengurangi dependensi dan meningkatkan interdependensi resiprokal yang seimbang dan diperlukan untuk memperkukuh fundamental ekonomi; 7) restrukturisasi pola-pikir atau reorientasi budaya; 8) restrukturisasi sosial-politik dan sosial-budaya: Restrukturisasi ekonomi ini tidak akan sepenuhnya bermanfaat apabila tidak didukung oleh restrukturisasi di bidang sosial-politik dan sosial-budaya. Restrukturisasi sosial-politik menyangkut demokratisasi politik dan peran masyarakat madani. Restrukturisasi sosial-budaya menyangkut upaya mengubah cara pandang, khususnya restrukturisasi dan demokratisasi pendidikan rakyat.

Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Perwujudan infrastruktur wilayah yang handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu jawaban tantangan yang dihadapi Kabupaten Cianjur. Peran infrastruktur yang mendorong keterhubungan antar bagian wilayah dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, sesuai dengan Tujuan 8, 9, 10 dan 17, bahwa Penyediaan infrastruktur terutama menjadi isu strategis yang mesti segera diselesaikan. Kondisi saat ini jalan Kabupaten Cianjur dalam kondisi mantap selama empat tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Jalan mantap pada tahun 2017 sejumlah 43,17%, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 52,07%, kemudian pada tahun 2019 kondisi mantap jalan kabupaten meningkat mencapai 62,33%. Berdasarkan alokasi anggaran penanganan jalan kabupaten tahun 2020, kondisi mantap jalan kabupaten Cianjur pada akhir tahun 2020 mencapai sebesar 63,279%.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, terkait penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menjadi target penyelesaian, hal ini sesuai dengan indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Cianjur. Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, isu strategis penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni menjadi target untuk pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya.

Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.

Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan. Salah satu isu yang mengemuka terkait pengembangan wilayah dan dampaknya terhadap perekonomian, yaitu rencana pembangunan maupun pengembangan beberapa ruas jalan dan kereta api, antara lain: a. Rencana pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar barat Kota Cianjur. Hal ini untuk melanjutkan pengembangan kota dan sebagai salah satu alternatif mengatasi kemacetan lalu lintas wilayah perkotaan; b. Pembangunan jalur alternatif Puncak II, untuk mengantisipasi kemacetan di jalur puncak; c. Reaktivasi Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang berfungsi untuk koneksi dan kontinuitas transportasi dari Bogor-Bandung;

d. Rencana Pembangunan Jalan tol Sukabumi-Ciranjang dan Cikarang-Ciranjang. Akses yang diciptakan oleh infrastruktur ini dapat menurunkan biaya transportasi yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat aktivitas ekonomi. Sehingga isu strategis pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang didukung infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sangat relevan dan menjadi fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur.

Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan. Sebagaimana diketahui sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mempertimbangkan kepentingan kelestarian lingkungan hidup menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Perwujudan Kawasan Lindung. Dalam penyusunan rencana tata ruang, dipertimbangkan keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya sehingga suatu wilayah dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2011 -2031 direncanakan bahwa Kabupaten Cianjur harus mewujudkan sekitar 60% luas wilayahnya untuk menjadi kawasan lindung. Namun pada kenyataannya akibat adanya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan lahan untuk kegiatan budidaya juga meningkat.

Hal tersebut dapat berdampak pada banyaknya pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya di kawasan lindung. Rencana pola ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2031 dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan lindung sebesar 217,653.87 Ha (60,22%) dan kawasan budidaya sebesar 143,781.64 Ha (39,78%). c. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

Tujuan Pembangunan berkelanjutan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya menjadi isu strategis di Kabupaten Cianjur yang dijabarkan menjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Ruang kota yang tercermin dari kualitas dan kinerja lingkungan perkotaan belum terwujud dengan optimal. Perencanaan dan perwujudan ruang kota atau ruang permukiman seharusnya memaksimalkan keamanan, kenyamanan dan tingkat produktivitas serta mengutamakan keberlanjutan. Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cianjur masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tata Kelola Pemerintahan dan Penerapan Reformasi Birokrasi

Prioritas utama Kabupaten Cianjur dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Cianjur dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Birokrasi yang efektif dan efisien adalah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing daerah. Birokrasi yang terjadi di seluruh Indonesia pada umumnya justru tidak efektif dan efisien. Sejak era otonomi daerah ide tentang reformasi birokrasi meluas ke seluruh Indonesia. Bagaimanapun, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan reformasi struktural, tetapi yang terpenting dan tersulit adalah reformasi kultural dengan mengubah nilai-nilai budaya kerja.

Untuk melakukan kultural dengan mengubah nilai-nilai budaya kerja, maka terdapat lima bidang utama sasaran reformasi birokrasi yaitu pembaharuan paradigma dan penyusunan kerangka program, reformasi birokrasi bidang perencanaan, reformasi birokrasi bidang kelembagaan dan tata laksana serta pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi bidang keuangan, dan reformasi pengawasan.

Penataan Daerah

Berdasarkan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota serta Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu melakukan penataan daerah melalui pemekaran wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

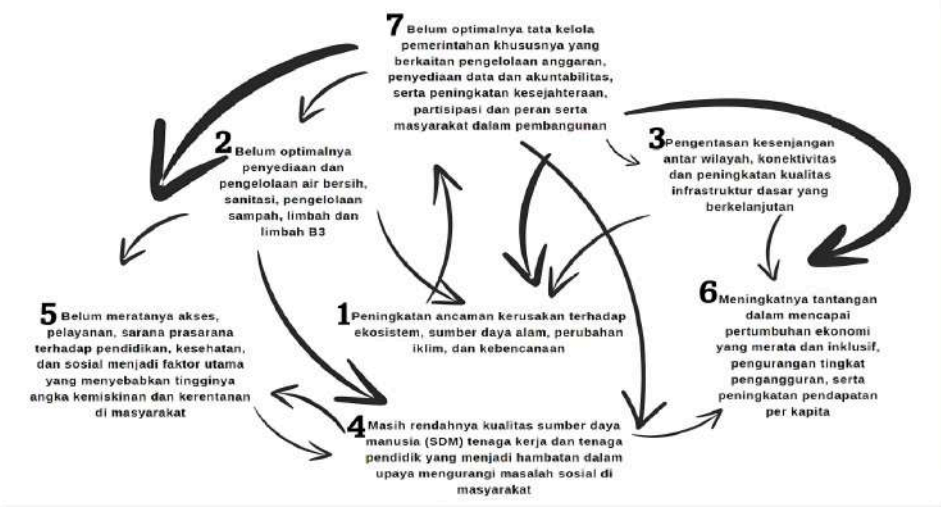
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : (1) Percepatan pelayanan kepada masyarakat (2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi (3) Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah (4) Percepatan pengelolaan potensi daerah (5) Peningkatan keamanan dan ketertiban dan (6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan penataan daerah melalui pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keadilan, kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, Isu Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten Cianjur sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Kebijakan penataan daerah yang akan dilaksanakan pada periode RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 ini yaitu penataan daerah wilayah Cianjur Utara dan Cianjur Selatan.

Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026, arah pembangunan daerah selanjutnya memasuki tahapan perencanaan baru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Periode ini membawa dinamika, tantangan, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan yang berbeda dengan periode sebelumnya, baik dalam konteks pembangunan nasional, kondisi regional, maupun karakteristik permasalahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penjabaran isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Cianjur pada periode 2025–2029 sebagai landasan dalam menjaga kesinambungan sekaligus memperkuat akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sebanyak tujuh isu strategis Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui pelaksanaan Konsultasi Publik sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Ketujuh isu tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem permasalahan pembangunan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keterkaitan dan interkoneksi antar isu menjadi sangat penting dalam merumuskan alternatif solusi serta rekomendasi kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Keterkaitan Antar Isu Strategis



Sumber: Hasil Analisis Tim Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Isu 1: Peningkatan ancaman kerusakan terhadap ekosistem, sumber daya alam, perubahan iklim, dan kebencanaan

Ketidakmampuan dalam mengelola lingkungan memperburuk risiko bencana, perubahan iklim, dan hilangnya sumber daya alam karena tata kelola pemerintah yang belum berjalan optimal (7). Hal ini memicu peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial karena banyak masyarakat bergantung pada sumber daya alam (Isu 5). Kondisi ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah karena sarana prasarana yang masih minim (Isu 4). Peningkatan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan kebencanaan sangat terkait dengan infrastruktur perkotaan. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor, terutama di area yang rentan. Infrastruktur yang tidak berkelanjutan, seperti kurangnya ruang hijau dan pengelolaan air yang buruk, memperburuk dampak perubahan iklim dan mengancam stabilitas serta kesejahteraan perkotaan (Isu 3).

Isu 2: Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, limbah, dan limbah B3.

Isu nomor 2 merupakan masalah mendasar yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan Ketidakseimbangan dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang tidak memadai dalam pengelolaan air, sanitasi, dan limbah (termasuk limbah berbahaya/B3) menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan (Isu 5). Degradasi lingkungan dan perubahan iklim memperburuk ketersediaan air bersih dan meningkatkan risiko pencemaran. Ketiadaan pengelolaan yang memadai menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekosistem, yang pada gilirannya memperburuk bencana dan masalah lingkungan lainnya (Isu 1). Isu 4 (rendahnya kualitas SDM) berkaitan erat dengan Isu 5 (ketidakmerataan akses layanan dasar).

Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menyebabkan rendahnya kualitas SDM, yang pada akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kerentanan terhadap dampak buruk lingkungan dan ekonomi. Ketimpangan dalam layanan dasar (Isu 5) juga berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan yang tidak optimal (Isu 2), di mana daerah-daerah yang tertinggal sering kali tidak memiliki infrastruktur memadai untuk pengelolaan air, sanitasi, dan limbah. Hal ini memperburuk kerusakan lingkungan dan memperkuat siklus kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan tata kelola pemerintah yang belum optimal (Isu 7).

Isu 3: Pengentasan kesenjangan antar wilayah, konektivitas, dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan

Ketidakmerataan infrastruktur memperlebar kesenjangan antar wilayah dan menyebabkan isolasi sosial dan ekonomi di daerah terpencil. Kualitas infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas dan akses terhadap pasar serta layanan penting. Isu 3 (kesenjangan antar wilayah dan konektivitas) berkaitan erat dengan Isu 6 (tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif). Konektivitas yang buruk dan ketimpangan infrastruktur menghambat perkembangan ekonomi di daerah tertinggal, memperlebar kesenjangan antara wilayah maju dan terbelakang. Peningkatan infrastruktur yang merata diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Isu 1 (kerusakan ekosistem dan perubahan iklim) juga sangat terkait dengan Isu 3. Pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan memperburuk kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Isu 7 (tata kelola pemerintahan yang tidak optimal) merupakan akar dari banyak masalah, termasuk ketimpangan wilayah, kerusakan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Tanpa tata kelola yang baik, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sering kali tidak tepat sasaran, kurang transparan, dan minim akuntabilitas.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga kesenjangan tetap tinggi.

Isu 4: Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja dan tenaga pendidik yang menjadi hambatan dalam upaya mengurangi masalah sosial di masyarakat

Kualitas SDM yang rendah membatasi produktivitas dan inovasi dalam ekonomi lokal, memperburuk masalah pengangguran dan ketidakmampuan bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Isu 4 (rendahnya kualitas SDM) berhubungan erat dengan Isu 6 (pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengangguran).

Kualitas SDM yang rendah membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif, yang kemudian berujung pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Di sisi lain, ketidaksiapan SDM juga memperburuk pengelolaan layanan dasar dan infrastruktur, yang menjadi masalah dalam Isu 2 dan Isu 5. Isu 2 (pengelolaan air bersih, sanitasi, dan limbah) sangat terkait dengan Isu 5 (akses dan infrastruktur layanan dasar). Daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai seringkali memiliki masalah dalam penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Hal ini memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi. Isu 7 (tata kelola pemerintahan yang tidak optimal) menjadi akar masalah dalam mengatasi isu-isu lainnya. Pengelolaan anggaran yang tidak tepat dan minimnya akuntabilitas menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga layanan dasar tidak tersebar dengan baik. Hal ini memperburuk ketimpangan dan memperkuat siklus kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan angka pengangguran.

Isu 5: Belum meratanya akses, pelayanan, sarana prasarana terhadap pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan kerentanan di masyarakat

Ketimpangan dalam distribusi akses dan layanan ini berdampak pada ketimpangan ekonomi dan sosial, memperburuk tingkat kemiskinan dan keterbatasan peluang ekonomi. Isu 4 (rendahnya kualitas SDM) memiliki kaitan erat dengan Isu 5 (akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sosial).

Akses yang tidak merata terhadap sarana pendidikan dan kesehatan menyebabkan rendahnya kualitas SDM. Daerah yang kurang terlayani dengan baik seringkali menghasilkan tenaga kerja yang tidak kompetitif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi sosial. Isu 2 (pengelolaan air bersih, sanitasi, dan limbah) sangat terkait dengan Isu 5 (akses dan infrastruktur layanan dasar).

Ketika pengelolaan air bersih dan sanitasi tidak optimal, ini memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang infrastruktur kesehatannya kurang memadai. Akibatnya, daerah tersebut semakin rentan terhadap kemiskinan dan ketertinggalan sosial. Isu 7 (tata kelola pemerintahan yang tidak optimal) menjadi akar permasalahan dalam penyelesaian isu lainnya.

Ketika tata kelola anggaran dan penyediaan data tidak berjalan dengan baik, alokasi sumber daya menjadi tidak efektif, menyebabkan berbagai masalah layanan dasar yang terabaikan. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan kerentanan sosial, serta memperlebar kesenjangan dalam kualitas hidup antar wilayah.

Isu 6: Meningkatnya tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan pendapatan per kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif memperparah ketimpangan pendapatan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial.

Tantangan ini muncul dari rendahnya investasi dalam sektor-sektor kunci dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Isu 3 (kesenjangan antar wilayah dan infrastruktur dasar) sangat terkait dengan Isu 6 (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan pengangguran). Ketimpangan dalam infrastruktur antar wilayah memperburuk disparitas ekonomi, membuat daerah tertinggal sulit berkembang dan mendorong ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Isu 4 (rendahnya kualitas SDM) menjadi penghambat utama dalam mengentaskan kesenjangan antar wilayah (Isu 3) dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Isu 6). Daerah yang infrastrukturnya tertinggal biasanya juga memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, yang kemudian menghasilkan SDM yang kurang kompeten. Ini memperburuk masalah pengangguran dan rendahnya pendapatan per kapita. Isu 7 (tata kelola pemerintahan yang tidak optimal) menjadi akar permasalahan dalam mengatasi semua isu lainnya. Ketika pengelolaan anggaran dan penyediaan data tidak efektif, distribusi sumber daya menjadi tidak efisien, memperparah ketimpangan antar wilayah dan memperburuk kualitas infrastruktur. Kebijakan yang tidak akuntabel juga sering kali gagal mengakomodasi kebutuhan lokal, yang akhirnya menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengurangi efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan.

Isu 7: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, penyediaan data dan akuntabilitas, serta peningkatan kesejahteraan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Pengelolaan pemerintahan yang belum efektif memperlambat implementasi program sosial, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan penyediaan layanan dasar, anggaran yang tidak transparan, dan keterlibatan masyarakat yang rendah. Ancaman terhadap ekosistem dan perubahan iklim (Isu 1) memperburuk ketersediaan sumber daya vital seperti air bersih dan sanitasi (Isu 2), menciptakan dampak langsung pada kesehatan masyarakat serta kemampuan daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar yang tahan terhadap perubahan lingkungan (Isu 3). Ketimpangan infrastruktur ini selanjutnya menghambat akses yang adil terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Isu 5), yang pada akhirnya mereduksi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Isu 4). Kualitas SDM yang rendah menjadi faktor penghambat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif (Isu 6), sehingga memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan sosial. Tata kelola pemerintahan yang kurang optimal (Isu 7) berperan sebagai katalisator negatif, memperlambat respons terhadap masalah-masalah ini dan sering kali memperburuk keadaan. Setiap isu tidak dapat dilihat secara terpisah, karena satu isu mempengaruhi yang lain dalam lingkaran yang saling terkait.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Cianjur merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan isu-isu strategis di level internasional, nasional, dan regional Provinsi Jawa Barat. Isu Strategis merupakan jangkar sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Cianjur pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025 (diolah)

Pemetaan Isu Strategis Daerah Kabupaten Cianjur

Potensi Daerah	Permasalahan Pembangunan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Jumlah penduduk produktif dan bonus demografi	1. Distribusi penduduk yang belum merata; 2. Pertumbuhan penduduk tinggi tanpa diimbangi penyebaran kesempatan kerja; 3. Urbanisasi dan kepadatan di wilayah tertentu; 4. Masih adanya angka putus sekolah; 5. Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi; 6. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal; 7. Masih adanya kasus kematian ibu; 8. Masih adanya kasus kematian bayi; 9. Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan atas hak anak; 10. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan penyandang masalah kematian ibu kesejahteraan sosial; 11. Masih rendahnya	1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja dan tenaga pendidik yang menjadi hambatan dalam upaya mengurangi masalah sosial di Masyarakat 2. Belum meratanya akses, pelayanan, sarana prasarana terhadap pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan kerentanan di masyarakat	1. *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2. Perkembangan Teknologi Informasi	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas

Potensi Daerah	Permasalahan Pembangunan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Partisipasi Masyarakat Pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan; 12. Minimnya SDM berkompetensi TIK; 13. Keterampilan kerja belum sesuai kebutuhan industri; 14. Rendahnya produktivitas tenaga kerja					
Potensi wilayah yang luas dengan keanekaragaman sumber daya alam	Ketergantungan pada sektor primer	Peningkatan ancaman kerusakan terhadap ekosistem, sumber daya alam, perubahan iklim, dan kebencanaan	Ketahanan Pangan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
	1. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi; 2. Belum optimalnya kontribusi koperasi UMKM terhadap perekonomian daerah; 3. Struktur ekonomi yang masih dominan primer dan kurang nilai tambah; 4. industrialisasi dan ekonomi modern 5. Lemahnya daya tarik investasi dan pengelolaan potensi lokal	Meningkatnya tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan pendapatan per kapita	Pandemi	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19		Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
	Infrastruktur pariwisata dan industri belum berkembang					Pariwisata yang Berkelanjutan dengan program peningkatan

Potensi Daerah	Permasalahan Pembangunan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
						daya tarik destinasi pariwisata
	tingkat kemiskinan yang tinggi					Kemiskinan dan Pengangguran dengan program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
Perkembangan pada pusat pertumbuhan wilayah dan peningkatan konektivitas	1. Infrastruktur dasar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2. Kondisi geografis yang berkontur; 3. Keterbatasan infrastruktur pendukung diantaranya; 4. Kualitas dan konektivitas jalan yang belum merata 5. Akses infrastruktur dasar belum optimal di daerah terpencil	Pengentasan kesenjangan antar wilayah, konektivitas, dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Kesadaran Aksi Global terkait *Climate Action* (Aksi Iklim)	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah
Kondisi lingkungan yang masih alami terutama di Cianjur selatan	1. Tingginya indeks risiko bencana; 2. Kerentanan infrastruktur terhadap bencana	1. Peningkatan ancaman kerusakan terhadap ekosistem, sumber daya alam, perubahan iklim, dan kebencanaan; 2. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, pengelolaan		1. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti bencana banjir rob di daerah pesisir, gempa bumi, dan potensi tsunami di daerah pesisir selatan 2. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah		Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Potensi Daerah	Permasalahan Pembangunan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		sampah, limbah, dan limbah B3		Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri		
Inovasi peningkatan dan pelayanan publik yang baik	1. Jarak dan letak geografis; 2. Infrastruktur digital tertinggal di banyak wilayah; 3. Optimalisasi SPBE 4. Peningkatan pelayanan public 5. Peningkatan reformasi birokrasi	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, penyediaan data dan akuntabilitas, serta peningkatan kesejahteraan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan		Sinkronisasi kebijakan makro		Kualitas tata kelola dan layanan pemerintahan serta reformasi birokrasi hulu dan hilir
						Penataan Daerah

Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025 (diolah)

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja pada Tahun 2025 disusun sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur, dengan mempertimbangkan posisi tahun berjalan sebagai tahun transisi perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2025 berada pada akhir periode RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 sekaligus menjadi awal implementasi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, sehingga perencanaan kinerja pada tahun ini perlu mengacu pada kedua dokumen perencanaan tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan selaras, terukur, dan akuntabel.

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur 2021-2026

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Berdasarkan pengertian diatas, maka Visi Kabupaten Cianjur 2021-2026 adalah:

“CIANJUR MANDIRI MAJU RELIGIUS (MANJUR) dan BERAKHLAK MULIA”

Visi Kabupaten Cianjur untuk RPJMD tahun 2021-2026 memiliki pilar-pilar seperti yang dijelaskan pada Tabel berikut :

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN VISI
Cianjur Manjur Berakhlak Mulia	Pembangunan sumber daya manusia (Maju, Religius, Berakhlak Mulia)	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Pembangunan sumber daya manusia diupayakan melalui : 1) layanan kesehatan yang terjangkau, 2) layanan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas, 3) perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat, 4) Peningkatan kehidupan sosial yang mandiri dan religius.
	Pembangunan ekonomi berkelanjutan (Mandiri)	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi dapat tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Cianjur. Potensi unggulan perekonomian Kabupaten Cianjur yaitu : 1) pertanian dalam skala luas meliputi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan, 2) pariwisata alam dan budaya, 3) UMKM. Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam Kabupaten Cianjur yang melimpah didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
	Pemerataan Pembangunan (Maju, Mandiri)	Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat, dengan demikian pemerataan pembangunan menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi (Maju)	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Penyelenggaraan *e- Government* merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sumber : RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2021-2026

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur dapat diwujudkan melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 adalah melalui :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup; dan
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

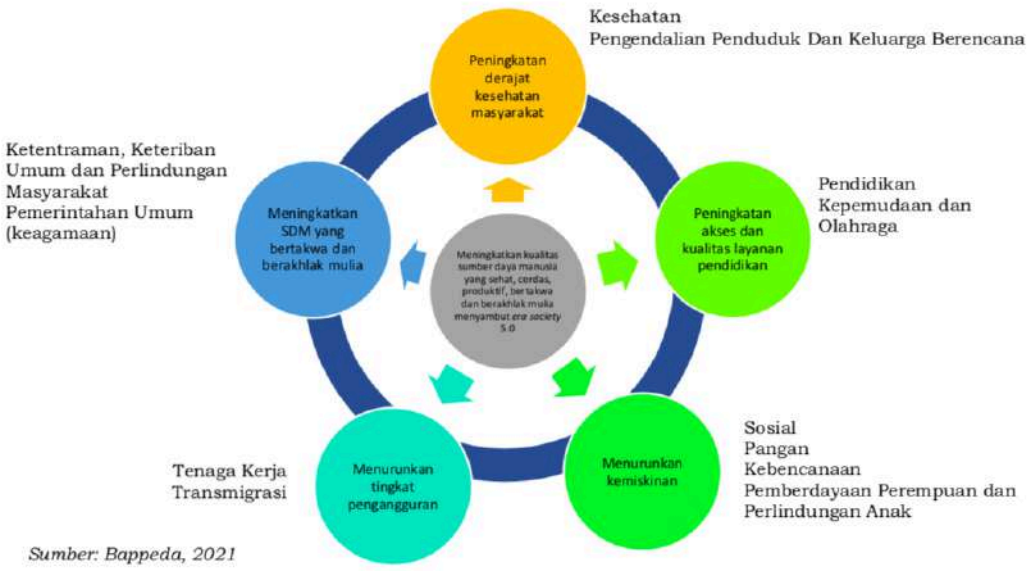
Lima misi di atas disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan yang telah dirumuskan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Misi 1**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0.

Kualitas sumber daya manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur masih menempati urutan terendah di Provinsi Jawa Barat walaupun secara pertumbuhan termasuk tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dalam upaya pencapaian misi ke-1, maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagaimana pada gambar berikut :

Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 1

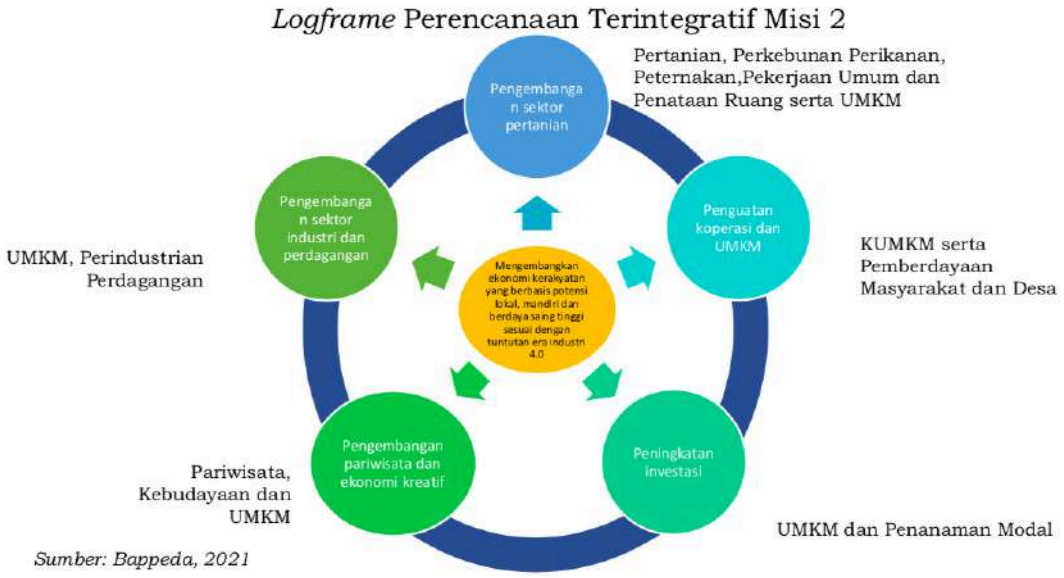


Sumber: Bappeda, 2021

- **Misi 2**

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0.

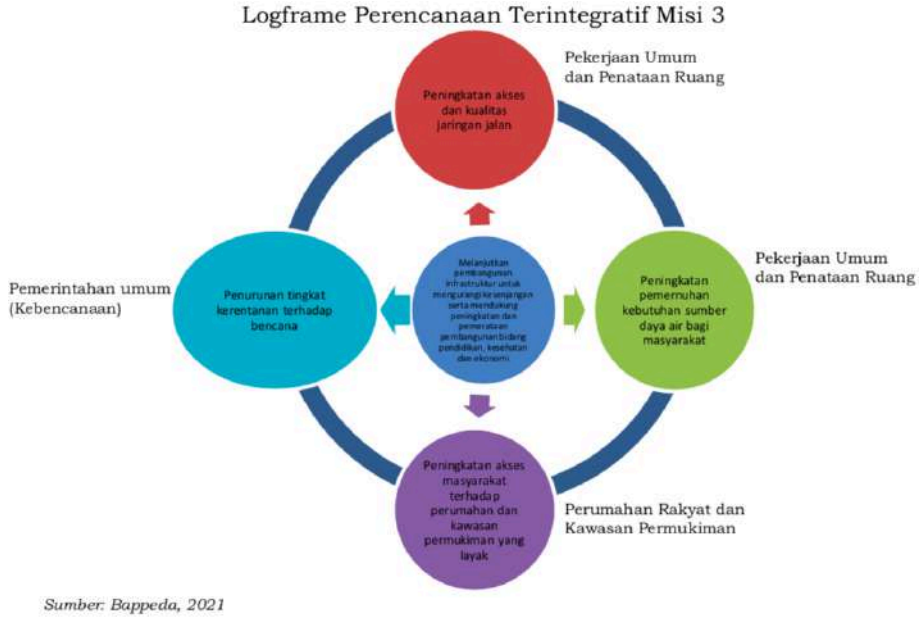
Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat memiliki potensi sumber daya yang melimpah mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan potensi lokal serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Dalam upaya pencapaian misi ke-2, maka dirumuskan perencanaan terintegratif lima langkah pencapaian misi ke-2 sebagaimana pada gambar berikut :



- **Misi 3**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor di daerah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pencapaian misi ke-3, maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-3 sebagaimana pada gambar berikut :

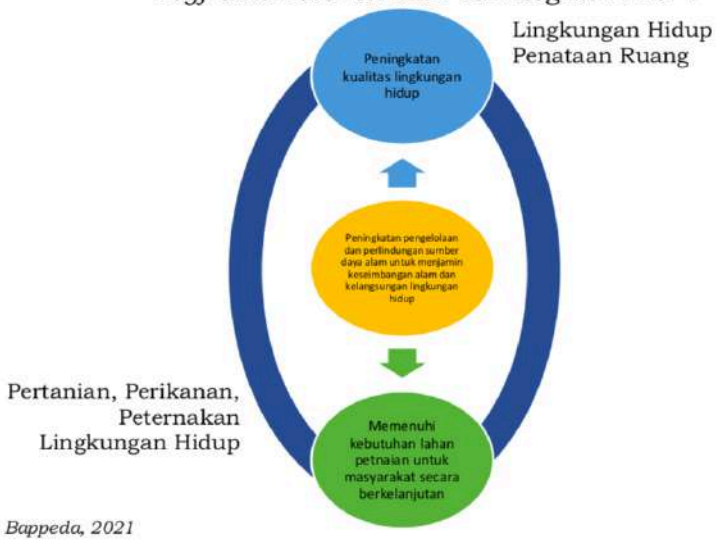


- **Misi 4**

Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu untuk memelihara dan melestarikan ketersediaan sumber daya alam, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya pencapaian misi ke-4, maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-4 sebagai berikut :

Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 4



Sumber: Bappeda, 2021

- **Misi 5**

Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin variatif maka dibutuhkan kinerja aparatur yang profesional serta pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip good governance and clean governance. Dalam upaya pencapaian misi ke-5, maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-5 sebagai berikut :

Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 5



Sumber: Bappeda, 2021

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun tujuan di setiap misi dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Tujuan ke-1, Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan religius**

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut *era society* 5.0, ditetapkan tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan religius dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas;
3. Menurunnya angka kemiskinan;
4. Menurunnya tingkat pengangguran; dan
5. Meningkatnya sumber daya manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran kemudian dapat dijabarkan melalui Desain *Logical Framework* pencapaian misi 1 sebagaimana pada gambar berikut:

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 1



- **Tujuan ke-2, Meningkatnya Perekonomian Daerah**

Dalam rangka pencapaian misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0, ditetapkan tujuan **Meningkatnya perekonomian daerah** dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB sektor pertanian;
2. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian;
3. Meningkatnya nilai investasi;
4. Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Meningkatnya PDRB sektor perindustrian; dan
6. Meningkatnya PDRB sektor perdagangan.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran kemudian dapat dijabarkan melalui Desain *Logical Framework* pencapaian misi 2 sebagaimana pada gambar berikut :

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 2



- **Tujuan ke-3, Terwujudnya Infrastruktur Dasar Daerah Yang Memadai**

Dalam rangka pencapaian misi melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. ditetapkan tujuan **Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan;
2. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; dan
4. Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran kemudian dapat dijabarkan melalui Desain *Logical Framework* pencapaian misi 3 sebagaimana pada gambar berikut :

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 3



- **Tujuan ke-4, Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Dalam rangka pencapaian misi Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup, ditetapkan tujuan **Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;
2. Terpenuhinya kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat secara berkelanjutan.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran kemudian dapat dijabarkan melalui Desain *Logical Framework* pencapaian misi 4 sebagaimana pada gambar berikut :

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 4



- **Tujuan ke-5, Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas**

Dalam rangka pencapaian misi **Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju *era governance* 3.0**, ditetapkan tujuan Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran kemudian dapat dijabarkan melalui Desain *Logical Framework* pencapaian misi 5 sebagaimana pada gambar berikut :

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 5



Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur 2025-2029

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan daerah dalam jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, serta kebijakan strategis pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Cianjur, yaitu dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi, dirumuskan sebagai Visi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, yaitu **"Cianjur BERJAYA (Beragama, Sejahtera, Berkarya)".** Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, serta memiliki kapasitas untuk berkarya dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 tersebut, diperlukan perumusan misi pembangunan yang jelas, terarah dan operasional. Misi pembangunan disusun sebagai penjabaran visi ke dalam fokus-fokus utama pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi penyusunan tujuan, sasaran, serta program prioritas pemerintah daerah. Dengan demikian, keterkaitan antara visi dan misi menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cianjur selama periode 2025-2029 berjalan secara konsisten, terukur dan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

VISI KABUPATEN CIANJUR 2025-2029	URAIAN VISI		MISI	
CIANJUR BERJAYA (Beragama, Sejahtera, dan Berkarya)	Beragama	Merupakan kondisi masyarakat Cianjur yang berkepribadian akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat tercipta kondisi masyarakat yang mampu mempraktikkan kerukunan dalam masyarakat dan antarumat beragama.	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlakul karimah dan berdaya saing melalui tata kelola pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang mudah, adil dan berkualitas.
	Sejahtera	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur, baik pada aspek fisik, batin, maupun mental. Kesejahteraan masyarakat meliputi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rasa aman dan tentram.	2	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan.
			3	Mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi pertanian.
	Berkarya	Meningkatnya daya saing baik pada aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aspek kemampuan daerah. Untuk meningkatkan daya saing SDM, maka perlu peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu meningkatkan produktivitas ekonomi dengan memberdayakan potensi unggulan daerah dan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	4	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan.
			5	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi.

Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025 (diolah)

Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima Misi Pembangunan Kabupaten Cianjur selama tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlakul karimah dan berdaya saing melalui tata kelola pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang mudah, adil, dan berkualitas;** Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam agenda pembangunan daerah. Maka, peningkatan kualitas SDM perlu mendapat perhatian. Dengan SDM yang berkualitas, maka akan tercapai kondisi Kabupaten Cianjur yang berbudi pekerti luhur, sehat, cerdas, dan mandiri. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum, utamanya pada kemudahan akses dan keandalan layanan.
2. M**ewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian serta kesejahteraan yang berkelanjutan;** Kabupaten Cianjur memiliki potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Pemanfaatan potensi lokal ini dilakukan dengan prinsip ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas dan inovasi agar memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, sehingga mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
3. M**ewujudkan ketahanan pangan yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi pertanian;** Ketahanan pangan menjadi isu pembangunan di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Cianjur untuk membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan potensi unggulan Kabupaten Cianjur dalam sektor pertanian dan perikanan, baik dalam skala usaha maupun skala rumah tangga, melalui pemanfaatan teknologi untuk membangun ketahanan pangan.
4. M**ewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan;** Infrastruktur dasar juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan Kabupaten Cianjur. Dengan infrastruktur dasar yang andal, maka masyarakat Kabupaten Cianjur dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan melakukan aktivitas ekonomi. Infrastruktur dasar yang dimaksud diharapkan saling terhubung untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas yang mendukung aktivitas masyarakat, serta ditopang oleh kebijakan ketahanan bencana dan lingkungan hidup berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. M**engoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi;** Untuk menyediakan layanan publik yang prima, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif melalui reformasi birokrasi. Cakupan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi kualitas perencanaan, efektivitas pelayanan publik, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi dan informasi, pengawasan internal, serta tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan tahap dalam perencanaan strategis yang memuat kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD. Perumusan tujuan berfungsi penting untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah secara teknokratis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Rumusan tujuan merupakan turunan secara lebih operasional dari misi pembangunan daerah, dan mencerminkan kondisi yang akan dicapai serta dapat mendukung pencapaian misi daerah. Tujuan yang telah dirumuskan kemudian dapat diukur keberhasilan maupun pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan dengan indikator tujuan.

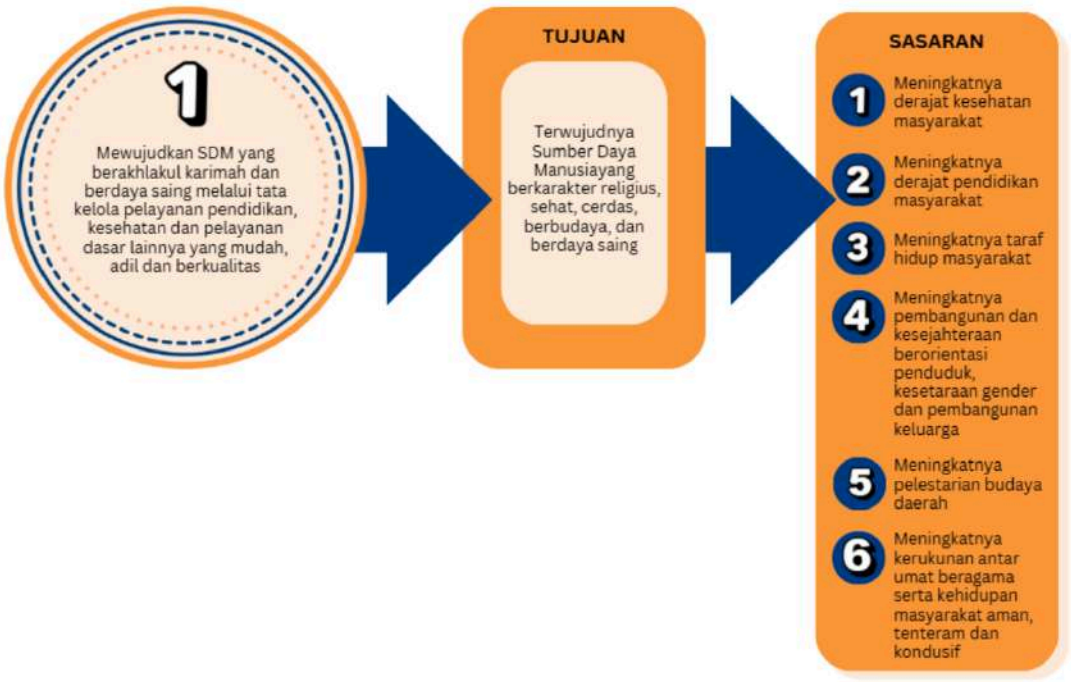
Sejalan dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun berbasis pada kinerja, yaitu terdapat penekanan pada target kinerja baik hasil (*outcome*), dampak (*impact*), maupun keluaran (*output*) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun kegiatan. Perumusan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya diturunkan menjadi sasaran pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah nantinya menjadi landasan bagi perumusan Renstra Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan instrumen evaluasi pelaksanaan strategi pembangunan tersebut. Berdasarkan visi dan misi kepala daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Cianjur 2025-2029:

1. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing**

Hakikat dari pembangunan daerah adalah menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Dengan adanya manusia yang religius dan berbudaya, maka kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis. Selain itu, manusia yang sehat dan cerdas dapat menjadi modal untuk membangun daerah yang lebih baik di berbagai sektor dalam jangka panjang. Pentingnya manusia sebagai sumber daya juga akan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, baik dari dalam maupun luar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

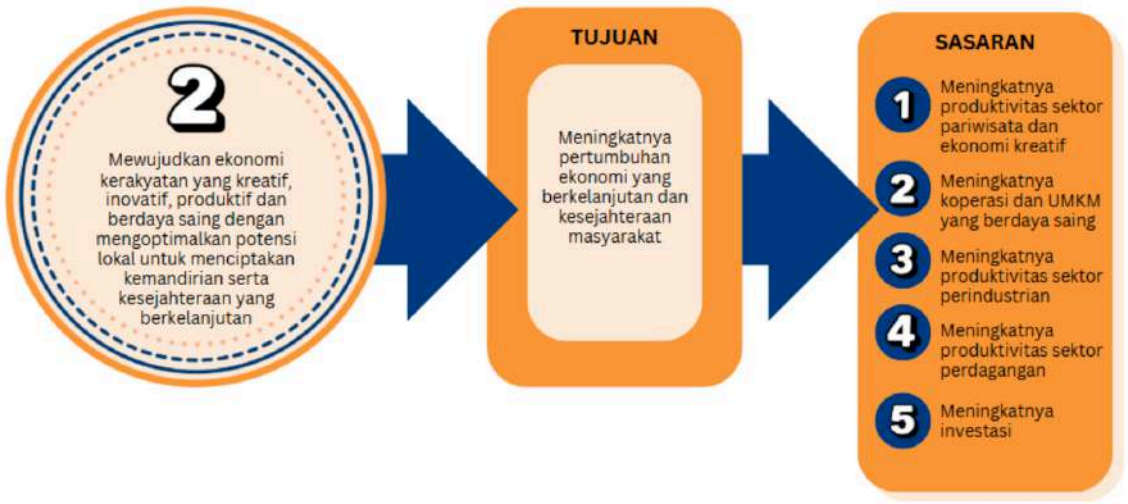


Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025

2. **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Keberlangsungan kehidupan daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi. Perekonomian sebuah daerah dapat diukur keberhasilannya dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh sektor ekonomi unggulan serta sektor ekonomi pendukung. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan menstimulasi iklim usaha berbagai sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran pada Misi 2



Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025

3. **Tercapainya ketahanan pangan yang kuat dengan didukung oleh sektor pertanian**

Ketahanan pangan merupakan isu penting di Kabupaten Cianjur. Dengan wilayah yang luas, pertumbuhan penduduk, dan adanya potensi lokal di sektor pertanian, Kabupaten Cianjur hendak membangun ketahanan pangan yang mumpuni. Pembangunan ketahanan pangan ini utamanya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan, serta perdagangan untuk memastikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

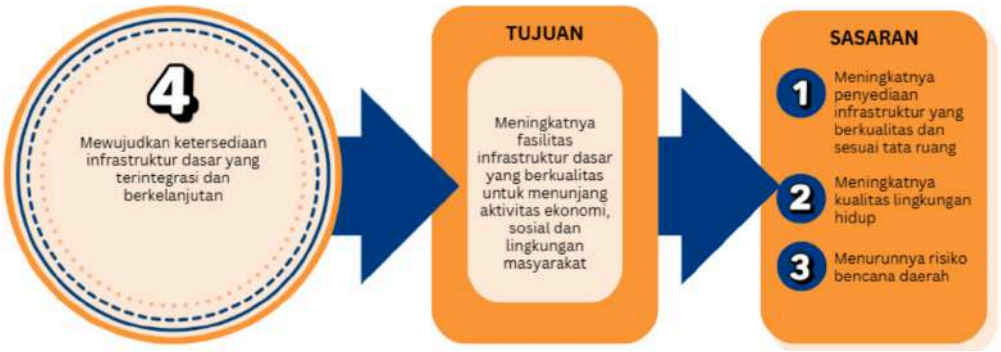


Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025

4. **Meningkatnya fasilitas infrastruktur dasar yang berkualitas untuk menunjang aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat**

Keberadaan infrastruktur merupakan kebutuhan esensial dalam pembangunan daerah. Infrastruktur dasar akan menunjang kualitas hidup manusia, seperti kemudahan akses terhadap air bersih, rumah layak huni, jalan dan jembatan mantap, drainase yang andal, layanan transportasi, dan lain-lain. Kualitas hidup manusia juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup, meliputi air, udara, tutupan lahan, pengelolaan sampah, serta emisi gas rumah kaca. Selain itu, diperlukan pula membangun ketahanan daerah terhadap bencana, yang mana merupakan isu penting di kawasan Kabupaten Cianjur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran pada Misi 4



Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025

5. **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**

Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan di daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan kualitasnya dari berbagai aspek, meliputi pembangunan SDM, pengelolaan teknologi, perencanaan, pengawasan, keuangan, dan lainnya, serta melakukan pembinaan, pengawasan dan dukungan pada pemerintah desa untuk mencapai target pembangunan daerah. Pelaksanaan pemerintahan pada pemerintah daerah kabupaten/kota perlu memenuhi unsur-unsur *dynamic governance,* dimana pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dan tindakan mereka dengan perubahan lingkungan yang cepat, tidak pasti dan melibatkan kemampuan untuk beradaptasi, merespons, serta berinovasi dalam menjalankan pemerintahan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien sampai ke tingkat pemerintah desa untuk mencapai kemajuan dan kemandirian desa, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatnya derajat kehidupan masyarakat. Berikut adalah pemaparan logis keterkaitan antara peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (*dynamic governance*) dengan pencapaian kemandirian desa**:**

a. Dynamic Governance sebagai Pondasi Kemandirian Desa. Prinsip-prinsip seperti adaptif, responsif, dan inovatif adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ketika diterapkan, prinsip-prinsip ini memungkinkan pengelolaan dana desa dan kebijakan pembangunan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan kestabilan dan kepercayaan publik.
b. Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Pemerintah desa yang menerapkan dynamic governance mendorong keterlibatan warga secara aktif dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program desa. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan kesadaran kolektif yang kuat dan menjadi landasan penting menuju kemandirian desa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran pada Misi 5



Sumber : Bapperida Kabupaten Cianjur, 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan kondisi yang diharapkan, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini berdasarkan RPJMD 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK Tahun 2025
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,85
Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,37
	3	Angka Harapan Sekolah (tahun)	12,05
Menurunnya angka kemiskinan	4	Persentase penduduk miskin (%)	10,07
Menurunnya tingkat pengangguran	5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,92
Meningkatnya sumber daya manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia	6	Indeks Kesalehan Sosial (nilai)	85,65
Meningkatnya PDRB sektor pertanian	7	PDRB sektor pertanian	10.876,95
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian	8	Tingkat Koperasi yang berkualitas (%)	10,13
	9	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	15,27
Meningkatnya nilai investasi	10	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	1
Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (miliar)	2.627,85
Meningkatnya PDRB sektor perindustrian	12	PDRB sektor perindustrian (miliar)	2.475,31
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	13	PDRB sektor perdagangan (miliar)	7.093,00
Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	14	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (nilai)	57,84
Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	67,67

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target PK Perubahan 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing	1	Persentase Penduduk Miskin	9,8	9,82	99,79%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,91	75,05	100,18%
	3	Angka Prevalensi Stunting (persen)	6,8	7,3*	*Data Belum Rilis
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,39	7,62	103,11%
	5	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,05	12,31	102,16%
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,71	6,17	92,54%
	7	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta rupiah)	9,27	9,173	98,95%
Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan berorientasi penduduk, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga	8	Indeks Ketimpangan Gender (poin)	0,529	0,544*	*Data Belum Rilis
	9	Indeks Pembangunan Keluarga (poin)	57,67	51,9	89,99%
	10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (poin)	59,2	54,5	92,06%
Meningkatnya pelestarian budaya daerah	11	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Berkembang (objek)	86	96	111,63%
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama serta kehidupan masyarakat aman, tentram, dan kondusif	12	Indeks Kesalehan Sosial (poin)	79,52	90,38	113,65%
	13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	77,52	87,72	113,16%
	14	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (poin)	66	64	96,97%
Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	15	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (persen)	6.48	7.6	117,28%
Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	16	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	1.94	2.1	108,25%
	17	Tingkat Koperasi yang berkualitas (persen)	44	44.11	100,25%
Meningkatnya produktivitas sektor perindustrian	18	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	7.31	7.02	96,03%
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	19	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (miliar rupiah)	10.051	10.055,67	100,04%
Meningkatnya investasi	20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)	25	25,37	101,48%
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	21	Nilai PDRB Pertanian (miliar rupiah)	10.955,40	11.209,19	102,31%
	22	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	74,9	78,58	104,91%
Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang	23	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar (poin)	80,28	80,68	100,5%
	24	Rasio Konektivitas (persen)	0,74	0,74	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	67,54	72,85	107,86%
	26	Indeks Risiko Bencana (poin)	164	136,31	120,31%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	27	Indeks Reformasi Birokrasi General (poin)	73,93	76,31	101,19%
	28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	79,22	72,0414	90,93%
Meningkatnya kemandirian desa	29	Persentase Desa Mandiri (persen)	29,94	31,07	104%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Rencana Anggaran Tahun 2025

Struktur APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	4,872,820,396,779.00
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,154,020,500,846.00
	Pendapatan Transfer	3,718,799,895,933.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00
2	Belanja	5,047,290,553,811.61
	Belanja Operasi	3,782,531,459,993.82
	Belanja Modal	492,322,609,636.00
	Belanja Tidak Terduga	36,811,390,309.79
	Belanja Transfer	735,625,093,872.00
3	Pembiayaan Daerah	174,470,157,032.61
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	181,770,157,032.61
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,300,000,000.00

Sumber: BKAD Kabupaten Cianjur, 2026

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 disajikan dalam konteks tahun transisi perencanaan pembangunan daerah, yang berada pada peralihan antara periode RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD 2021–2026, sekaligus terhadap capaian kinerja pada awal implementasi RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut. Selain itu, berikut disajikan pula tabel perbandingan perencanaan antara RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029, yang bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan dan relevansi indikator kinerja antara periode perencanaan lama dan periode perencanaan baru.

Perbandingan Perencanaan antara RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029

Kinerja Utama Bupati 2025-2029	Indikator Kinerja Utama		Kinerja Utama Bupati 2021-2026	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing	Persentase Penduduk Miskin		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
	Angka Prevalensi Stunting			
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah		Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah
	Harapan Lama Sekolah			Angka Harapan Sekolah
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka
	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan			
Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan berorientasi penduduk, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga	Indeks Ketimpangan Gender			
	Indeks Pembangunan Keluarga			
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)			
Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Berkembang			
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama serta kehidupan masyarakat aman, tenteram, dan kondusif.	Indeks Kesalehan Sosial		Meningkatnya sumber daya manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia	Indeks Kesalehan Sosial
	Indeks Kerukunan Umat Beragama			
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum			
			Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Rasio Kewirausahaan Daerah			
	Tingkat Koperasi yang berkualitas		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian	Tingkat koperasi yang berkualitas
				Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
Meningkatnya produktivitas sektor perindustrian	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan			
			Meningkatnya PDRB sektor perindustrian	PDRB sektor perindustrian
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan		Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan
Meningkatnya investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto			
			Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi

Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	Nilai PDRB Pertanian		Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan			
Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar			
	Rasio Konektivitas			
			Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup
Menurunnya risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi General			
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
			Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri			

Sumber: Bapperida, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel Perbandingan Perencanaan antara RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 mengenai perbandingan perencanaan antara RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029, terdapat perbedaan fokus pada sasaran kinerja maupun indikator kinerja yang digunakan. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode perencanaan yang baru. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja pada RPJMD Tahun 2021–2026 masih dinilai relevan untuk mengukur keberhasilan sasaran pada RPJMD Tahun 2025–2029, sementara sebagian indikator lainnya mengalami perubahan atau penyesuaian agar lebih selaras dengan fokus pembangunan yang ditetapkan dalam periode perencanaan terbaru.

Pengukuran Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Cianjur tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati merupakan kinerja tahun ke-4 (tahun terakhir) pada periode RPJMD Kabupaten Cianjur 2021-2026, dan merupakan kinerja tahun pertama pada periode RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Tahun 2024	Target PK Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,8	74,85	75,05	100,27%
Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,33	7,37	7,62	101,44%
	3	Angka Harapan Sekolah (tahun)	12,04	12,05	12,31	102,16%
Menurunnya angka kemiskinan	4	Persentase penduduk miskin (%)	10,14	10,07	9,82	102,55%
Menurunnya tingkat pengangguran	5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	7,92	6,17	128,36%
Meningkatnya sumber daya manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia	6	Indeks Kesalehan Sosial (nilai)	79,43	85,65	90,38	105,52%
Meningkatnya PDRB sektor pertanian	7	PDRB sektor pertanian	10.610,47	10.876,95	11.209,19	103,05%
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian	8	Tingkat Koperasi yang berkualitas (%)	43,85	10,13	44,11	435,44%
	9	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	44,7	15,27	46,22	302,68%
Meningkatnya nilai investasi	10	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	57,04	1	26,35	2.635%
Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (miliar)	2.647,54	2.627,85	3.077,47	117,11%
Meningkatnya PDRB sektor perindustrian	12	PDRB sektor perindustrian (miliar)	2.786,62	2.475,31	2.837,15	114,62%
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	13	PDRB sektor perdagangan (miliar)	6.148,50	7.093,00	6.303,37	88,86%
Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	14	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah (nilai)	53,15	57,84	68,12	117,78%
Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	67,82	67,67	72,85	107,66%
Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas	16	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	84,85	74,60	88,02*	117,99%

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target PK Perubahan 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing	1	Persentase Penduduk Miskin	9,8	9,82	99,79%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,91	75,05	100,18%
	3	Angka Prevalensi Stunting (persen)	6,8	7,3*	*Data Belum Rilis
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,39	7,62	103,11%
	5	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,05	12,31	102,16%
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,71	6,17	92,54%
	7	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta rupiah)	9,27	9,173	98,95%
Meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan berorientasi penduduk, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga	8	Indeks Ketimpangan Gender (poin)	0,529	0,544*	*Data Belum Rilis
	9	Indeks Pembangunan Keluarga (poin)	57,67	51,9	89,99%
	10	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (poin)	59,2	54,5	92,06%
Meningkatnya pelestarian budaya daerah	11	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Berkembang (objek)	86	96	111,63%
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama serta kehidupan masyarakat aman, tentram, dan kondusif	12	Indeks Kesalehan Sosial (poin)	79,52	90,38	113,65%
	13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	77,52	87,72	113,16%
	14	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (poin)	66	64	96,97%
Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	15	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (persen)	6.48	7.6	117,28%
Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing	16	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	1.94	2.1	108,25%
	17	Tingkat Koperasi yang berkualitas (persen)	44	44.11	100,25%
Meningkatnya produktivitas sektor perindustrian	18	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	7.31	7.02	96,03%
Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	19	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (miliar rupiah)	10.051	10.055,67	100,04%
Meningkatnya investasi	20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)	25	25,37	101,48%

Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan	21	Nilai PDRB Pertanian (miliar rupiah)	10.955,40	11.209,19	102,31%
	22	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	74,9	78,58	104,91%
Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang	23	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar (poin)	80,28	80,68	100,5%
	24	Rasio Konektivitas (persen)	0,74	0,74	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	67,54	72,85	107,86%
	26	Indeks Risiko Bencana (poin)	164	136,31	120,31%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	27	Indeks Reformasi Birokrasi General (poin)	73,93	76,31	101,19%
	28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	79,22	72,0414	90,93%
Meningkatnya kemandirian desa	29	Persentase Desa Mandiri (persen)	29,94	31,07	104%

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan arah pembangunan kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu. Sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH).

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, Umur Harapan Hidup Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 75,05 tahun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 74,8 tahun. Capaian tersebut telah melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 74,85 tahun, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026 sebesar 71,64 tahun, maka capaian UHH pada tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 104,75 persen. Dengan demikian, kinerja indikator Umur Harapan Hidup tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD sebelum berakhirnya periode perencanaan.



Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, Umur Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,25 tahun, dari 74,80 tahun menjadi 75,05 tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
1	Kota Bekasi	75,60	75,86	76,14	76,61
2	Kota Bandung	75,26	75,53	75,83	76,30
3	Kota Depok	75,24	75,53	75,82	76,30
4	Kota Bogor	75,21	75,52	75,80	76,25
5	Kota Cimahi	74,99	75,27	75,55	76,00
6	Kota Cirebon	74,87	75,17	75,48	75,97
7	Bekasi	74,86	75,09	75,33	75,71
8	Bandung	74,67	74,92	75,23	75,70
9	Sumedang	74,77	75,04	75,29	75,70
10	Ciamis	74,69	74,96	75,26	75,69
11	Kota Tasikmalaya	74,80	75,08	75,31	75,66
12	Kuningan	74,67	74,91	75,22	75,64
13	Karawang	74,63	74,90	75,16	75,57
	Jawa Barat	**74,65**	**74,91**	**75,16**	**75,53**
14	Pangandaran	74,60	74,88	75,11	75,45
15	Kota Sukabumi	74,64	74,89	75,11	75,45
16	Bandung Barat	74,59	74,78	75,06	75,44
17	Subang	74,46	74,87	75,08	75,41
18	Cirebon	74,43	74,71	74,98	75,39
19	Kota Banjar	74,48	74,77	74,99	75,35
20	Majalengka	74,44	74,73	74,98	75,32
21	Purwakarta	74,40	74,67	74,92	75,28
22	Bogor	74,42	74,67	74,90	75,23
23	Indramayu	74,39	74,61	74,82	75,16
24	Garut	74,43	74,66	74,87	75,14
25	Sukabumi	74,40	74,65	74,85	75,12
26	**Cianjur**	**74,37**	**74,61**	**74,80**	**75,05**
27	Tasikmalaya	73,64	73,87	74,06	74,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kabupaten Cianjur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 UHH Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 74,37 tahun, kemudian meningkat menjadi 74,61 tahun pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 74,80 tahun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 75,05 tahun. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, posisi Umur Harapan Hidup Kabupaten Cianjur masih relatif berada pada kelompok bawah. Pada tahun 2025, UHH Kabupaten Cianjur sebesar 75,05 tahun menempatkan Cianjur pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya berada di atas Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki UHH sebesar 74,37 tahun. Nilai tersebut juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 75,53 tahun.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah dengan capaian tertinggi, seperti Kota Bekasi (76,61 tahun), Kota Bandung (76,30 tahun), dan Kota Depok (76,30 tahun), terlihat adanya selisih sekitar 1 hingga 1,5 tahun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Cianjur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tren peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Cianjur terus mengalami perbaikan, tingkat derajat kesehatan masyarakat masih memerlukan penguatan agar dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Jawa Barat.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai strategi dan kegiatan, diantaranya meningkatkan promosi dan prevensi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan kesehatan serta mentradisikan perilaku CEKAS, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stress. Selain itu, dilakukan peningkatan kegiatan perkesmas di masyarakat yang disertai dengan konseling secara langsung ke rumah warga secara bertahap, rutin, dan berkelanjutan.

Upaya lainnya dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penjaringan, penemuan, dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah Daerah juga menetapkan kebijakan terkait Puskesmas Rawat Inap, di mana dalam satu kecamatan minimal terdapat satu Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

Selanjutnya, disediakan jaminan kesehatan “Cianjur Sehat” bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan, serta dilakukan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan akreditasi di Puskesmas dan Rumah Sakit.

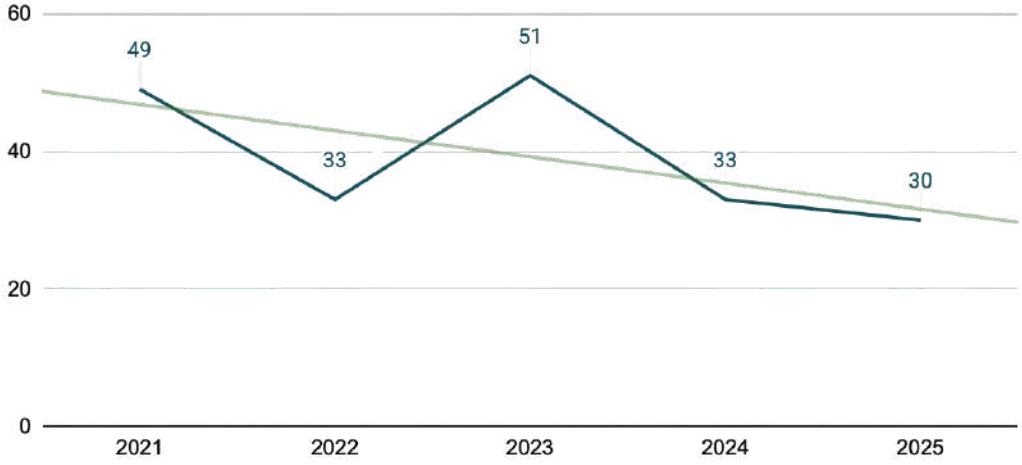
Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan juga terus berupaya menekan angka kematian ibu. Pada tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat sebanyak 30 kasus kematian ibu. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kematian ibu merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil analisis kasus yang dilakukan, sebanyak 83,33 persen kasus kematian ibu telah dilakukan pengkajian, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kematian serta mengevaluasi aspek sistem pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki. Dari sisi lokasi kejadian, sebagian besar kematian ibu yaitu 96,7 persen terjadi di rumah sakit, dengan 68,18 persen di antaranya meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam sejak masuk rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah berada dalam kondisi kegawatdaruratan saat dirujuk atau terdapat keterlambatan dalam proses penanganan.

Apabila dilihat dari penyebab medisnya, perdarahan menjadi penyebab kematian ibu tertinggi yaitu sebesar 46,7 persen. Perdarahan merupakan salah satu kegawatdaruratan obstetri yang sebenarnya dapat dicegah apabila penanganan dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, dari aspek mutu layanan kesehatan, sekitar 50 persen kasus berada pada kategori perawatan suboptimal, yang menunjukkan adanya potensi pencegahan apabila tata laksana pelayanan dilakukan secara optimal sesuai standar yang berlaku.

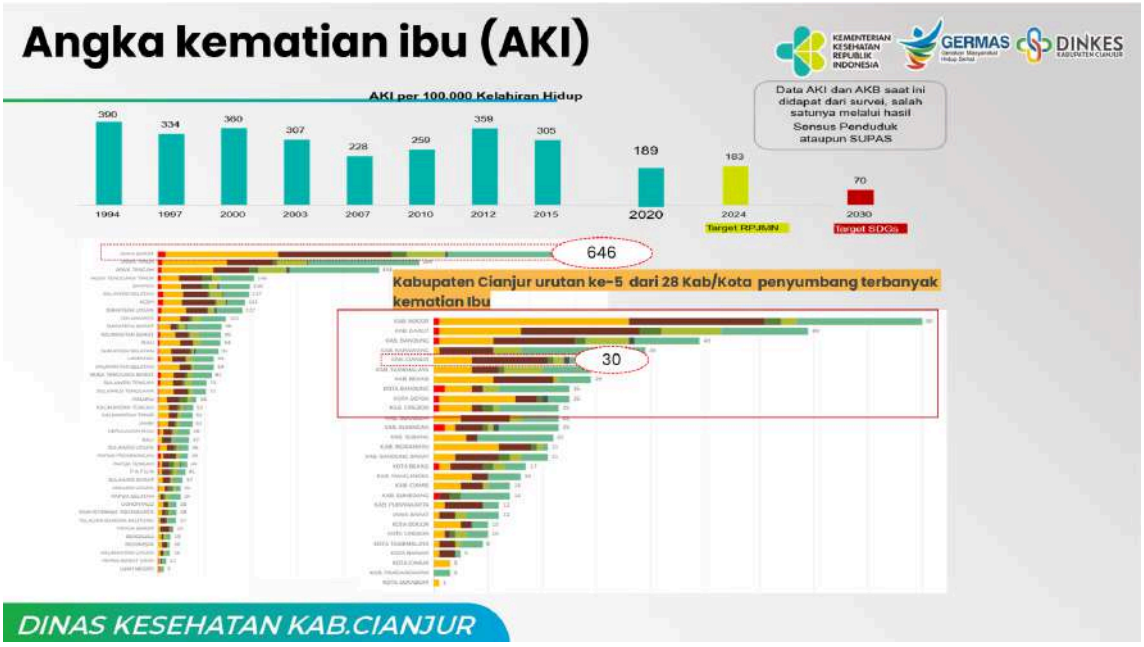
Selain faktor medis, terdapat pula sejumlah faktor non-medis yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kematian ibu. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan dalam proses rujukan, waktu respon pelayanan yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan. Oleh karena itu, penguatan sistem rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta perbaikan mutu layanan kegawatdaruratan maternal menjadi langkah penting yang perlu terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Cianjur.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Cianjur



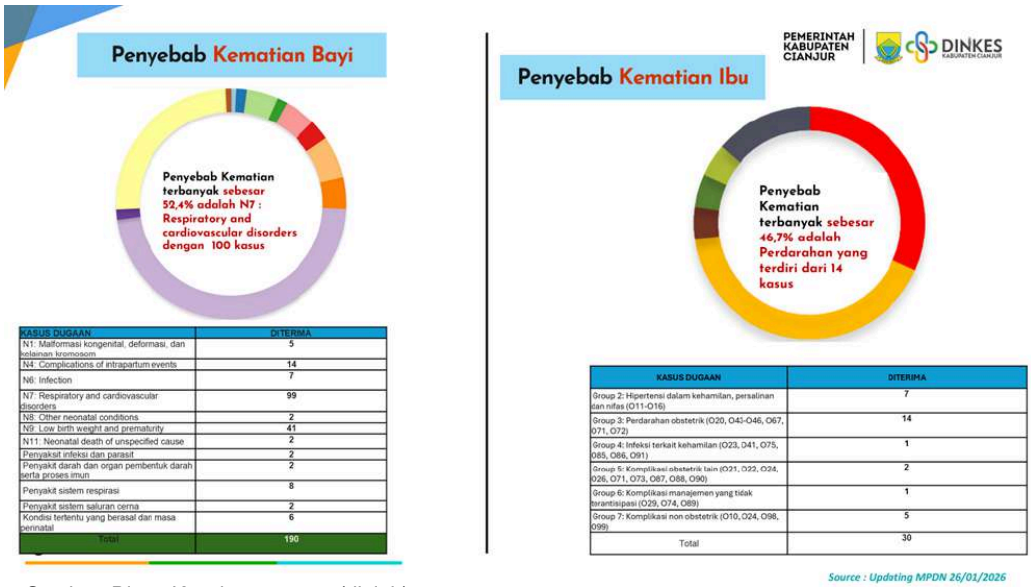
Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 (diolah)

Terdapat penurunan jumlah kematian Ibu di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 51 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 (diolah)

Di tahun 2025 Kabupaten Cianjur menempati urutan ke-5 di Jawa Barat dengan kasus Kematian ibu sebanyak 30 kasus. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung jumlah kematian ibu lebih banyak dari Kabupaten Cianjur, Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Cianjur jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah kematian Ibu di Jawa Barat tahun 2025.



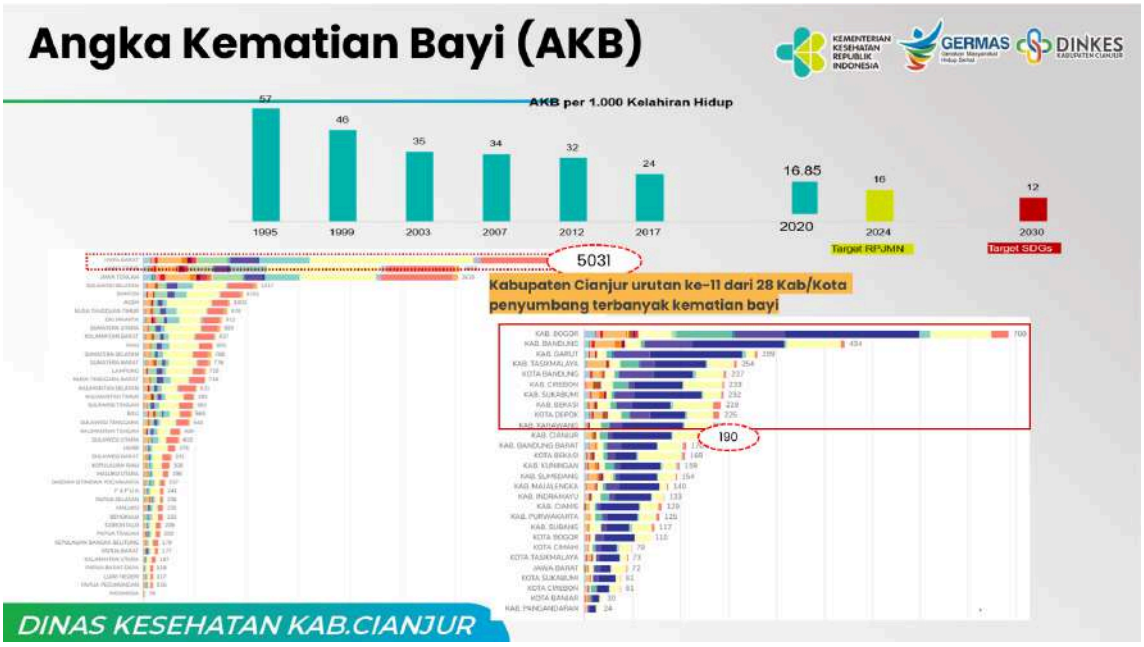
Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 (diolah)

Tren kasus kematian ibu pada tahun 2025 didominasi oleh perdarahan, yang mencapai 46,7 persen atau sebanyak 14 kasus dari total kematian ibu yang tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdarahan masih menjadi penyebab utama kematian ibu dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan serta penanganan kegawat daruratan obstetri.

Dalam rangka menekan angka kematian ibu, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dengan pendekatan siklus hidup. Upaya tersebut dimulai sejak masa sebelum kehamilan melalui edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, pelayanan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, serta skrining kelayakan hamil bagi calon pengantin dan pasangan usia subur. Selanjutnya pada masa kehamilan dilakukan penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu disertai pemeriksaan USG, sedangkan pada masa persalinan hingga pasca persalinan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, pelayanan masa nifas, serta pemberian layanan kontrasepsi. Selain itu, peningkatan pengetahuan ibu juga dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

Sebagai bagian dari upaya penurunan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur juga melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kapasitas pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Kegiatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis Fokus Terintegrasi serta pendampingan oleh tim ahli dokter spesialis kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pelaksanaan On the Job Training (OJT) penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP di rumah sakit, serta penyelenggaraan Pertemuan Audit Maternal Perinatal – Surveilans Respons (AMP-SR). Selain itu, dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) internal program untuk pembahasan kasus kematian ibu dan bayi, penguatan pemetaan jejaring layanan ANC, serta pelaksanaan kampanye Ibu Hamil Sehat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin.

Selain Angka Kematian Ibu, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga berupaya menekan Angka Kematian Bayi. Jumlah kematian bayi pada tahun 2025, baik secara rasio maupun jumlah absolut, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, angka kematian bayi tercatat sebanyak 125 kasus. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 190 kasus kematian bayi.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 (diolah)

Pada tahun 2025, jumlah kematian bayi di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 190 kasus dan menempatkan Cianjur pada peringkat ke-11 penyumbang kematian bayi di Provinsi Jawa Barat. Secara perbandingan, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok yang mencatatkan 225 kasus kematian bayi. Meskipun demikian, jumlah kematian bayi di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bertambah 65 kasus dari 125 kasus pada tahun 2024 menjadi 190 kasus pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis, peningkatan kematian bayi di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebesar 6,25 persen disebabkan oleh keterlambatan dalam mencari pertolongan tenaga kesehatan, yang dipengaruhi oleh pemahaman dan karakteristik masyarakat serta keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Sebesar 6,25 persen lainnya disebabkan oleh ketiadaan pembiayaan, antara lain karena data kependudukan yang belum lengkap seperti tidak memiliki Kartu Keluarga, KTP, maupun dokumen pernikahan yang menjadi persyaratan dalam pengusulan kepesertaan jaminan pembiayaan kesehatan (BPJS). Selain itu, 6,25 persen disebabkan oleh keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, termasuk kompetensi dalam pelayanan PONED, PONEK, serta tatalaksana kegawatdaruratan maternal baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan lanjutan. Faktor lainnya adalah minimnya ketersediaan serta kesesuaian pelayanan dengan standar yang ditetapkan (SOP/PPK dan lainnya) sebesar 25 persen. Sebesar 18,75 persen disebabkan oleh respons time penanganan kasus yang tidak tepat waktu, termasuk keterbatasan ketersediaan dokter jaga atau dokter spesialis sesuai jadwal serta komunikasi antar departemen dalam merespons konsultasi medis. Selain itu, faktor sosial budaya atau kepercayaan masyarakat juga berkontribusi sebesar 18,75 persen, serta kendala dalam sistem rujukan, termasuk hambatan memperoleh ruang rawat maupun layanan ICU, yang juga menyumbang sebesar 18,75 persen.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Cianjur antara lain akses layanan kesehatan yang belum merata, termasuk keterbatasan fasilitas perawatan neonatal khusus dan layanan intensif bagi bayi. Selain itu, ketersediaan obat di fasilitas kesehatan terkadang belum lengkap sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penanganan kondisi kritis pada bayi, misalnya dalam kasus kejang. Tantangan lainnya adalah rendahnya cakupan layanan antenatal sesuai standar minimal kunjungan pemeriksaan kehamilan (minimal enam kali kunjungan), sehingga risiko komplikasi saat persalinan tidak terdeteksi atau ditangani sejak dini. Rendahnya kesadaran dan dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu hamil juga turut memengaruhi kondisi ini. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa wilayah Cianjur masih belum optimal, termasuk keterbatasan rumah sakit serta layanan rujukan neonatal intensif. Hambatan geografis dan jarak menuju fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan juga dapat menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah tingkat literasi kesehatan masyarakat, khususnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan serta perawatan bayi baru lahir.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain memperluas akses layanan obstetrik dan neonatal dasar serta rujukan darurat, memastikan ketersediaan obat-obatan esensial untuk penanganan kegawatdaruratan neonatal sesuai dengan estimasi jumlah bayi berisiko, serta meningkatkan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara intensif sejak masa kehamilan hingga proses persalinan dan pemantauan tumbuh kembang bayi setelah lahir. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan kesehatan secara aktif dari rumah ke rumah oleh tenaga kesehatan bagi sasaran yang tidak datang ke Posyandu, peningkatan cakupan layanan antenatal sesuai standar kunjungan minimal (K6), serta penyiapan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) guna meningkatkan kualitas layanan klinis bagi ibu dan bayi.

Sasaran

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan merupakan sebuah harapan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur bagaimana masyarakat mampu memperoleh informasi dan pelayanan pendidikan dengan mudah. Akses layanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Cianjur dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal. Sementara itu HLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak sejak usia tertentu, semakin tinggi nilai RLS dan HLS, semakin baik akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di suatu daerah.

Rata-rata Lama Sekolah

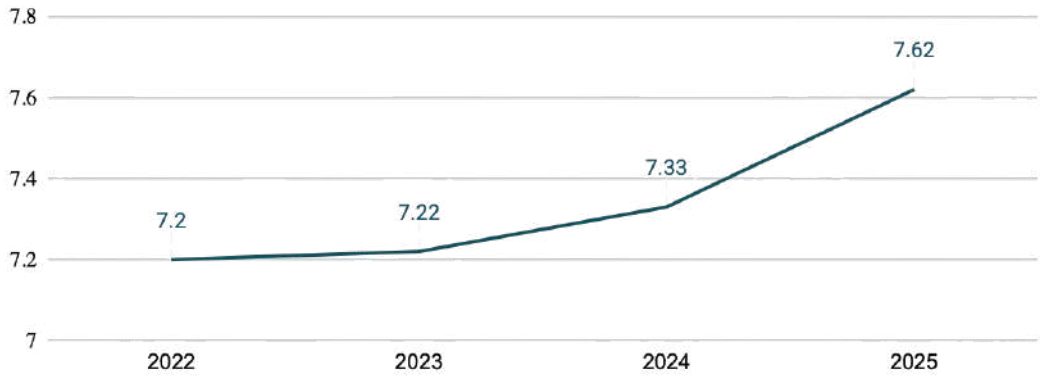


Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 7,62 tahun dengan capaian kinerja sebesar 101,44 persen. Artinya, realisasi tahun 2025 telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 telah mencapai capaian kinerja sebesar 100,39 persen. Dengan demikian, target akhir RPJMD pada tahun 2026 telah berhasil terlampaui dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 7,59 tahun. Kinerja peningkatan akses layanan pendidikan yang berkualitas menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, meskipun pelaksanaan masih berada pada periode tahun 2025 dan belum mencapai akhir periode RPJMD tahun 2026.

Secara tren, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur dalam empat tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan yang terjadi secara konsisten, yaitu dari 7,20 tahun pada tahun 2022 menjadi 7,22 tahun pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 7,33 tahun pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 7,62 tahun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam capaian pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih lama.

Tren Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Tren Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2025

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Kota Bekasi	11.79	12.11
2	Kota Depok	11.59	11.83
3	Kota Cimahi	11.52	11.53
4	Kota Bandung	11.07	11.41
5	Kota Bogor	10.71	10.72
6	Kota Cirebon	10.53	10.54
7	Kota Sukabumi	10.38	10.39
8	Bekasi	9.76	10.07
9	Kota Tasikmalaya	9.63	9.64
10	Bandung	9.15	9.4
	Jawa Barat	8.87	9.14
11	Sumedang	8.74	8.92
12	Kota Banjar	8.83	8.84
13	Bogor	8.39	8.72
14	Purwakarta	8.14	8.37
15	Bandung Barat	8.24	8.34
16	Karawang	8.05	8.31
17	Ciamis	8.1	8.23
18	Pangandaran	8.1	8.11
19	Tasikmalaya	7.97	7.98
20	Kuningan	7.9	7.91
21	Cirebon	7.65	7.88
22	Garut	7.85	7.86
23	Majalengka	7.53	7.81
24	Subang	7.46	7.68
25	Sukabumi	7.34	7.63
26	Cianjur	7.33	7.62
27	Indramayu	6.95	7.06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, capaian Kabupaten Cianjur sebesar 7,62 tahun masih berada pada kelompok daerah dengan nilai relatif rendah, yaitu pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 7,33 tahun, posisi Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 9,14 tahun.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, capaian Kabupaten Cianjur masih lebih rendah dibandingkan sebagian besar daerah, termasuk kabupaten seperti Sumedang, Bogor, dan Purwakarta. Kesenjangan yang cukup signifikan juga terlihat jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung yang telah mencapai rata-rata lama sekolah di atas 11 tahun.

Namun demikian, capaian Kabupaten Cianjur masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Indramayu yang berada pada posisi terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kinerja, upaya peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur masih perlu terus ditingkatkan secara lebih optimal agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain serta mendekati rata-rata provinsi.

Harapan Lama Sekolah

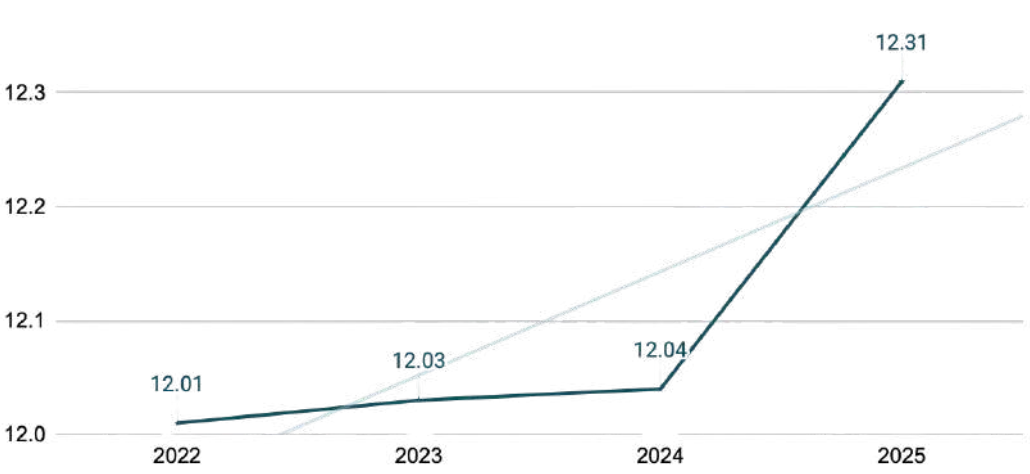


Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 12,31 tahun. Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 sebesar 102,16 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 12,05 tahun.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2025 terhadap target tahun 2026 baru mencapai 91,25 persen, sehingga belum memenuhi target akhir yang diharapkan. Namun demikian, mengingat periode RPJMD 2021–2026 secara efektif berakhir pada tahun 2025, maka capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD belum dapat tergambarkan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencakup satu tahun penuh hingga 2026.

Secara tren, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cianjur dalam periode tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,01 tahun pada tahun 2022, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 12,03 tahun pada tahun 2023 dan 12,04 tahun pada tahun 2024. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang lebih signifikan menjadi 12,31 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Tren Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Ciamis	14,30	14,31
2	Kota Bandung	14,25	14,27
3	Kota Depok	14,11	14,21
4	Kota Bekasi	14,14	14,15
5	Kota Cimahi	13,85	13,86
6	Kota Bogor	13,51	13,69
7	Kota Sukabumi	13,62	13,63
8	Kota Tasikmalaya	13,50	13,51
9	Kota Cirebon	13,17	13,45
10	Kota Banjar	13,28	13,29
11	Bekasi	13,18	13,22
12	Sumedang	13,02	13,21
	Jawa Barat	12,80	13,02
13	Bandung	12,74	12,99
14	Tasikmalaya	12,64	12,92
15	Bogor	12,75	12,76
16	Cirebon	12,42	12,67
17	Indramayu	12,32	12,58
18	Kuningan	12,27	12,52
19	Purwakarta	12,25	12,51
20	Majalengka	12,27	12,50
21	Garut	12,17	12,43
22	Pangandaran	12,31	12,41
23	Sukabumi	12,39	12,40
24	Subang	12,11	12,38
25	Cianjur	12,04	12,31
26	Bandung Barat	12,00	12,26
27	Karawang	12,21	12,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 13,02 tahun pada tahun 2025, capaian Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harapan lama sekolah di Cianjur masih tertinggal sekitar 0,71 tahun dibandingkan capaian provinsi.

Secara peringkat, Kabupaten Cianjur berada di kelompok bawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Beberapa daerah dengan capaian tertinggi seperti Kabupaten Ciamis (14,31 tahun), Kota Bandung (14,27 tahun), dan Kota Depok (14,21 tahun) menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten lain, seperti Kabupaten Sumedang (13,21 tahun) dan Kabupaten Bekasi (13,22 tahun), capaian Cianjur masih relatif lebih rendah.

Meskipun demikian, tren peningkatan yang terjadi pada Kabupaten Cianjur sejalan dengan tren peningkatan yang juga dialami oleh sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang terus dilakukan dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dalam meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan yang mencakup berbagai jenjang dan jenis layanan pendidikan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), upaya difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, seperti mebel sekolah, perlengkapan sekolah, serta perlengkapan siswa. Selain itu, dilakukan penambahan ruang kelas baru, pembangunan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan proses pembelajaran dan ujian bagi peserta didik. Aspek peningkatan kualitas juga didukung melalui pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, penguatan kelembagaan dan manajemen sekolah, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), upaya yang dilakukan relatif lebih kompleks dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan proses pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, termasuk ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, dilakukan pengadaan mebel, perlengkapan sekolah dan siswa, serta alat praktik dan peraga. Kegiatan lainnya meliputi penambahan ruang kelas baru, pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU, penyelenggaraan proses pembelajaran dan ujian, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, serta penguatan tata kelola melalui pengelolaan dan peningkatan kapasitas Dana BOS, pembinaan kelembagaan, dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fokus kegiatan diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kualitas layanan pembelajaran. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas, dan ruang guru, pengadaan perlengkapan serta alat praktik dan peraga siswa, serta penyelenggaraan proses pembelajaran PAUD. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan dan manajemen PAUD, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pada pendidikan nonformal dan kesetaraan, upaya peningkatan derajat pendidikan dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana, seperti pembangunan gedung, ruang kelas, dan ruang guru, serta pengadaan alat praktik dan perlengkapan pendidikan. Di samping itu, dilaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran dan ujian bagi peserta didik, penguatan kelembagaan dan manajemen satuan pendidikan nonformal, pengelolaan Dana BOP, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Faktor pendukung yang mendorong peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025

salah satunya adalah ketersediaan layanan pendidikan kesetaraan yang cukup luas di setiap wilayah kecamatan. Jumlah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Cianjur mencapai 378 lembaga. Jika dirata-ratakan, terdapat sekitar 10 lembaga PKBM/SKB di setiap kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan layanan pendidikan kesetaraan melalui PKBM/SKB cukup luas bagi masyarakat yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang belum pernah bersekolah.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan kesetaraan tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta didik pada satuan pendidikan nonformal PKBM yang mencapai 67.078 siswa, serta pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 247 siswa. Jika dibandingkan dengan periode tiga tahun sebelumnya, jumlah peserta didik pada PKBM tercatat sebanyak 45.535 siswa dan pada SKB sebanyak 292 siswa. Sementara itu, jumlah lulusan pendidikan kesetaraan pada tahun 2025 terdiri atas 523 siswa pada jenjang Paket A, 4.855 siswa pada jenjang Paket B, dan 9.920 siswa pada jenjang Paket C. Secara keseluruhan, sebanyak 15.298 masyarakat Cianjur telah menyelesaikan pendidikan kesetaraan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah.

Faktor pendukung lainnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, khususnya pendidikan kesetaraan, yang tergolong baik dengan tingkat ketercapaian sebesar 95,92 persen. Angka tersebut terdiri atas persentase ketercapaian penerima layanan dasar pendidikan kesetaraan sebesar 76,07 persen dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 19,85 persen.

Di samping itu, dukungan porsi anggaran yang memadai dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Dukungan anggaran ini memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sehingga berdampak pada peningkatan proses pembelajaran, mutu, serta pemerataan layanan pendidikan kesetaraan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah lulusan serta angka melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah, tidak melanjutkan, maupun yang belum pernah bersekolah.

Selanjutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendidikan kesetaraan. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin antar pihak tersebut secara bersama-sama mendorong peningkatan minat dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan.

Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didorong oleh optimalisasi program pengelolaan pendidikan, khususnya pada pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menunjang operasional pembelajaran.
Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengoptimalkan program tersebut pada jenjang TK, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pada tahun 2025, distribusi bantuan revitalisasi mencakup 26 sekolah jenjang SD, 25 sekolah jenjang SMP, 4 sekolah jenjang TK, dan 1 satuan pendidikan kesetaraan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi ruang kelas dan toilet, pembangunan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang administrasi, laboratorium komputer, laboratorium IPA, beserta penyediaan perabot pendukungnya.

Sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, sehingga tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran juga terus ditingkatkan, antara lain melalui pengadaan mebel sekolah, peralatan TIK seperti chromebook, laptop, dan interactive flat panel, serta peralatan laboratorium. Upaya lainnya meliputi rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang praktik belajar, laboratorium, serta sarana utilitas sekolah seperti toilet. Peningkatan sarana prasarana ini berdampak pada meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Dalam rangka menekan angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melaksanakan program pemberian beasiswa melalui APBD Tahun 2025 sebagai program unggulan kepala daerah. Program ini memberikan manfaat kepada 1.000 siswa jenjang Sekolah Dasar serta 514 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan kesetaraan. Selain itu, sinergi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut dioptimalkan untuk menekan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Dukungan lainnya diberikan melalui penyediaan school kit bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai upaya meningkatkan partisipasi pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi peserta didik, termasuk pengembangan minat dan bakat melalui kompetisi atau lomba olimpiade siswa di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Secara khusus, peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga didukung melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal. Hal ini dilakukan melalui pembentukan kelompok belajar di setiap desa/kelurahan dengan sasaran masyarakat usia 25–45 tahun. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan, termasuk perangkat desa, pendidik formal, aparat pemerintah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Selain itu, program pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada jenjang pendidikan kesetaraan turut dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja maupun kewirausahaan peserta didik. Dukungan terhadap keberlangsungan proses pembelajaran juga diperkuat melalui pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan (tutor), termasuk pemberian insentif bagi tenaga pendidik pada satuan pendidikan nonformal.

Meskipun capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan posisi Kabupaten Cianjur terhadap capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Cianjur masih tergolong rendah, dengan rata-rata lama sekolah yang masih berada pada jenjang kelas 7 (kelas 1 SMP).

Belum meratanya satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian HLS dan RLS. Selain itu, kondisi ketersediaan dan keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang belum optimal turut mempengaruhi rendahnya minat dan animo masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mencukupi serta distribusinya yang belum merata juga berdampak pada kualitas pendidikan yang belum optimal.

Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan masih relatif rendah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi lingkungan. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), baik yang putus sekolah (drop out), lulus tidak melanjutkan, maupun yang belum pernah bersekolah.

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Cianjur tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang pembelajaran, terbatasnya daya tampung pada satuan pendidikan formal dan nonformal, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah akibat faktor biaya, keterjangkauan layanan pendidikan, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan serta belum meratanya distribusi pada masing-masing satuan pendidikan turut menjadi kendala, ditambah dengan ketersediaan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang belum merata di setiap wilayah kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat pada tahun mendatang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan representatif berbasis ketuntasan pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan advokasi secara masif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Upaya lainnya mencakup penyediaan sarana dan alat pembelajaran yang mendukung peningkatan kompetensi siswa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan pendidikan. Optimalisasi program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga akan terus dilakukan di setiap wilayah, khususnya bagi masyarakat dengan karakteristik tertentu atau kelompok marjinal.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan memastikan serta mendorong anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar dapat melanjutkan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal (PKBM).



Sasaran

Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang telah lama menjadi perhatian utama, tidak terkecuali di Kabupaten Cianjur. Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencerminkan kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

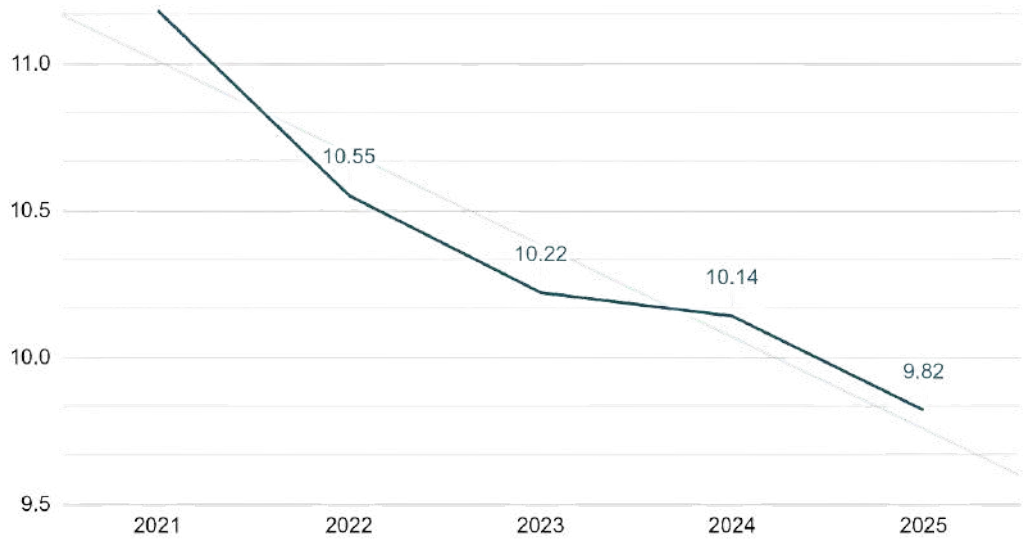
Keberadaan kemiskinan menciptakan situasi dimana hak-hak mendasar seperti pangan, air bersih, hunian layak, pendidikan dan pelayanan kesehatan sulit dijangkau oleh banyak orang. Dengan demikian kemiskinan tidak sekadar rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memanfaatkan kesempatan pembangunan yang seharusnya dapat diakses oleh setiap individu.



Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 yaitu sebesar 9,82 persen dengan capaian kinerja mencapai 102,54 persen. Artinya berhasil melebihi target kinerja yang ditentukan yaitu persentase penduduk miskin sebesar 10,07 persen.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026, realisasi kinerja penurunan persentase penduduk miskin tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD yaitu telah mencapai 88,18 persen. Artinya, capaian tersebut belum berhasil memenuhi target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 8,66 persen penduduk miskin. Mengingat periode RPJMD 2021–2026 secara efektif berakhir pada tahun 2025, maka capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD belum dapat tergambarkan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencakup satu tahun penuh hingga 2026.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur

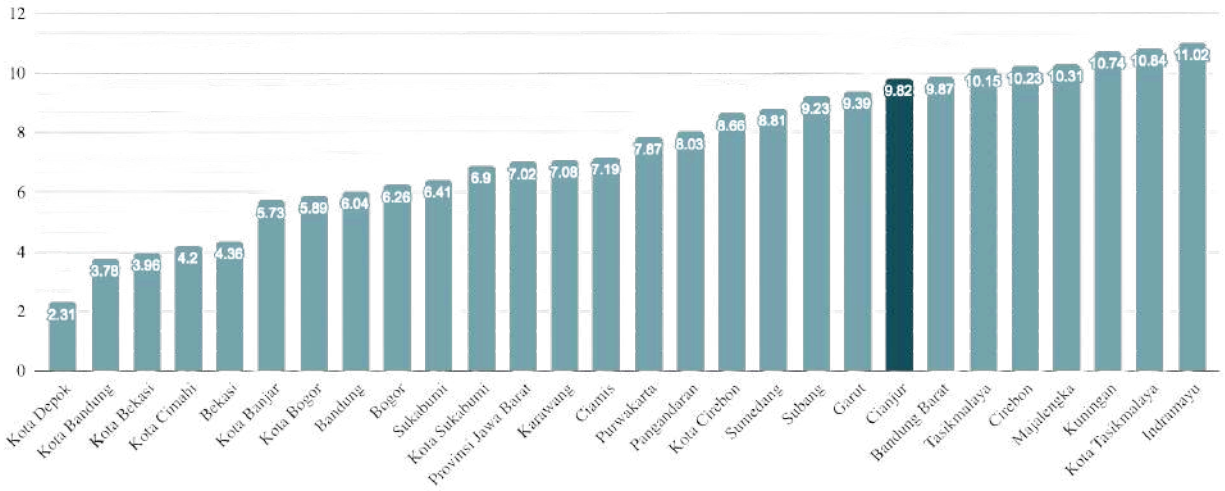


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur pada periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,18 persen, kemudian menurun menjadi 10,55 persen pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 10,22 persen pada tahun 2023. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 menjadi 10,14 persen, hingga akhirnya mencapai 9,82 persen pada tahun 2025.

Penurunan yang terjadi secara bertahap ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat angka sebesar 9,82 persen dan berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten/kota. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar daerah lainnya di Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan daerah dengan capaian terendah, seperti Kota Depok (2,31 persen), Kota Bandung (3,78 persen), dan Kota Bekasi (3,96 persen), terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,02 persen, yang mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Meskipun demikian, posisi Kabupaten Cianjur masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Tasikmalaya (10,15 persen), Kabupaten Cirebon (10,23 persen), dan Kabupaten Indramayu (11,02 persen). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah memberikan hasil, namun masih perlu ditingkatkan agar capaian Kabupaten Cianjur dapat lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial berupaya meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Program Pemberdayaan Sosial. Program ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas individu pada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), baik keluarga maupun kelompok, agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengatasi permasalahan sosial secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Program Pemberdayaan Sosial memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi pembimbingan kepada PSKS, serta membangun koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Fungsi program ini tercermin melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas, pembinaan kelembagaan sosial, serta fasilitasi usaha ekonomi produktif. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Program Pemberdayaan Sosial diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat partisipasi sosial dalam pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada 20 lembaga dengan nominal Rp10.000.000 per lembaga.

Dinas Sosial memiliki strategi melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial, guncangan ekonomi, maupun kondisi darurat.

Program ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta mencegah terjadinya penurunan taraf kesejahteraan sosial akibat kemiskinan, bencana, disabilitas, lanjut usia, maupun kerentanan lainnya. Tugas program ini meliputi penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima manfaat untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali dampak sosial akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga mampu menjaga daya tahan masyarakat dan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin sebanyak 1.766 penerima.

Kemudian, Program Rehabilitasi Sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan layanan pemulihan bagi individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami gangguan sosial, keterlantaran, penyalahgunaan zat adiktif, atau masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan sosial, meningkatkan kemandirian, serta mendukung reintegrasi masyarakat ke dalam lingkungan sosial yang produktif. Fungsi program ini diwujudkan melalui layanan pemulihan sosial bagi PPKS, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian, pemberian bimbingan keterampilan, serta reintegrasi sosial agar penerima manfaat dapat kembali berperan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial memberikan pelayanan permakanan kepada 200 orang, pelayanan sandang kepada 28 orang, penyediaan alat bantu sebanyak 36 unit, pelayanan bimbingan sosial kepada 200 orang, pelayanan reunifikasi kepada 80 orang, pelayanan penelusuran kepada 80 orang, serta pelayanan rujukan kepada 80 orang.

Selanjutnya, Program Penanganan Bencana diarahkan untuk meminimalkan dampak sosial, menjaga keselamatan dan kesejahteraan korban, serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat dapat kembali berfungsi secara normal. Fungsi program ini diwujudkan melalui penyediaan bantuan sosial darurat bagi korban bencana, penyelenggaraan tempat penampungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kesehatan, serta pendampingan sosial untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi masyarakat. Selain itu, program ini juga berperan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan masyarakat agar mampu menghadapi risiko bencana secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah menyalurkan bantuan permakanan bagi korban bencana kepada 490 orang.

Terakhir, pada urusan wajib, Dinas Sosial melaksanakan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dirancang untuk memastikan korban mendapatkan akses terhadap layanan sosial, perlindungan hukum, serta dukungan psikososial sehingga dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Program ini diwujudkan melalui penyediaan layanan perlindungan sosial, bantuan psikososial dan medis, fasilitasi pemulangan dan reintegrasi ke masyarakat, serta pemberian bimbingan kemandirian agar korban dapat menata kembali kehidupan mereka. Selain itu, program ini juga berperan dalam advokasi hak korban, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menangani kasus serupa di masa depan. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah memulangkan sebanyak 35 orang migran korban tindak kekerasan.

Sasaran

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 berfokus pada penurunan tingkat pengangguran. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,17 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Capaian kinerja indikator TPT pada tahun 2025 mencapai 128,36 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi tersebut menunjukkan realisasi yang positif dari target yang ditetapkan sebesar 7,92 persen.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, capaian persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 terhadap target tahun 2026 telah mencapai 149,59 persen, dengan target akhir sebesar 9,23 persen. Dengan demikian, upaya penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur menunjukkan kinerja yang sangat efektif dan telah melampaui target akhir RPJMD sebelum berakhirnya periode perencanaan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kondisi yang lebih tinggi. Pada Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,99 persen, kemudian pada Tahun 2025 menjadi 6,17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah perbaikan pada periode berikutnya.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2023 TPT tercatat sebesar 7,71 persen, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 5,99 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2025 TPT kembali berada pada tingkat yang lebih tinggi yaitu 6,17 persen.

Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur masih berada pada tren yang lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya, meskipun upaya penurunan pengangguran masih perlu terus diperkuat.

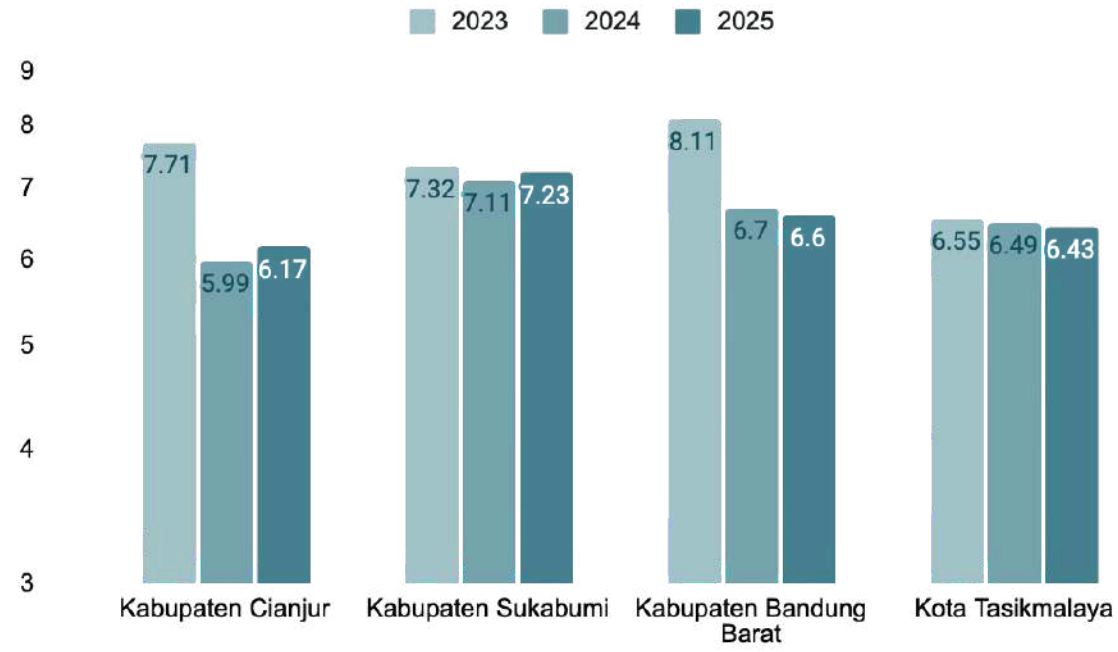
Rincian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur

No	Uraian	2024	2025	Satuan
1	Bekerja	1.331.439,00	1.277.106,00	orang
2	Pengangguran Terbuka	84.781,00	84.036,00	orang
3	Jumlah Angkatan Kerja	1.416.220,00	1.361.142,00	orang
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,99	6,17	persen

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2026

Namun demikian, secara absolut jumlah pengangguran terbuka justru mengalami penurunan dari 84.781 orang pada tahun 2024 menjadi 84.036 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan TPT bukan disebabkan oleh bertambahnya jumlah pengangguran, melainkan lebih dipengaruhi oleh penurunan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan, dari 1.416.220 orang pada tahun 2024 menjadi 1.361.142 orang pada tahun 2025. Penurunan angkatan kerja ini juga sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk bekerja dari 1.331.439 orang menjadi 1.277.106 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cianjur tercatat paling rendah di antara daerah pembanding. Kabupaten Sukabumi memiliki TPT sebesar 7,23 persen, Kabupaten Bandung Barat 6,60 persen, dan Kota Tasikmalaya 6,43 persen. Dengan demikian, meskipun terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur relatif lebih baik dibandingkan ketiga daerah tersebut.

Selain itu, secara tren Kabupaten Sukabumi cenderung berada pada tingkat pengangguran yang lebih tinggi, sedangkan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan secara bertahap namun masih berada di atas tingkat pengangguran Kabupaten Cianjur pada tahun 2025.

Capaian realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 2025–2029 mencapai 78,44 persen. Target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,84 persen pada tahun 2029. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran masih perlu terus ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan penyerapan pencari kerja terdaftar.

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan persentase penyerapan pencari kerja, dari 44 persen pada tahun 2024 menjadi 74,68 persen pada tahun 2025.

Capaian kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025. Salah satu faktor pendukungnya adalah optimalisasi pelayanan antar kerja yang ditunjukkan melalui penghimpunan dan fasilitasi penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebanyak 17.526 lowongan kerja sepanjang tahun berjalan. Penyediaan informasi lowongan kerja tersebut difasilitasi melalui berbagai kegiatan, antara lain penyelenggaraan bursa kerja (Job Fair), penguatan kemitraan dengan perusahaan penyedia lapangan kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK), serta pemanfaatan layanan digital “Lapak Manjur” untuk memperluas akses informasi pasar kerja. Untuk mempertahankan capaian tersebut, instansi akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak serta melakukan pembaruan data lowongan kerja secara berkala.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Evaluasi menunjukkan bahwa berbagai kegiatan dalam program tersebut, mulai dari fasilitasi penempatan tenaga kerja hingga penyediaan informasi pasar kerja, telah dilaksanakan untuk menjembatani kebutuhan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.

Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja didorong oleh kesesuaian antara kompetensi pencari kerja hasil pelatihan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selain itu, instansi juga berhasil menghimpun dan mendistribusikan 17.526 lowongan pekerjaan sepanjang tahun 2025 melalui berbagai layanan informasi pasar kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui optimalisasi program ketransmigrasian, dengan memberangkatkan dan menempatkan 2 Kepala Keluarga (KK) asal Kabupaten Cianjur ke kawasan transmigrasi di Polewali Mandar. Ke depan, instansi akan terus meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, memperbarui basis data lowongan kerja, serta memperluas kerja sama penempatan tenaga kerja antardaerah.

Meskipun persentase penyerapan tenaga kerja terdaftar menunjukkan capaian yang melampaui target, terdapat penurunan jumlah absolut pencari kerja terdaftar. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 27.395 orang, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 20.022 orang. Penurunan ini tidak disebabkan oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja baru, tetapi dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pendataan pencari kerja. Sistem perpanjangan masa berlaku pada penerbitan AK-1 (Kartu Kuning) yang sebelumnya digunakan telah dihapus dan digantikan dengan sistem pendataan digital terpusat melalui portal SIAPKerja.id. Perubahan sistem tersebut menyebabkan sebagian pencari kerja tidak lagi melakukan pembaruan data secara berkala, sehingga jumlah pencari kerja terdaftar dalam sistem mengalami penurunan.

Guna mengatasi kendala administratif serta meningkatkan validitas data pencari kerja, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merumuskan beberapa langkah sebagai berikut:

Sinergi ekosistem digital lokal (Lapak Manjur) dan nasional (SIAPKerja)
Memanfaatkan aplikasi Lapak Manjur sebagai layanan digital daerah untuk memberikan notifikasi secara berkala kepada pengguna terdaftar. Melalui integrasi tersebut, pencari kerja di Kabupaten Cianjur diingatkan untuk secara berkala memperbarui profil dan status pekerjaan pada portal SIAPKerja.id, sehingga data yang tersedia dalam sistem menjadi lebih valid dan mutakhir.

Optimalisasi literasi digital dan pelayanan jemput bola
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, mengenai pentingnya memiliki dan mengelola akun SIAPKerja.id. Sosialisasi ini disertai dengan pelayanan jemput bola ke kecamatan dan desa untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet maupun literasi digital dalam melakukan pendaftaran dan pembaruan data.

Penerapan syarat administratif terintegrasi
Menjadikan kepemilikan akun SIAPKerja.id yang aktif dan mutakhir sebagai salah satu persyaratan bagi masyarakat yang akan mengakses berbagai layanan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, seperti pendaftaran program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), keikutsertaan dalam Job Fair, serta fasilitasi program transmigrasi.

Penguatan kemitraan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK)
Meningkatkan kerja sama dengan BKK di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi di Kabupaten Cianjur. Melalui kerja sama ini, pengelola BKK didorong untuk mengarahkan lulusan baru (fresh graduate) agar mendaftarkan diri pada portal SIAPKerja.id sebelum kelulusan, sehingga data angkatan kerja baru dapat tercatat dalam sistem ketenagakerjaan.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari kolaborasi tiga program strategis yang dilaksanakan secara terpadu, yaitu: (1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja; (2) Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempercepat proses keterhubungan antara pencari kerja dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan; serta (3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang membuka alternatif penyerapan tenaga kerja melalui pemerataan kesempatan kerja di wilayah tujuan transmigrasi.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang diikuti oleh 200 orang peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, dilakukan pula pembinaan terhadap 20 lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta, yang difokuskan pada pengawasan serta peningkatan standar kualitas manajemen lembaga pelatihan kerja yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pelayanan antar kerja juga dilaksanakan melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja baik Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Lokal (AKL), serta pemberian layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Layanan ini turut dilengkapi dengan fasilitasi khusus melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan guna memastikan akses kesempatan kerja yang lebih inklusif.

Selain itu, dilakukan pemeliharaan aplikasi serta penyediaan informasi pasar kerja secara daring melalui sistem Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, termasuk penguatan pemanfaatan platform Karir Hub/Lapak Manjur. Melalui layanan tersebut tercatat sebanyak 20.022 orang pencari kerja yang terdaftar dalam sistem pada tahun 2025.

Upaya memperluas akses informasi kesempatan kerja juga dilakukan melalui penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja, yang menjadi sarana pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan. Kegiatan ini diikuti oleh 742 orang pencari kerja, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penempatan tenaga kerja di dunia usaha dan industri.

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah melalui peningkatan tata kelola hubungan industrial yang harmonis.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi membina serta mendorong perusahaan di wilayah Kabupaten Cianjur untuk mematuhi norma ketenagakerjaan dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Kabupaten Cianjur menerapkan pendekatan preventif atau struktural melalui indikator persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial dengan baik. Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan aspek-aspek mendasar hubungan industrial. Logikanya sederhana, apabila perusahaan telah memenuhi empat pilar utama hubungan industrial secara kumulatif, yaitu Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB), Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka iklim kerja akan lebih kondusif dan potensi sengketa ketenagakerjaan dapat diminimalkan.

Pendekatan tersebut diwujudkan dengan mendorong perusahaan untuk memenuhi keempat instrumen kelayakan hubungan industrial tersebut secara terpadu. Melalui penguatan indikator ini, instansi tidak hanya berupaya mencegah terjadinya konflik hubungan kerja, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, menjamin pemenuhan hak normatif pekerja, serta menjaga iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Cianjur.

Upaya tersebut juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah alokasi anggaran APBD untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 40.000 pekerja rentan. Kebijakan ini memberikan perlindungan dasar bagi pekerja serta membantu memitigasi risiko sosial ekonomi yang dapat memicu perselisihan hubungan industrial.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Hubungan Industrial, khususnya melalui sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, anggaran perlindungan bagi pekerja rentan dapat disalurkan secara tepat sasaran sehingga berkontribusi terhadap terciptanya hubungan industrial yang lebih kondusif di Kabupaten Cianjur.

Namun demikian, dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada sisi hubungan industrial masih terdapat sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen dari pihak manajemen perusahaan dalam memenuhi standar tata kelola ketenagakerjaan. Masih terdapat perusahaan di wilayah Kabupaten Cianjur yang belum melengkapi instrumen hubungan industrial secara memadai, khususnya dalam pemenuhan secara kumulatif terhadap keberadaan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, penerapan Struktur dan Skala Upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Ketidaksiapan sebagian perusahaan dalam memenuhi standar tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan persentase perusahaan yang memenuhi kelayakan hubungan industrial.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan beberapa intervensi program. Salah satunya melalui kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Kegiatan ini merupakan langkah afirmatif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, yang diwujudkan melalui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 40.000 pekerja rentan menggunakan anggaran daerah. Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi pekerja, menjaga keberlanjutan penghasilan, serta meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, dilakukan pula kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembinaan Tata Kelola Hubungan Industrial. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan mediasi atas perselisihan antara pekerja dan pengusaha, seperti kasus pemutusan hubungan kerja maupun sengketa hak normatif. Pada tahun 2025 tercatat 20 perkara perselisihan hubungan industrial yang berhasil difasilitasi penyelesaiannya oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Selain fungsi penyelesaian sengketa, kegiatan ini juga mencakup upaya preventif melalui pendampingan administratif kepada perusahaan dalam penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan LKS Bipartit, serta penerapan Struktur dan Skala Upah.

Guna meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran perusahaan dalam melengkapi instrumen hubungan industrial tersebut, instansi merumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Optimalisasi pendampingan teknis (coaching clinic)
Penyusunan dokumen teknis seperti Struktur dan Skala Upah maupun Peraturan Perusahaan seringkali menjadi kendala bagi perusahaan skala menengah dan kecil. Oleh karena itu, pola pembinaan akan diperkuat melalui pendampingan teknis secara langsung. Mediator hubungan industrial akan memfasilitasi kegiatan coaching clinic untuk membantu pihak perusahaan dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut hingga proses pengesahan.

Sinergi pengawasan dan penegakan kepatuhan
Koordinasi lintas instansi akan ditingkatkan dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat wilayah kerja Cianjur. Melalui sinergi ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ketenagakerjaan, termasuk yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, akan direkomendasikan untuk mendapatkan pembinaan lanjutan hingga pemberian teguran administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan sosialisasi dialogis bipartit
Frekuensi penyuluhan kepada asosiasi pengusaha, seperti APINDO, serta serikat pekerja/serikat buruh akan ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa pemenuhan instrumen hubungan industrial bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya pencegahan sengketa serta langkah untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Penerapan sistem penghargaan (reward system)
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga merencanakan pemberian apresiasi kepada perusahaan yang secara konsisten memenuhi instrumen hubungan industrial secara lengkap. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim kompetisi yang positif di dunia usaha serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan.

Sasaran

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Bertakwa dan Berakhlak Mulia

Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 90,38 poin, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,52 persen dari target yang ditetapkan sebesar 85,65 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pada dimensi kesalehan sosial tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui ekspektasi yang telah direncanakan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan di masyarakat telah berjalan secara efektif.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026 sebesar 86,15 poin, maka realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan capaian kinerja sebesar 104,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sasaran pembangunan pada indikator Indeks Kesalehan Sosial secara substantif telah tercapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

INDEKS KESALEHAN SOSIAL

Efisiensi Anggaran 1,77%
Rp 918.961.859,00

Capaian 2025
105,52%

Target	Realisasi
85,65 poin	90,38 poin

Perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Realisasi 2024	Realisasi lebih baik
79,43 poin	10,95 poin

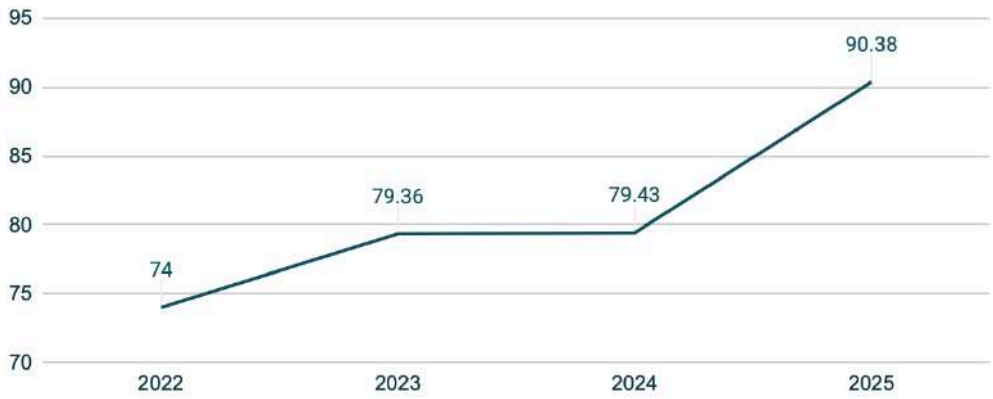
Perbandingan dengan target akhir RPJMD:

Target 2026	Capaian terhadap target akhir
86,15 poin	104,91 persen

Didukung oleh Program:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur



Sumber: Bapperida, 2026



Kegiatan pengajian rutin Ihya di Ruang Garuda Pendopo Kabupaten Cianjur

Secara tren, perkembangan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur dalam periode 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 74,00 poin pada tahun 2022 menjadi 79,36 poin pada tahun 2023, relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 79,43 poin, dan kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025 menjadi 90,38 poin. Lonjakan pada tahun 2025 ini mengindikasikan adanya akselerasi kinerja yang cukup kuat, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun efektivitas intervensi program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, capaian Indeks Kesalehan Sosial ini belum dapat dibandingkan secara komprehensif dengan daerah lain karena keterbatasan ketersediaan data pembanding yang seragam. Oleh karena itu, analisis kinerja masih berfokus pada capaian internal dan tren perkembangan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan peningkatan Indeks Kesalehan Sosial tidak terlepas dari kontribusi berbagai faktor yang saling berkaitan. Pada sasaran meningkatnya partisipasi dalam kegiatan adat dan keagamaan, faktor internal individu berperan melalui meningkatnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berinteraksi sosial serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan nilai-nilai yang berkembang turut memperkuat keterlibatan tersebut.

Dari sisi eksternal, dukungan lingkungan sosial seperti keluarga, masyarakat, dan tokoh agama menjadi pendorong utama dalam membangun interaksi dan kebersamaan. Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat dan keagamaan juga memperluas akses masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai sosial dan spiritual.

Sementara itu, dari aspek institusional, peran pemerintah daerah cukup signifikan melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan keagamaan. Salah satu contoh adalah kegiatan subuh berjamaah bagi aparatur pemerintah yang tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat nilai keteladanan serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja. Pada aspek internal, masih dijumpai rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kegiatan keagamaan, serta adanya sikap apatis yang memengaruhi tingkat partisipasi. Dari aspek eksternal, munculnya faktor sosial-psikologis seperti ketidakpedulian, antipati, dan konflik sosial turut menghambat interaksi sosial yang harmonis. Sedangkan dari sisi institusional, sosialisasi program yang belum optimal serta persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang cenderung seremonial menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Pada sasaran meningkatnya kualitas penanaman nilai-nilai mental spiritual, keberhasilan dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal, eksternal, dan institusional. Kesadaran individu, konsistensi dalam pengamalan nilai, serta dukungan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi fondasi utama. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah seperti pemberian insentif guru ngaji, integrasi nilai spiritual dalam pendidikan, serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan secara rutin turut memperkuat proses internalisasi nilai-nilai tersebut.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, antara lain dalam meningkatkan konsistensi antara pengetahuan dan perilaku, memperkuat keteladanan di lingkungan sosial, serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan program agar lebih aplikatif dan berkelanjutan.

Pada tingkat subkegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, keberhasilan ditentukan oleh komitmen pimpinan, dukungan kebijakan dan anggaran, perencanaan program yang terstruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta lingkungan yang mendukung. Konsistensi pimpinan dalam memberikan teladan, kejelasan indikator kinerja, serta pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

Adapun faktor kendala yang masih dihadapi meliputi aspek manajerial, perencanaan, sumber daya manusia, dan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya penerapan nilai keteladanan, perencanaan program yang belum sepenuhnya terstruktur, keterbatasan kompetensi fasilitator, serta budaya lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung internalisasi nilai-nilai spiritual.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan progresif. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas pelaksanaan program, peningkatan partisipasi yang lebih substantif, serta konsistensi dalam pembinaan nilai-nilai sosial dan spiritual agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.



Kegiatan pengajian rutin Ihya di Ruang Garuda Pendopo Kabupaten Cianjur

Sasaran

Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 difokuskan pada peningkatan perekonomian daerah. Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu peningkatan PDRB sektor pertanian. Nilai PDRB sektor pertanian Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 11.209,19 miliar rupiah berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yaitu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha. Capaian kinerja PDRB sektor pertanian tahun 2025 sebesar 103,05 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 10.876,98 miliar rupiah.

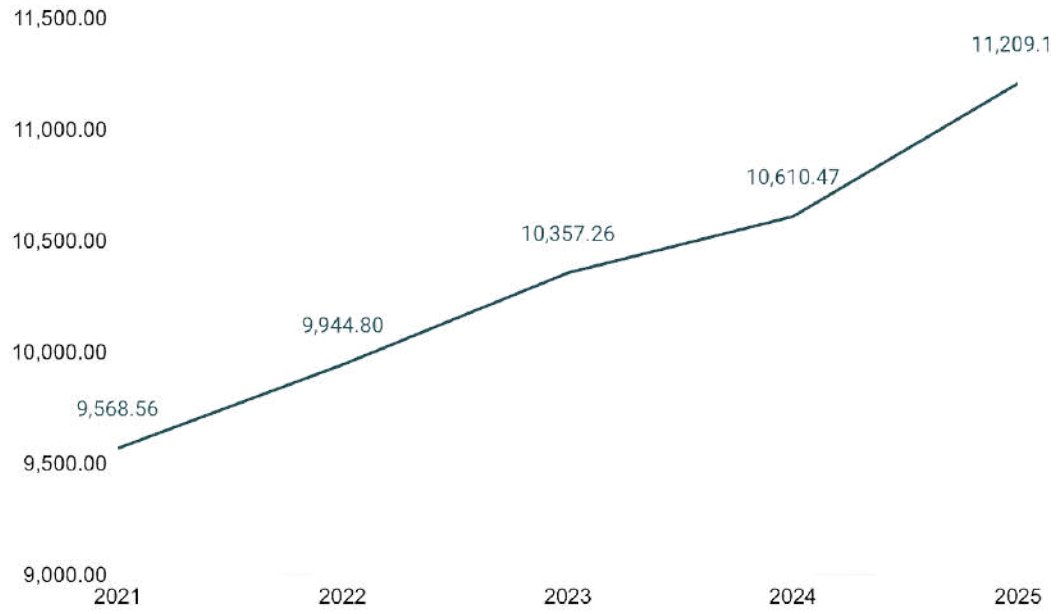


Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2025 telah mencapai 99,86 persen terhadap target tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 11.224,47 miliar rupiah. Namun demikian, mengingat periode RPJMD 2021–2026 secara efektif berakhir pada tahun 2025, maka capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD belum dapat tergambarkan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencakup satu tahun penuh hingga 2026.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB sektor pertanian juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2024, nilai PDRB tercatat sebesar 10.610,47 miliar rupiah dan meningkat sebesar 598,72 miliar rupiah menjadi 11.209,19 miliar rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif pada sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur (miliar rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Secara tren, perkembangan PDRB sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Nilai PDRB pada tahun 2021 sebesar 9.568,56 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 9.944,80 miliar rupiah pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 10.357,26 miliar rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 10.610,47 miliar rupiah, hingga akhirnya mencapai 11.209,19 miliar rupiah pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Cianjur terus mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Nilai PDRB Pertanian Harga Konstan	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Cianjur	9,568.56	9,944.80	10,357.26	10,610.47	11,209.19
Kabupaten Sukabumi	9,051.57	9,540.18	9,944.90	10,152.25	11,437.62
Kabupaten Bandung Barat	3,672.83	3,823.82	3,884.46	4,100.25	4,444.05
Kota Tasikmalaya	660.75	690.75	718.53	769.27	849.86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan daerah lain, pada tahun 2025 nilai PDRB pertanian Kabupaten Cianjur berada sedikit di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencapai 11.437,62 miliar rupiah, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bandung Barat sebesar 4.444,05 miliar rupiah dan Kota Tasikmalaya sebesar 849,86 miliar rupiah. Secara tren, Kabupaten Cianjur sempat memiliki nilai PDRB pertanian yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sukabumi pada periode 2021–2023, namun sejak tahun 2024 posisi tersebut mengalami pergeseran. Meskipun demikian, Kabupaten Cianjur tetap menunjukkan kinerja yang kompetitif dengan pertumbuhan yang stabil serta mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kontribusi sektor pertanian yang signifikan di antara wilayah pembanding.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)

Nilai PDRB Pertanian Harga Berlaku	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Cianjur	16,441.35	17,507.76	18,864.37	20,631.43	22,016.28
Kabupaten Sukabumi	15,772.07	17,238.62	18,681.49	19,904.36	23,152.33
Kabupaten Bandung Barat	6,140.22	6,812.50	7,247.21	7,732.00	8,584.30
Kota Tasikmalaya	1,100.18	1,202.36	1,319.55	1,490.28	1,673.55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, nilai PDRB pertanian Kabupaten Cianjur mencapai 22.016,28 miliar rupiah, meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2024 sebesar 20.631,43 miliar rupiah. Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya pertumbuhan volume produksi, tetapi juga adanya pengaruh kenaikan harga komoditas pertanian.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, pada tahun 2025 Kabupaten Cianjur berada sedikit di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencatatkan nilai sebesar 23.152,33 miliar rupiah. Padahal pada periode 2021–2024, Kabupaten Cianjur masih unggul dibandingkan Kabupaten Sukabumi. Pergeseran posisi ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi pada tahun terakhir relatif lebih tinggi. Sementara itu, dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya, nilai PDRB pertanian Kabupaten Cianjur tetap jauh lebih tinggi, yang menunjukkan peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, tren PDRB atas dasar harga berlaku di seluruh wilayah pembanding sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, Kabupaten Cianjur tetap menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten, meskipun perlu meningkatkan akselerasi pertumbuhan agar dapat kembali melampaui Kabupaten Sukabumi pada periode selanjutnya.
Upaya pemerintah kabupaten cianjur khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam meningkatkan nilai PDRB Pertanian yaitu dengan mendorong upaya pada peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Pada tahun 2025 realisasi produksi tanaman pangan mencapai 1.131.563 ton.

Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Cianjur

No	Komoditas	2024	2025
1	Padi (GKG)	912,295	1,010,014
2	Jagung	74,793	82,764
3	Kedelai	6,089	1,009
4	Kacang Tanah	1,123	813
5	Ubi Kayu / Singkong	34,342	30,483
6	Ubi Jalar	6,048	6,442
7	Kacang Hijau	38	38
	Jumlah	1,034,728	1,131,563

Sumber: DTPHP, 2025

Produksi tanaman pangan Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan secara agregat, tercermin dari total produksi yang naik dari 1.034.728 ton pada tahun 2024 menjadi 1.131.563 ton pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 96.835 ton. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan produksi, dengan yang paling signifikan yaitu pada produksi kedelai yang pada tahun 2024 hasil produksinya mencapai 6.089 ton kini di tahun 2025 hanya 1.009 ton saja. Penurunan ini umumnya dipengaruhi oleh pergeseran preferensi petani ke komoditas yang lebih menguntungkan secara ekonomi, keterbatasan daya tarik budidaya kedelai lokal akibat harga dan ketergantungan dari program pemerintah, serta faktor iklim dan efisiensi pemanfaatan lahan.

Produksi Padi Tahun 2025

Cakupan Wilayah	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Nasional	60,207,101	11,320,986	5.32
Provinsi Jawa Barat	10,226,654	1,755,300	5.83
Kabupaten Cianjur	1,010,014	178,108	5.67

Sumber: DTPHP, 2025

Pada Tahun 2025, produksi padi Kabupaten Cianjur mencapai 1.010.014 ton atau berkontribusi sebesar 9,88 persen terhadap total produksi Provinsi Jawa Barat serta 1,68 persen terhadap produksi nasional. Kabupaten Cianjur menempati urutan ke-4 sebagai produsen padi terbesar di Jawa Barat. Dari sisi produktivitas Kabupaten Cianjur sebesar 5,67 ton/ha berada di atas rata-rata nasional (5,32 ton/ha), namun sedikit di bawah rata- rata Provinsi Jawa Barat (5,83 ton/ha). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis sebagai sentra produksi padi di tingkat provinsi, dengan kinerja budidaya yang relatif efisien dan masih memiliki ruang peningkatan produktivitas.

Bantuan Sarana (Alat dan Mesin Pertanian) Pra Panen Tahun 2025

No	Jenis Alsintan	Volume (Unit)
1	Cultivator	3
2	Hand Sprayer	912
3	IoT	7
4	Pompa Air	242
5	Rice Transplanter	13
6	Traktor Roda 2	66
7	Traktor Roda 4	25
8	Traktor Roda Crawler	8

Sumber: DTPHP, 2025

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melaksanakan berbagai upaya strategis pada tahun 2025, baik melalui penyediaan sarana produksi maupun penguatan prasarana pertanian. Dari sisi sarana, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen difokuskan untuk mendukung efisiensi dan modernisasi proses budidaya. Bantuan tersebut meliputi hand sprayer sebanyak 912 unit sebagai komponen dominan, pompa air sebanyak 242 unit, serta traktor roda 2 sebanyak 66 unit dan traktor roda 4 sebanyak 25 unit. Selain itu, juga disalurkan rice transplanter sebanyak 13 unit, cultivator sebanyak 3 unit, traktor roda crawler sebanyak 8 unit, serta dukungan teknologi pertanian berbasis Internet of Things (IoT) sebanyak 7 unit. Penyediaan alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi melalui mekanisasi pertanian.

Bantuan Prasarana Pertanian Tahun 2025

No	Kegiatan	Volume (Unit)	Coverage Area (Ha)
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tani	34	850
2	Sumur Bor	15	75
3	Irigasi Perpompaan	13	1,085
4	Irigasi Perpipaan	22	220
5	Damparit	3	30

Sumber: DTPHP, 2025

Di sisi prasarana, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melakukan penguatan infrastruktur pertanian guna menjamin ketersediaan air dan meningkatkan indeks pertanaman. Upaya tersebut antara lain melalui rehabilitasi jaringan irigasi tani sebanyak 34 unit dengan cakupan area seluas 850 hektare, pembangunan sumur bor sebanyak 15 unit dengan cakupan 75 hektare, serta pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 13 unit yang mampu melayani area hingga 1.085 hektare. Selain itu, dilakukan pula pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 22 unit dengan cakupan 220 hektar dan pembangunan damparit sebanyak 3 unit untuk area seluas 30 hektar.

Selain pada produksi tanaman pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) juga mendorong peningkatan produksi hortikultura. Pada tahun 2025, total produksi hortikultura Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 509.060 ton. Produksi hortikultura pada tahun tersebut menunjukkan dinamika yang beragam, ditandai dengan peningkatan pada beberapa komoditas utama serta penurunan pada komoditas lainnya.

Peningkatan produksi paling signifikan terjadi pada kelompok komoditas cabai (cabai keriting dan cabai besar/TW/teropong) yang meningkat sebesar 7.629 ton. Selain itu, produksi kubis juga mengalami peningkatan sebesar 1.811 ton, serta pisang yang mencatat kenaikan cukup besar secara volume yaitu sebesar 15.784 ton. Peningkatan pada komoditas-komoditas tersebut mencerminkan respon positif petani terhadap peluang pasar, dukungan teknis budidaya, serta relatif terkendalinya gangguan produksi pada sentra hortikultura tertentu.

Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Cianjur

No	Komoditas	2024	2025
1	Bawang Daun	43,235	32,935
2	Kubis	22,316	24,127
3	Tomat	36,932	31,068
4	Aneka Cabai	43,874	50,026
5	Durian	14,845	13,449
6	Manggis	1,771	1,750
7	Pisang	339,921	355,705
	Jumlah	502,894	509,060

Sumber: DTPHP, 2025

Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi. Penurunan paling besar terjadi pada bawang daun yang turun sebesar 10.300 ton, diikuti oleh tomat yang menurun sebesar 5.864 ton. Penurunan juga terjadi pada cabai rawit sebesar 1.477 ton, durian sebesar 1.396 ton, serta manggis yang mengalami penurunan relatif kecil yaitu sebesar 21 ton. Penurunan produksi pada komoditas buah seperti durian dan manggis dipengaruhi oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengganggu fase generatif tanaman, khususnya pada proses pembungaan, penyerbukan, dan pembentukan buah. Kondisi kelembaban yang tinggi menyebabkan gugur bunga dan buah muda serta meningkatkan serangan penyakit, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas dan hasil panen.

Selain faktor cuaca, penurunan produksi pada beberapa komoditas sayuran juga dipengaruhi oleh adanya alih komoditas oleh sebagian petani ke tanaman sayuran eksotis dataran tinggi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, namun tidak termasuk dalam kelompok komoditas yang dilaporkan. Hal ini turut berkontribusi terhadap penurunan produksi pada komoditas sayuran tertentu.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan, peningkatan signifikan pada komoditas cabai dan pisang berperan penting dalam menjaga kinerja subsektor hortikultura Kabupaten Cianjur pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengelolaan pola tanam dan distribusi produksi yang lebih terencana, agar fluktuasi produksi antar komoditas dapat diminimalkan dan keberlanjutan usaha hortikultura tetap terjaga.

Peningkatan produksi hortikultura di Kabupaten Cianjur tidak hanya dipengaruhi oleh adanya dorongan stimulan berupa bantuan sarana produksi dari pemerintah daerah, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan produktivitas di tingkat usaha tani. Hal ini sejalan dengan posisi Kabupaten Cianjur sebagai salah satu sentra hortikultura strategis di Jawa Barat. Faktor-faktor yang berperan penting antara lain penerapan teknologi budidaya yang tepat, penggunaan varietas unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu.

Selain itu, upaya pengurangan kehilangan hasil (losses) pada tahap panen dan pascapanen menjadi aspek yang krusial, mengingat karakteristik komoditas hortikultura yang mudah rusak dan rentan terhadap penurunan mutu. Penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi tawar petani, serta mendorong konsistensi kualitas dan kuantitas pasokan.

Di sisi hilir, kepastian akses pasar serta pengembangan pola kemitraan menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan produksi. Peningkatan produksi akan berjalan optimal apabila didukung oleh jaminan serapan hasil dan stabilitas harga. Oleh karena itu, strategi peningkatan produksi hortikultura di Kabupaten Cianjur diarahkan pada optimalisasi komoditas basis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi di tingkat provinsi, melalui pendekatan klaster atau kawasan sentra produksi, sehingga menghasilkan dampak yang lebih fokus, signifikan, dan terukur.

Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Hortikultura Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Volume
1	Bibit Buah-buahan	1.100 pohon
2	Plastik UV	12 roll
3	Handsprayer	4 unit
4	Pendaftaran Varietas Lokal dan Varietas Turunan Esensial	1 kegiatan
5	Greenhouse	2 unit
6	Pengembangan Bawang Merah	3 Ha
7	Pengembangan Aneka Cabai	12 Ha
8	Benih Sayuran	390 pack
9	Benih Bawang Merah	385 kg

Sumber: DTPHP, 2025

Sebagai bentuk dukungan konkret, pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memberikan bantuan sarana dan prasarana hortikultura yang meliputi bibit buah-buahan sebanyak 1.100 pohon, plastik UV sebanyak 12 roll, handsprayer sebanyak 4 unit, serta pembangunan greenhouse sebanyak 2 unit. Selain itu, dilaksanakan kegiatan pendaftaran varietas lokal dan varietas turunan esensial sebanyak 1 kegiatan, pengembangan bawang merah seluas 3 hektar, dan pengembangan aneka cabai seluas 12 hektar. Dukungan lainnya berupa penyaluran benih sayuran sebanyak 390 pack serta benih bawang merah sebanyak 385 kilogram. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan kualitas hasil, serta mendorong keberlanjutan pengembangan hortikultura di Kabupaten Cianjur.

Jumlah produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dengan realisasi sebesar 69.349 ton. Komoditas unggulan seperti kopi dan teh memberikan kontribusi terhadap pasar regional serta memiliki potensi untuk dikembangkan ke pasar ekspor, meskipun skalanya masih dalam tahap berkembang jika dibandingkan dengan sentra utama nasional.

Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cianjur

No	Komoditas	2024	2025
1	Aren	21,326	21,327
2	Cengkeh	736	778
3	Guttapercha	-	-
4	Jambu Mete	-	-
5	Jarak	-	-
6	Kakao	793	978
7	Kapok	29	28
8	Karet	2,771	2,993
9	Kayu Manis		
10	Kelapa dalam	4,737	4,754
11	Kelapa Hibrida	364	353
12	Kelapa sawit	11,519	11,530
13	Kemiri	24	24
14	Kemiri Sunan	-	-
15	Kenanga	-	-
16	Kina	148	241
17	Kopi Arabika	916	922
18	Kopi Robusta	324	324
19	Kumis Kucing	-	-
20	Lada	20	20
21	Pala	107	107
22	Pandan	-	-
23	Panili	8	8
24	Pinang	-	-
25	Teh	24,630	24,912
26	Tembakau	42	50
27	Serehwangi	108	109

Sumber: DTPHP, 2025

Peningkatan produksi tanaman perkebunan tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain kegiatan peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, serta penguatan kelembagaan pekebun. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti fluktuasi harga komoditas di pasar global dan kondisi tanaman yang telah berusia tua. Oleh karena itu, upaya pengembangan ke depan diarahkan pada hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah agar daya saing komoditas perkebunan semakin meningkat.

Secara umum, keberhasilan peningkatan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai program pembangunan pertanian. Program tersebut meliputi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, serta Program Penyuluhan Pertanian.

Implementasi program-program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain pemberian bantuan sarana produksi pertanian berupa bibit, benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Selain itu, dilakukan pula pembangunan dan penguatan prasarana pertanian seperti jaringan irigasi, damparit, dan greenhouse. Di sisi lain, peningkatan kapasitas petani juga didukung melalui kemudahan akses terhadap informasi dan penerapan teknologi pertanian melalui kegiatan penyuluhan.

Selain subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, capaian nilai PDRB sektor pertanian di Kabupaten Cianjur juga didukung oleh kontribusi subsektor perikanan dan peternakan yang dikelola oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan. Pada tahun 2025, total produksi hasil perikanan mencapai 131.143 ton. Produksi tersebut berasal dari berbagai sumber, baik perikanan tangkap di laut, perairan umum daratan, maupun kegiatan budidaya ikan yang dilakukan secara komersial dan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui dinas terkait telah melakukan berbagai upaya, antara lain pemberian bantuan stimulan berupa benih ikan dan pakan kepada pelaku usaha budidaya. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat pembudidaya dalam mengadopsi teknologi perikanan serta tingginya harga pakan. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penerapan teknologi budidaya perikanan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Sementara itu, pada subsektor peternakan, produksi hasil peternakan pada tahun 2025 tercatat sebesar 92.188 ton. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 107.668 ton. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan kekhawatiran peternak untuk kembali membeli ternak bakalan, serta meningkatnya harga bakalan dengan kualitas yang relatif sama. Selain itu, pada komoditas tertentu seperti telur, tingginya biaya operasional dan harga pakan juga menjadi kendala dalam peningkatan produksi.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba, serta dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas ternak. Oleh karena itu, upaya penanganan yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan vaksinasi secara berkala guna menekan penyebaran kasus PMK dan memulihkan kepercayaan peternak.

Sasaran

Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian, Kabupaten Cianjur menargetkan peningkatan kualitas koperasi serta pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha mandiri. Koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mengembangkan usaha secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan koperasi yang berkualitas, pelaku usaha memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan, pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha, sehingga daya saing di pasar dapat meningkat.

Di sisi lain, usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha juga menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Usaha mikro yang telah memiliki izin resmi, seperti Izin Usaha Mikro (IUM) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian lokal. Dengan skala usaha yang lebih mapan, pelaku usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.

Sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Cianjur, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM. Dengan demikian, diharapkan sektor koperasi dan UMKM dapat semakin berkontribusi dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur secara berkelanjutan.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas

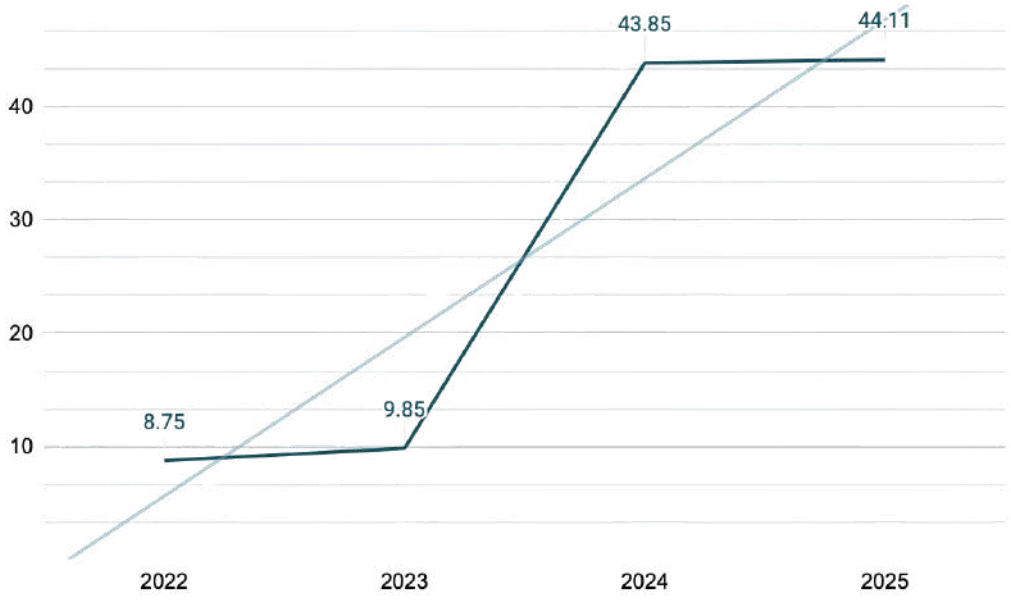


Realisasi tingkat koperasi yang berkualitas pada tahun 2025 mencapai 44,11 persen. Capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 435,44 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi telah jauh melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, capaian tingkat koperasi yang berkualitas pada tahun 2025 terhadap target tahun 2026 telah mencapai 426,95 persen. Dengan demikian, kinerja indikator ini tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 tingkat koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen koperasi yang berkualitas pada tahun 2025. Semula tingkat koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 yaitu hanya 43,85 persen.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2025

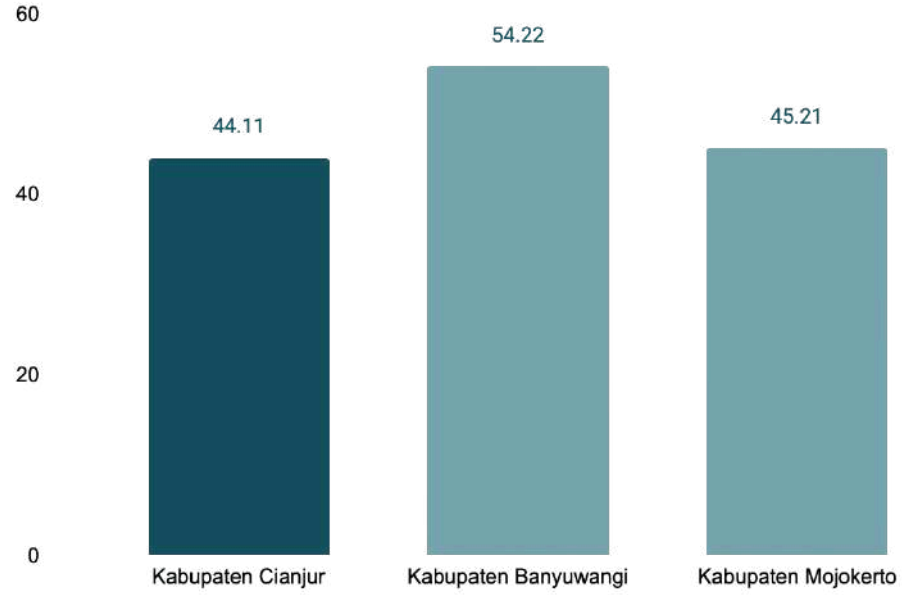


Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Tingkat koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2022, persentase koperasi berkualitas tercatat sebesar 8,75 persen, kemudian meningkat menjadi 9,85 persen pada Tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 43,85 persen, yang menunjukkan adanya percepatan dalam upaya pembinaan serta penataan kelembagaan koperasi.

Pada Tahun 2025, capaian tersebut kembali meningkat menjadi 44,11 persen, meskipun dengan kenaikan yang relatif moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Cianjur dapat terus dipertahankan, sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar dikelola secara lebih sehat dan profesional.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas Tahun 2025



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2026

Apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain, tingkat koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 masih berada sedikit di bawah capaian daerah pembanding. Persentase koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 44,11 persen, sedangkan Kabupaten Banyuwangi mencapai 54,22 persen dan Kabupaten Mojokerto sebesar 45,21 persen.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Cianjur telah berada pada level yang relatif mendekati beberapa daerah lain, khususnya Kabupaten Mojokerto yang memiliki selisih capaian yang tidak terlalu signifikan. Namun demikian, capaian Kabupaten Cianjur masih berada di bawah Kabupaten Banyuwangi yang telah menunjukkan tingkat penguatan kelembagaan koperasi yang lebih tinggi.

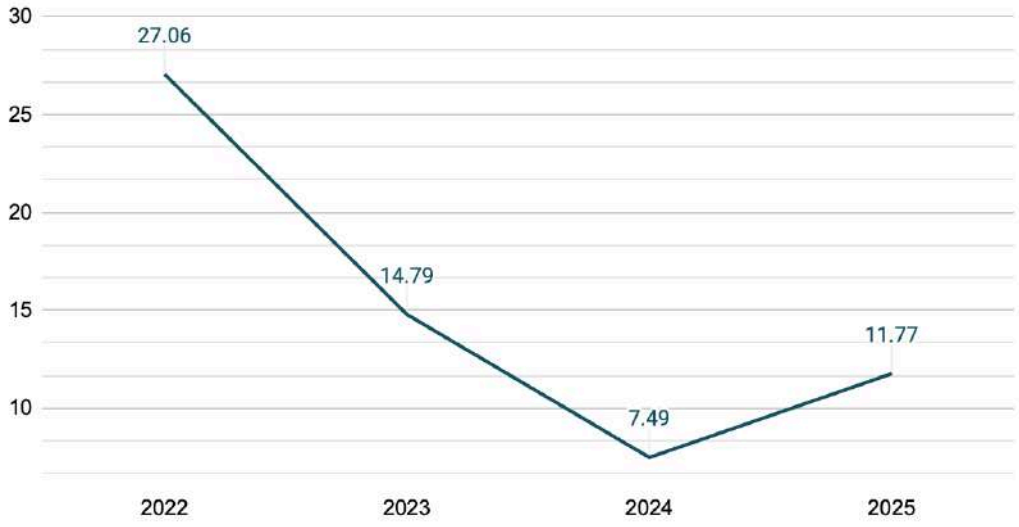
Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Cianjur telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih diperlukan penguatan pembinaan koperasi secara berkelanjutan sehingga diharapkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria koperasi berkualitas dapat terus meningkat sehingga mampu memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada Tahun 2025, persentase koperasi aktif tercatat sebesar 39,61 persen, meningkat 15,63 persen dibandingkan Tahun 2024.

Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif dari sebelumnya 431 koperasi menjadi 795 koperasi pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, serta memenuhi aspek kelembagaan dan administrasi koperasi. Hal tersebut turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha koperasi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan volume usaha. Selain itu, peningkatan jumlah koperasi aktif juga dipengaruhi oleh bertambahnya badan hukum koperasi baru di Kabupaten Cianjur.

Jika dilihat dari sisi kinerja usaha, laju pertumbuhan volume usaha koperasi di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 mencapai 11,77 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 7,49 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi di Kabupaten Cianjur semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.

Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Kabupaten Cianjur



Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Hal ini selaras dengan pelaksanaan program strategis pemerintah dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian, serta dukungan kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendorong percepatan aktivasi koperasi di daerah.

Meskipun demikian, perkembangan koperasi bersifat dinamis. Dalam praktiknya, koperasi secara kelembagaan maupun kegiatan usaha dapat berubah status menjadi tidak aktif. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara berturut-turut, tidak berjalannya kegiatan usaha, serta tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas, masih terdapat sejumlah hambatan, khususnya dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan volume usaha dan omzet koperasi sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar serta diminati oleh masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia koperasi, rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola dan ketentuan kelembagaan, serta belum optimalnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, akses koperasi terhadap permodalan dan pembiayaan formal masih relatif terbatas akibat lemahnya administrasi dan laporan keuangan. Kondisi ini juga diperparah dengan masih rendahnya kapasitas koperasi dalam melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan digitalisasi, serta partisipasi anggota yang belum optimal dalam mendukung aktivitas koperasi.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendorong terciptanya sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Cianjur. Dalam hal pemberdayaan dan pembinaan koperasi, perkembangan di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian secara berkelanjutan memfasilitasi koperasi agar memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga memperluas kesempatan bagi koperasi untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan dan pengembangan. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pemerataan penerima manfaat program di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan usaha koperasi.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemeriksaan kesehatan koperasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap standar kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan usaha, khususnya pada usaha simpan pinjam yang sehat dan akuntabel.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, seperti pelatihan dan uji kompetensi bagi pengelola koperasi, serta pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas sumber daya manusia koperasi agar mampu mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian serta standar tata kelola yang baik. Melalui pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil koperasi, diharapkan koperasi dapat semakin mandiri dalam mengelola usaha, mengambil keputusan organisasi, serta beradaptasi terhadap dinamika perkembangan ekonomi.

Di samping itu, melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun badan usaha yang tangguh dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

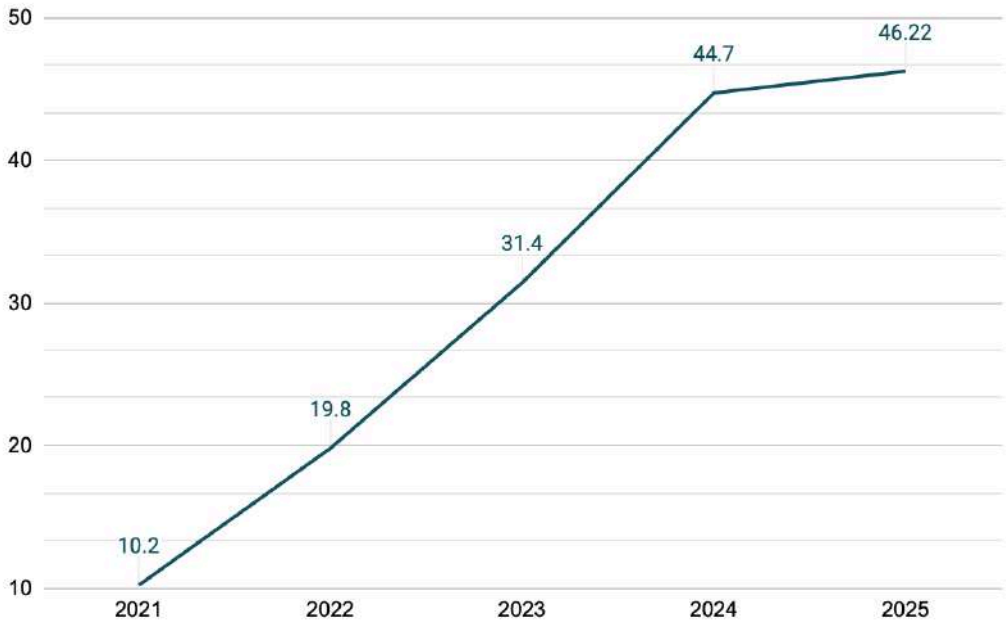
Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha



Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2025 mencapai 46,22 persen, dengan capaian kinerja sebesar 302,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan, yaitu sebesar 15,27 persen usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, realisasi persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2025 terhadap target tahun 2026 telah mencapai 273 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD yang telah ditetapkan.

Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha di Kabupaten Cianjur

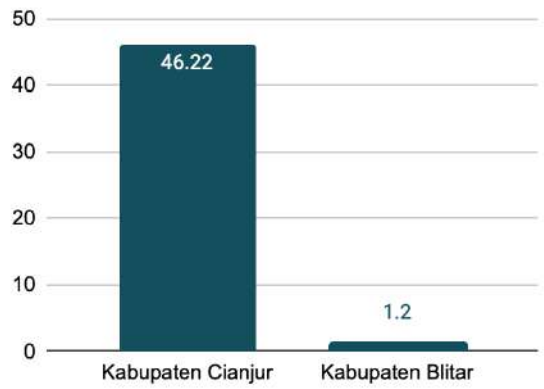


Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tercatat sebesar 10,2 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 19,8 persen pada tahun 2022 dan 31,4 persen pada tahun 2023. Peningkatan yang cukup tajam juga terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 44,7 persen, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 46,22 persen.

Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 46,22 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Blitar yang hanya sebesar 1,20 persen. Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa tingkat transformasi usaha mikro menjadi wirausaha di Kabupaten Cianjur relatif lebih baik.

Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha



Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2026

Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam mendorong usaha mikro untuk berkembang menjadi wirausaha. Kenaikan yang signifikan terutama terjadi pada periode 2021 hingga 2024, yang mengindikasikan efektivitas berbagai program dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha mikro. Meskipun pada tahun 2025 peningkatan relatif lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap menunjukkan keberlanjutan pertumbuhan dan stabilitas dalam pengembangan wirausaha di Kabupaten Cianjur.

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Cianjur, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagin) menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah

memperluas kesempatan bagi seluruh pelaku usaha mikro untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan dan pengembangan usaha.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemerataan penerima manfaat program di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur sehingga dapat menjadi stimulus bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang menjadi wirausaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Salah satu bentuk implementasi strategi tersebut adalah melalui pendampingan usaha yang terintegrasi, yang mencakup fasilitasi perizinan dan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikasi halal, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendampingan ini juga dilaksanakan secara daring untuk mengakomodasi pelaku usaha yang berada jauh dari lokasi pendampingan secara luring. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk, memperkuat kepercayaan pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha para pelaku wirausaha, khususnya pada sektor usaha mikro.

Selain itu, melalui program unggulan pengembangan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan alat usaha yang tepat guna kepada pelaku usaha mikro. Pelaksanaan program ini ditargetkan secara merata di berbagai wilayah sebagai bentuk pemerataan pemberdayaan sekaligus penguatan ekosistem usaha mikro di daerah. Dengan dukungan sarana produksi, pelatihan, serta pendampingan usaha, pelaku usaha mikro diharapkan mampu mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Cianjur masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya minat pelaku usaha mikro dalam memenuhi legalitas dasar usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang telah memiliki NIB namun belum terdata secara optimal sehingga belum menerima manfaat dari berbagai program yang dijalankan. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan ekosistem usaha, terutama dalam peningkatan produktivitas dan akses pemasaran.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah terus mendorong pendampingan pemenuhan legalitas usaha disertai dengan peningkatan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha bagi pengembangan bisnis.

Selain itu, berbagai fasilitas pendukung pengembangan usaha juga disediakan, antara lain melalui pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitasi sertifikasi produk, dukungan pemasaran, serta pemberian bantuan sarana usaha.

Di sisi lain, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Cianjur juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kondisi wilayah. Kabupaten Cianjur memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, sehingga banyak usaha mikro berada di lokasi yang sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur jalan, jarak antar wilayah yang cukup jauh, serta keterbatasan akses transportasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan usaha secara merata.

Selain faktor geografis, dinamika usaha mikro yang cenderung bersifat informal juga menjadi tantangan dalam pengelolaan data usaha. Banyak usaha mikro yang berpindah lokasi, berubah jenis usaha, atau belum memiliki legalitas usaha yang jelas sehingga data yang tersedia sering kali cepat berubah dan menjadi kurang akurat. Perubahan status usaha seperti usaha yang berhenti beroperasi, berganti jenis usaha, atau usaha baru yang muncul di masyarakat seringkali belum tercatat secara optimal. Hal ini menimbulkan kendala dalam penyusunan perencanaan program bantuan, pembinaan, maupun kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis data.

Melalui berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha yang telah dilakukan, diharapkan tingkat pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Cianjur dapat terus meningkat sehingga tercipta ekosistem kewirausahaan yang semakin kuat sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Secara umum, pemberdayaan dan pengembangan usaha di Kabupaten Cianjur menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat dinamika dalam pencapaian target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu terus memfasilitasi para pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Sasaran

Meningkatnya Nilai Investasi

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 berfokus pada peningkatan perekonomian daerah. Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu peningkatan nilai investasi di Kabupaten Cianjur, yang diukur melalui indikator persentase peningkatan nilai investasi.

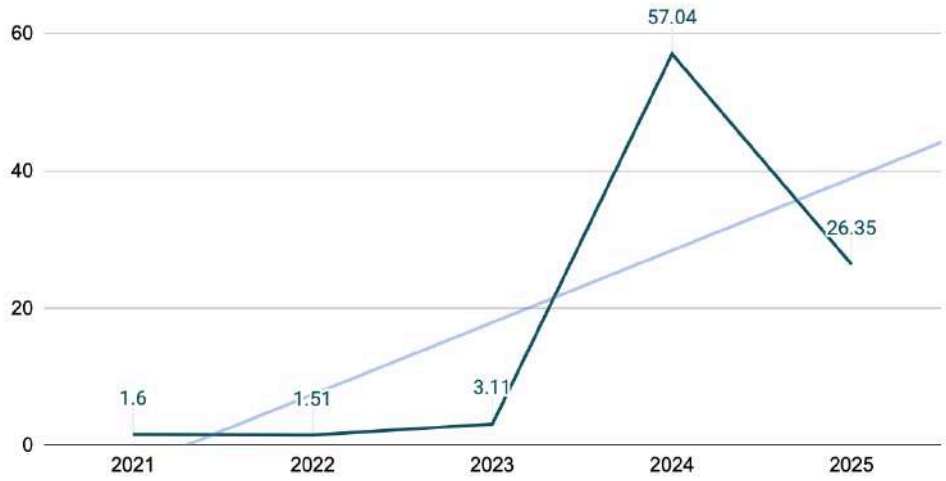


Pada tahun 2025, persentase peningkatan nilai investasi di Kabupaten Cianjur mencapai 26,35 persen, dengan capaian kinerja sebesar 2.635 persen dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu sebesar 1 persen. Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh hasil evaluasi penentuan target tahun 2025 yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi aktual tahun 2024, sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja Murni 2025 masih mengacu pada target yang tercantum dalam dokumen RPJMD.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, realisasi persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2025 telah mencapai 527 persen terhadap target tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut telah melampaui target akhir RPJMD secara signifikan, meskipun penetapan target tahunan belum sepenuhnya mencerminkan dinamika perkembangan investasi terkini.

Persentase peningkatan nilai investasi Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 belum dapat diperbandingkan secara langsung dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan dan keseragaman data antar daerah, baik dalam hal metode perhitungan, periode pelaporan, maupun kelengkapan data yang dipublikasikan.

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Cianjur



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026 (diolah)

Persentase peningkatan nilai investasi Kabupaten Cianjur selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, persentase peningkatan nilai investasi tercatat sebesar 1,6 persen dan relatif stabil pada tahun 2022 sebesar 1,51 persen. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 3,11 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja investasi daerah.

Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 57,04 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya lonjakan realisasi investasi yang cukup tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan minat investor, percepatan perizinan, maupun realisasi proyek investasi dalam skala besar. Pada tahun 2025, persentase peningkatan nilai investasi tercatat sebesar 26,35 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dibandingkan periode awal.

Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja investasi di Kabupaten Cianjur dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat fluktuasi yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan investasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja investasi di Kabupaten Cianjur dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat fluktuasiDalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Cianjur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendorong dengan meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Cianjur. Nilai realisasi penanaman modal pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.576.429.835.506. Berdasarkan data kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bahwa struktur investasi daerah didominasi oleh PMA dengan nilai kontribusi sebesar Rp3.101.566.910.001 atau setara dengan 86,72 persen dari total realisasi investasi. Sementara itu, PMDN memberikan kontribusi sebesar Rp474.862.925.505 atau 13,28 persen, yang tetap menunjukkan peran signifikan pelaku usaha dalam negeri dalam mendukung aktivitas penanaman modal. yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan investasi di masa mendatang.



Dari sisi dampak ketenagakerjaan, realisasi investasi tersebut telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.753 orang. Hal ini mencerminkan bahwa masuknya investasi, khususnya yang bersumber dari PMA, tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat sosial melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Laju investasi menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun 2024 ke tahun 2025, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara Nasional, nilai realisasi investasi tumbuh dari Rp1.714,2 triliun menjadi Rp1.931,2 triliun. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang terjaga dan meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia dalam skala makro.

Sejalan dengan tren nasional, Provinsi Jawa Barat terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi investasi utama di Indonesia. Realisasi investasi di wilayah ini mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni dari Rp251,14 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp296,8 triliun pada tahun 2025. Kontribusi Jawa Barat tetap menjadi pilar penting bagi pencapaian target investasi nasional.

Peningkatan yang membanggakan juga terlihat di level daerah, khususnya di Kabupaten Cianjur. Meskipun secara nominal lebih kecil dibandingkan angka provinsi, pertumbuhan persentase di Cianjur cukup impresif. Nilai investasi di Kabupaten Cianjur naik dari Rp2,8 triliun menjadi Rp3,5 triliun dalam kurun waktu satu tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi mulai terdistribusi dengan baik ke wilayah tingkat kabupaten, yang diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi lokal dan pembukaan lapangan kerja baru.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat, Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Cianjur menempati peringkat kelima sebagai daerah dengan realisasi investasi asing terbesar di Jawa Barat, dengan nilai PMA sebesar Rp3,1 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PMA Kabupaten Purwakarta sebesar Rp2,89 triliun dan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp2,71 triliun.

Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Cianjur berada pada peringkat ke-22 di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar Rp474 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PMDN daerah masih relatif terbatas dibandingkan dengan wilayah lain di tingkat provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Sukabumi yang mencapai Rp2,4 Triliun dan Kabupaten Majalengka sebesar Rp1,7 Triliun, sehingga diperlukan upaya penguatan daya tarik investasi domestik melalui peningkatan kemudahan berusaha, promosi peluang investasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah.

Secara keseluruhan, total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Cianjur menempati peringkat ke-15 di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp3,5 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total realisasi investasi Kabupaten Majalengka sebesar Rp3,36 triliun dan Kabupaten Indramayu sebesar Rp3,35 triliun. Dengan demikian, posisi Kabupaten Cianjur menunjukkan kinerja investasi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kedua daerah tersebut pada periode yang sama.

Dilihat dari sumber modalnya, terjadi dinamika yang menarik dalam struktur investasi di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2024, aktivitas investasi didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyumbang angka sebesar Rp2,4 Triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 382 Miliar. Hal ini menunjukkan kuatnya kepercayaan pelaku usaha lokal dalam melakukan ekspansi bisnis di wilayah Cianjur pada periode tersebut.

Namun, memasuki tahun 2025, terjadi pergeseran peta investasi yang sangat progresif. Kabupaten Cianjur berhasil menarik minat investor global secara masif, yang ditandai dengan lonjakan tajam Penanaman Modal Asing (PMA) hingga menyentuh angka Rp3,1 Triliun. Meskipun pada saat yang sama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terkoreksi menjadi Rp474 Miliar, dominasi PMA di tahun 2025 menjadi indikator kuat bahwa Kabupaten Cianjur telah naik kelas menjadi destinasi investasi yang kompetitif di tingkat internasional. Peningkatan total investasi ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Di sisi lain, dinamika realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang fluktuatif dipengaruhi oleh variasi kemampuan ekspansi pelaku usaha domestik, keterbatasan kapasitas permodalan, serta sensitivitas investasi domestik terhadap perubahan kondisi ekonomi dan permintaan pasar. Selain faktor tersebut, pergeseran prioritas investasi pelaku usaha lokal dan tingkat kesiapan proyek dalam negeri juga berpengaruh terhadap variasi nilai realisasi PMDN dari tahun ke tahun. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan dominasi PMA pada periode akhir sekaligus menjelaskan fluktuasi kontribusi PMDN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian kinerja investasi di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung menunjang iklim penanaman modal. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan terpadu dan digitalisasi layanan memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan proses investasi dan peningkatan kepastian berusaha. Kegiatan promosi peluang investasi daerah, penyusunan profil potensi investasi sektoral, serta fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal turut memperkuat daya tarik daerah bagi penanaman modal, khususnya dalam mendorong peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyediaan data peluang investasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pertumbuhan investasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mendorong peningkatan investasi daerah serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan pengawasan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan usaha, serta penguatan promosi dan kebijakan investasi.

Dalam aspek pengawasan penanaman modal, DPMPTSP melaksanakan pengawasan terhadap 73 pelaku usaha bersama tim teknis dengan melibatkan perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku, sehingga kegiatan investasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Selain itu, DPMPTSP juga melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal kepada pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perizinan, kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta tata kelola usaha yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng tenaga ahli dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh 85 pelaku usaha yang berasal dari asosiasi pengusaha dan pelaku UMKM. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih tertib dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan investasi daerah.

Upaya peningkatan investasi juga dilakukan melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, fasilitasi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Pada Tahun 2025, sebanyak 20 pelaku usaha telah difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan usahanya. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kabupaten Cianjur.

Dalam rangka memperluas peluang investasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melaksanakan berbagai kegiatan promosi investasi yang diinisiasi oleh DPMPTSP. Kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan pameran promosi investasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), serta asosiasi pengusaha di Kabupaten Cianjur. Selain itu, dilakukan pula pembuatan video promosi investasi yang berkolaborasi dengan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (DPKHP), Disbudpar, dan DTPHP, serta penyusunan Buku Profil Promosi Investasi yang disusun bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Berbagai media promosi tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cianjur.

DPMPTSP juga melaksanakan pengelolaan, penyajian, dan pemanfaatan data serta informasi perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pemanfaatan sistem berbasis elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, memperkuat transparansi proses perizinan, serta mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan perizinan di Kabupaten Cianjur.

Sebagai bentuk penguatan dukungan kebijakan investasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga menyusun kebijakan terkait Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang disusun melalui kolaborasi dengan 19 perangkat daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil yang melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) serta DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh 20 pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi usaha, memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha kecil, serta mendorong terciptanya ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.

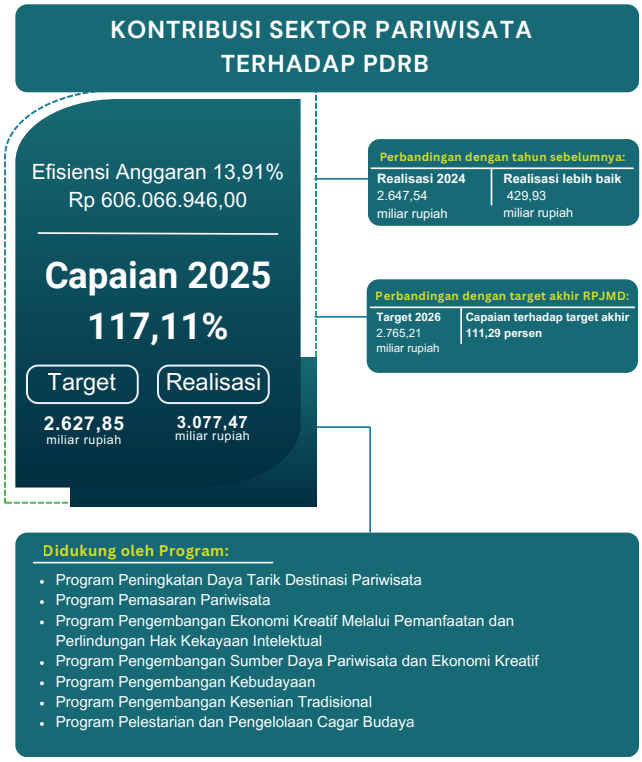
Di sisi lain, beberapa kendala programatik turut memengaruhi belum optimalnya pencapaian kinerja pada periode tertentu. Keterbatasan pengembangan kawasan investasi yang siap huni, belum meratanya dukungan infrastruktur ekonomi, serta kapasitas pelaku usaha domestik yang masih bervariasi menjadi faktor yang memengaruhi fluktuasi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain itu, efektivitas promosi investasi yang belum sepenuhnya terfokus pada proyek siap investasi dan keterbatasan integrasi data lintas sektor juga berdampak pada kecepatan realisasi investasi. Oleh karena itu, penguatan program pengembangan kawasan prioritas investasi, peningkatan kualitas promosi berbasis proyek, optimalisasi pelayanan perizinan, serta pembinaan pelaku usaha lokal menjadi langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja secara berkelanjutan.

Sasaran

Berkembangnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 berfokus pada peningkatan perekonomian daerah. Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur. Perkembangan sektor tersebut diukur melalui indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 3.077,47 miliar rupiah berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yaitu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 sebesar 117,11 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 2.627,85 miliar rupiah.



Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2025 telah mencapai 111,29 persen terhadap target tahun 2026. Artinya, capaian kinerja indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD sebelum berakhirnya periode perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur telah berjalan secara efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2026

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengembangan daya tarik destinasi melalui penciptaan objek wisata baru, revitalisasi kawasan wisata, serta inovasi atraksi berbasis wisata alam, budaya, buatan, dan event menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, pemanfaatan promosi dan digital marketing yang efektif melalui media sosial, influencer, serta platform perjalanan turut meningkatkan kesadaran dan minat berkunjung wisatawan. Penyelenggaraan berbagai event dan festival, seperti festival budaya dan kuliner, juga mampu menarik lonjakan kunjungan dalam periode tertentu. Faktor lainnya meliputi peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi, ketersediaan amenitas seperti hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya, serta kondisi keamanan dan stabilitas yang memberikan rasa nyaman bagi wisatawan. Dukungan kebijakan pemerintah yang mempermudah investasi dan pengembangan ekonomi kreatif, serta tren perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertarik pada wisata alam, budaya, dan konsep “healing” juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

Meskipun demikian, dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan masih terdapat berbagai hambatan dan permasalahan. Keterbatasan infrastruktur seperti kondisi jalan yang belum optimal, transportasi umum yang terbatas, kapasitas parkir yang sempit, serta fasilitas umum dan sanitasi yang belum memadai dapat menurunkan minat wisatawan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya dalam hal pelayanan (hospitality) dan kemampuan bahasa asing, masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Faktor eksternal seperti potensi bencana alam, isu keamanan, dan kondisi sosial politik juga dapat memengaruhi tingkat kunjungan. Permasalahan lainnya adalah risiko overcrowding, pengelolaan sampah, dan degradasi lingkungan yang dapat merusak citra destinasi, serta masih terbatasnya informasi resmi dan terpercaya mengenai destinasi wisata yang dapat menimbulkan keraguan bagi calon wisatawan.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam upaya mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Cianjur semula merencanakan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARKAB). Namun, pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat terserap akibat kendala administratif dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

Sesuai ketentuan dari BPBJ, durasi minimal pengerjaan jasa konsultansi untuk dokumen perencanaan strategis seperti RIPPARKAB ditetapkan selama 150 hari kalender guna menjamin kualitas kajian yang komprehensif, mulai dari survei lapangan, analisis data, hingga uji publik. Sementara itu, instruksi tersebut diterima pada saat sisa waktu tahun anggaran sudah tidak mencukupi untuk memenuhi durasi minimal yang dipersyaratkan, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) hingga saat ini belum terbit, sehingga penyusunan RIPPARKAB juga belum dapat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hambatan dalam peningkatan kunjungan wisatawan mencakup aspek infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan destinasi, promosi, serta faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan agar sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur dapat tumbuh secara optimal, berdaya saing, dan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan investasi industri kreatif. Pertumbuhan investasi industri kreatif merupakan peningkatan nilai, jumlah, dan kualitas penanaman modal, baik dari pemerintah, swasta, maupun investor lainnya, ke dalam sektor berbasis kreativitas, inovasi, keterampilan, dan kekayaan intelektual. Dengan demikian, pertumbuhan investasi ini tidak hanya mencerminkan peningkatan modal semata, tetapi juga menjadi indikator berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, produktif, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, realisasi investasi di sektor industri kreatif di Kabupaten Cianjur tercatat mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Capaian ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain potensi lokal yang kuat, dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, akses pasar, serta kolaborasi antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Sinergi dari berbagai faktor tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri kreatif.

Salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan investasi adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif, terampil, dan inovatif. Melalui pelatihan, pendidikan keterampilan, dan pengembangan kompetensi, produktivitas serta daya saing pelaku usaha kreatif dapat ditingkatkan sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan investor. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan berbasis ekonomi kreatif, khususnya melalui sub kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan kriya di Kecamatan Warungkondang dan kawasan Gunung Padang. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 14–15 Mei 2025 di Aula Desa Tegallega dan Budaya Pandanwangi, Kecamatan Warungkondang, dengan narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta lembaga pelatihan seperti LKP Batik Simkuring dan LKP CHICHI Warungkondang. Peserta kegiatan ini merupakan pelaku usaha pemula di bidang kriya, khususnya penganyaman dan merangkai bunga, yang berasal dari dua desa di wilayah tersebut dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.

Kegiatan pelatihan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 26–27 November 2025 di Aula Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, dengan narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta LKP CHICHI Warungkondang. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan terkait ekonomi kreatif yang mencakup 17 subsektor, khususnya pada bidang kriya dan strategi pemasaran produk. Peserta kegiatan ini juga merupakan pelaku usaha pemula di bidang kriya dengan jumlah sebanyak 25 orang.

Selain itu, dalam sub kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melaksanakan pelatihan digital marketing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam memasarkan produk atau jasa melalui media digital dan internet, sehingga dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur.

Realisasi investasi di sektor industri kreatif di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu faktor pendorong dalam peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, terdapat faktor vital yang tidak kalah penting, yaitu tenaga kerja industri kreatif. Tenaga kerja industri kreatif merupakan sumber daya manusia yang bekerja pada sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, ide, inovasi, bakat, dan keterampilan sebagai faktor utama dalam proses produksi barang dan jasa. Berbeda dengan sektor manufaktur atau ekstraktif yang lebih mengandalkan mesin dan sumber daya alam, sektor ini menempatkan kemampuan intelektual dan imajinasi sebagai modal utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Selain itu, tenaga kerja industri kreatif juga berperan dalam menghasilkan produk yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai estetika, budaya, dan identitas lokal.

Secara karakteristik, tenaga kerja industri kreatif memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta mampu mengolah potensi budaya dan kearifan lokal menjadi produk yang berdaya saing. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup keterampilan teknis (hard skills) seperti desain, editing, pemrograman, dan teknik produksi, serta keterampilan non-teknis (soft skills) seperti komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, dan kewirausahaan. Dalam era digital, penguasaan teknologi informasi dan pemasaran digital juga menjadi aspek penting agar tenaga kerja mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Dari sisi ekonomi, tenaga kerja industri kreatif berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan investasi, serta peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain itu, tenaga kerja di sektor ini juga berperan dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui inovasi produk berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, tenaga kerja industri kreatif tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan budaya yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja pada sektor industri kreatif di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 2.512 orang. Capaian ini didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan keterampilan teknis, seperti desain, produksi, editing, dan pemrograman, serta keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kreativitas, manajemen, dan kewirausahaan. Selain itu, pelatihan berbasis kompetensi, workshop, sertifikasi profesi, serta inkubasi bisnis kreatif turut berperan dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di sektor ini.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pelaku industri pariwisata serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Peserta kegiatan terdiri dari anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) sebanyak 10 orang dengan skema Pemandu Wisata Lintas Daerah (overland), serta pelaku pariwisata bidang perhotelan sebanyak 10 orang dengan skema Food and Beverage Service, dengan penyelenggara sertifikasi oleh AMA Institute.

Hasil yang dicapai dari kegiatan sertifikasi kompetensi ini antara lain meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata, tersedianya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku, serta meningkatnya mutu pelayanan dan daya saing sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur.

Sasaran

Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian

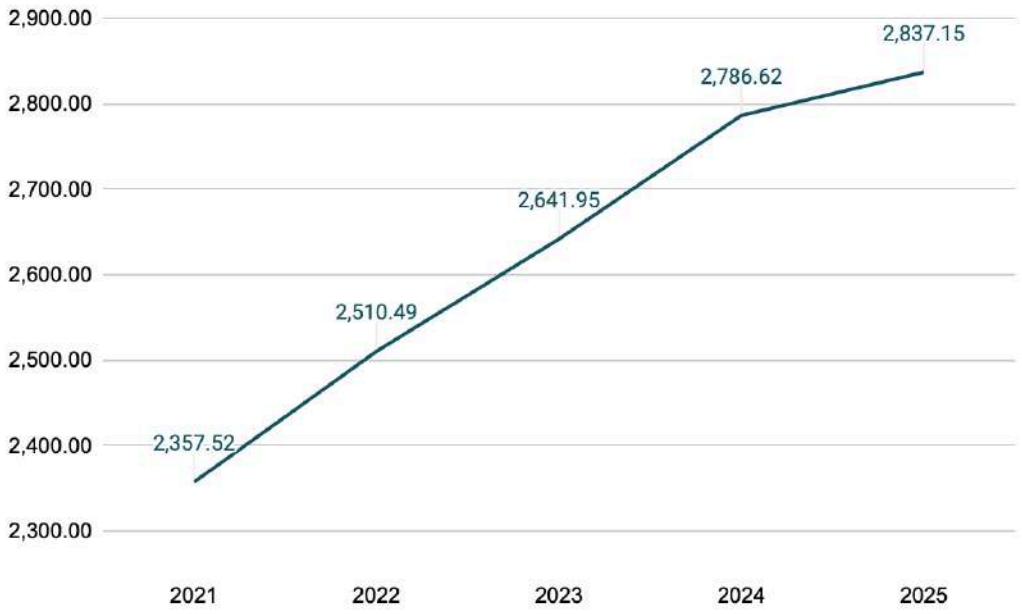
Arah pembangunan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 difokuskan pada peningkatan perekonomian daerah, dengan sasaran strategis meningkatnya PDRB sektor perindustrian yang diukur melalui indikator PDRB sektor perindustrian.



Nilai PDRB sektor perindustrian pada tahun 2025 mencapai 2.837,25 miliar rupiah berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 114,64 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Cianjur mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, nilai PDRB sektor perindustrian pada tahun 2025 telah mencapai 74,04 persen terhadap target tahun 2026. Mengingat periode RPJMD 2021–2026 secara efektif berakhir pada tahun 2025, maka capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD belum dapat tergambarkan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencakup satu tahun penuh hingga 2026. Dengan demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan sektor perindustrian agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal.

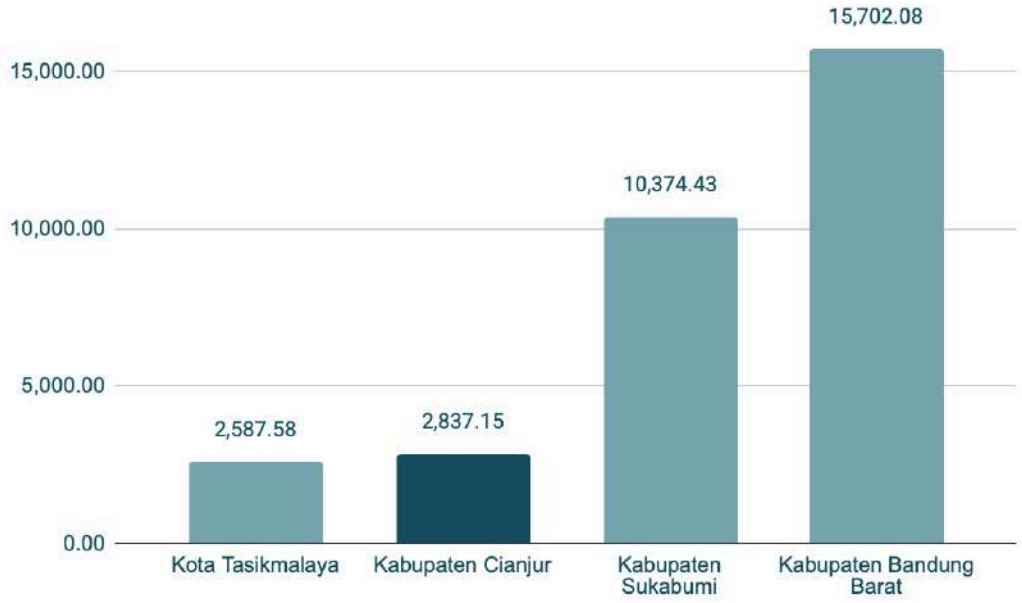
PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Cianjur



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

PDRB sektor perindustrian Kabupaten Cianjur selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor perindustrian tercatat sebesar 2.357,52 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2.510,49 miliar rupiah pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 2.641,95 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 2.786,62 miliar rupiah, serta terus mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 2.837,15 miliar rupiah. Tren positif ini menunjukkan bahwa sektor perindustrian di Kabupaten Cianjur terus berkembang dan memberikan kontribusi yang stabil terhadap perekonomian daerah.

PDRB Sektor Perindustrian Menurut Harga Konstan Tahun 2025



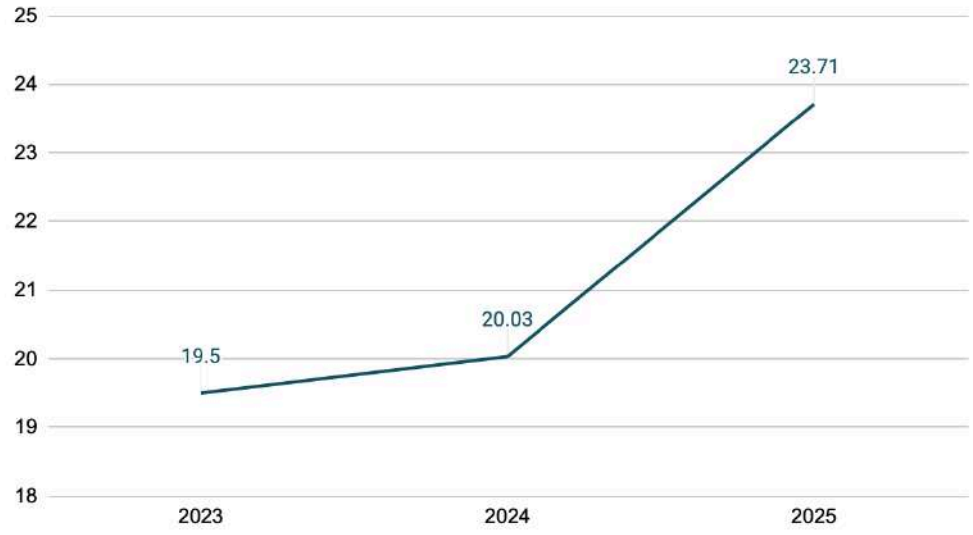
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Apabila dibandingkan dengan daerah lain pada tahun 2025, nilai PDRB sektor perindustrian Kabupaten Cianjur sebesar 2.837,15 miliar rupiah masih berada di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencapai 10.374,43 miliar rupiah dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 15.702,08 miliar rupiah. Namun demikian, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Tasikmalaya yang sebesar 2.587,58 miliar rupiah.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Cianjur dalam sektor perindustrian masih berada pada tingkat menengah di antara daerah pembanding. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang untuk meningkatkan kontribusi sektor perindustrian melalui penguatan investasi, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan daya saing industri lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam upaya meningkatkan rasio PDRB sektor industri pengolahan dengan berfokus pada meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan kecil menengah yang ada di Kabupaten Cianjur. Laju pertumbuhan industri pengolahan kecil menengah di Kabupaten Cianjur mengalami tren peningkatan dari tahun 2023 yang semula 19,50 persen kini pada tahun 2025 berhasil mencapai 23,71 persen.

Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Kecil Menengah Kabupaten Cianjur



Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Tren peningkatan ini didorong oleh penguatan kemitraan dengan ritel modern serta optimalisasi teknologi tepat guna. Pencapaian tersebut juga didukung oleh sinkronisasi program yang lebih terfokus, di mana pelaksanaan di tahun 2026 tidak lagi menggunakan pembagian lokus per OPD seperti tahun 2022, melainkan mengacu pada Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Cianjur tahun 2025.

Namun demikian, peningkatan volume produksi Industri Kecil Menengah (IKM) masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, terutama bagi IKM yang sedang melakukan ekspansi usaha. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku juga sempat memengaruhi margin keuntungan pelaku usaha, sehingga diperlukan strategi pengelolaan bahan baku dan manajemen stok yang lebih baik. Di sisi lain, pergeseran kebijakan lokus pembangunan dari pendekatan berbasis instansi menjadi berbasis wilayah desa/kelurahan menuntut setiap Perangkat Daerah untuk lebih cermat dalam memetakan kebutuhan spesifik IKM di wilayah prioritas, sehingga intervensi program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya melalui pendekatan jemput bola dalam fasilitasi sertifikasi serta penguatan basis data IKM secara terintegrasi. Penguatan database ini bertujuan untuk memudahkan proses pemetaan kebutuhan bantuan, khususnya dalam penyaluran alat produksi bagi pelaku IKM. Ke depan, pemerintah daerah juga berfokus pada upaya memastikan bahwa peningkatan kuantitas produksi dapat diimbangi dengan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mengimplementasikan Program Pengembangan Wilayah Industri melalui penguatan industri potensial. Program ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan pelatihan keterampilan teknis dengan pendampingan manajerial, sehingga pelaku IKM tidak hanya memiliki kemampuan dalam proses produksi, tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka memperluas akses pasar bagi produk IKM, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan E-Katalog lokal serta penyelenggaraan berbagai pameran tematik sebagai sarana promosi produk unggulan daerah. Upaya ini menjadi salah satu katalisator penting dalam pencapaian target kinerja tahun 2025. Langkah tersebut turut diperkuat dengan pelaksanaan pelatihan peningkatan daya saing produk, yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi pemanfaatan teknologi industri melalui penyediaan bantuan alat produksi yang lebih efisien guna menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kapasitas produksi IKM.

Kebijakan dinas juga diarahkan pada penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi yang mendukung kemudahan perizinan usaha, khususnya bagi industri rumah tangga.

Kebijakan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya jumlah IKM baru yang terdata dalam sistem daerah. Upaya tersebut juga didukung melalui intensifikasi pelatihan penggunaan E-Katalog, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memperluas akses produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, pelatihan peningkatan daya saing secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperkuat kemampuan pelaku IKM dalam manajemen produksi, pengendalian kualitas, serta pengembangan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat di pasar formal.

Melalui kesinambungan berbagai program strategis tersebut, ekosistem industri di Kabupaten Cianjur diharapkan dapat berkembang menjadi lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung industri diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor non-pertanian serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat secara lebih luas.

Sasaran

Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 difokuskan pada peningkatan perekonomian daerah, salah satunya melalui sasaran strategis meningkatnya PDRB sektor perdagangan yang diukur dengan indikator PDRB sektor perdagangan.

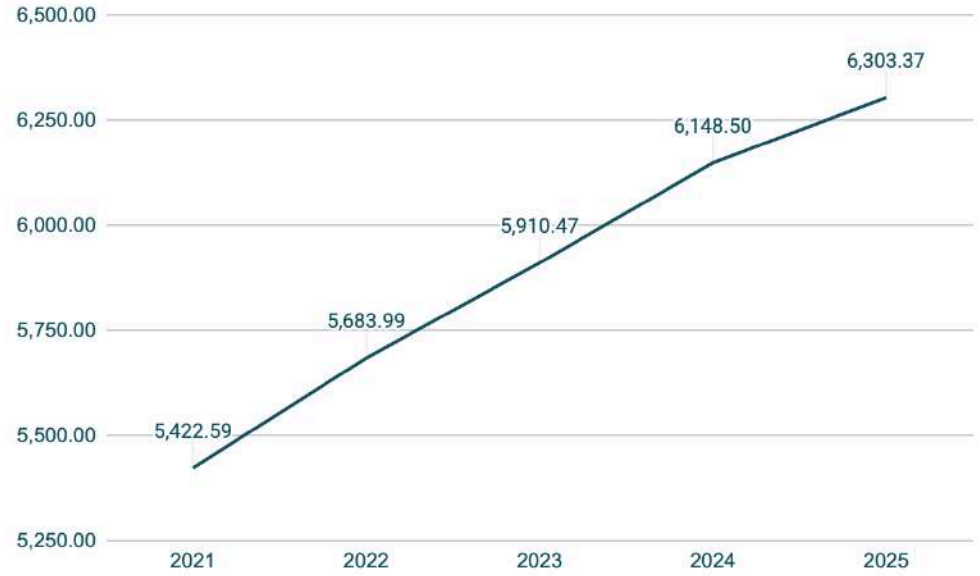


Nilai PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 6.303,37 miliar rupiah berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 sebesar 88,86 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor perdagangan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, nilai PDRB sektor perdagangan pada tahun 2025 telah mencapai 84,91 persen terhadap target tahun 2026. Artinya, realisasi tahun 2025 belum mencapai target akhir perencanaan yang ditetapkan sebesar 7.422,86 miliar rupiah.

Namun demikian, mengingat periode RPJMD 2021–2026 secara efektif berakhir pada tahun 2025, maka capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD belum dapat tergambarkan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencakup satu tahun penuh hingga 2026. Dengan demikian, masih diperlukan upaya penguatan sektor perdagangan untuk mendorong pencapaian target secara lebih optimal pada periode perencanaan selanjutnya.

PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Cianjur



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

PDRB sektor perdagangan Kabupaten Cianjur selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor perdagangan tercatat sebesar 5.422,59 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 5.683,99 miliar rupiah pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 5.910,47 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 6.148,50 miliar rupiah, serta terus mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 6.303,37 miliar rupiah.

Meskipun menunjukkan tren positif, laju pertumbuhan pada tahun 2025 relatif lebih moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan hanya 2,52 persen dibandingkan dengan tahun 2024 laju pertumbuhannya mencapai angka 4,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor perdagangan terus berkembang, terdapat perlambatan pertumbuhan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga momentum peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

PDRB Sektor Perdagangan Menurut Harga Konstan Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Apabila dibandingkan dengan daerah lain pada tahun 2025, nilai PDRB sektor perdagangan Kabupaten Cianjur sebesar 6.303,37 miliar rupiah berada di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencapai 10.060,34 miliar rupiah. Namun demikian, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bandung Barat sebesar 4.927,54 miliar rupiah dan Kota Tasikmalaya sebesar 4.256,36 miliar rupiah.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Cianjur dalam sektor perdagangan berada pada tingkat menengah di antara daerah pembanding. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan melalui penguatan aktivitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, serta pengembangan jaringan distribusi dan pasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.

Upaya peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara terintegrasi melalui beberapa program strategis yang saling mendukung. Salah satu fondasi utama adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang mendorong pelaku usaha untuk memiliki legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kepemilikan NIB memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai fasilitasi pemerintah. Legalitas usaha menjadi prasyarat penting bagi pelaku usaha agar dapat berkembang secara formal, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem perdagangan daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan Nilai PDRB sektor perdagangan.

Peningkatan daya saing pelaku usaha juga diperkuat melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan bertujuan untuk memperlancar arus barang, menekan biaya distribusi, serta memperluas jangkauan pemasaran produk pelaku usaha. Sementara itu, upaya stabilisasi harga dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan perdagangan serta mampu menjaga keberlanjutan usahanya di tengah dinamika pasar.

Selain itu, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan pasar terhadap produk yang diperdagangkan. Melalui penerapan standar, pengawasan, serta perlindungan konsumen, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan mutu barang dan menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab. Sinergi berbagai program tersebut diarahkan untuk membentuk pelaku usaha perdagangan yang legal, efisien, berkualitas, dan adaptif terhadap persaingan pasar, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Nilai PDRB sektor perdagangan serta pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan tercermin dalam LKIP Kabupaten Cianjur.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat legalitas pelaku usaha perdagangan, khususnya di pasar tradisional. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usaha yang dijalankan masih bersifat informal dan belum memperoleh pengakuan negara secara memadai. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses pelaku usaha terhadap fasilitas pembiayaan, pasar modern, serta peluang kemitraan yang lebih luas. Rendahnya legalitas usaha juga menyebabkan keterbatasan partisipasi pelaku usaha dalam rantai pasok formal dan berbagai program pengembangan usaha yang diselenggarakan pemerintah.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi rendahnya tingkat legalitas usaha adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat kepemilikan NIB. Banyak pelaku usaha masih memandang proses pembuatan NIB hanya sebagai kewajiban administratif, tanpa menyadari bahwa legalitas usaha memberikan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, pendampingan, serta peluang untuk berpartisipasi dalam program pemerintah maupun pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya tingkat sosialisasi dan literasi mengenai sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya memahami manfaat strategis dari legalitas usaha dalam meningkatkan reputasi dan daya saing usaha.

Hambatan lain yang dihadapi adalah keterbatasan literasi digital dan kemampuan teknis dalam mengakses sistem OSS, khususnya bagi pelaku usaha mikro, pedagang lanjut usia, serta pelaku usaha di wilayah perdesaan. Proses pendaftaran NIB melalui OSS memerlukan penggunaan perangkat elektronik serta pemahaman terhadap sistem digital, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha yang kurang terbiasa dengan teknologi. Keterbatasan literasi digital tersebut menyebabkan rendahnya inisiatif pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran NIB secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan pendampingan dan pelatihan teknis yang lebih intensif.

Di sisi lain, keterbatasan pendampingan dan pendekatan langsung kepada pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat luas wilayah serta besarnya jumlah pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Banyak pedagang tradisional memerlukan asistensi secara langsung dalam memahami proses perizinan, menyiapkan dokumen, hingga mengakses sistem OSS secara efektif. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga pendamping dengan kebutuhan pelaku usaha menyebabkan proses legalisasi usaha belum berjalan secara merata, terutama di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, penguatan pendekatan jemput bola dan peningkatan intensitas pendampingan menjadi langkah penting untuk mempercepat peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan serta kontribusinya terhadap Nilai PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Cianjur.

Sasaran

Terwujudnya Infrastruktur Dasar Daerah yang Memadai

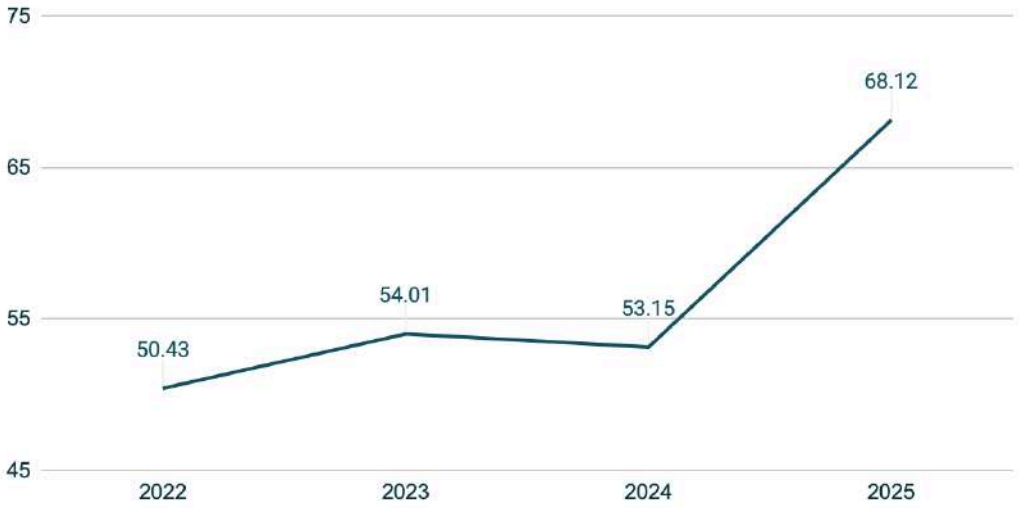
Infrastruktur dasar daerah yang memadai merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan suatu daerah, baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, maupun sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 berfokus pada upaya mewujudkan infrastruktur dasar daerah yang memadai.



Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 68,12 poin dengan capaian kinerja sebesar 117,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 57,84 poin. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 telah mencapai 115,04 persen terhadap target tahun 2026. Artinya, capaian kinerja indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD sebelum berakhirnya periode perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur daerah telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Cianjur



Sumber: Bapperida, 2026

Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 50,43 poin dan meningkat menjadi 54,01 poin pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 53,15 poin. Kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2025 indeks meningkat signifikan menjadi 68,12 poin.

Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2025 menunjukkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur terus mengalami perbaikan, meskipun masih terdapat dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga konsistensi pembangunan ke depan.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan daerah lain, Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Cianjur belum dapat diperbandingkan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan data yang seragam antar daerah, baik dari sisi metode pengukuran, periode pelaporan, maupun publikasi data. Oleh karena itu, analisis kinerja indikator ini lebih difokuskan pada perkembangan internal daerah dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya dalam mewujudkan infrastruktur dasar daerah yang memadai, salah satunya melalui peningkatan pelayanan infrastruktur jalan kabupaten yang terhubung dengan pusat-pusat kegiatan. Upaya ini bertujuan untuk mendukung konektivitas wilayah serta meningkatkan aksesibilitas jalur logistik dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pada tahun 2025, persentase aksesibilitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 78,70 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan telah berada dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat sekitar 21,30 persen yang perlu ditingkatkan kualitasnya ke depan.

Peningkatan kondisi jalan tersebut didorong oleh realisasi kinerja pada berbagai sub kegiatan, seperti rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pelebaran jalan menuju standar, serta rehabilitasi jalan yang melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan survei kondisi jalan secara rutin setiap tahun turut mendukung pemutakhiran data kondisi jalan secara aktual, sehingga perencanaan penanganan menjadi lebih tepat sasaran. Dari sisi pendanaan, program ini didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), DBH Sawit, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik, di antaranya penggantian 3 unit jembatan, rekonstruksi jalan sepanjang 13,89 km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 3,7 km, serta pelebaran jalan menuju standar sepanjang 32,313 km. Selain itu, dilakukan rehabilitasi jalan sepanjang 33,61 km dan pemeliharaan rutin jalan dengan total panjang mencapai 695,47 km. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur.

Dalam pelaksanaannya, program penyelenggaraan jalan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain penurunan masa manfaat jalan akibat faktor usia, kondisi cuaca, serta tingginya beban lalu lintas kendaraan dengan muatan berlebih yang menyebabkan kerusakan pada lapisan jalan. Selain itu, sistem drainase yang belum optimal mengakibatkan genangan air yang dapat meresap ke dalam struktur jalan dan mempercepat kerusakan. Faktor cuaca hujan serta tingginya mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, juga kerap menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dilakukan sejumlah langkah strategis, antara lain penyesuaian penggunaan material konstruksi yang lebih kuat, seperti campuran hotmix dan beton pada ruas jalan dengan beban berat. Selain itu, dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal. Dalam menghadapi kendala cuaca dan tingginya mobilitas masyarakat, strategi yang dilakukan antara lain penambahan jam kerja serta peningkatan jumlah tenaga kerja di lokasi proyek, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain peningkatan kondisi jalan untuk mendukung aksesibilitas, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mendorong peningkatan layanan infrastruktur irigasi. Pada tahun 2025, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Cianjur mencapai 59,36 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh jaringan irigasi telah berfungsi dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan irigasi secara menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan layanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pada tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan bangunan perkuatan tebing sepanjang 0,445 km, pembangunan tanggul sungai sepanjang 0,0497 km, serta pembangunan 1 unit embung dan penampung air. Selain itu, dilakukan rehabilitasi embung dan penampungan air sebanyak 5 unit serta rehabilitasi bendung irigasi sebanyak 5 unit.

Upaya peningkatan jaringan irigasi juga dilakukan melalui peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 1,145 km dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 8,863 km. Di samping itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dilaksanakan dengan cakupan panjang mencapai 133,3 km, guna menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi yang ada.

Tidak hanya berfokus pada aspek fisik, penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian melalui peningkatan kapasitas 40 lembaga pengelola irigasi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, dalam mendukung pengelolaan tata air secara lebih komprehensif, dilakukan rehabilitasi terhadap 5 sistem drainase perkotaan serta penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase perkotaan.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selaras dengan tata ruang melalui upaya peningkatan akses serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman. Pada tahun 2025, cakupan lingkungan permukiman yang didukung oleh PSU di Kabupaten Cianjur mencapai 37,33 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya alokasi anggaran yang bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang berperan dalam pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang perumahan turut berkontribusi dalam meningkatkan cakupan layanan PSU di kawasan permukiman.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Luasnya wilayah Kabupaten Cianjur menyebabkan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan belum dapat dilakukan secara merata. Selain itu, kualitas jalan lingkungan atau jalan setapak yang dibangun kerap mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Penggunaan metode konstruksi beton, meskipun lebih kuat, juga berdampak pada terbatasnya panjang jalan yang dapat dibangun dibandingkan dengan metode hotmix.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan mengidentifikasi lokasi-lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan jalan lingkungan, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Cianjur. Selain itu, peningkatan kualitas pelaksanaan pekerjaan juga dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaksana kegiatan, sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur permukiman dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 difokuskan pada upaya mewujudkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

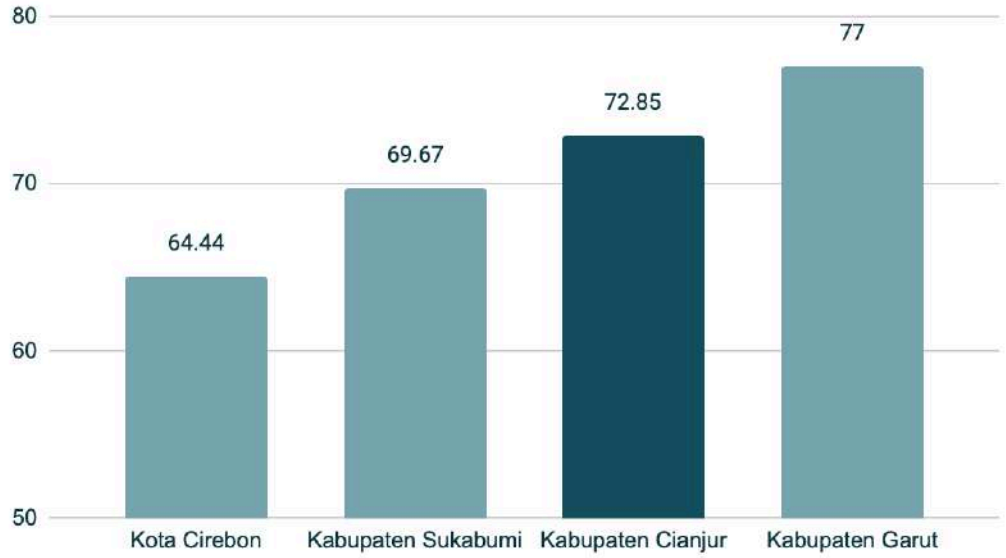
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 72,85 poin, dengan capaian kinerja sebesar 107,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur.



Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 telah mencapai 98,55 persen terhadap target tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target akhir yang ditetapkan sebesar 73,92 poin. Namun demikian, mengingat periode RPJMD 2021–2026 secara efektif berakhir pada tahun 2025, maka capaian terhadap target akhir RPJMD belum dapat tergambarkan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencakup satu tahun penuh hingga 2026. Dengan demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tren dari tahun sebelumnya terdapat peningkatan ke arah yang positif dari sebelumnya tahun 2024 67,82 poin kini meningkat sebesar 5,03 poin menjadi 72,85 poin pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2025

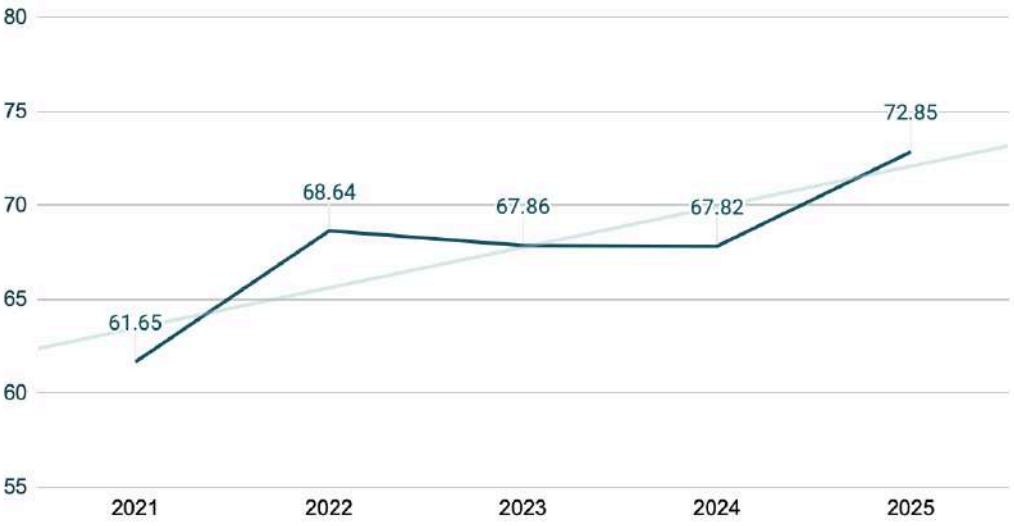


Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2026

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 72,85 poin. Jika dibandingkan dengan daerah lain, capaian ini berada di bawah Kabupaten Garut yang mencapai 77 poin, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sukabumi sebesar 69,67 poin dan Kota Cirebon sebesar 64,44 poin.

Posisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur tergolong cukup baik dan berada pada kelompok menengah atas di antara daerah pembanding. Meskipun belum menjadi yang tertinggi, capaian ini mencerminkan kondisi lingkungan yang relatif terjaga dengan baik serta adanya upaya pengelolaan lingkungan yang cukup efektif. Ke depan, masih terdapat ruang perbaikan agar Kabupaten Cianjur dapat meningkatkan kinerjanya dan mendekati bahkan melampaui capaian daerah dengan nilai IKLH yang lebih tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur



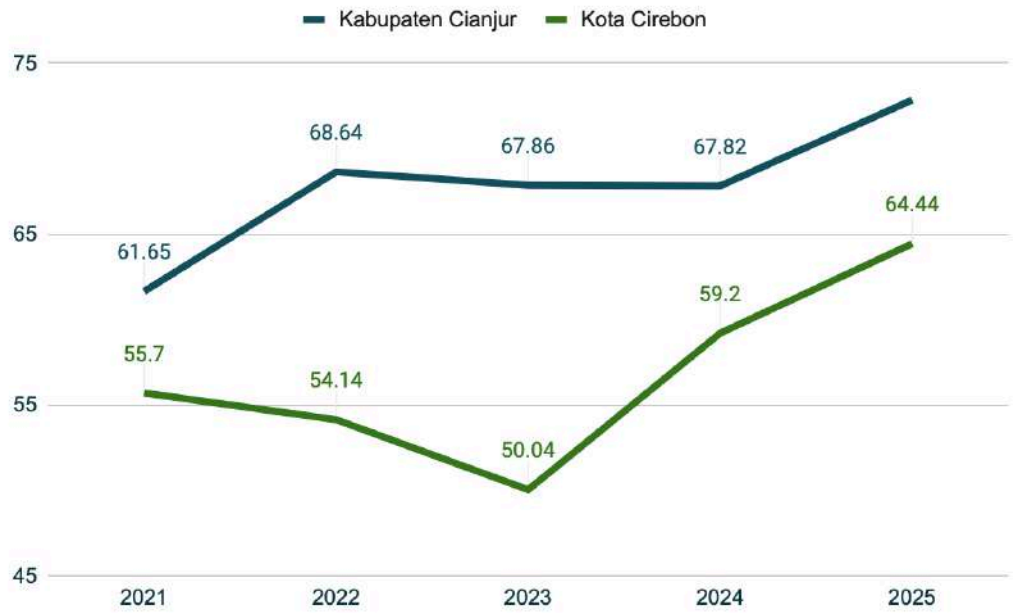
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan beberapa dinamika pada tahun tertentu. Pada tahun 2021, IKLH berada pada angka 61,65 poin, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 68,64 poin. Namun, pada tahun 2023 indeks tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 67,86 poin dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan capaian 67,82 poin.

Memasuki tahun 2025, IKLH Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 72,85 poin. Kenaikan ini menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren IKLH Kabupaten Cianjur menunjukkan arah yang positif, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode 2023–2024. Peningkatan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan mulai memberikan hasil yang lebih nyata, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025



Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2026 (diolah)

Perbandingan tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Cianjur dan Kota Cirebon selama periode 2021–2025 menunjukkan pola perkembangan yang berbeda. Kabupaten Cianjur cenderung mengalami tren peningkatan secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan tipis pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 72,85 poin.

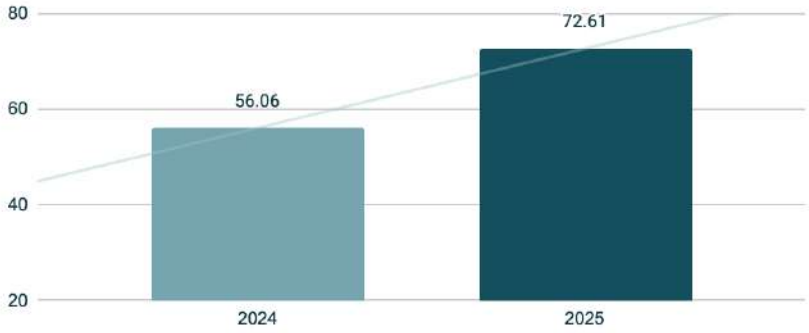
Sebaliknya, Kota Cirebon menunjukkan tren yang lebih fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada periode 2021–2023, dari 55,70 poin menjadi 50,04 poin. Namun, pada tahun 2024 dan 2025, Kota Cirebon mulai mengalami pemulihan dengan peningkatan hingga mencapai 64,44 poin pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan, yang masing-masing didukung oleh berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pada aspek pengendalian pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan peningkatan pembinaan terhadap ketaatan pelaku usaha dan kegiatan dalam pengelolaan air limbah, termasuk optimalisasi fungsi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang diikuti oleh 32 pelaku usaha. Selain itu, dilakukan pemantauan kualitas air secara berkala pada badan air prioritas, serta pemantauan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan limbah domestik seperti IPAL komunal.

Edukasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait pengolahan limbah cair juga dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 9 pelaku usaha. Penguatan regulasi dan kebijakan daerah turut dilakukan melalui penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan persetujuan teknis pembuangan emisi, dengan jumlah 32 pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan teknis. Upaya-upaya tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Kualitas Air dari 56,06 pada tahun 2024 menjadi 72,61 pada tahun 2025.

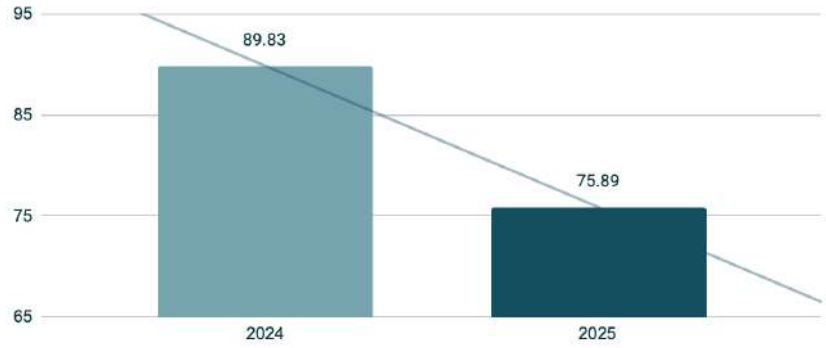
Indeks Kualitas Air Kabupaten Cianjur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Selanjutnya Indeks Kualitas Udara Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 sebesar 75,89 dengan kategori sedang. Namun demikian, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 89,83, yang disebabkan oleh adanya perubahan formulasi perhitungan, kriteria, dan parameter indeks kualitas udara sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Cianjur



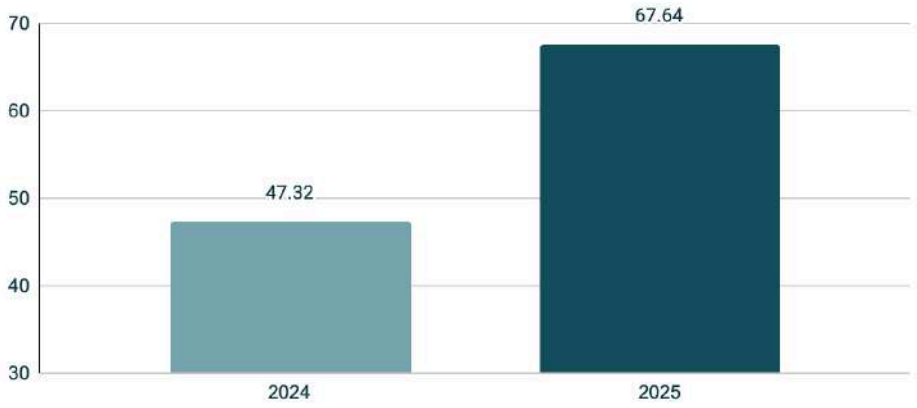
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Pada aspek pengendalian pencemaran udara, dilakukan pemantauan udara ambien secara berkala pada lokasi yang mewakili area permukiman, perkantoran, dan industri. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan dan pembinaan terhadap emisi sumber tidak bergerak (industri). Upaya lainnya meliputi pengendalian aktivitas pembakaran terbuka dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, serta penguatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya alami dalam meningkatkan kualitas udara. Penguatan lintas sektor dan peran aktif masyarakat juga terus didorong dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pada aspek kualitas lahan, dilakukan inventarisasi data secara menyeluruh untuk memperoleh luasan nilai ruang terbuka hijau (RTH) secara masif, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis dalam perumusan kebijakan perbaikan. Selain itu, dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan taman kota dan RTH. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Kualitas Lahan dari 47,32 pada tahun 2024 menjadi 67,64 pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Cianjur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Dalam aspek kualitas tutupan lahan, kegiatan inventarisasi data sumber daya alam memerlukan kompetensi teknis bagi SDM yang mampu mengoperasikan aplikasi Google Earth dan ArcGIS. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mengalami keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi tersebut, mengingat penggunaan metode tersebut memerlukan pembelajaran khusus. Akibatnya, hanya 1 sampai 2 orang SDM yang memadai, sehingga kegiatan inventarisasi belum dapat dilaksanakan secara masif. Kondisi ini diperparah dengan adanya beban tugas lain yang memiliki tingkat urgensi tinggi pada SDM yang bersangkutan. Selain keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan inventarisasi tutupan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Ketersediaan PC atau laptop dengan spesifikasi yang memadai menjadi kebutuhan dasar, mengingat aplikasi atau metode yang digunakan cukup berat dan tidak dapat berjalan optimal pada perangkat dengan spesifikasi lama.

Kegiatan inventarisasi tutupan lahan tetap dilaksanakan meskipun belum secara masif. SDM terus dipersiapkan setiap tahunnya untuk mempelajari metode penggunaan Google Earth dan ArcGIS, sehingga diharapkan jumlah kegiatan inventarisasi tutupan lahan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu sampah juga menjadi permasalahan setiap daerah, strategi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, yang berdampak pada meningkatnya beban pengolahan di hilir. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan mengingat tingginya biaya operasional dan investasi teknologi yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan TPS, TPA, dan armada pengangkut, turut menghambat optimalisasi layanan. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar instansi yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan, sementara dari aspek teknologi masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian dengan karakteristik sampah serta tingginya biaya operasional dan pemeliharaan.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus. Aspek pengurangan sampah di hulu menjadi kunci dalam menekan timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pembatasan penggunaan bahan sekali pakai, pemanfaatan kembali, serta kegiatan daur ulang dengan target pengurangan sekitar 30 persen. Sementara itu, aspek penanganan sampah di hilir berfokus pada proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA dengan target penanganan sekitar 70 persen dari total timbulan sampah.

Aspek regulasi dan kebijakan menjadi landasan hukum melalui keberadaan peraturan daerah dan standar operasional dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Aspek kelembagaan berperan melalui keterlibatan dinas terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta kemitraan dengan pihak swasta dan komunitas. Aspek pembiayaan menjadi faktor penunjang utama yang bersumber dari APBD, retribusi, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya. Dukungan teknologi dan infrastruktur seperti TPS3R, TPST, TPA, serta teknologi pengolahan modern juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan sampah menjadi PSEL.

Namun demikian, dalam pencapaian target tersebut masih terdapat berbagai kendala yang meliputi perilaku masyarakat, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, kelembagaan dan SDM, teknologi, serta penegakan hukum. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai solusi yang meliputi penguatan di hulu melalui kewajiban memilah sampah dari sumber, pengembangan bank sampah, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, dilakukan penguatan operasional melalui penambahan armada angkut, optimalisasi TPS3R dan TPST, serta modernisasi TPA dengan sistem sanitary landfill. Pengembangan teknologi juga dilakukan melalui komposting skala rumah tangga dan kawasan, penerapan RDF dan co-processing, serta pengolahan sampah menjadi energi (PSEL).

Di sisi regulasi, dilakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi serta insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi multipihak juga terus didorong melalui kerja sama dengan pihak swasta serta pelibatan UMKM daur ulang. Dukungan dari akademisi dan komunitas diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi, kampanye secara masif melalui sekolah dan media sosial, serta pelatihan pengelolaan sampah. Selain itu, dilakukan digitalisasi dan monitoring melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi serta dashboard capaian kinerja.

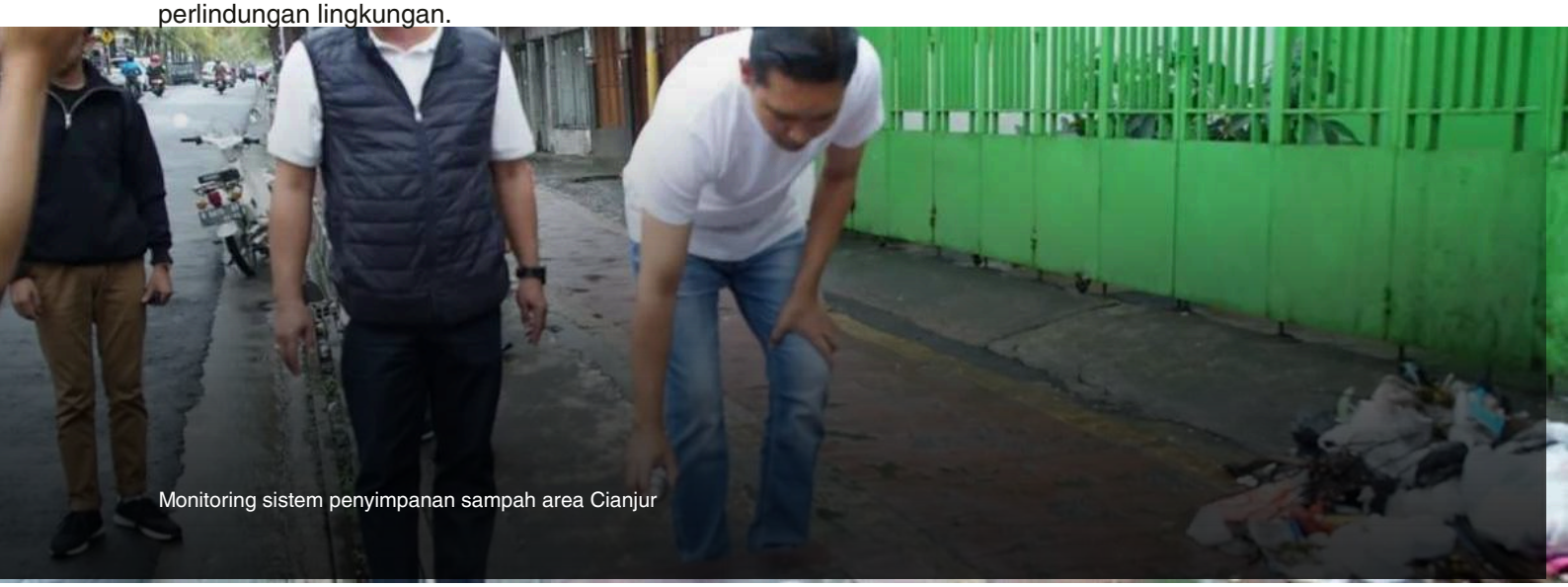
Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengelolaan pengaduan terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2025, terdapat 28 pengaduan yang diterima dan seluruhnya telah ditindaklanjuti serta diselesaikan.

Meskipun demikian, dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup masih terdapat beberapa hambatan, antara lain kepatuhan pelaku usaha yang belum optimal, terutama dalam pengoperasian IPAL dan pengendalian emisi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik serta fasilitas pemantauan kualitas lingkungan masih menjadi kendala, baik dari sisi jumlah maupun jangkauan. Sumber pencemar domestik yang cukup besar, seperti limbah rumah tangga dan kebiasaan pembakaran sampah, juga menjadi kontributor signifikan terhadap pencemaran. Di samping itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pemantauan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, perubahan tata guna lahan serta pertumbuhan aktivitas permukiman dan industri, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan turut menjadi tantangan dalam pengendalian pencemaran.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dilakukan sejumlah solusi dan strategi, antara lain peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan sanksi administratif secara konsisten, serta pembinaan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan IPAL dan pengendalian emisi. Penguatan sarana dan prasarana lingkungan juga dilakukan melalui pemantauan pembangunan dan optimalisasi IPAL komunal/domestik serta penyediaan fasilitas pendukung pengendalian pencemaran.

Selain itu, pengendalian sumber pencemar domestik dilakukan melalui peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik, edukasi pengurangan dan pengelolaan sampah termasuk larangan pembakaran terbuka, serta pemberdayaan masyarakat melalui program kampung iklim (Proklim). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran juga menjadi perhatian melalui pelatihan teknis bagi petugas pengawas dan laboratorium lingkungan serta optimalisasi alokasi anggaran dan dukungan pendanaan dari berbagai sumber.

Penguatan koordinasi lintas sektor dilakukan melalui sinkronisasi program antar perangkat daerah, pelibatan dunia usaha dan masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Di sisi lain, pengendalian tata ruang dan pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang serta pengendalian perizinan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terus didorong melalui kampanye dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan serta penguatan peran komunitas dan sekolah dalam perlindungan lingkungan.



Monitoring sistem penyimpanan sampah area Cianjur

Sasaran

Terwujudnya Transformasi Reformasi Birokrasi yang Berkualitas

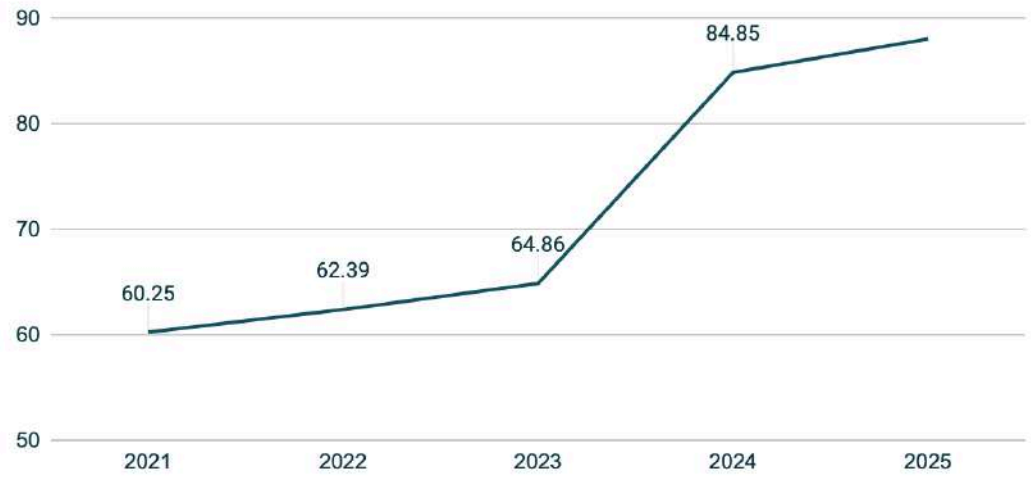
Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2021–2026 difokuskan pada mewujudkan transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas. Reformasi birokrasi yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 88,02 poin berdasarkan angka sementara pada Portal Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 sebesar 117,99 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cianjur.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021–2026, capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 telah melampaui target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 77,59 poin, dengan tingkat capaian terhadap target akhir sebesar 113,44 persen. Dengan demikian, kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD sebelum berakhirnya periode perencanaan, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas.



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur



Sumber: KemenPANRB, 2026 (diolah)

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 60,25 poin dan meningkat menjadi 62,39 poin pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai indeks kembali meningkat menjadi 64,86 poin. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 84,85 poin, dan terus meningkat pada tahun 2025 menjadi 88,02 poin.

Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa terdapat perubahan metode perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2023. Pada tahun 2021–2022, pengukuran indeks menggunakan bobot maksimal sebesar 100. Sementara itu, pada tahun 2023, Kementerian PANRB menerapkan metode pengukuran baru dengan bobot maksimal sebesar 120, yang terdiri atas Indeks Reformasi Birokrasi General dengan bobot 100 dan Indeks Reformasi Birokrasi Tematik dengan bobot 20.

Dengan adanya perubahan metode tersebut, perbandingan capaian indeks sebelum dan sesudah tahun 2023 perlu dilakukan secara hati-hati. Meskipun demikian, secara umum tren peningkatan nilai indeks menunjukkan adanya perbaikan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur. Peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2023 hingga 2025 mengindikasikan bahwa implementasi reformasi birokrasi, baik dari aspek general maupun tematik, telah berjalan semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur

No	Nama Instansi	2024	2025	Predikat 2025
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	99,01	99,05	A-
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	89,65	94,72	A-
3	Pemerintah Daerah Kota Bogor	90,36	93,97	A-
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	86,15	92,80	A-
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	87,37	91,43	A-
6	Pemerintah Daerah Kota Depok	87,11	90,51	A-
7	Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	87,10	90,30	A-
8	Pemerintah Daerah Kota Cimahi	86,29	89,64	A-
9	Pemerintah Daerah Kota Bekasi	83,46	89,28	A-
10	Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	85,16	88,62	A-
11	Pemerintah Daerah Kota Bandung	88,02	88,19	A-
12	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	84,85	88,02	A-
13	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	84,09	87,73	A-
14	Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	86,53	87,48	A-
15	Pemerintah Daerah Kota Cirebon	85,14	87,46	A-
16	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	85,94	87,21	A-
17	Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis	82,37	87,04	A-
18	Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	82,41	86,74	A-
19	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	83,78	86,71	A-
20	Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	84,95	86,26	A-
21	Pemerintah Daerah Kota Banjar	85,71	85,80	A-
22	Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	80,77	85,05	A-
23	Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	78,47	84,72	A-
24	Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	81,14	84,68	A-
25	Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu	81,23	83,06	A-
26	Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	79,08	82,39	A-
27	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	76,46	81,43	A-
28	Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan	75,02	80,31	A-
Rata-rata		**84,56**	**87,88**	**A-**

Sumber: KemenPANRB, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Kabupaten Cianjur memperoleh nilai sebesar 88,02 poin dengan predikat A-. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Cianjur pada kelompok pemerintah daerah dengan kinerja reformasi birokrasi yang baik, serta berada di atas rata-rata kabupaten/kota yang sebesar 87,88 poin.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, posisi Kabupaten Cianjur masih berada pada kelompok menengah. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor mencatatkan nilai yang lebih tinggi, bahkan mendekati 90 poin ke atas. Di sisi lain, capaian Kabupaten Cianjur masih lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lainnya seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja reformasi birokrasi Kabupaten Cianjur telah berada pada kategori baik dan melampaui rata-rata provinsi, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat bersaing dengan daerah yang memiliki capaian lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi, baik dari aspek general maupun tematik, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara lebih optimal.

Keberhasilan peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan hasil dari langkah-langkah manajerial yang terukur, antara lain melalui intensifikasi koordinasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun 2025 terbukti efektif dalam menyelaraskan persepsi, memperkuat pemahaman teknis, serta meningkatkan fungsi pengendalian terhadap pemenuhan indikator reformasi birokrasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mendorong pemahaman reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga ke seluruh perangkat daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya dipahami oleh perangkat daerah pengampu, tetapi juga diinternalisasikan pada seluruh unit kerja. Pada tahun 2025, upaya perbaikan tidak hanya dilakukan pada 31 (tiga puluh satu) perangkat daerah teknis, tetapi juga mulai diperluas hingga tingkat kecamatan. Terdapat empat kecamatan yang telah melaksanakan penilaian reformasi birokrasi, yaitu Kecamatan Cianjur, Cipanas, Cugenang, dan Cibeber.

Di samping penguatan aspek manajerial, transformasi digital menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) yang diinisiasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Implementasi aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan penyampaian standar penilaian kepada seluruh perangkat daerah. Proses pengumpulan bukti dukung (eviden) menjadi lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap unit kerja dapat memenuhi parameter penilaian secara optimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum optimalnya konsistensi dalam pengendalian dan koordinasi lintas sektor. Sebelum adanya penguatan pada tahun 2025, monitoring terhadap progres indikator cenderung bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. Selain itu, terdapat ketimpangan capaian antar indikator, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan fokus antar perangkat daerah.
Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan langkah strategis melalui akselerasi transformasi digital dengan implementasi aplikasi SURABI, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman terhadap indikator penilaian, serta mendorong kemandirian perangkat daerah dalam memenuhi target reformasi birokrasi.

Selain itu, penguatan fungsi koordinasi dan pengendalian terus dilakukan melalui penyelenggaraan rapat konsultasi yang terjadwal dan berkelanjutan. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi ego sektoral serta memastikan bahwa proses evaluasi kinerja berjalan secara konsisten sepanjang tahun. Ke depan, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur akan terus diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan. Diharapkan pada tahun 2029, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-20029

Sasaran

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Religius, Sehat, Cerdas, Berbudaya, dan Berdaya Saing

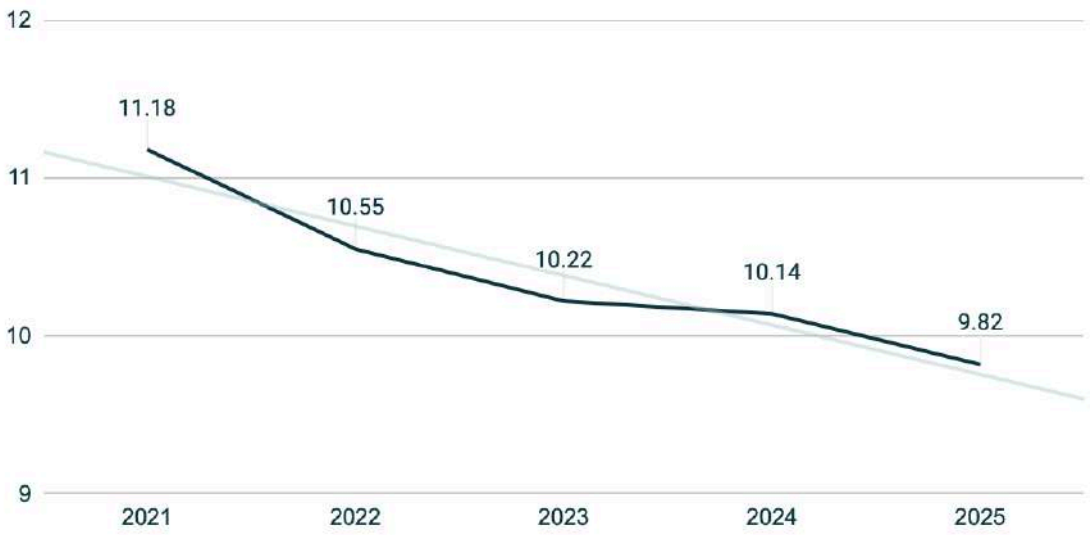
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2025–2029 difokuskan pada upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. Persentase penduduk miskin menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk terus menekan angka kemiskinan di kabupaten cianjur.



Persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,82 persen, dengan capaian kinerja sebesar 99,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 9,80 persen penduduk miskin.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, capaian persentase penduduk miskin pada tahun 2025 terhadap target tahun 2029 telah mencapai 90,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun baru memasuki tahun pertama periode RPJMD, capaian kinerja yang diperoleh telah mendekati target akhir yang ditetapkan. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan progres yang positif dalam upaya penurunan angka kemiskinan serta menjadi modal yang baik untuk mencapai target secara optimal pada akhir periode perencanaan.

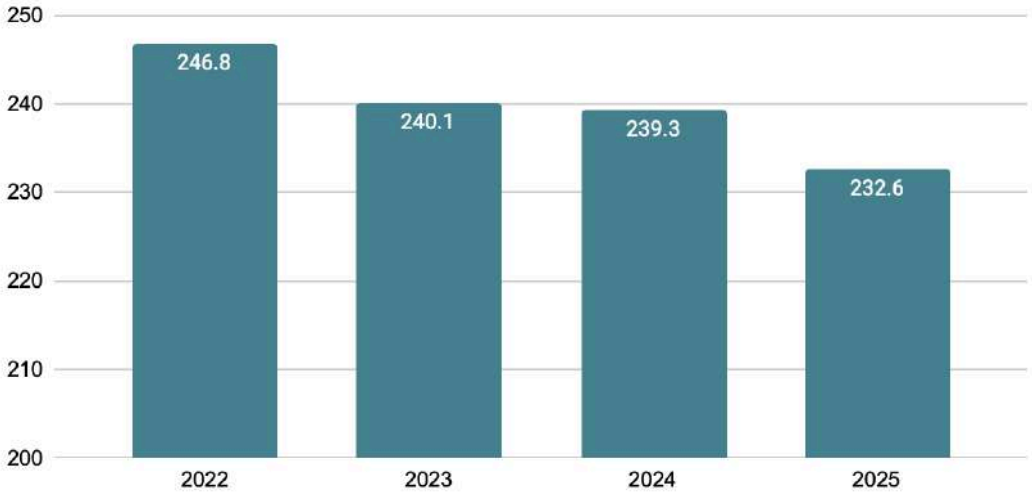
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,18 persen, kemudian menurun menjadi 10,55 persen pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 10,22 persen pada tahun 2023. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 menjadi 10,14 persen, hingga akhirnya mencapai 9,82 persen pada tahun 2025.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (ribu orang)

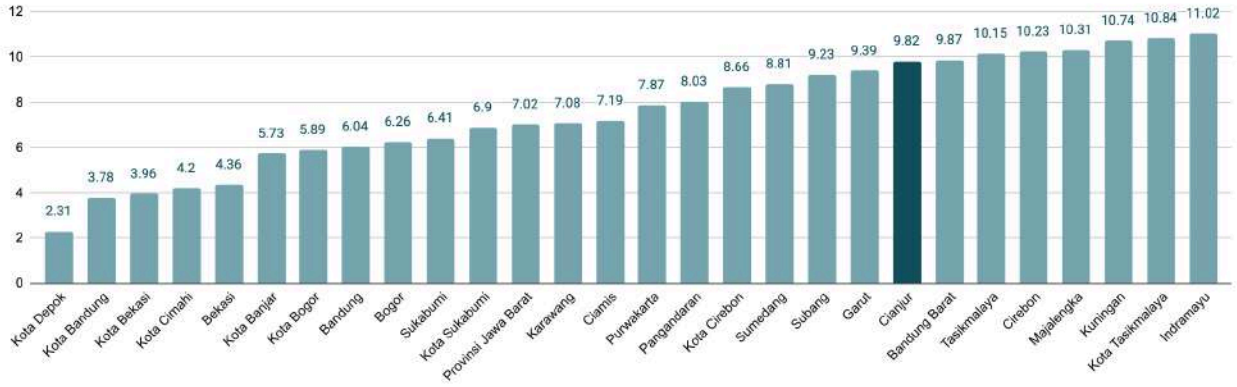


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur selama tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 246,8 ribu orang, kemudian menurun menjadi 240,1 ribu orang pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 239,3 ribu orang pada tahun 2024. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 232,6 ribu orang.

Penurunan yang terjadi secara bertahap ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat angka sebesar 9,82 persen dan berada pada peringkat ke-20 dari 27 kabupaten/kota. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar daerah lainnya di Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan daerah dengan capaian terendah, seperti Kota Depok (2,31 persen), Kota Bandung (3,78 persen), dan Kota Bekasi (3,96 persen), terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,02 persen, yang mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Meskipun demikian, posisi Kabupaten Cianjur masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Tasikmalaya (10,15 persen), Kabupaten Cirebon (10,23 persen), dan Kabupaten Indramayu (11,02 persen). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah memberikan hasil, namun masih perlu ditingkatkan agar capaian Kabupaten Cianjur dapat lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial berupaya meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Program Pemberdayaan Sosial. Program ini merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas individu pada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), baik keluarga maupun kelompok, agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengatasi permasalahan sosial secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Program Pemberdayaan Sosial memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi pembimbingan kepada PSKS, serta membangun koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Fungsi program ini tercermin melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas, pembinaan kelembagaan sosial, serta fasilitasi usaha ekonomi produktif. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Program Pemberdayaan Sosial diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat partisipasi sosial dalam pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada 20 lembaga dengan nominal Rp10.000.000 per lembaga.

Selanjutnya, Dinas Sosial memiliki strategi melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial, guncangan ekonomi, maupun kondisi darurat. Program ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta mencegah terjadinya penurunan taraf kesejahteraan sosial akibat kemiskinan, bencana, disabilitas, lanjut usia, maupun kerentanan lainnya. Tugas program ini meliputi penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima manfaat untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali dampak sosial akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga mampu menjaga daya tahan masyarakat dan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin sebanyak 1.766 penerima.

Kemudian, Program Rehabilitasi Sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan layanan pemulihan bagi individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami gangguan sosial, keterlantaran, penyalahgunaan zat adiktif, atau masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan sosial, meningkatkan kemandirian, serta mendukung reintegrasi masyarakat ke dalam lingkungan sosial yang produktif. Fungsi program ini diwujudkan melalui layanan pemulihan sosial bagi PPKS, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian, pemberian bimbingan keterampilan, serta reintegrasi sosial agar penerima manfaat dapat kembali berperan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial memberikan pelayanan permakanan kepada 200 orang, pelayanan sandang kepada 28 orang, penyediaan alat bantu sebanyak 36 unit, pelayanan bimbingan sosial kepada 200 orang, pelayanan reunifikasi kepada 80 orang, pelayanan penelusuran kepada 80 orang, serta pelayanan rujukan kepada 80 orang.

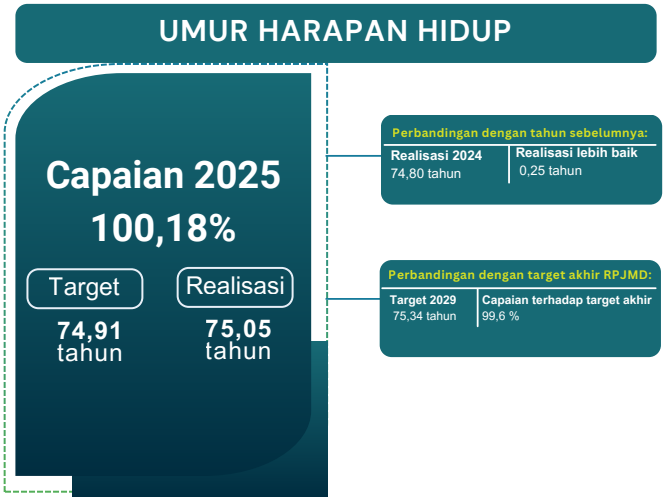
Selanjutnya, Program Penanganan Bencana diarahkan untuk meminimalkan dampak sosial, menjaga keselamatan dan kesejahteraan korban, serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat dapat kembali berfungsi secara normal. Fungsi program ini diwujudkan melalui penyediaan bantuan sosial darurat bagi korban bencana, penyelenggaraan tempat penampungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kesehatan, serta pendampingan sosial untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi masyarakat. Selain itu, program ini juga berperan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan masyarakat agar mampu menghadapi risiko bencana secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah menyalurkan bantuan permakanan bagi korban bencana kepada 490 orang.

Terakhir, pada urusan wajib, Dinas Sosial melaksanakan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dirancang untuk memastikan korban mendapatkan akses terhadap layanan sosial, perlindungan hukum, serta dukungan psikososial sehingga dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Program ini diwujudkan melalui penyediaan layanan perlindungan sosial, bantuan psikososial dan medis, fasilitasi pemulangan dan reintegrasi ke masyarakat, serta pemberian bimbingan kemandirian agar korban dapat menata kembali kehidupan mereka. Selain itu, program ini juga berperan dalam advokasi hak korban, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menangani kasus serupa di masa depan. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah memulangkan sebanyak 35 orang migran korban tindak kekerasan.

Sasaran

Meningkatnya Derajat **Kesehatan** Masyarakat

Umur Harapan Hidup



Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik kondisi kesehatan masyarakat, maka semakin besar pula potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu arah pembangunan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator ini menggambarkan perkiraan rata-rata lama hidup penduduk sejak lahir dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan nilai umur harapan hidup menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, baik dari sisi akses terhadap layanan kesehatan, kualitas gizi, maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Oleh karena itu, umur harapan hidup menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Cianjur.

Umur Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,05 tahun berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik pada Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Cianjur diperkirakan dapat hidup hingga usia sekitar 75,05 tahun. Capaian realisasi kinerja pemerintah pada indikator umur harapan hidup yaitu 100,18 persen. Berhasil mencapai lebih dari target yang diharapkan sebelumnya yaitu 74,91 tahun.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, Umur Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 0,25 tahun, dari 74,80 tahun menjadi 75,05 tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir (tahun)

NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
1	Kota Bekasi	75,60	75,86	76,14	76,61
2	Kota Bandung	75,26	75,53	75,83	76,30
3	Kota Depok	75,24	75,53	75,82	76,30
4	Kota Bogor	75,21	75,52	75,80	76,25
5	Kota Cimahi	74,99	75,27	75,55	76,00
6	Kota Cirebon	74,87	75,17	75,48	75,97
7	Bekasi	74,86	75,09	75,33	75,71
8	Bandung	74,67	74,92	75,23	75,70
9	Sumedang	74,77	75,04	75,29	75,70
10	Ciamis	74,69	74,96	75,26	75,69
11	Kota Tasikmalaya	74,80	75,08	75,31	75,66
12	Kuningan	74,67	74,91	75,22	75,64
13	Karawang	74,63	74,90	75,16	75,57
	Jawa Barat	**74,65**	**74,91**	**75,16**	**75,53**
14	Pangandaran	74,60	74,88	75,11	75,45
15	Kota Sukabumi	74,64	74,89	75,11	75,45
16	Bandung Barat	74,59	74,78	75,06	75,44
17	Subang	74,46	74,87	75,08	75,41
18	Cirebon	74,43	74,71	74,98	75,39
19	Kota Banjar	74,48	74,77	74,99	75,35
20	Majalengka	74,44	74,73	74,98	75,32
21	Purwakarta	74,40	74,67	74,92	75,28
22	Bogor	74,42	74,67	74,90	75,23
23	Indramayu	74,39	74,61	74,82	75,16
24	Garut	74,43	74,66	74,87	75,14
25	Sukabumi	74,40	74,65	74,85	75,12
26	**Cianjur**	**74,37**	**74,61**	**74,80**	**75,05**
27	Tasikmalaya	73,64	73,87	74,06	74,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kabupaten Cianjur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 UHH Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 74,37 tahun, kemudian meningkat menjadi 74,61 tahun pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 74,80 tahun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 75,05 tahun. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, posisi Umur Harapan Hidup Kabupaten Cianjur masih relatif berada pada kelompok bawah. Pada tahun 2025, UHH Kabupaten Cianjur sebesar 75,05 tahun menempatkan Cianjur pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya berada di atas Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki UHH sebesar 74,37 tahun. Nilai tersebut juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 75,53 tahun.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah dengan capaian tertinggi, seperti Kota Bekasi (76,61 tahun), Kota Bandung (76,30 tahun), dan Kota Depok (76,30 tahun), terlihat adanya selisih sekitar 1 hingga 1,5 tahun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Cianjur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tren peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Cianjur terus mengalami perbaikan, tingkat derajat kesehatan masyarakat masih memerlukan penguatan agar dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Jawa Barat.

Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan target akhir RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Pada akhir periode RPJMD tahun 2029, umur harapan hidup masyarakat ditargetkan dapat mencapai 75,34 tahun. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 75,05 tahun, maka capaian terhadap target akhir RPJMD telah mencapai sekitar 99,62 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Cianjur telah berada pada jalur yang cukup baik menuju target yang telah ditetapkan. Selisih antara capaian tahun 2025 dengan target akhir RPJMD relatif kecil, yaitu sekitar 0,29 tahun, sehingga dengan tren peningkatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, target tersebut secara realistis dapat dicapai pada akhir periode RPJMD.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menekan angka kematian ibu. Pada tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat sebanyak 30 kasus kematian ibu. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kematian ibu merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

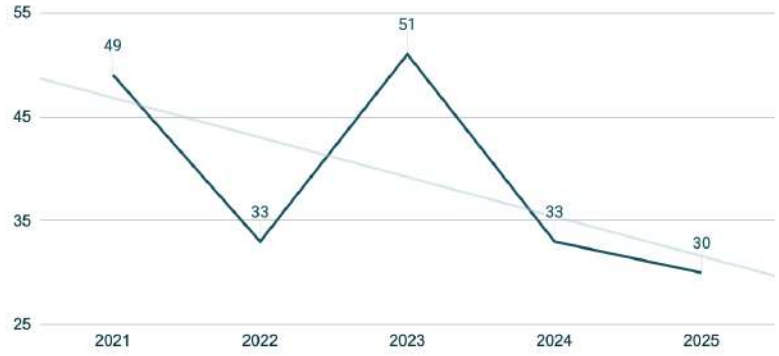
Berdasarkan hasil analisis kasus yang dilakukan, sebanyak 83,33 persen kasus kematian ibu telah dilakukan pengkajian, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kematian serta mengevaluasi aspek sistem pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki. Dari sisi lokasi kejadian, sebagian besar kematian ibu yaitu 96,7 persen terjadi di rumah sakit, dengan 68,18 persen di antaranya meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam sejak masuk rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah berada dalam kondisi kegawatdaruratan saat dirujuk atau terdapat keterlambatan dalam proses penanganan.

Apabila dilihat dari penyebab medisnya, perdarahan menjadi penyebab kematian ibu tertinggi yaitu sebesar 46,7 persen. Perdarahan merupakan salah satu kegawatdaruratan obstetri yang sebenarnya dapat dicegah apabila penanganan dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, dari aspek mutu layanan kesehatan, sekitar 50 persen kasus berada pada kategori perawatan suboptimal, yang menunjukkan adanya potensi pencegahan apabila tata laksana pelayanan dilakukan secara optimal sesuai standar yang berlaku.

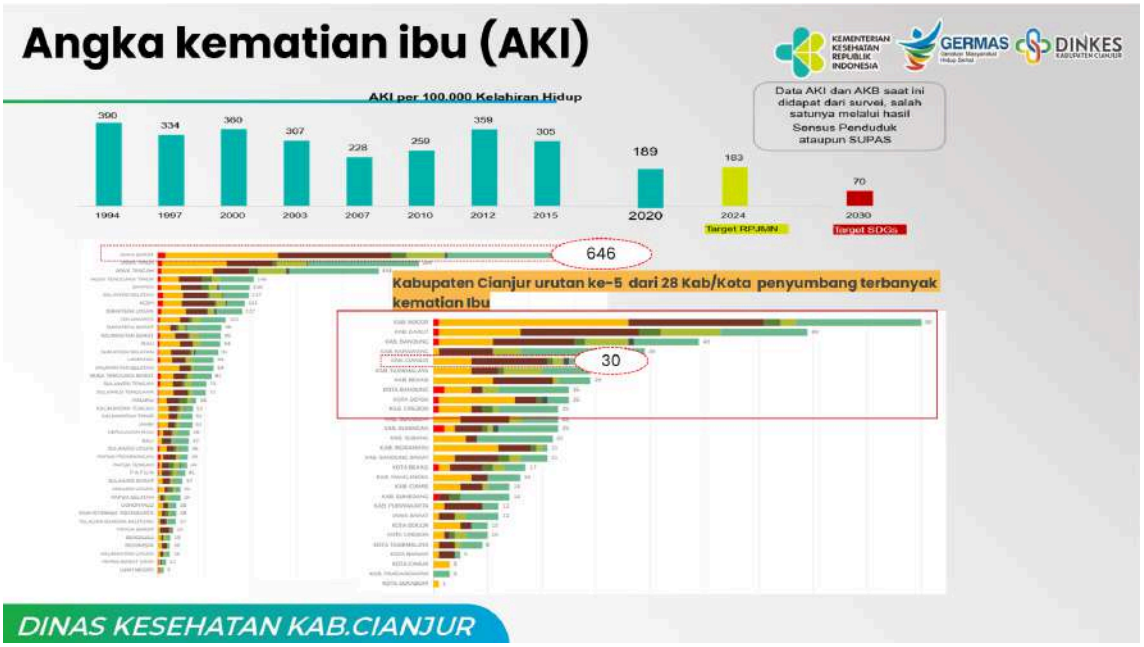
Selain faktor medis, terdapat pula sejumlah faktor non-medis yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kematian ibu. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan dalam proses rujukan, waktu respon pelayanan yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan. Oleh karena itu, penguatan sistem rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta perbaikan mutu layanan kegawatdaruratan maternal menjadi langkah penting yang perlu terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Cianjur.

Terdapat penurunan jumlah kematian Ibu di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 51 kasus.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Cianjur



Sumber: Dinas Kesehatan, 2026 (diolah)



Di tahun 2025 Kabupaten Cianjur menempati urutan ke-5 di Jawa Barat dengan kasus Kematian ibu sebanyak 30 kasus. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung jumlah kematian ibu lebih banyak dari Kabupaten Cianjur, Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Cianjur jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah kematian Ibu di Jawa Barat tahun 2025.



KASUS DUGAAN	DITERIMA
N1: Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom	5
N4: Complications of intrapartum events	14
N6: Infection	7
N7: Respiratory and cardiovascular disorders	99
N8: Other neonatal conditions	2
N9: Low birth weight and prematurity	41
N11: Neonatal death of unspecified cause	2
Penyaksit infeksi dan parasit	2
Penyakit darah dan organ pembentuk darah serta proses imun	2
Penyakit sistem respirasi	8
Penyakit sistem saluran cerna	2
Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal	6
Total	190



KASUS DUGAAN	DITERIMA
Group 2: Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas (O11-O16)	7
Group 3: Perdarahan obstetrik (O20, O43-O46, O67, O71, O72)	14
Group 4: Infeksi terkait kehamilan (O23, O41, O75, O85, O86, O91)	1
Group 5: Komplikasi obstetrik lain (O21, O22, O24, O26, O71, O73, O87, O88, O90)	2
Group 6: Komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi (O29, O74, O89)	1
Group 7: Komplikasi non obstetrik (O10, O24, O98, O99)	5
Total	30

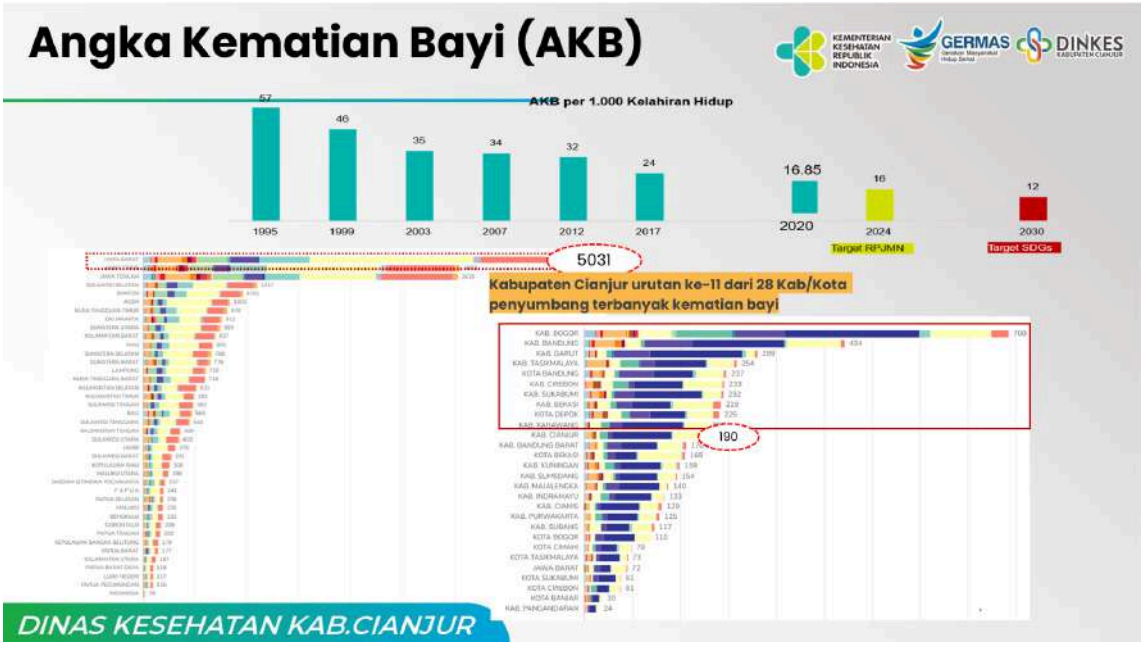
Source : Updating MPDN 26/01/2026

Tren kasus kematian ibu pada tahun 2025 didominasi oleh perdarahan, yang mencapai 46,7 persen atau sebanyak 14 kasus dari total kematian ibu yang tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdarahan masih menjadi penyebab utama kematian ibu dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan serta penanganan kegawatdaruratan obstetri.

Dalam rangka menekan angka kematian ibu, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dengan pendekatan siklus hidup. Upaya tersebut dimulai sejak masa sebelum kehamilan melalui edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, pelayanan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, serta skrining kelayakan hamil bagi calon pengantin dan pasangan usia subur. Selanjutnya pada masa kehamilan dilakukan penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu disertai pemeriksaan USG, sedangkan pada masa persalinan hingga pasca persalinan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, pelayanan masa nifas, serta pemberian layanan kontrasepsi. Selain itu, peningkatan pengetahuan ibu juga dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

Sebagai bagian dari upaya penurunan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur juga melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kapasitas pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Kegiatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis Fokus Terintegrasi serta pendampingan oleh tim ahli dokter spesialis kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pelaksanaan On the Job Training (OJT) penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP di rumah sakit, serta penyelenggaraan Pertemuan Audit Maternal Perinatal – Surveilans Respons (AMP-SR). Selain itu, dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) internal program untuk pembahasan kasus kematian ibu dan bayi, penguatan pemetaan jejaring layanan ANC, serta pelaksanaan kampanye Ibu Hamil Sehat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin.

Selain Angka Kematian Ibu, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga berupaya menekan Angka Kematian Bayi. Jumlah kematian bayi pada tahun 2025, baik secara rasio maupun jumlah absolut, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, angka kematian bayi tercatat sebanyak 125 kasus. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 190 kasus kematian bayi.



Pada tahun 2025, jumlah kematian bayi di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 190 kasus dan menempatkan Cianjur pada peringkat ke-11 penyumbang kematian bayi di Provinsi Jawa Barat. Secara perbandingan, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok yang mencatatkan 225 kasus kematian bayi. Meskipun demikian, jumlah kematian bayi di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bertambah 65 kasus dari 125 kasus pada tahun 2024 menjadi 190 kasus pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis, peningkatan kematian bayi di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebesar 6,25% disebabkan oleh keterlambatan dalam mencari pertolongan tenaga kesehatan, yang dipengaruhi oleh pemahaman dan karakteristik masyarakat serta keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Sebesar 6,25% lainnya disebabkan oleh ketiadaan pembiayaan, antara lain karena data kependudukan yang belum lengkap seperti tidak memiliki Kartu Keluarga, KTP, maupun dokumen pernikahan yang menjadi persyaratan dalam pengusulan kepesertaan jaminan pembiayaan kesehatan (BPJS). Selain itu, 6,25% disebabkan oleh keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, termasuk kompetensi dalam pelayanan PONED, PONEK, serta tatalaksana kegawatdaruratan maternal baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan lanjutan. Faktor lainnya adalah minimnya ketersediaan serta kesesuaian pelayanan dengan standar yang ditetapkan (SOP/PPK dan lainnya) sebesar 25%. Sebesar 18,75% disebabkan oleh respons time penanganan kasus yang tidak tepat waktu, termasuk keterbatasan ketersediaan dokter jaga atau dokter spesialis sesuai jadwal serta komunikasi antar departemen dalam merespons konsultasi medis. Selain itu, faktor sosial budaya atau kepercayaan masyarakat juga berkontribusi sebesar 18,75%, serta kendala dalam sistem rujukan, termasuk hambatan memperoleh ruang rawat maupun layanan ICU, yang juga menyumbang sebesar 18,75%.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Cianjur antara lain akses layanan kesehatan yang belum merata, termasuk keterbatasan fasilitas perawatan neonatal khusus dan layanan intensif bagi bayi. Selain itu, ketersediaan obat di fasilitas kesehatan terkadang belum lengkap sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penanganan kondisi kritis pada bayi, misalnya dalam kasus kejang. Tantangan lainnya adalah rendahnya cakupan layanan antenatal sesuai standar minimal kunjungan pemeriksaan kehamilan (minimal enam kali kunjungan), sehingga risiko komplikasi saat persalinan tidak terdeteksi atau ditangani sejak dini. Rendahnya kesadaran dan dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu hamil juga turut memengaruhi kondisi ini. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa wilayah Cianjur masih belum optimal, termasuk keterbatasan rumah sakit serta layanan rujukan neonatal intensif. Hambatan geografis dan jarak menuju fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan juga dapat menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah tingkat literasi kesehatan masyarakat, khususnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan serta perawatan bayi baru lahir.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain memperluas akses layanan obstetrik dan neonatal dasar serta rujukan darurat, memastikan ketersediaan obat-obatan esensial untuk penanganan kegawatdaruratan neonatal sesuai dengan estimasi jumlah bayi berisiko, serta meningkatkan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara intensif sejak masa kehamilan hingga proses persalinan dan pemantauan tumbuh kembang bayi setelah lahir. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan kesehatan secara aktif dari rumah ke rumah oleh tenaga kesehatan bagi sasaran yang tidak datang ke Posyandu, peningkatan cakupan layanan antenatal sesuai standar kunjungan minimal (K6), serta penyiapan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) guna meningkatkan kualitas layanan klinis bagi ibu dan bayi.

Selanjutnya, Tuberkulosis (TBC) juga menjadi salah satu fokus utama penanganan kesehatan di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2024, Kabupaten Cianjur menempati urutan kedelapan sebagai penyumbang kasus tuberkulosis terbanyak dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah kasus mencapai 12.197 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tuberkulosis masih menjadi penyakit menular yang serius serta menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan mendorong peningkatan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Angka Keberhasilan Pengobatan merupakan indikator yang menunjukkan persentase pasien TBC yang berhasil menyelesaikan terapi dengan hasil sembuh atau pengobatan lengkap. Tingginya angka keberhasilan pengobatan memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mencegah terjadinya resistensi obat.

Angka Keberhasilan Tuberkulosis di Kabupaten Cianjur Tahun 2025

No	Kategori Hasil Akhir Pengobatan	Jumlah pasien	Capaian (%)
1.	Sembuh	1.311	**13,15%**
2.	Pengobatan Lengkap	7.902	**79,24%**
3.	Gagal	10	0,10%
4.	Meninggal	214	2,15%
5.	Putus berobat (lost to follow up)	478	4,79%
6.	Pindah/Tidak dievaluasi	57	0,57%
Total (jumlah pasien TBC diobati)		**9.972**	**100%**
Treatment Success Rate			**92,39%**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Faktor yang mendukung keberhasilan pengobatan tuberkulosis antara lain kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan secara teratur hingga selesai, pelaksanaan strategi Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) yang optimal, serta ketersediaan obat anti-tuberkulosis yang lengkap dan berkesinambungan. Selain itu, peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan pemantauan kepada pasien, dukungan keluarga dan lingkungan, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta penanganan penyakit penyerta dan perbaikan status gizi pasien juga turut berkontribusi dalam meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TBC.

Dalam mendukung peningkatan keberhasilan pengobatan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas petugas penanggung jawab program TBC di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui kegiatan bimbingan teknis. Selain itu, dilakukan penguatan peran Puskesmas dan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan diagnosis dan pengobatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program. Implementasi strategi DOTS juga terus diperkuat dengan memastikan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat melalui keberadaan Pengawas Menelan Obat (PMO) guna meminimalkan angka putus berobat.

Upaya penanggulangan TBC juga didukung melalui penemuan kasus secara aktif dan pemanfaatan inovasi. Pemanfaatan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dilakukan untuk mendukung digitalisasi pencatatan dan pelaporan kasus sehingga keberhasilan pengobatan dapat dipantau secara lebih akurat dan real time. Selain itu, beberapa Puskesmas juga mengembangkan inovasi dalam penanggulangan TBC, seperti inovasi "KUPAT KETAN" di Puskesmas Muka dan "PENTAS SENI" di Puskesmas Cikalong yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC.

Dukungan edukasi dan kemitraan juga menjadi bagian penting dalam pengendalian TBC. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap pasien TBC sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengobatan hingga tuntas. Di samping itu, kolaborasi multisektor juga diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta komunitas dalam pemantauan pengobatan pasien.

Untuk menjamin keberlanjutan program, pemerintah daerah juga mendorong perencanaan dan dukungan pendanaan melalui penyusunan langkah-langkah konkret dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, sehingga komitmen program pengendalian TBC dapat dilaksanakan secara berkelanjutan bersama lintas perangkat daerah. Selain itu, Dinas Kesehatan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator keberhasilan pengobatan (success rate) serta angka konversi pada fasilitas kesehatan guna mengukur kinerja program penanggulangan TBC.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam pengendalian TBC, antara lain rendahnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, efek samping obat anti-tuberkulosis, serta faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, gizi buruk, dan rendahnya dukungan keluarga maupun komunitas. Selain itu, adanya penyakit penyerta seperti HIV, Diabetes Melitus, malnutrisi, dan penyakit kronis lainnya juga dapat memperberat proses terapi. Tantangan lainnya adalah kasus putus berobat serta munculnya tuberkulosis resisten obat.

Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan penguatan strategi pengobatan yang diawasi melalui penerapan strategi DOTS, yaitu pendekatan pengendalian TBC di mana pasien mengonsumsi obat di bawah pengawasan langsung petugas kesehatan atau Pengawas Menelan Obat (PMO) guna memastikan kepatuhan dan keberhasilan pengobatan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan edukasi serta pendampingan pasien, serta pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan pengobatan dan menekan angka penularan TBC.

Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Cianjur adalah dengan arah kebijakan pada cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan menunjukkan akses pada pelayanan kesehatan.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 telah mencapai 2.694.892 jiwa. Namun demikian, cakupan peserta aktif masih berada pada angka 81,68% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dalam merancang kebijakan dan program kerja, khususnya untuk meningkatkan jumlah peserta aktif yang mengalami penurunan status akibat tunggakan iuran maupun mutasi kepesertaan.

CAKUPAN keaktifan peserta



Dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program JKN, peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper perlu terus diperkuat, baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan serta kompetensi tenaga medis, khususnya dokter, maupun penguatan sistem rujukan. Penguatan peran FKTP diharapkan dapat menekan angka rujukan pasien ke rumah sakit sehingga mampu mengurangi beban pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan serta menekan potensi peningkatan biaya pelayanan kesehatan bagi peserta. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan juga perlu memperkuat koordinasi dengan dinas atau lembaga terkait guna mendukung pemenuhan tenaga medis, termasuk dokter spesialis dan subspesialis, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pada FKTP maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sesuai dengan kompetensinya.

Selain itu, harmonisasi regulasi, perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan, serta peningkatan sosialisasi kebijakan masih sangat diperlukan dalam rangka mendukung implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Upaya promotif dan preventif juga perlu dimasifkan melalui kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha, dunia pendidikan, serta komunitas atau organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, kementerian dan lembaga terkait juga perlu menetapkan kebijakan mengenai manfaat pelayanan, tarif, dan besaran iuran dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, serta kemampuan masyarakat dalam membayar iuran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program JKN, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain melalui koordinasi dan sinkronisasi program jaminan kesehatan dengan berbagai pihak terkait, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dan BPJS Kesehatan, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, dilakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data masyarakat penerima bantuan iuran agar penetapan kepesertaan tepat sasaran. Pembinaan dan pemantauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas dan rumah sakit, juga dilaksanakan untuk memastikan kualitas pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan tetap terjaga. Kegiatan lainnya meliputi pengelolaan data pelayanan kesehatan peserta serta penyusunan laporan pelaksanaan program secara berkala sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan serta tata cara memperoleh pelayanan kesehatan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemerintah daerah juga menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terkait pelayanan jaminan kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

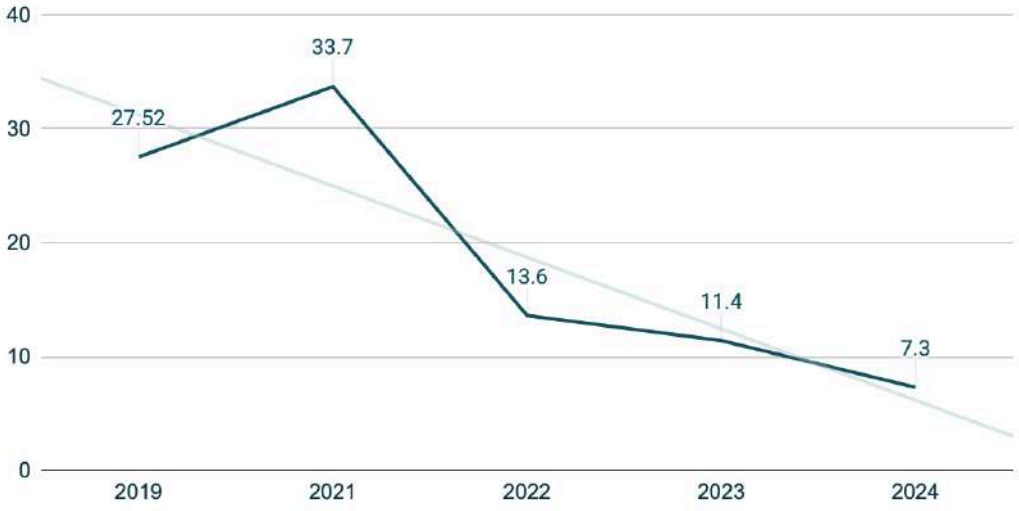
Angka Prevalensi Stunting



Dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, selain menggunakan indikator umur harapan hidup, Kabupaten Cianjur juga menggunakan indikator angka prevalensi stunting sebagai fokus prioritas dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2025 tidak dilakukan survei pengukuran angka prevalensi stunting, sehingga pengukuran indikator tersebut akan dilaksanakan kembali pada tahun 2026.

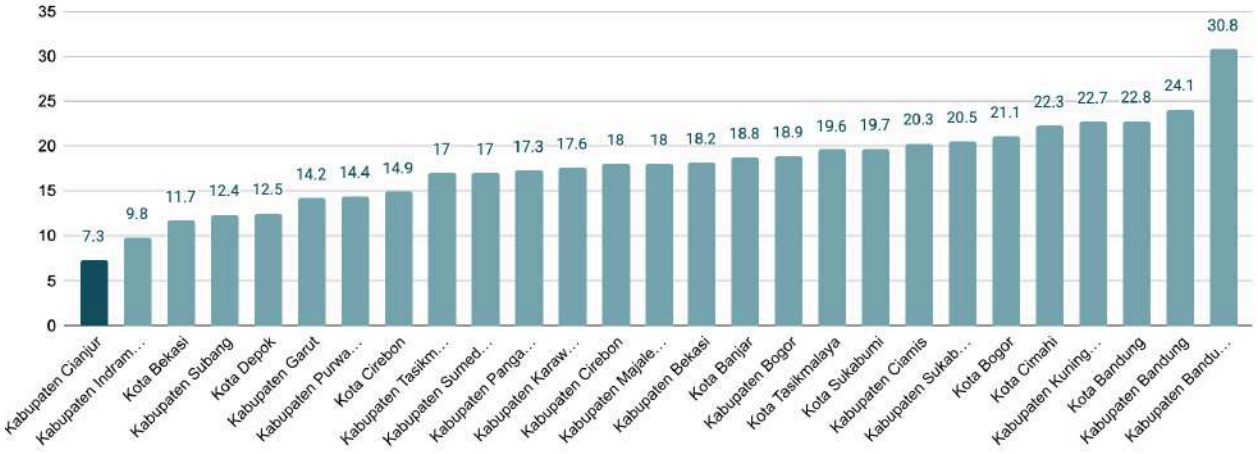
Apabila dilihat berdasarkan tren, angka prevalensi stunting di Kabupaten Cianjur menunjukkan arah yang positif, dengan kecenderungan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting tercatat sebesar 27,52 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 33,7 persen. Selanjutnya, angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 13,6 persen, kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 11,4 persen, dan pada tahun 2024 mencapai 7,3 persen. Penurunan ini juga tercatat sebagai capaian signifikan dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Cianjur.

Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Cianjur



Sumber: Bapperida, 2025 (diolah)

Angka Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: Open Data Jabar, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan angka prevalensi stunting kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024, Kabupaten Cianjur menunjukkan capaian yang sangat baik dibandingkan daerah lainnya. Dengan angka prevalensi stunting sebesar 7,3 persen, Kabupaten Cianjur menempati posisi terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu yang berada pada posisi kedua dengan angka prevalensi stunting sebesar 9,8 persen, serta Kota Bekasi sebesar 11,7 persen dan Kabupaten Subang sebesar 12,4 persen. Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota lainnya masih berada pada angka prevalensi stunting di atas 14 persen, seperti Kabupaten Garut sebesar 14,2 persen dan Kabupaten Purwakarta sebesar 14,4 persen.

Di sisi lain, terdapat daerah dengan angka prevalensi stunting yang relatif tinggi, seperti Kabupaten Bandung Barat sebesar 30,8 persen, Kabupaten Bandung sebesar 24,1 persen, dan Kota Bandung sebesar 22,8 persen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan capaian antar daerah dalam penanganan stunting di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, capaian Kabupaten Cianjur yang berada pada posisi terendah ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat dalam penanganan stunting pada tahun 2024.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka stunting pada tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan pencegahan dan penanganan. Dari sisi pencegahan, berbagai intervensi dilakukan secara menyeluruh pada kelompok sasaran. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri usia 12 sampai 18 tahun telah menjangkau 97.164 remaja, serta pemberian tablet tambah darah minimal 180 tablet bagi 25.569 ibu hamil. Selain itu, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK) selama 120 hari diberikan kepada 2.120 ibu hamil. Intervensi lainnya meliputi pemberian vitamin A kepada 41.310 ibu nifas, pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) pada 14.487 bayi baru lahir, serta pemberian ASI eksklusif kepada 14.978 bayi usia 6 bulan.

Selanjutnya, pada kelompok balita, intervensi dilakukan melalui pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) kepada 26.718 balita usia 6 sampai 23 bulan. Balita dengan kondisi gizi kurang sebanyak 3.503 orang, balita di bawah garis merah (BGM) sebanyak 188 orang, serta balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan sebanyak 371 orang juga mendapatkan PMT. Sementara itu, sebanyak 68 balita dengan kondisi gizi buruk memperoleh pangan olahan keperluan medis khusus (PKMK). Upaya pemantauan pertumbuhan juga dilakukan terhadap 143.279 balita sebagai bagian dari deteksi dini permasalahan gizi.

Dari sisi penanganan, dilakukan rujukan terhadap balita stunting yang selanjutnya diberikan PMT bagi balita gizi buruk dan gizi kurang komposit stunting, dengan jumlah sasaran sebanyak 406 balita.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan anggaran untuk pemberian PMT bagi balita BGM dan balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Selain itu, rendahnya tingkat rujukan balita stunting ke rumah sakit juga menjadi kendala, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman keluarga terkait stunting. Meskipun telah terdapat regulasi mengenai pembebasan biaya rawat inap untuk kasus stunting, namun belum tersedia alokasi dana khusus untuk penanganan balita stunting hasil rujukan. Di sisi lain, masih terdapat balita yang belum rutin ditimbang di posyandu.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, dilakukan advokasi hingga tingkat desa untuk mendorong pemanfaatan dana desa dan CSR dalam penyediaan PMT. Selain itu, dilakukan sosialisasi serta penguatan jejaring rujukan stunting guna meningkatkan akses layanan kesehatan. Diperlukan pula penyusunan regulasi lanjutan untuk mendukung implementasi pembebasan biaya rawat inap khusus kasus stunting. Upaya lainnya adalah revitalisasi posyandu agar lebih menarik minat masyarakat, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi orang tua untuk membawa balita ke posyandu secara rutin.

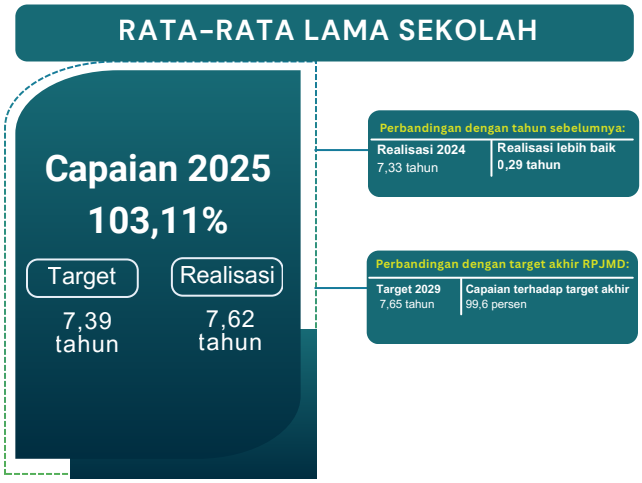


Sasaran

Meningkatnya Derajat **Pendidikan** Masyarakat

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya dengan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Pendidikan menjadi pondasi yang penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Dalam mengukur kinerja sasaran meningkatnya derajat masyarakat digunakan dua indikator yang umum digunakan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

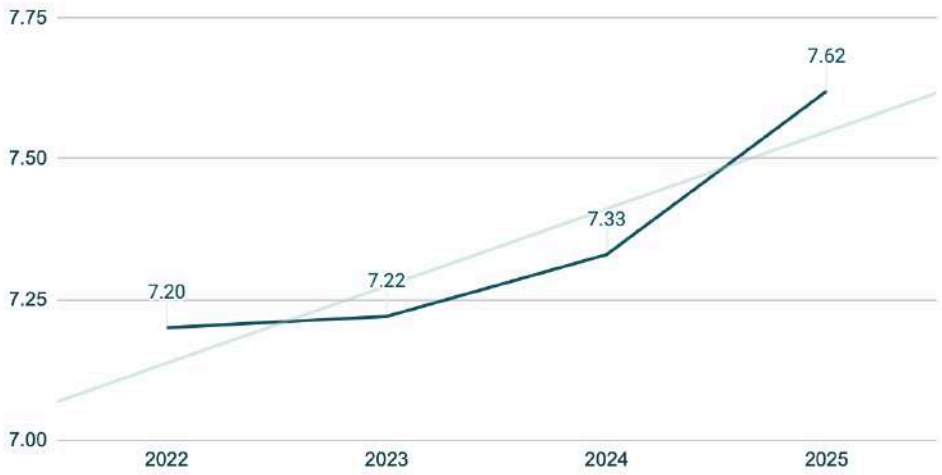
Rata-rata Lama Sekolah



Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 7,62 tahun. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,39 tahun, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,11 persen.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, realisasi tahun 2025 telah mencapai 99,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, telah berada sangat dekat dengan target jangka menengah yang ditetapkan, sehingga diperlukan upaya yang konsisten untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Tren Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Secara tren, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur dalam empat tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan yang terjadi secara konsisten, yaitu dari 7,20 tahun pada tahun 2022 menjadi 7,22 tahun pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 7,33 tahun pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 7,62 tahun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam capaian pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih lama.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Kota Bekasi	11.79	12.11
2	Kota Depok	11.59	11.83
3	Kota Cimahi	11.52	11.53
4	Kota Bandung	11.07	11.41
5	Kota Bogor	10.71	10.72
6	Kota Cirebon	10.53	10.54
7	Kota Sukabumi	10.38	10.39
8	Bekasi	9.76	10.07
9	Kota Tasikmalaya	9.63	9.64
10	Bandung	9.15	9.4
	Jawa Barat	8.87	9.14
11	Sumedang	8.74	8.92
12	Kota Banjar	8.83	8.84
13	Bogor	8.39	8.72
14	Purwakarta	8.14	8.37
15	Bandung Barat	8.24	8.34
16	Karawang	8.05	8.31
17	Ciamis	8.1	8.23
18	Pangandaran	8.1	8.11
19	Tasikmalaya	7.97	7.98
20	Kuningan	7.9	7.91
21	Cirebon	7.65	7.88
22	Garut	7.85	7.86
23	Majalengka	7.53	7.81
24	Subang	7.46	7.68
25	Sukabumi	7.34	7.63
26	**Cianjur**	**7.33**	**7.62**
27	Indramayu	6.95	7.06

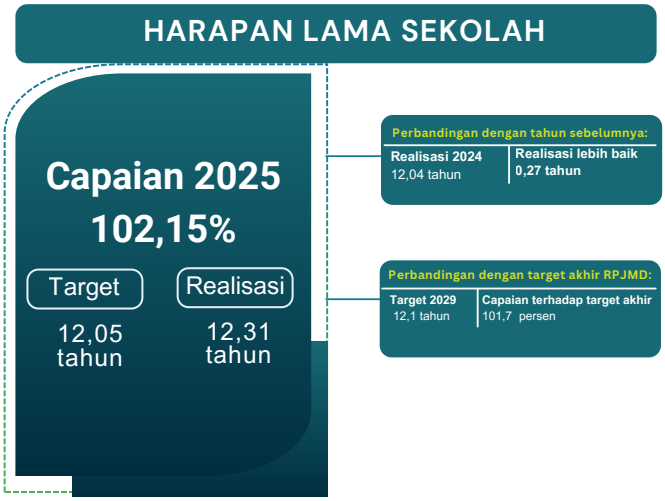
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, capaian Kabupaten Cianjur sebesar 7,62 tahun masih berada pada kelompok daerah dengan nilai relatif rendah, yaitu pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 7,33 tahun, posisi Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 9,14 tahun.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, capaian Kabupaten Cianjur masih lebih rendah dibandingkan sebagian besar daerah, termasuk kabupaten seperti Sumedang, Bogor, dan Purwakarta. Kesenjangan yang cukup signifikan juga terlihat jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung yang telah mencapai rata-rata lama sekolah di atas 11 tahun.

Namun demikian, capaian Kabupaten Cianjur masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Indramayu yang berada pada posisi terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kinerja, upaya peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur masih perlu terus ditingkatkan secara lebih optimal agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain serta mendekati rata-rata provinsi.

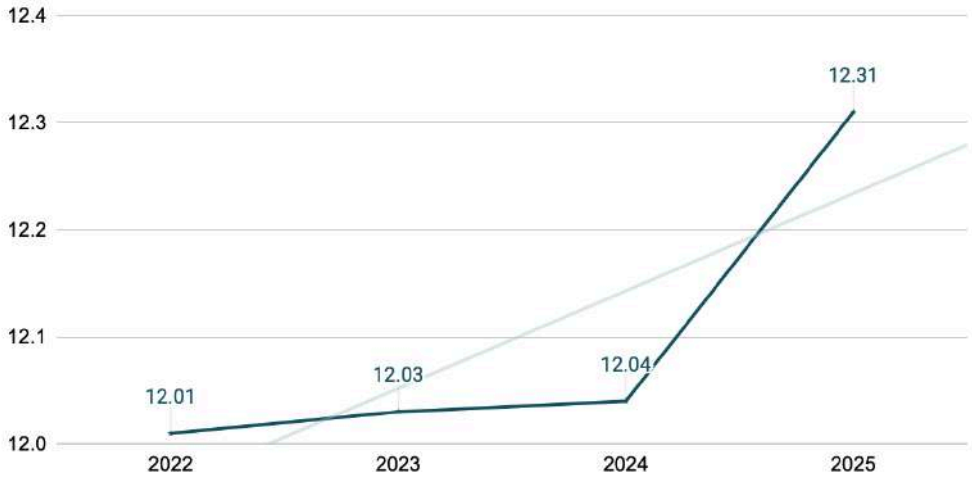
Harapan Lama Sekolah



Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 12,31 tahun, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 12,05 tahun. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 102,15 persen. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 12,04 tahun.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, yaitu sebesar 12,1 tahun, realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 101,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dalam peningkatan harapan lama sekolah, telah mencapai bahkan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan.

Tren Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Secara tren, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cianjur dalam periode tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nilai harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,01 tahun pada tahun 2022, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 12,03 tahun pada tahun 2023 dan 12,04 tahun pada tahun 2024. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang lebih signifikan menjadi 12,31 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Ciamis	14,30	14,31
2	Kota Bandung	14,25	14,27
3	Kota Depok	14,11	14,21
4	Kota Bekasi	14,14	14,15
5	Kota Cimahi	13,85	13,86
6	Kota Bogor	13,51	13,69
7	Kota Sukabumi	13,62	13,63
8	Kota Tasikmalaya	13,50	13,51
9	Kota Cirebon	13,17	13,45
10	Kota Banjar	13,28	13,29
11	Bekasi	13,18	13,22
12	Sumedang	13,02	13,21
	Jawa Barat	12,80	13,02
13	Bandung	12,74	12,99
14	Tasikmalaya	12,64	12,92
15	Bogor	12,75	12,76
16	Cirebon	12,42	12,67
17	Indramayu	12,32	12,58
18	Kuningan	12,27	12,52
19	Purwakarta	12,25	12,51
20	Majalengka	12,27	12,50
21	Garut	12,17	12,43
22	Pangandaran	12,31	12,41
23	Sukabumi	12,39	12,40
24	Subang	12,11	12,38
25	**Cianjur**	**12,04**	**12,31**
26	Bandung Barat	12,00	12,26
27	Karawang	12,21	12,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 13,02 tahun pada tahun 2025, capaian Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harapan lama sekolah di Cianjur masih tertinggal sekitar 0,71 tahun dibandingkan capaian provinsi.

Secara peringkat, Kabupaten Cianjur berada di kelompok bawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Beberapa daerah dengan capaian tertinggi seperti Kabupaten Ciamis (14,31 tahun), Kota Bandung (14,27 tahun), dan Kota Depok (14,21 tahun) menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten lain, seperti Kabupaten Sumedang (13,21 tahun) dan Kabupaten Bekasi (13,22 tahun), capaian Cianjur masih relatif lebih rendah.

Meskipun demikian, tren peningkatan yang terjadi pada Kabupaten Cianjur sejalan dengan tren peningkatan yang juga dialami oleh sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang terus dilakukan dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan yang mencakup berbagai jenjang dan jenis layanan pendidikan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), upaya difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, seperti mebel sekolah, perlengkapan sekolah, serta perlengkapan siswa. Selain itu, dilakukan penambahan ruang kelas baru, pembangunan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan proses pembelajaran dan ujian bagi peserta didik. Aspek peningkatan kualitas juga didukung melalui pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, penguatan kelembagaan dan manajemen sekolah, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), upaya yang dilakukan relatif lebih kompleks dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan proses pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, termasuk ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, dilakukan pengadaan mebel, perlengkapan sekolah dan siswa, serta alat praktik dan peraga. Kegiatan lainnya meliputi penambahan ruang kelas baru, pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU, penyelenggaraan proses pembelajaran dan ujian, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, serta penguatan tata kelola melalui pengelolaan dan peningkatan kapasitas Dana BOS, pembinaan kelembagaan, dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fokus kegiatan diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kualitas layanan pembelajaran. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung, ruang kelas, dan ruang guru, pengadaan perlengkapan serta alat praktik dan peraga siswa, serta penyelenggaraan proses pembelajaran PAUD. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan dan manajemen PAUD, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pada pendidikan nonformal dan kesetaraan, upaya peningkatan derajat pendidikan dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana, seperti pembangunan gedung, ruang kelas, dan ruang guru, serta pengadaan alat praktik dan perlengkapan pendidikan. Di samping itu, dilaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran dan ujian bagi peserta didik, penguatan kelembagaan dan manajemen satuan pendidikan nonformal, pengelolaan Dana BOP, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Faktor pendukung yang mendorong peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 salah satunya adalah ketersediaan layanan pendidikan kesetaraan yang cukup luas di setiap wilayah kecamatan. Jumlah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan di Kabupaten Cianjur mencapai 378 lembaga. Jika dirata-ratakan, terdapat sekitar 10 lembaga PKBM/SKB di setiap kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan layanan pendidikan kesetaraan melalui PKBM/SKB cukup luas bagi masyarakat yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang belum pernah bersekolah.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan kesetaraan tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta didik pada satuan pendidikan nonformal PKBM yang mencapai 67.078 siswa, serta pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 247 siswa. Jika dibandingkan dengan periode tiga tahun sebelumnya, jumlah peserta didik pada PKBM tercatat sebanyak 45.535 siswa dan pada SKB sebanyak 292 siswa. Sementara itu, jumlah lulusan pendidikan kesetaraan pada tahun 2025 terdiri atas 523 siswa pada jenjang Paket A, 4.855 siswa pada jenjang Paket B, dan 9.920

siswa pada jenjang Paket C. Secara keseluruhan, sebanyak 15.298 masyarakat Cianjur telah menyelesaikan pendidikan kesetaraan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah.

Faktor pendukung lainnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, khususnya pendidikan kesetaraan, yang tergolong baik dengan tingkat ketercapaian sebesar 95,92 persen. Angka tersebut terdiri atas persentase ketercapaian penerima layanan dasar pendidikan kesetaraan sebesar 76,07 persen dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 19,85 persen.

Di samping itu, dukungan porsi anggaran yang memadai dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Dukungan anggaran ini memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, sehingga berdampak pada peningkatan proses pembelajaran, mutu, serta pemerataan layanan pendidikan kesetaraan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah lulusan serta angka melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah, tidak melanjutkan, maupun yang belum pernah bersekolah.

Selanjutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendidikan kesetaraan. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin antar pihak tersebut secara bersama-sama mendorong peningkatan minat dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan.

Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didorong oleh optimalisasi program pengelolaan pendidikan, khususnya pada pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menunjang operasional pembelajaran.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengoptimalkan program tersebut pada jenjang TK, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pada tahun 2025, distribusi bantuan revitalisasi mencakup 26 sekolah jenjang SD, 25 sekolah jenjang SMP, 4 sekolah jenjang TK, dan 1 satuan pendidikan kesetaraan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi ruang kelas dan toilet, pembangunan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang administrasi, laboratorium komputer, laboratorium IPA, beserta penyediaan perabot pendukungnya.

Sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, sehingga tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran juga terus ditingkatkan, antara lain melalui pengadaan mebel sekolah, peralatan TIK seperti chromebook, laptop, dan interactive flat panel, serta peralatan laboratorium. Upaya lainnya meliputi rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang praktik belajar, laboratorium, serta sarana utilitas sekolah seperti toilet. Peningkatan sarana prasarana ini berdampak pada meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan.



Dalam rangka menekan angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melaksanakan program pemberian beasiswa melalui APBD Tahun 2025 sebagai program unggulan kepala daerah. Program ini memberikan manfaat kepada 1.000 siswa jenjang Sekolah Dasar serta 514 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan kesetaraan. Selain itu, sinergi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut dioptimalkan untuk menekan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Dukungan lainnya diberikan melalui penyediaan school kit bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai upaya meningkatkan partisipasi pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi peserta didik, termasuk pengembangan minat dan bakat melalui kompetisi atau lomba olimpiade siswa di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Secara khusus, peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga didukung melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal. Hal ini dilakukan melalui pembentukan kelompok belajar di setiap desa/kelurahan dengan sasaran masyarakat usia 25–45 tahun. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan, termasuk perangkat desa, pendidik formal, aparat pemerintah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Selain itu, program pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada jenjang pendidikan kesetaraan turut dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja maupun kewirausahaan peserta didik. Dukungan terhadap keberlangsungan proses pembelajaran juga diperkuat melalui pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan (tutor), termasuk pemberian insentif bagi tenaga pendidik pada satuan pendidikan nonformal.

Meskipun capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan posisi Kabupaten Cianjur terhadap capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Cianjur masih tergolong rendah, dengan rata-rata lama sekolah yang masih berada pada jenjang kelas 7 (kelas 1 SMP).

Belum meratanya satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian HLS dan RLS. Selain itu, kondisi ketersediaan dan keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang belum optimal turut mempengaruhi rendahnya minat dan animo masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mencukupi serta distribusinya yang belum merata juga berdampak pada kualitas pendidikan yang belum optimal.

Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan masih relatif rendah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi lingkungan. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), baik yang putus sekolah (drop out), lulus tidak melanjutkan, maupun yang belum pernah bersekolah.

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Cianjur tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang pembelajaran, terbatasnya daya tampung pada satuan pendidikan formal dan nonformal, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah akibat faktor biaya, keterjangkauan layanan pendidikan, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan serta belum meratanya distribusi pada masing-masing satuan pendidikan turut menjadi kendala, ditambah dengan ketersediaan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang belum merata di setiap wilayah kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat pada tahun mendatang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan representatif berbasis ketuntasan pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan advokasi secara masif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Upaya lainnya mencakup penyediaan sarana dan alat pembelajaran yang mendukung peningkatan kompetensi siswa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan pendidikan. Optimalisasi program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga akan terus dilakukan di setiap wilayah, khususnya bagi masyarakat dengan karakteristik tertentu atau kelompok marjinal.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan memastikan serta mendorong anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar dapat melanjutkan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal (PKBM).



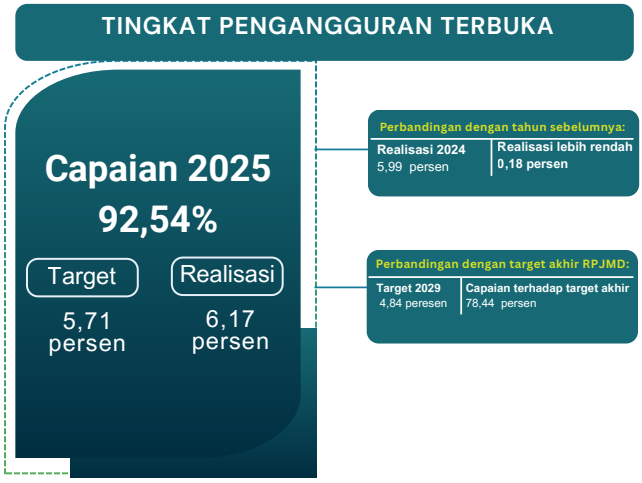
Kegiatan penguatan pendidikan karakter SMKN 1 Pacet

Sasaran

Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan daerah yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menggambarkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, serta pengeluaran per kapita disesuaikan yang merefleksikan kemampuan daya beli dan kualitas konsumsi masyarakat. Kedua indikator tersebut secara komplementer memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik dari sisi kesempatan kerja maupun tingkat kesejahteraan yang dinikmati.

Tingkat Pengangguran Terbuka



Arah pembangunan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan taraf hidup tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diharapkan menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 tercatat sebesar 6,17 persen. Capaian kinerja dalam menurunkan tingkat pengangguran pada tahun tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target tingkat pengangguran sebelumnya ditetapkan sebesar 5,71 persen, sehingga capaian realisasi kinerja hanya mencapai 92,54 persen dari target yang diharapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kondisi yang lebih tinggi. Pada Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,99 persen, kemudian pada Tahun 2025 menjadi 6,17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2023 TPT tercatat sebesar 7,71 persen, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 5,99 persen. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2025 TPT kembali berada pada tingkat yang lebih tinggi yaitu 6,17 persen.

Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur masih berada pada tren yang lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya, meskipun upaya penurunan pengangguran masih perlu terus diperkuat.

Rincian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur

No	Uraian	2024	2025	Satuan
1	Bekerja	1.331.439,00	1.277.106,00	orang
2	Pengangguran Terbuka	84.781,00	84.036,00	orang
3	Jumlah Angkatan Kerja	1.416.220,00	1.361.142,00	orang
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,99	6,17	persen

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2026

Namun demikian, secara absolut jumlah pengangguran terbuka justru mengalami penurunan dari 84.781 orang pada tahun 2024 menjadi 84.036 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan TPT bukan disebabkan oleh bertambahnya jumlah pengangguran, melainkan lebih dipengaruhi oleh penurunan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan, dari 1.416.220 orang pada tahun 2024 menjadi 1.361.142 orang pada tahun 2025. Penurunan angkatan kerja ini juga sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk bekerja dari 1.331.439 orang menjadi 1.277.106 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cianjur tercatat paling rendah di antara daerah pembanding. Kabupaten Sukabumi memiliki TPT sebesar 7,23 persen, Kabupaten Bandung Barat 6,60 persen, dan Kota Tasikmalaya 6,43 persen. Dengan demikian, meskipun terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur relatif lebih baik dibandingkan ketiga daerah tersebut.

Selain itu, secara tren Kabupaten Sukabumi cenderung berada pada tingkat pengangguran yang lebih tinggi, sedangkan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan secara bertahap namun masih berada di atas tingkat pengangguran Kabupaten Cianjur pada tahun 2025.

Capaian realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD 2025–2029 mencapai 78,44 persen. Target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,84 persen pada tahun 2029. Dengan demikian, capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat pengangguran masih perlu terus ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan penyerapan pencari kerja terdaftar. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan persentase penyerapan pencari kerja, dari 44 persen pada tahun 2024 menjadi 74,68 persen pada tahun 2025.

Capaian kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2025. Salah satu faktor pendukungnya adalah optimalisasi pelayanan antar kerja yang ditunjukkan melalui penghimpunan dan fasilitasi penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebanyak 17.526 lowongan kerja sepanjang tahun berjalan. Penyediaan informasi lowongan kerja tersebut difasilitasi melalui berbagai kegiatan, antara lain penyelenggaraan bursa kerja (Job Fair), penguatan kemitraan dengan perusahaan penyedia lapangan kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK), serta pemanfaatan layanan digital “Lapak Manjur” untuk memperluas akses informasi pasar kerja. Untuk mempertahankan capaian tersebut, instansi akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak serta melakukan pembaruan data lowongan kerja secara berkala.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Evaluasi menunjukkan bahwa berbagai kegiatan dalam program tersebut, mulai dari fasilitasi penempatan tenaga kerja hingga penyediaan informasi pasar kerja, telah dilaksanakan untuk menjembatani kebutuhan pencari kerja dengan

Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja didorong oleh kesesuaian antara kompetensi pencari kerja hasil pelatihan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selain itu, instansi juga berhasil menghimpun dan mendistribusikan 17.526 lowongan pekerjaan sepanjang tahun 2025 melalui berbagai layanan informasi pasar kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui optimalisasi program ketransmigrasian, dengan memberangkatkan dan menempatkan 2 Kepala Keluarga (KK) asal Kabupaten Cianjur ke kawasan transmigrasi di Polewali Mandar. Ke depan, instansi akan terus meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, memperbarui basis data lowongan kerja, serta memperluas kerja sama penempatan tenaga kerja antardaerah.

Meskipun persentase penyerapan tenaga kerja terdaftar menunjukkan capaian yang melampaui target, terdapat penurunan jumlah absolut pencari kerja terdaftar. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 27.395 orang, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 20.022 orang. Penurunan ini tidak disebabkan oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja baru, tetapi dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pendataan pencari kerja. Sistem perpanjangan masa berlaku pada penerbitan AK-1 (Kartu Kuning) yang sebelumnya digunakan telah dihapus dan digantikan dengan sistem pendataan digital terpusat melalui portal SIAPKerja.id. Perubahan sistem tersebut menyebabkan sebagian pencari kerja tidak lagi melakukan pembaruan data secara berkala, sehingga jumlah pencari kerja terdaftar dalam sistem mengalami penurunan.



Audiensi dengan PT PNS Cabang Sukabumi sebagai upaya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur

Guna mengatasi kendala administratif serta meningkatkan validitas data pencari kerja, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merumuskan beberapa langkah sebagai berikut:

Sinergi ekosistem digital lokal (Lapak Manjur) dan nasional (SIAPKerja)
Memanfaatkan aplikasi Lapak Manjur sebagai layanan digital daerah untuk memberikan notifikasi secara berkala kepada pengguna terdaftar. Melalui integrasi tersebut, pencari kerja di Kabupaten Cianjur diingatkan untuk secara berkala memperbarui profil dan status pekerjaan pada portal SIAPKerja.id, sehingga data yang tersedia dalam sistem menjadi lebih valid dan mutakhir.

Optimalisasi literasi digital dan pelayanan jemput bola
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, mengenai pentingnya memiliki dan mengelola akun SIAPKerja.id. Sosialisasi ini disertai dengan pelayanan jemput bola ke kecamatan dan desa untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet maupun literasi digital dalam melakukan pendaftaran dan pembaruan data.

Penerapan syarat administratif terintegrasi
Menjadikan kepemilikan akun SIAPKerja.id yang aktif dan mutakhir sebagai salah satu persyaratan bagi masyarakat yang akan mengakses berbagai layanan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, seperti pendaftaran program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), keikutsertaan dalam Job Fair, serta fasilitasi program transmigrasi.

Penguatan kemitraan dengan Bursa Kerja Khusus (BKK)
Meningkatkan kerja sama dengan BKK di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi di Kabupaten Cianjur. Melalui kerja sama ini, pengelola BKK didorong untuk mengarahkan lulusan baru (fresh graduate) agar mendaftarkan diri pada portal SIAPKerja.id sebelum kelulusan, sehingga data angkatan kerja baru dapat tercatat dalam sistem ketenagakerjaan.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari kolaborasi tiga program strategis yang dilaksanakan secara terpadu, yaitu: (1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja; (2) Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempercepat proses keterhubungan antara pencari kerja dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan; serta (3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang membuka alternatif penyerapan tenaga kerja melalui pemerataan kesempatan kerja di wilayah tujuan transmigrasi.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang diikuti oleh 200 orang peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, dilakukan pula pembinaan terhadap 20 lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta, yang difokuskan pada pengawasan serta peningkatan standar kualitas manajemen lembaga pelatihan kerja yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cianjur.

Pelayanan antar kerja juga dilaksanakan melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja baik Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Lokal (AKL), serta pemberian layanan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Layanan ini turut dilengkapi dengan fasilitasi khusus melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan guna memastikan akses kesempatan kerja yang lebih inklusif.

Selain itu, dilakukan pemeliharaan aplikasi serta penyediaan informasi pasar kerja secara daring melalui sistem Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, termasuk penguatan pemanfaatan platform Karir Hub/Lapak Manjur. Melalui layanan tersebut tercatat sebanyak 20.022 orang pencari kerja yang terdaftar dalam sistem pada tahun 2025.

Upaya memperluas akses informasi kesempatan kerja juga dilakukan melalui penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja, yang menjadi sarana pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan. Kegiatan ini diikuti oleh 742 orang pencari kerja, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penempatan tenaga kerja di dunia usaha dan industri.

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah melalui peningkatan tata kelola hubungan industrial yang harmonis. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi membina serta mendorong perusahaan di wilayah Kabupaten Cianjur untuk mematuhi norma ketenagakerjaan dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Kabupaten Cianjur menerapkan pendekatan preventif atau struktural melalui indikator persentase perusahaan yang menerapkan hubungan industrial dengan baik. Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan aspek-aspek mendasar hubungan industrial. Logikanya sederhana, apabila perusahaan telah memenuhi empat pilar utama hubungan industrial secara kumulatif, yaitu Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB), Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka iklim kerja akan lebih kondusif dan potensi sengketa ketenagakerjaan dapat diminimalkan.

Pendekatan tersebut diwujudkan dengan mendorong perusahaan untuk memenuhi keempat instrumen kelayakan hubungan industrial tersebut secara terpadu. Melalui penguatan indikator ini, instansi tidak hanya berupaya mencegah terjadinya konflik hubungan kerja, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, menjamin pemenuhan hak normatif pekerja, serta menjaga iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Cianjur.

Upaya tersebut juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah alokasi anggaran APBD untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 40.000 pekerja rentan. Kebijakan ini memberikan perlindungan dasar bagi pekerja serta membantu memitigasi risiko sosial ekonomi yang dapat memicu perselisihan hubungan industrial.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Hubungan Industrial, khususnya melalui sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, anggaran perlindungan bagi pekerja rentan dapat disalurkan secara tepat sasaran sehingga berkontribusi terhadap terciptanya hubungan industrial yang lebih kondusif di Kabupaten Cianjur.

Namun demikian, dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada sisi hubungan industrial masih terdapat sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen dari pihak manajemen perusahaan dalam memenuhi standar tata kelola ketenagakerjaan. Masih terdapat perusahaan di wilayah Kabupaten Cianjur yang belum melengkapi instrumen hubungan industrial secara memadai, khususnya dalam pemenuhan secara kumulatif terhadap keberadaan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, penerapan Struktur dan Skala Upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Ketidaksiapan sebagian perusahaan dalam memenuhi standar tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan persentase perusahaan yang memenuhi kelayakan hubungan industrial.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melaksanakan beberapa intervensi program. Salah satunya melalui kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Kegiatan ini merupakan langkah afirmatif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, yang diwujudkan melalui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 40.000 pekerja rentan menggunakan anggaran daerah. Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi pekerja, menjaga keberlanjutan penghasilan, serta meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, dilakukan pula kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pembinaan Tata Kelola Hubungan Industrial. Kegiatan ini difokuskan pada penanganan mediasi atas perselisihan antara pekerja dan pengusaha, seperti kasus pemutusan hubungan kerja maupun sengketa hak normatif. Pada tahun 2025 tercatat 20 perkara perselisihan hubungan industrial yang berhasil difasilitasi penyelesaiannya oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Selain fungsi penyelesaian sengketa, kegiatan ini juga mencakup upaya preventif melalui pendampingan administratif kepada perusahaan dalam penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan LKS Bipartit, serta penerapan Struktur dan Skala Upah.

Guna meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran perusahaan dalam melengkapi instrumen hubungan industrial tersebut, instansi merumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

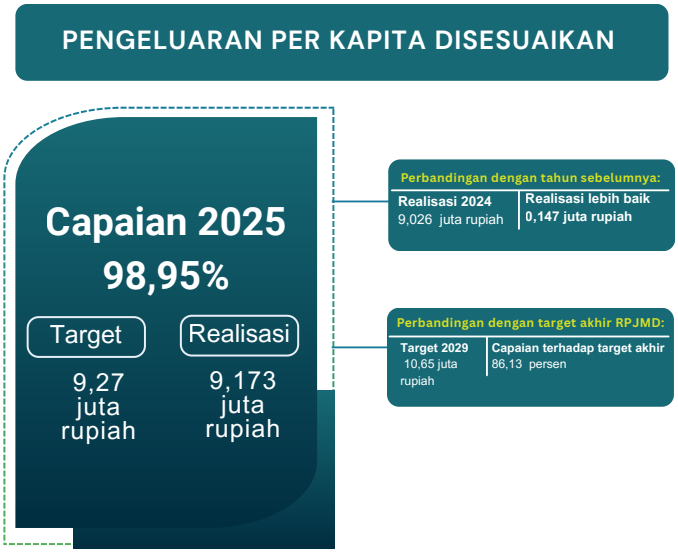
Optimalisasi pendampingan teknis (coaching clinic)
Penyusunan dokumen teknis seperti Struktur dan Skala Upah maupun Peraturan Perusahaan seringkali menjadi kendala bagi perusahaan skala menengah dan kecil. Oleh karena itu, pola pembinaan akan diperkuat melalui pendampingan teknis secara langsung. Mediator hubungan industrial akan memfasilitasi kegiatan coaching clinic untuk membantu pihak perusahaan dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut hingga proses pengesahan.

Sinergi pengawasan dan penegakan kepatuhan
Koordinasi lintas instansi akan ditingkatkan dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat wilayah kerja Cianjur. Melalui sinergi ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ketenagakerjaan, termasuk yang belum mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, akan direkomendasikan untuk mendapatkan pembinaan lanjutan hingga pemberian teguran administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan sosialisasi dialogis bipartit
Frekuensi penyuluhan kepada asosiasi pengusaha, seperti APINDO, serta serikat pekerja/serikat buruh akan ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa pemenuhan instrumen hubungan industrial bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya pencegahan sengketa serta langkah untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Penerapan sistem penghargaan (reward system)
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga merencanakan pemberian apresiasi kepada perusahaan yang secara konsisten memenuhi instrumen hubungan industrial secara lengkap. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim kompetisi yang positif di dunia usaha serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan.

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan



Meningkatnya taraf hidup masyarakat juga dapat dinilai melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup, karena nilai pengeluaran telah disesuaikan dengan tingkat harga sehingga dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif.

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,173 juta rupiah berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025. Capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 9,27 juta rupiah. Dengan demikian terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar 0,097 juta rupiah atau sekitar 97 ribu rupiah, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 98,95 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun belum mencapai target, selisih antara target dan realisasi relatif kecil sehingga secara umum kinerja indikator ini masih berada pada jalur yang mendekati sasaran yang diharapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Cianjur menunjukkan peningkatan ke arah yang positif. Pada tahun 2024 nilai pengeluaran per kapita tercatat sebesar 9,026 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 9,173 juta rupiah pada tahun 2025 atau bertambah sebesar 0,147 juta rupiah (147 ribu rupiah). Apabila dilihat dari tren beberapa tahun terakhir, pengeluaran per kapita di Kabupaten Cianjur menunjukkan peningkatan yang relatif konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat secara bertahap mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, posisi Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Cianjur masih berada pada peringkat terakhir dari 27 kabupaten/kota dan masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat di Kabupaten Cianjur relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain di Jawa Barat. Dengan demikian, meskipun tren pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan, posisi Kabupaten Cianjur yang masih berada di bawah rata-rata provinsi menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu terus didorong.

Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (juta rupiah)

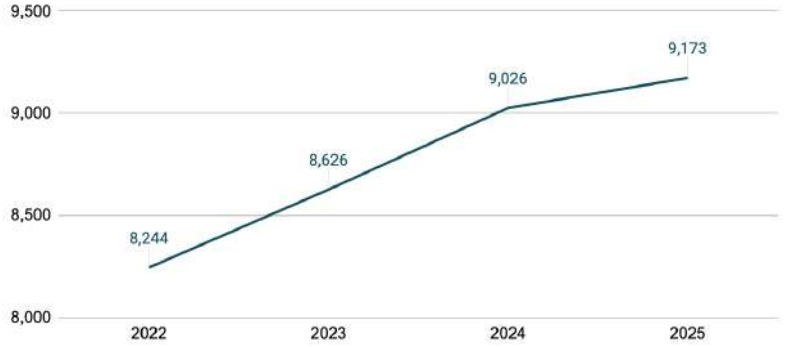
NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
1	Kota Bandung	17.639	18.236	18.795	19.280
2	Kota Depok	15.926	16.279	16.640	17.279
3	Kota Bekasi	16.239	16.479	16.775	17.216
4	Kota Cimahi	12.500	12.883	13.278	13.697
5	Kota Bogor	12.058	12.656	13.154	13.571
6	Purwakarta	12.193	12.619	13.099	13.400
7	Kota Cirebon	12.087	12.506	12.869	13.341
8	Karawang	11.927	12.392	12.942	13.251
9	Bekasi	11.757	12.123	12.500	13.004
10	Kota Sukabumi	11.229	11.799	12.252	12.692
11	**Jawa Barat**	**11.277**	**11.695**	**12.157**	**12.447**
12	Kota Banjar	10.967	11.356	11.811	12.222
13	Subang	11.294	11.537	11.894	12.144
14	Sumedang	10.776	11.136	11.589	11.963
15	Bogor	10.860	11.153	11.563	11.933
16	Kota Tasikmalaya	10.578	11.063	11.431	11.849
17	Cirebon	10.791	11.128	11.529	11.769
18	Bandung	10.588	11.018	11.392	11.619
19	Indramayu	10.166	10.580	11.010	11.316
20	Majalengka	9.950	10.340	10.842	11.094
21	Kuningan	9.620	10.011	10.418	10.707
22	Ciamis	9.428	9.750	10.085	10.406
23	Sukabumi	9.210	9.482	9.815	10.244
24	Pangandaran	9.389	9.406	9.654	9.995
25	Bandung Barat	9.044	9.392	9.583	9.862
26	Garut	8.227	8.685	9.168	9.479
27	Tasikmalaya	8.177	8.562	8.965	9.258
28	**Cianjur**	**8.244**	**8.626**	**9.026**	**9.173**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan target akhir RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029. Pada akhir periode RPJMD tahun 2029, pengeluaran per kapita disesuaikan ditargetkan mencapai 10,65 juta rupiah. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 9,173 juta rupiah, maka capaian terhadap target akhir RPJMD telah mencapai sekitar 86,13 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita di Kabupaten Cianjur telah berada pada jalur menuju target yang ditetapkan dalam RPJMD. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Cianjur masih perlu memperkuat berbagai strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan dengan kabupaten/kota lain, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

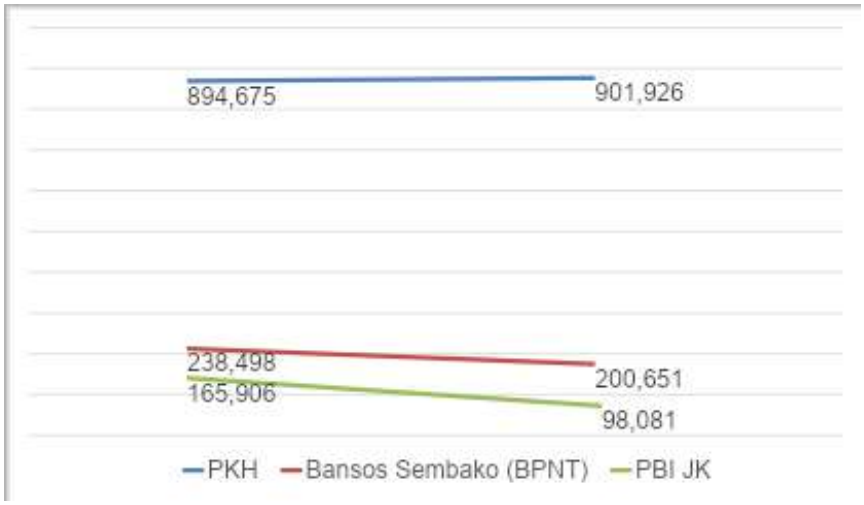
Tren Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Kabupaten Cianjur (juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Dalam upaya mendukung ketercapaian pengeluaran per kapita disesuaikan, pada tahun 2025 pemerintah kabupaten cianjur berfokus menyasar masyarakat miskin. Khususnya Dinas Sosial mendorong peningkatan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan sosial dan peluang peningkatan kualitas hidup. Hal ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta kesempatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Dengan pendekatan yang inklusif, setiap individu dan kelompok diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Melalui upaya ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, kesenjangan sosial dapat dikurangi, dan tercipta masyarakat yang produktif, tangguh, dan sejahtera.

Perbandingan Penyaluran Penerima Bantuan Sosial APBN
Tahun 2024 dan Tahun 2025



Sumber: Dinas Sosial, 2026 (diolah)

Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sosial, terjadi penurunan jumlah penerima/manfaat bantuan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dimaknai dari beberapa perspektif kinerja. Pertama, dari sisi pengendalian kemiskinan, penurunan penyaluran bantuan sosial dapat mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga jumlah penduduk yang memenuhi kriteria penerima bantuan menjadi lebih sedikit.

Kedua, penurunan juga dapat mencerminkan peningkatan akurasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga penerima bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Dalam hal ini, berkurangnya jumlah penerima bukan berarti berkurangnya komitmen pelayanan, tetapi menunjukkan proses verifikasi dan validasi yang lebih selektif sesuai kriteria yang ditetapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menyusun perencanaan penyaluran bantuan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mana sasaran tersebut berfokus untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang selama ini ada pada naungan LKS di Kabupaten Cianjur, tidak sedikit juga Dinas Sosial sering merujuk masyarakat miskin dan kelompok rentan terlantar ke LKS karena belum adanya Panti Sosial milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Cianjur.

Penyaluran bantuan sosial bagi LKS memperhatikan prosedur administrasi dan mekanisme yang jelas melalui proses input SIPD yang mana selanjutnya dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh Tim dari Bapperida Kabupaten Cianjur sehingga monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dari program ini untuk memastikan setiap bantuan digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal. Program ini juga membangun koordinasi dengan instansi terkait, mitra LKS, dan pihak-pihak yang berperan dalam penyaluran bantuan, sehingga tercipta sinergi yang mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 20 lembaga dengan nominal Rp10.000.000,00 per Lembaga.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya dengan menurunkan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dinas Sosial melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bantuan sosial yang disalurkan melalui program ini berupa uang tunai yang di transfer langsung melalui Bank yang telah ditunjuk secara teknis.

Verifikasi dan validasi tetap dilakukan agar bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran meskipun tantangannya sangat besar karena data bersifat dinamis sehingga mengalami perubahan setiap detiknya. Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca salur bantuan sosial merupakan tindak pengawasan yang Dinas Sosial laksanakan agar penerima dapat menggunakan bantuan sosial secara tepat. Pada Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah memberikan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin sebanyak 1766 keluarga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Cianjur juga berfokus pada pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada penyandang disabilitas terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, gelandangan pengemis di luar panti, dan korban bencana sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pembinaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia serta perencanaan pembangunan yang terintegrasi melalui Bappenas.

Fokus dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, SPM memiliki korelasi positif meskipun bersifat tidak langsung. SPM menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana. Kelompok-kelompok ini merupakan populasi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kemiskinan ekstrem. Pelayanan SPM berkontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan sosial, sehingga menekan kedalaman kemiskinan (poverty gap). Kedua, meningkatkan kapasitas sosial dan fungsi pemberdayaan melalui rehabilitasi sosial, yang dalam jangka panjang dapat mendorong produktivitas. Ketiga, berperan sebagai shock absorber ketika terjadi bencana atau krisis, sehingga mencegah masyarakat rentan jatuh ke kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Secara nasional, pola yang terlihat menunjukkan bahwa daerah dengan implementasi SPM yang baik cenderung memiliki ketahanan sosial yang lebih kuat. Hal ini berdampak pada stabilitas kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sehingga laju peningkatan kemiskinan dapat ditekan, bahkan berkontribusi pada tren penurunan kemiskinan secara bertahap. SPM berfungsi sebagai fondasi perlindungan dasar yang memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Dinas Sosial pada Program Rehabilitasi Sosial dalam Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara, khususnya kelompok rentan yang mengalami hambatan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka kebijakan nasional, program ini berada dalam pembinaan teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia dan menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rehabilitasi sosial dalam SPM bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran program ini meliputi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana yang berada di luar panti sosial. Kelompok-kelompok tersebut diprioritaskan karena memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kemiskinan ekstrem dan eksklusi sosial. Pelaksanaan program diawali dengan proses pendataan dan asesmen sosial guna mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, serta potensi penerima layanan.

Berdasarkan hasil asesmen, dilakukan intervensi sosial yang dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian bantuan sosial, dukungan psikososial, pendampingan, hingga rujukan kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi kependudukan. Pendekatan yang digunakan bersifat profesional dan berbasis kasus, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap individu atau keluarga.

Dalam konteks SPM, pelayanan rehabilitasi sosial harus memenuhi indikator yang terukur, seperti cakupan layanan, ketepatan waktu pemberian bantuan, serta kesesuaian kualitas layanan dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial dan peningkatan keberfungsian sosial mereka.

Secara strategis, Program Rehabilitasi Sosial dalam SPM berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang mencegah kelompok rentan semakin terperosok ke dalam kemiskinan. Program ini bukan semata-mata bersifat bantuan sesaat, melainkan bertujuan menciptakan kemandirian, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Selanjutnya Program Penanganan Bencana. Dalam kerangka kebijakan nasional, pelaksanaannya berada dalam koordinasi sektor sosial bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia serta bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai koordinator penanggulangan bencana secara nasional.

Dalam konteks SPM, Program Penanganan Bencana bertujuan memastikan korban bencana memperoleh pelayanan sosial secara cepat, tepat, dan sesuai standar. Pelayanan ini mencakup fase tanggap darurat hingga rehabilitasi sosial pascabencana. Sasaran program adalah individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non-alam yang mengalami gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pelaksanaan program dimulai dari respon cepat saat terjadi bencana, meliputi evakuasi, pendataan korban, serta penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial. Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa bantuan tersalurkan tepat waktu dan menjangkau seluruh korban, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Setelah fase tanggap darurat, pelayanan dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial, yaitu upaya pemulihan kondisi sosial masyarakat agar dapat kembali berfungsi secara normal. Hal ini dapat berupa dukungan pemulihan psikososial, fasilitasi reunifikasi keluarga, serta penguatan ketahanan sosial komunitas terdampak.

Dalam kerangka SPM, keberhasilan Program Penanganan Bencana diukur melalui indikator yang terstandar, seperti ketepatan waktu respon, cakupan pelayanan terhadap korban terdampak, serta kesesuaian bantuan dengan standar kebutuhan dasar. Dengan demikian, pelayanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terstruktur dan terukur.

Sasaran

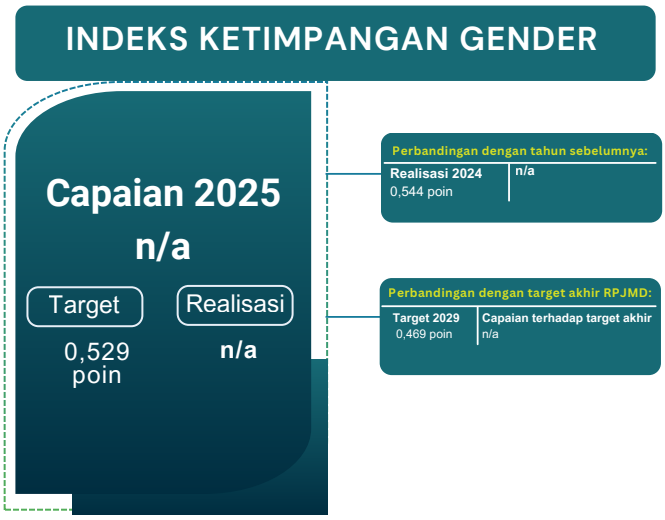
Meningkatnya Pembangunan dan Kesejahteraan Berorientasi Penduduk, Kesetaraan Gender dan Pembangunan Keluarga

Pembangunan yang berorientasi pada penduduk, kesetaraan gender, dan pembangunan keluarga merupakan arah kebijakan yang diwujudkan melalui sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan dan Kesejahteraan Berorientasi Penduduk, Kesetaraan Gender dan Pembangunan Keluarga” di Kabupaten Cianjur. Sasaran ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dengan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pengukuran capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan dan Kesejahteraan Berorientasi Penduduk, Kesetaraan Gender dan Pembangunan Keluarga” dilakukan melalui indikator kinerja utama, yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan, sementara Indeks Pembangunan Keluarga mencerminkan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Adapun Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan menilai sejauh mana pembangunan daerah telah memperhatikan aspek kependudukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. IPBK menjadi indikator untuk menilai apakah pemerintah telah menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.

Ketiga indikator tersebut secara terpadu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur, baik dari aspek kesetaraan gender, ketahanan keluarga, maupun pengelolaan kependudukan. Melalui pengukuran ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

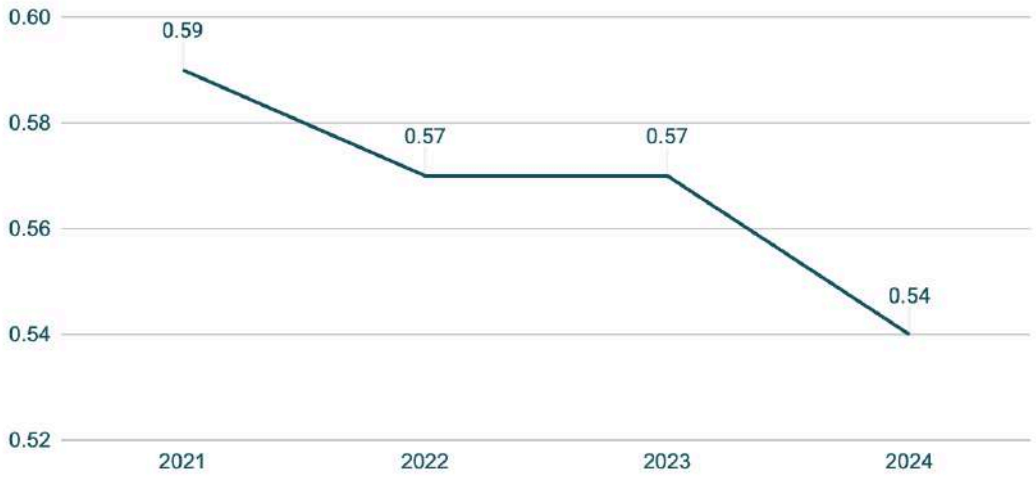
Indeks Ketimpangan Gender



Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas diarahkan melalui sasaran strategis peningkatan pembangunan dan kesejahteraan yang berorientasi pada penduduk, kesetaraan gender, dan pembangunan keluarga. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender.

Realisasi Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2025 sampai pada waktu penyusunan laporan ini dibuat belum ada rilis realisasinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka belum dapat dianalisis terkait capaian realisasi kinerjanya pada tahun 2025.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Cianjur



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2021, IKG tercatat sebesar 0,59, kemudian menurun menjadi 0,57 pada tahun 2022 dan relatif stabil pada tahun 2023, sebelum kembali menurun menjadi 0,54 pada tahun 2024.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	2024
1	Kota Cimahi	0.162
2	Kota Depok	0.165
3	Sumedang	0.217
4	Kota Banjar	0.239
5	Kota Bandung	0.244
6	Kota Bekasi	0.273
7	Bekasi	0.348
8	Indramayu	0.349
9	Kota Tasikmalaya	0.354
10	Kota Sukabumi	0.359
11	Kota Bogor	0.376
12	Kota Cirebon	0.383
13	Cirebon	0.385
14	Bandung	0.387
15	Kuningan	0.415
16	Pangandaran	0.415
17	Subang	0.432
18	Majalengka	0.437
19	Ciamis	0.439
	Provinsi Jawa Barat	0.458
20	Karawang	0.478
21	Bandung Barat	0.520
22	Sukabumi	0.533
23	Garut	0.533
24	Cianjur	0.544
25	Purwakarta	0.548
26	Tasikmalaya	0.559
27	Bogor	0.577

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024, Kabupaten Cianjur mencatat nilai sebesar 0,544 dan berada pada peringkat ke-24 dari 27 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Cianjur masih relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar daerah lainnya di Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan capaian terbaik, seperti Kota Cimahi (0,162), Kota Depok (0,165), dan Kabupaten Sumedang (0,217), terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Selain itu, nilai IKG Kabupaten Cianjur juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,458, yang menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan strategi pembangunan yang memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Dalam pelaksanaannya, DPPKBP3A melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap pentingnya penerapan perspektif gender dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat kapasitas, serta memastikan pelaksanaan PUG dan PPRG dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di setiap perangkat daerah. Sasaran kegiatan ini meliputi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan PUG dan PPRG sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan lembaga agar mampu menerapkan perspektif gender secara konsisten pada seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Pelatihan ini memberikan pemahaman dan keterampilan praktis mengenai analisis gender, strategi PUG, serta penyusunan dokumen PPRG seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Peserta dipandu untuk mampu mengidentifikasi isu kesenjangan gender serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang pemangku kepentingan.

Selanjutnya, DPPKBP3A juga melaksanakan rapat koordinasi Pokja PUG sebagai forum koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Cianjur. Rapat koordinasi ini menjadi ruang bagi anggota Pokja PUG untuk berbagi informasi, menyelesaikan hambatan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di seluruh sektor pembangunan. Sasaran kegiatan ini meliputi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan terkait.

Program lainnya adalah Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), yang merupakan program terpadu lintas sektor dengan tujuan meningkatkan peran, kapasitas, dan kesejahteraan perempuan dalam keluarga melalui pengembangan wilayah dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan di tingkat desa sebagai upaya menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, serta berdaya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahun 2025, program ini dilaksanakan di Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi.

Selain itu, terdapat Program Sakola Istri Cianjur yang merupakan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Cianjur. Program ini menjadi ruang belajar nonformal yang dirancang untuk memperkuat peran perempuan dalam keluarga, ekonomi, dan masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk sesi kelas, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, serta edukasi mengenai kesehatan, parenting, dan literasi keuangan. Program ini diikuti oleh 50 orang perempuan dengan rentang usia 18 sampai dengan 55 tahun.

Selanjutnya, dalam program pemenuhan hak anak (PHA), DPPKBP3A melaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten Cianjur sebagai upaya sistematis untuk memperkuat peran anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam pemenuhan hak anak. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi percepatan Kabupaten Cianjur menuju Kabupaten Layak Anak, dengan sasaran sebanyak 35 orang anak berusia 13 sampai dengan 17 tahun yang berasal dari perwakilan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memastikan satuan pendidikan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, sehat, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Implementasi SRA diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pelibatan peserta didik, serta penguatan kebijakan sekolah guna mencegah kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta.

Kegiatan lainnya adalah pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pegiat atau lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi anak. Kegiatan ini diikuti oleh 65 orang peserta yang berasal dari 33 desa.

Hambatan utama dalam menekan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Cianjur bersumber dari tiga dimensi krusial yang masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar. Pertama, pada dimensi kesehatan reproduksi, di mana angka kematian ibu dan proporsi kelahiran di luar fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah pelosok seperti Cianjur Selatan, masih menjadi beban terhadap capaian indeks. Kedua, pada dimensi pemberdayaan, yang dipengaruhi oleh rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta kesenjangan tingkat pendidikan menengah antara laki-laki dan perempuan akibat masih tingginya angka putus sekolah. Ketiga, pada dimensi pasar tenaga kerja, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang disebabkan oleh beban ganda domestik serta terbatasnya akses perempuan terhadap sektor pekerjaan formal yang inklusif.

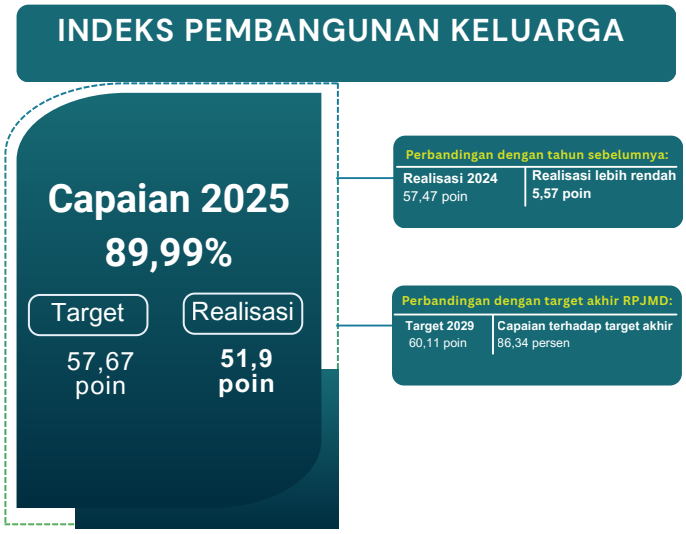
Dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan gender secara nyata, diperlukan langkah-langkah solutif yang strategis dan terintegrasi. Pada bidang kesehatan, dilakukan penguatan program Jaminan Persalinan (Jampersal) serta optimalisasi peran Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di wilayah terpencil untuk memastikan seluruh ibu hamil dapat bersalin di fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga dapat menekan angka kematian ibu. Pada bidang pendidikan dan sosial, dilakukan implementasi kebijakan Zero Child Marriage melalui Peraturan Desa (Perdes) yang ketat, serta pemberian beasiswa khusus bagi anak perempuan dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK maupun perguruan tinggi, guna meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan agar setara dengan laki-laki.

Selanjutnya, pada bidang politik, dilakukan penyelenggaraan Sekolah Kader Politik Perempuan secara rutin untuk mempersiapkan tokoh perempuan potensial di tingkat desa dan kecamatan agar mampu berpartisipasi dan bersaing dalam kontestasi politik serta menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Pada bidang ekonomi, didorong penyusunan regulasi perusahaan inklusif di tingkat kabupaten yang mewajibkan penyediaan fasilitas ruang laktasi dan tempat penitipan anak (daycare) di kawasan industri, sehingga perempuan dapat tetap aktif di pasar tenaga kerja tanpa harus mengorbankan peran domestik dan keluarga.

Selain itu, pada bidang data, dilakukan digitalisasi data gender melalui sistem Satu Data Gender Cianjur yang terintegrasi antar perangkat daerah, sehingga setiap intervensi, baik bantuan sosial maupun pelatihan ekonomi, dapat lebih tepat sasaran kepada kelompok perempuan yang paling rentan secara ekonomi.
Dengan demikian, upaya penurunan IKG di Kabupaten Cianjur tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPPKBP3A, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, guna memastikan bahwa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh laki-laki maupun perempuan.

Indeks Pembangunan Keluarga

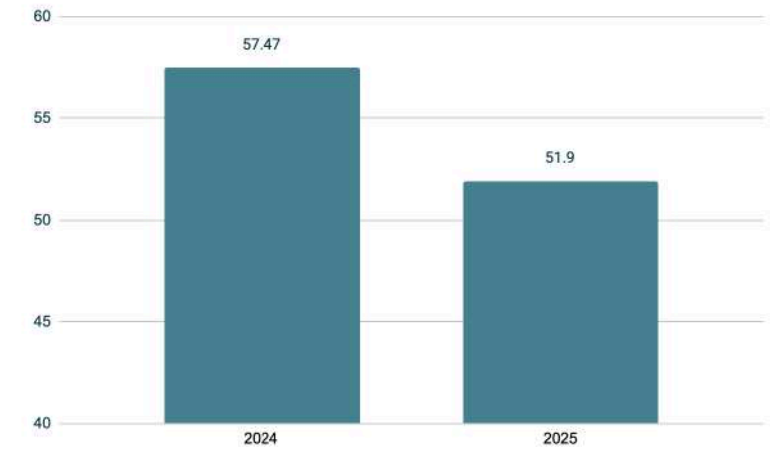
Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas diarahkan melalui sasaran strategis peningkatan pembangunan dan kesejahteraan yang berorientasi pada penduduk, kesetaraan gender, dan pembangunan keluarga. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga.



Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2025 sebesar 51,9 poin dengan capaian kinerja sebesar 89,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 57,67 poin.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD 2025–2029, realisasi Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2025 mencapai 86,34 persen terhadap target akhir, dengan target pada tahun 2029 sebesar 60,11 poin.

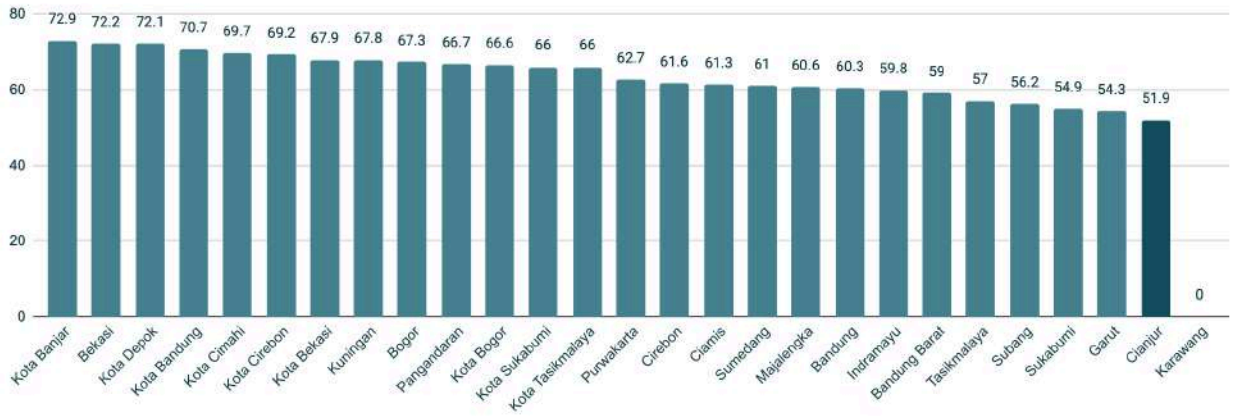
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Cianjur



Sumber: BKKBN, 2026 (diolah)

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Cianjur menunjukkan tren penurunan pada periode tahun 2024 hingga 2025. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Keluarga tercatat sebesar 57,47 poin, kemudian menurun menjadi 51,9 poin pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Cianjur mengalami pelemahan pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Sumber: BKKBN, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat nilai sebesar 51,9 poin dan berada pada kelompok capaian terendah, yaitu peringkat ke-26 dari seluruh kabupaten/kota yang terukur. Capaian ini berada jauh di bawah daerah dengan nilai tertinggi seperti Kota Banjar (72,9 poin), Kabupaten Bekasi (72,2 poin), dan Kota Depok (72,1 poin).

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kabupaten/kota lainnya, nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Cianjur juga masih tertinggal, bahkan berada di bawah sebagian besar daerah dengan karakteristik wilayah yang relatif serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Cianjur masih memerlukan perhatian dan upaya peningkatan yang lebih intensif.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melaksanakan berbagai kegiatan di masyarakat, antara lain melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Duta Generasi Berencana (GenRe).

Pembinaan dilakukan kepada keluarga yang memiliki remaja dengan materi terkait kesehatan reproduksi dan Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), yang meliputi pencegahan pergaulan bebas atau kehamilan dini, pencegahan HIV/AIDS, serta penyalahgunaan napza. Pada tahun 2025, pembinaan dilaksanakan pada 607 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), 190 kelompok PIK-R, serta kepada 720 Duta Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Cianjur. Dalam pelaksanaannya, DPPKBP3A juga melakukan pembinaan kepada para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak di masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum meratanya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat bagi remaja, keterbatasan partisipasi keluarga dalam kegiatan pembinaan, serta belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan masyarakat sebagai sarana edukasi keluarga.

Sebagai alternatif solusi, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada keluarga yang memiliki remaja, penguatan peran kader dan penyuluh keluarga berencana dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta pengembangan kegiatan pembinaan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Remaja. Selain itu, sinergi dengan perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat juga terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pengasuhan remaja di lingkungan keluarga dan masyarakat.

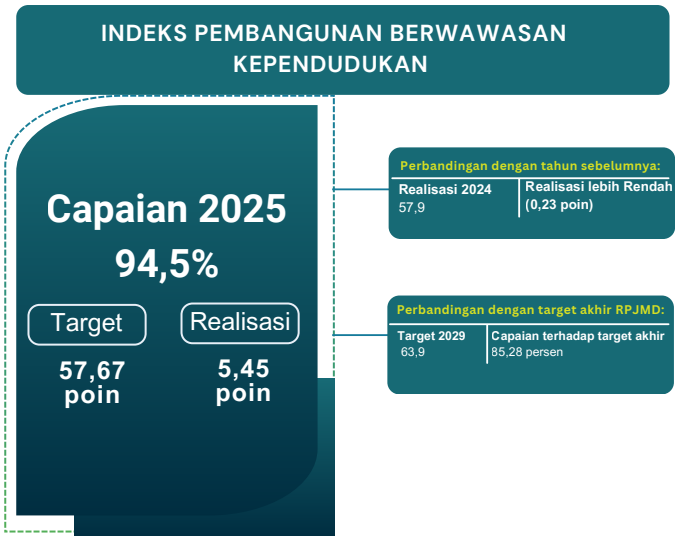
Selain pembinaan remaja, DPPKBP3A juga melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lansia di masyarakat. Upaya ini ditunjukkan melalui peningkatan partisipasi keluarga dalam memberikan dukungan terhadap lansia serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendorong lansia untuk tetap aktif, sehat, dan produktif. Dukungan program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui penguatan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan lansia.

Selanjutnya, pembinaan dan pemberdayaan lansia juga dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Lansia yang mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Di Kabupaten Cianjur terdapat 3 (tiga) Sekolah Lansia, yaitu Sekolah Lansia Kemuning di Kecamatan Cipanas, Sekolah Lansia Lentera Hati di Kecamatan Pacet, dan Sekolah Lansia Bunga Desa di Kecamatan Pacet. Pada tahun 2025, jumlah lulusan Sekolah Lansia angkatan pertama mencapai 70 orang.
Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain belum meratanya partisipasi lansia dalam kegiatan pemberdayaan, keterbatasan akses terhadap layanan pembinaan lansia di beberapa wilayah, serta masih terbatasnya pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan terhadap lansia agar tetap aktif dan mandiri.

Sebagai alternatif solusi, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penguatan pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia, peningkatan sosialisasi kepada keluarga mengenai pentingnya peran keluarga dalam mendukung keberdayaan lansia, serta penguatan sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan lansia. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan keberdayaan lansia di Kabupaten Cianjur dapat terus meningkat sehingga lansia dapat menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, dan produktif.

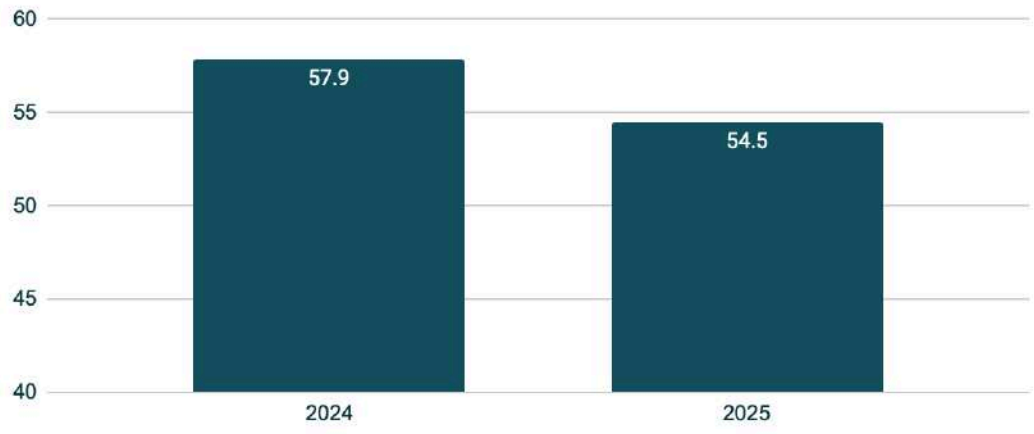
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Realisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 54,5 poin dengan capaian kinerja sebesar 94,5 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja IPBK pada tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 57,67 poin. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara realisasi dan target yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.



Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD 2025–2029, capaian IPBK tahun 2025 telah mencapai 85,28 persen terhadap target akhir yang ditetapkan. Adapun target IPBK pada tahun 2029 diharapkan dapat mencapai angka 63,9 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun belum memenuhi target tahunan, posisi kinerja saat ini masih berada pada jalur yang cukup progresif menuju target akhir RPJMD, dengan catatan perlunya upaya percepatan dan peningkatan efektivitas program pada tahun-tahun berikutnya.

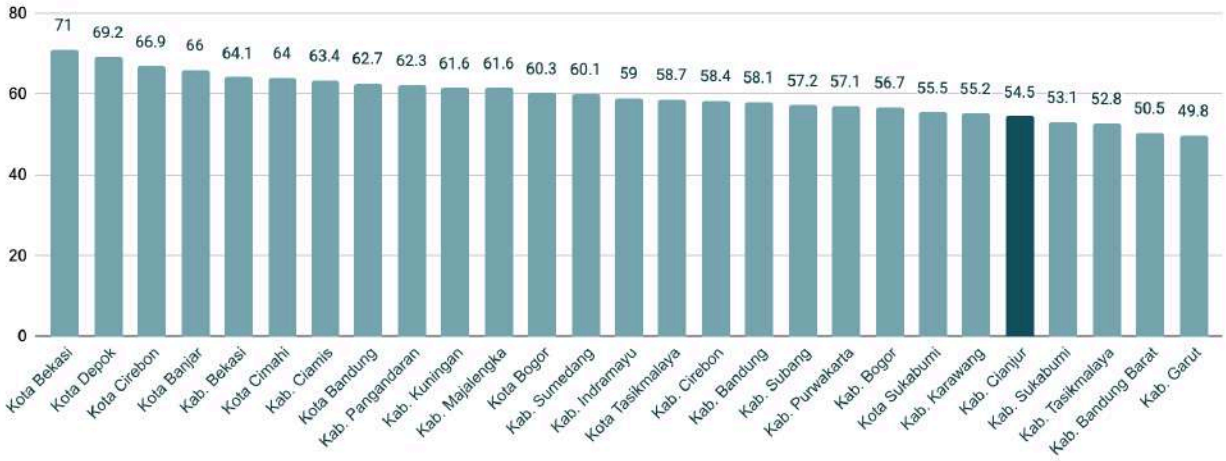
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kabupaten Cianjur



Sumber: BKKBN, 2026 (diolah)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Cianjur pada periode tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, IPBK tercatat sebesar 57,9 poin, kemudian menurun menjadi 54,5 poin pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Cianjur mengalami perlambatan pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber: BKKBN, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat nilai sebesar 54,5 poin dan berada pada peringkat ke-23 dari 27 kabupaten/kota. Capaian ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Cianjur masih berada pada kelompok capaian relatif rendah dibandingkan daerah lainnya.

Jika dibandingkan dengan daerah dengan capaian tertinggi, seperti Kota Bekasi (71,00 poin), Kota Depok (69,20 poin), dan Kota Cirebon (66,90 poin), terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Bahkan dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota lainnya, capaian IPBK Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata, termasuk dibandingkan dengan daerah yang memiliki karakteristik wilayah yang relatif serupa.

Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai indikator dari sasaran meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan yang berorientasi pada penduduk, kesetaraan gender, dan pembangunan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022–2037. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cianjur.

Program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB). Upaya ini dilakukan melalui advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta penggerakan masyarakat dengan penguatan peran penyuluh keluarga berencana di tingkat lapangan, yang meliputi TPK, TPKBK, PLKB, Teladan KB, kader Posyandu, dan Pos KB Desa. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Pada tahun 2025, capaian peserta KB aktif sebesar 64,5 persen dari total pasangan usia subur sebanyak 385.898 pasangan, dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 249.087 pasangan.

Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) ke fasilitas kesehatan, pelayanan kontrasepsi melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan kelompok kegiatan keluarga, serta peningkatan kesadaran pasangan usia subur dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga penyuluh, fasilitas pelayanan kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengendalian angka kelahiran, sehingga capaian Total Fertility Rate (TFR) dapat terus menunjukkan tren yang semakin baik.

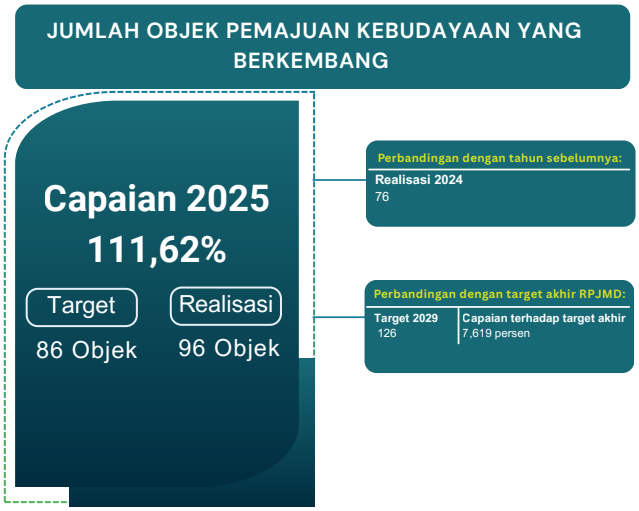
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki preferensi jumlah anak yang relatif tinggi, keterbatasan akses pelayanan keluarga berencana di beberapa wilayah, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Sebagai alternatif solusi, Pemerintah Daerah melalui penguatan program bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur terus melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan keluarga berencana, penguatan edukasi kepada pasangan usia subur, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh di lapangan, serta penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan masyarakat dalam mendukung Program Bangga Kencana. Melalui upaya tersebut, diharapkan pengendalian angka kelahiran dapat semakin optimal sehingga capaian Total Fertility Rate (TFR) dapat terus menurun dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Sasaran

Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

Ragam potensi warisan budaya di Kabupaten Cianjur perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekayaan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur yang menitikberatkan pada peningkatan pelestarian budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.



Pada tahun 2025, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang berkembang tercatat sebanyak 96 objek. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 86 objek, sehingga realisasi kinerja mencapai 111,26 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan sebanyak 76 objek pemajuan kebudayaan yang berkembang, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang berkembang. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang cukup efektif dalam mendorong pelestarian serta pengembangan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Cianjur.

Jika dikaitkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2029, capaian pada tahun 2025 telah mencapai 76,19 persen dari target yang ditetapkan. Adapun target yang diharapkan pada tahun 2029 adalah sebanyak 126 objek pemajuan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Cianjur.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, indikator jumlah objek pemajuan kebudayaan yang berkembang belum dapat dilakukan perbandingan secara langsung. Hal ini disebabkan adanya perbedaan indikator maupun metode pengukuran yang digunakan oleh masing-masing daerah, sehingga hasil capaian antar daerah belum dapat dibandingkan secara setara.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan budaya daerah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain meliputi pendataan, identifikasi, serta pengusulan penetapan warisan budaya, baik Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Takbenda, guna memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendataan ini mencakup berbagai aspek, seperti situs sejarah, bangunan tua, kesenian tradisional, adat istiadat, hingga kuliner khas Cianjur. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menghidupkan kembali tradisi dan kesenian melalui penyelenggaraan festival budaya, pagelaran seni, serta lomba-lomba tradisional, termasuk pelestarian Tembang Cianjuran sebagai identitas budaya khas daerah. Upaya lainnya dilakukan melalui dokumentasi warisan budaya dalam bentuk foto, video, dan arsip digital untuk mencegah kehilangan data sekaligus mendukung promosi melalui media sosial dan website resmi pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pelestarian budaya di Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi, pendanaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Pada tahun 2025, salah satu faktor pendukung pelestarian budaya daerah adalah pelaksanaan kegiatan atraksi seni. Atraksi seni merupakan pertunjukan karya seni yang ditampilkan kepada masyarakat sebagai bentuk ekspresi budaya, hiburan, dan apresiasi nilai estetika, yang melibatkan seniman, komunitas, maupun masyarakat luas. Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan serta mengekspresikan karya seni sebagai bagian dari pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, sekaligus menjadi sarana edukasi dan penguatan identitas budaya daerah. Sepanjang tahun 2025, kegiatan atraksi seni dilaksanakan pada berbagai momentum dan lokasi, antara lain:

1. Pembukaan Kuliner Malam, pada tanggal 11 Januari 2025
2. Libur Panjang Berkesenian di Taman Bunga Nusantara,pada tanggal 28-31 Januari 2025
3. Mandi Kahuripan, pada Tanggal 22 Februari 2025
4. Launching program nyaah ka indung, pada tanggal 11 April 2025
5. sambut kunjungan kerja kaesang, pada tanggal 02 Mei 2025
6. Tampilan Seni dalam Rangka Cross Bvoice Senaya's Cultural, pada tanggal 16 Mei 2025
7. Peresmian Gedung Creative Center dan Soft Opening Mall Pelayanan Publik, pada tanggal 27 Mei 2025
8. Nanggala Festival 2025 "Ngalokat Cai", pada tanggal 02 Juni 2025
9. Binojakrama Padalangan Wayang Golek Purwa, pada tanggal 12 Juni 2025
10. Festival Permainan Rakyat Jawa Barat 2025, pada tanggal 25-26 Juni 2025
11. City Tour dan Peluncuran Balon Udara Taman Bunga, pada tanggal 05 Juli 2025
12. Rudat Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2025, pada tanggal 26 Juli 2025
13. Serat Kalih Kirab Budaya Hari Jadi Ke - 80 Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 19 Agustus 2025
14. Mamaos Kirab Budaya Hari Jadi Ke - 80 Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 19 Agustus 2025
15. Tampilan Wayang Gejlig dalam rangka Pendokumentasian Warisan Budaya Tak Benda, pada tanggal 31 Agustus 2025
16. Tampilan Maenpo Cikalong dalam rangka Festival Pencak Malioboro, pada tanggal 13-14 September 2025
17. Tampilan Rampak Kendang dalam rangka Jakarta Open Trail Run Series, pada tanggal 26 September 2025
18. Tampilan Tari Kariaan dalam rangka Grand Final Mojang Jajaka Cianjur, pada tanggal 10 Oktober 2025
19. Tampilan Tari Upacara Adat / Sambutan dalam rangka Resital Ujian Tari Sanggar Seni Sekar Panghegar, pada tanggal 18 Oktober 2025

19. Tampilan Tari Upacara Adat / Sambutan dalam rangka Resital Ujian Tari Sanggar Seni Sekar Panghegar, pada tanggal 18 Oktober 2025
20. Tampilan Calung dalam rangka Abdi Nagri Nganjang Ka Warga, pada tanggal 01 November 2025
21. Tampilan Tari Kreasi Kaulinan dalam rangka Abdi Nagri Nganjang Ka Warga, pada tanggal 01 November 2025
22. Tampilan Bangkong Reang dalam rangka Abdi Nagri Nganjang Ka Warga, pada tanggal 01 November 2025
23. Tampilan Tari Persembahan dalam rangka Resital Tari atau Ujian Kenaikan Tingkat, pada tanggal 22 November 2025
24. Tampilan Tari Kepak Nafas Garuda dalam rangka Cianjur Berlari, pada tanggal 30 November 2025
25. Tampilan Pakemplung dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 12 Desember 2025

Selain itu, upaya pelestarian budaya juga dilakukan melalui penyelenggaraan Pasanggiri Mamaos, yaitu perlombaan seni vokal tradisional Sunda yang menampilkan Tembang Cianjuran. Mamaos Cianjuran merupakan seni musik tradisional yang memadukan vokal dengan iringan kecapi dan suling, yang berkembang sejak masa Bupati Raden Adipati Wiranatakusumah V. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025 di Dewan Kesenian Cianjur dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang dari tingkat SD dan SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan seni tradisi, meningkatkan apresiasi masyarakat, serta mendorong regenerasi seniman, khususnya di kalangan generasi muda.

Daftar Warisan Budaya yang Sudah Dilestarikan tahun 2025

NO	NAMA WARISAN BUDAYA	ALAMAT	STATUS
1	Situs Gunung Padang	Kp. Cipanggulaan Ds. Karyamukti Kec. Campaka	Cagar Budaya
2	Megalith Pasir Pogor	Desa Cikidang, Kec. Mande	Cagar Budaya
3	Megalith Pasir Tongtu	Desa Cikidang, Kec. Mande	Cagar Budaya
4	Megalith Bukit Kasur	Kec. Sukamaju RT 02 RW 05 Ds. Gadog Kec. Pacet	Cagar Budaya
5	Megalith Gunung Putri	Ds. Cikanyere Kec. Sukaresmi	Cagar Budaya
6	Megalith Lemah Duhur	Kp. Cijembar Ds. Sukajembar, Kec. Sukanagara	Cagar Budaya
7	Megalith Pasir Manggu	Kp. Cijembar Girang Ds. Sukajembar Kec. Sukanagara	Cagar Budaya
8	Megalith Pasir Gada	Kp. Cijembar Girang Ds. Sukajembar, Kec. Sukanagara	Cagar Budaya
9	Megalith Ciranjang	Ciranjang	Cagar Budaya
10	Istana Kepresidenan Cipanas	Jl. Raya Cipanas, Kec. Cipanas	Cagar Budaya
11	Pendopo Kabupaten Cianjur	Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Cagar Budaya
12	Bumi Ageung Cikidang	Jl. Moch. Ali No.64, Solokpandan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43214	Cagar Budaya

13	Kantor Pos dan Giro	Jl. Siti Jenab No. 39, Kec. Cianjur	Cagar Budaya
14	Stasiun Kereta Api	Jl. Yulius Usman No. 21, Kec. Cianjur	Cagar Budaya
15	Gedung Ampera (DKC)	Kec. Cianjur	Cagar Budaya
16	PLTA Cugenang	Jl. Gasol, Kec. Cugenang	Cagar Budaya
17	Tugu Pertempuran Cisokan	Kec. Sukaluyu	Cagar Budaya
18	Bunker I	Kec. Sukaluyu	Cagar Budaya
19	Lonceng Pendopo	Kec. Cianjur	Cagar Budaya
20	Makam Dalem Pancaniti	Kompleks Pemakaman Pasarean Agung, Kec. Cianjur	Cagar Budaya
21	Tebing Inggris Ciranjang	Kec. Ciranjang	Cagar Budaya
22	Gedung Suge	Jl. Taifur Yusuf No. 50	Cagar Budaya
23	Pangguyangan Badak Putih	Kec. Cianjur	Cagar Budaya
24	Jembatan Cisokan Lama	Kec. Ciranjang	Cagar Budaya
25	Arca Campalarang	Desa Miduana, Kec. Naringgul	Cagar Budaya
26	Goong Renteng Cibalagung	Desa Bobojong, Kec. Mande	Cagar Budaya
27	Manuskrip Surat Nyi Sariwulan	Desa Bobojong, Kec. Mande	Cagar Budaya
28	Manuskrip Piagam Sultan Sepuh Cirebon	Desa Bobojong, Kec. Mande	Cagar Budaya
29	Manuskrip Bambu Silsilah Prabu Siliwangi	Desa Bobojong, Kec. Mande	Cagar Budaya
30	Wisma Karya	Kec. Cianjur	Cagar Budaya
31	Polsek Pacet	Kec. Pacet	Cagar Budaya
32	Makam Dalem Cikundul	Jl. Maqom Dalem Cikundul Rt.02/01, Cijagang, Kec. Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43291	Objek Diduga Cagar Budaya
33	Makam Pahlawan Nasional Pr. Hidayatulloh	Jl. Pangeran Hidayatullah, Sawah Gede, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43212	Objek Diduga Cagar Budaya
34	Mandi Kahuripan	Desa Miduana, Kec. Naringgul	Warisan Budaya Takbenda
35	Makam Raden Aria Wira Tanu Datar II	Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Objek Diduga Cagar Budaya
36	Makam Raden Aria Wira Tanu Datar III	Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Objek Diduga Cagar Budaya
37	Makam Raden Aria Wira Tanu Datar IV	Kompleks Pemakaman Pasarean Agung, Kec. Cianjur	Objek Diduga Cagar Budaya
38	Jalangkring	Kecamatan Sindangbarang	Karya Budaya
39	Wayang Gejlig	Desa Miduana, Kec. Naringgul	Karya Budaya
40	Makam Raden Aria Wira Tanu Datar V	Kompleks Pemakaman Pasarean Agung, Kec. Cianjur	Objek Diduga Cagar Budaya
41	Hateup Miduana	Desa Miduana, Kec. Naringgul	Karya Budaya
42	Makam Raden Aria Wira Tanu Datar VI	Kompleks Pemakaman Pasarean Agung, Kec. Cianjur	Objek Diduga Cagar Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

Jumlah total warisan budaya Tahun 2025: 42 objek.

- Cagar Budaya: 31 objek (73.8%)
- Objek Diduga Cagar Budaya: 7 objek (16.7%)
- Karya Budaya: 3 objek (7.1%)
- Warisan Budaya Takbenda: 1 objek (2.4%)

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan cagar budaya, pada tahun 2025 juga dilaksanakan kegiatan penetapan cagar budaya dan pembuatan papan nama cagar budaya. Penetapan cagar budaya dilakukan melalui proses kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terhadap Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) hingga penetapan melalui keputusan kepala daerah. Sementara itu, pembuatan papan nama bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan nilai penting cagar budaya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penetapan cagar budaya masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan data yang tersedia, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang cagar budaya, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta adanya perubahan kondisi fisik pada objek cagar budaya. Kendala-kendala tersebut memengaruhi proses identifikasi, pengkajian, hingga penetapan cagar budaya secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui inventarisasi dan pendataan secara bertahap dengan melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), akademisi, dan pemerhati sejarah. Selain itu, dilakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat serta penyebarluasan informasi melalui media sosial guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Upaya lainnya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan rapat koordinasi serta penetapan alur penetapan yang lebih jelas. Di samping itu, dilakukan pendokumentasian kondisi objek secara detail serta pemeliharaan dan kunjungan secara rutin guna menjaga keberlanjutan dan kondisi fisik cagar budaya.

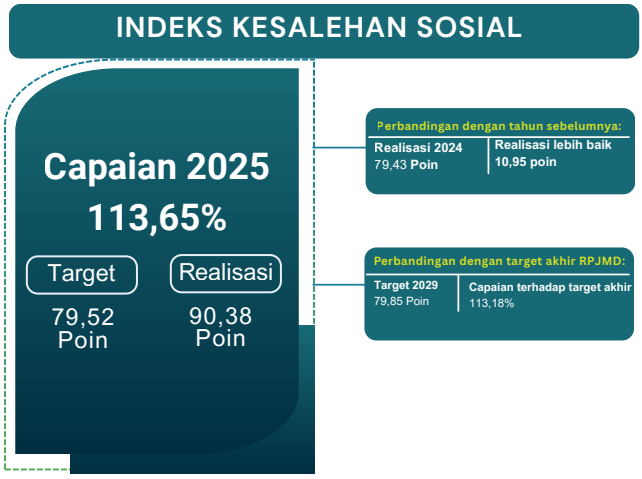
Sasaran

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Kehidupan Masyarakat Aman, Tentram, dan Kondusif

Peningkatan kerukunan antar umat beragama serta terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan kondusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Cianjur. Hal ini diwujudkan melalui sasaran strategis “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Kehidupan Masyarakat Aman, Tentram, dan Kondusif”yang menekankan pentingnya harmoni sosial, toleransi, serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menjadi fondasi utama dalam mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengukuran capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Kehidupan Masyarakat Aman, Tentram, dan Kondusif” dilakukan melalui beberapa indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kerukunan Umat Beragama, serta Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ketiga indikator tersebut secara terpadu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Cianjur, baik dari aspek hubungan antar umat beragama, kepedulian sosial, maupun situasi keamanan dan ketertiban. Melalui pengukuran ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif.

Indeks Kesalehan Sosial

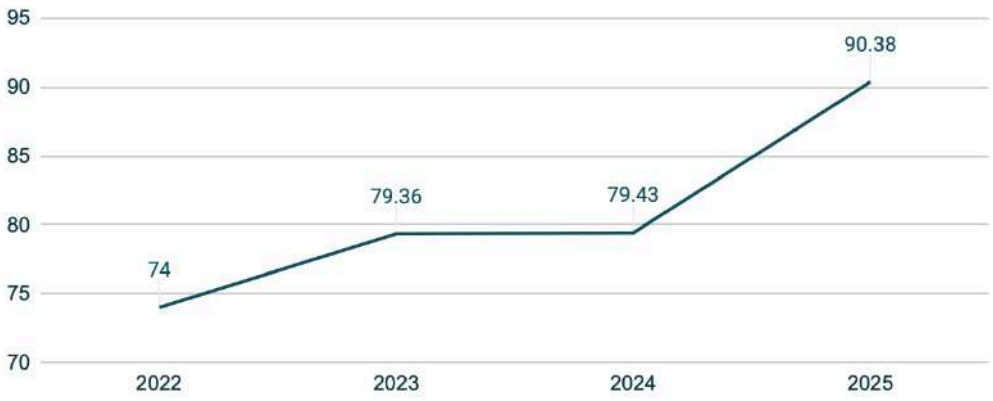


Indeks Kesalehan Sosial merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dengan cara melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti survei, penelitian lapangan, dan analisis data sekunder untuk membangun kriteria dan variabel yang relevan untuk pengukuran. Sasaran untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta kehidupan masyarakat aman, tentram dan kondusif dapat diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). IKS memberikan gambaran tentang sejauh mana individu dalam masyarakat mengintegrasikan nilai nilai moral, kejujuran, keadilan, dan solidaritas dalam kehidupan sehari hari mereka, yang semuanya merupakan aspek penting dari akhlak mulia dan takwa.

Indeks Kesalehan Sosial tahun 2025 di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 90,38 yang melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 79,52 dengan selisih antara target dan realisasi sebesar 10,86 poin. Realisasi ini menunjukkan bahwa capaian indeks kesalehan sosial tahun 2025 baru mencapai sekitar 113,65 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2929.

Berdasarkan data capaian Indeks Kesalehan Sosial, terdapat perbandingan hasil antara tahun 2024 dan tahun 2025. Realisasi Indeks Kesalehan Sosial tahun 2024 mencapai 79,43 poin sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2025, dengan persentase capaian sebesar 113,65 persen capaian tahun 2025 sudah melampaui dari target akhir RPJMD tahun 2025-2029 dengan capaian target akhir yaitu 113,18 persen dengan capaian tahun 2025 melebihi dari batas target akhir RPJMD 2025-2029 maka diperlukan penyesuaian target pada target tahun 2026.

Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur



Sumber: Bapperida, 2026

Secara tren, perkembangan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur dalam periode 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 74,00 poin pada tahun 2022 menjadi 79,36 poin pada tahun 2023, relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 79,43 poin, dan kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025 menjadi 90,38 poin. Lonjakan pada tahun 2025 ini mengindikasikan adanya akselerasi kinerja yang cukup kuat, baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun efektivitas intervensi program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Faktor faktor upaya dalam mencapai keberhasilan Indeks kesalehan sosial di kabupaten cianjur didorong beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur seperti kegiatan Keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dilakukan Peringatan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional dengan penuh khidmat dan dilakukan bersama-sama oleh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Keberhasilan peningkatan Indeks Kesalehan Sosial tidak terlepas dari kontribusi berbagai faktor yang saling berkaitan. Pada sasaran meningkatnya partisipasi dalam kegiatan adat dan keagamaan, faktor internal individu berperan melalui meningkatnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berinteraksi sosial serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan nilai-nilai yang berkembang turut memperkuat keterlibatan tersebut.

Dari sisi eksternal, dukungan lingkungan sosial seperti keluarga, masyarakat, dan tokoh agama menjadi pendorong utama dalam membangun interaksi dan kebersamaan. Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat dan keagamaan juga memperluas akses masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai sosial dan spiritual.

Sementara itu, dari aspek institusional, peran pemerintah daerah cukup signifikan melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan keagamaan. Salah satu contoh adalah kegiatan subuh berjamaah bagi aparatur pemerintah yang tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat nilai keteladanan serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja. Pada aspek internal, masih dijumpai rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kegiatan keagamaan, serta adanya sikap apatis yang memengaruhi tingkat partisipasi. Dari aspek eksternal, munculnya faktor sosial-psikologis seperti ketidakpedulian, antipati, dan konflik sosial turut menghambat interaksi sosial yang harmonis. Sedangkan dari sisi institusional, sosialisasi program yang belum optimal serta persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang cenderung seremonial menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Pada sasaran meningkatnya kualitas penanaman nilai-nilai mental spiritual, keberhasilan dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal, eksternal, dan institusional. Kesadaran individu, konsistensi dalam pengamalan nilai, serta dukungan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi fondasi utama. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah seperti pemberian insentif guru ngaji, integrasi nilai spiritual dalam pendidikan, serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan secara rutin turut memperkuat proses internalisasi nilai-nilai tersebut.

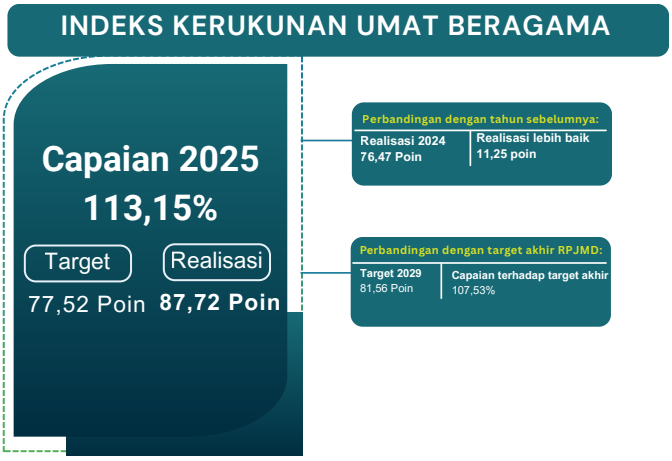
Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, antara lain dalam meningkatkan konsistensi antara pengetahuan dan perilaku, memperkuat keteladanan di lingkungan sosial, serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan program agar lebih aplikatif dan berkelanjutan.

Pada tingkat subkegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, keberhasilan ditentukan oleh komitmen pimpinan, dukungan kebijakan dan anggaran, perencanaan program yang terstruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta lingkungan yang mendukung. Konsistensi pimpinan dalam memberikan teladan, kejelasan indikator kinerja, serta pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

Adapun faktor kendala yang masih dihadapi meliputi aspek manajerial, perencanaan, sumber daya manusia, dan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya penerapan nilai keteladanan, perencanaan program yang belum sepenuhnya terstruktur, keterbatasan kompetensi fasilitator, serta budaya lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung internalisasi nilai-nilai spiritual.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan progresif. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas pelaksanaan program, peningkatan partisipasi yang lebih substantif, serta konsistensi dalam pembinaan nilai-nilai sosial dan spiritual agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

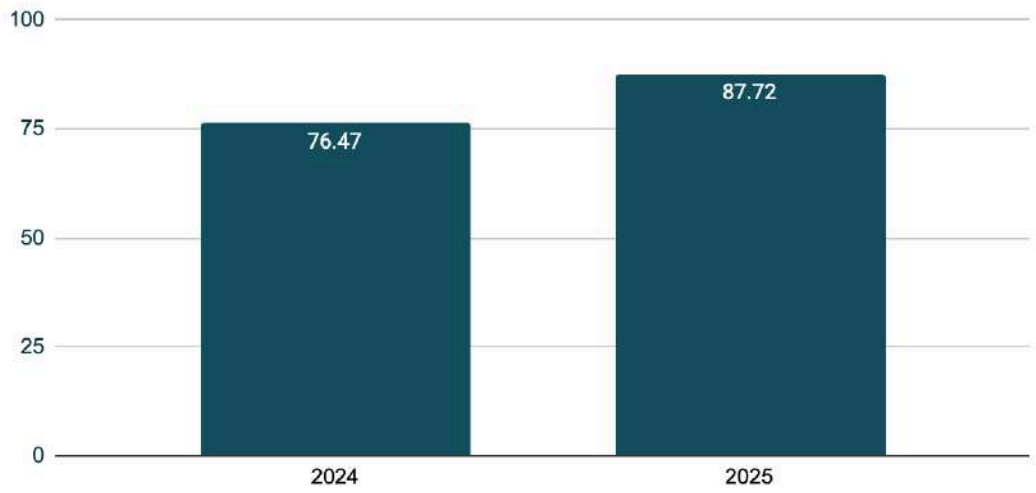


Arah kebijakan kabupaten cianjur yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter religius, sehat, cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. Sasaran selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta kehidupan masyarakat aman, tentram, dan kondusif. Salah satunya diukur dengan indikator indeks kerukunan umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari dimensi toleransi dan dimensi kerja sama berdasarkan laporan Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama tahun 2025 oleh Bapperida Kabupaten Cianjur.

Indeks kerukunan umat beragama kabupaten cianjur pada tahun 2025 yaitu 87,72 dengan capaian kinerja 113,15 persen. Realisasi tahun 2025 tersebut telah berhasil melebihi target kinerja yang ditentukan pada dokumen perencanaan yaitu 77,52 persen.

Apabila dikaitkan dengan target akhir akhir RPJMD pada tahun 2029 yang diharapkan dapat mencapai 81,57 poin, realisasi tahun 2025 telah melebihi target akhir yang ditentukan dengan capaian 107,53 persen. Maka perlu dilakukan evaluasi kembali dalam penentuan target di tahun selanjutnya dengan memperhatikan realisasi tahun 2025 sehingga kinerja yang dicapai menjadi lebih relevan dan berkinerja.

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cianjur



Sumber: Bapperida, 2026 (diolah)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,72, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 76,47. Kenaikan sebesar 11,25 poin ini menunjukkan adanya perbaikan yang sangat positif dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Cianjur.
Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan kondisi sosial yang harmonis, toleran, dan kondusif. Hal ini juga mengindikasikan semakin kuatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebhinekaan serta meningkatkan kualitas hubungan sosial antar umat beragama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025

	2025
Nasional	77,89
Provinsi Jawa Barat	79,43
Kabupaten Cianjur	87,72

Sumber: Provinsi Jawa Barat, 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional dan provinsi, nilai IKUB Kabupaten Cianjur berada pada posisi yang sangat baik. Pada tahun 2025, nilai IKUB nasional tercatat sebesar 77,89 dan Provinsi Jawa Barat sebesar 79,43, sedangkan Kabupaten Cianjur mencapai 87,72. Dengan demikian, capaian Kabupaten Cianjur berada jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Cianjur tidak hanya berada pada kategori tinggi, tetapi juga menjadi salah satu daerah dengan capaian yang unggul. Ke depan, kondisi ini perlu dipertahankan melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan serta konsistensi dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan kondusif, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cianjur melaksanakan berbagai strategi yang berfokus pada penguatan toleransi, pencegahan konflik sosial, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan pencapaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Pada tahun 2025, upaya penyelesaian konflik sosial dilaksanakan secara optimal sehingga seluruh konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan pendidikan politik.

Bakesbangpol melaksanakan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Program ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat dan aparatur di wilayah Kabupaten Cianjur dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Selain itu, dilakukan koordinasi internal Bakesbangpol dengan lembaga politik lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan demokratisasi di masyarakat. Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima hibah dan bantuan keuangan partai politik, serta fasilitasi penyaluran hibah kepada KPU dan Bawaslu dan bantuan keuangan kepada 9 partai politik.

Dalam rangka menekan angka konflik sosial, Bakesbangpol juga mengoptimalkan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, serta Sejarah Kebangsaan kepada masyarakat dan aparatur dengan jumlah peserta sebanyak 360 orang. Kegiatan ini diikuti dengan koordinasi lintas lembaga serta monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima hibah, termasuk fasilitasi pemberian hibah kepada 5 lembaga. Selain itu, pada tahun 2025 juga telah terbentuk 50 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Upaya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan juga dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang, disertai koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Cianjur. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 7 lembaga penerima bantuan hibah.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas sosial, dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama kepada masyarakat dan aparatur dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Kegiatan ini didukung dengan koordinasi lintas sektor di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta monitoring dan evaluasi terhadap 4 lembaga penerima hibah.

Di sisi lain, peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur dengan jumlah peserta sebanyak 390 orang. Kegiatan ini diikuti dengan koordinasi bersama instansi vertikal terkait kewaspadaan dini daerah, serta monitoring dan evaluasi terhadap 11 instansi vertikal penerima hibah. Selain itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Cianjur juga terlaksana secara aktif dalam mendukung terciptanya stabilitas daerah.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kerukunan antar umat beragama serta terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan kondusif di Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, serta pihak terkait lainnya yang dapat menghambat penanganan konflik sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia di daerah, juga menjadi kendala dalam penanganan konflik sosial. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanganan konflik sosial dan toleransi, yang berpotensi memperburuk situasi. Di sisi lain, konflik kepentingan antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah turut memperparah kondisi konflik sosial. Kurangnya infrastruktur, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan, juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi turut menjadi akar permasalahan konflik sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang semakin memperburuk kondisi tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanganan konflik sosial dan toleransi melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, serta mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi melalui pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum



Dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan kondusif, Kabupaten Cianjur juga menggunakan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai alat ukur kinerja. Pada tahun 2025, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 64 poin, dengan capaian kinerja sebesar 96,97 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 66 poin.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025–2029, realisasi Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 telah mencapai 86,48 persen terhadap target akhir tahun 2029, di mana pada tahun tersebut indeks ditargetkan mencapai 74 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum mencapai target tahunan, capaian yang ada telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah.

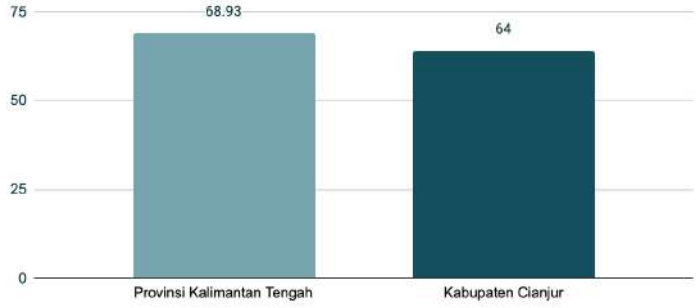
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Cianjur

	2024	2025
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	64	64

Sumber: SatpolPP dan Damkar, 2026 (diolah)

Berdasarkan tren capaian, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan kondisi yang stabil, yaitu berada pada angka 64 poin pada kedua tahun tersebut. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan telah mampu menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban umum, meskipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Cianjur



Sumber: SatpolPP dan Damkar, 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan daerah lain, capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Cianjur masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2025 mencapai 68,93 poin. Perbandingan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan bagi Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih aman, tenteram, dan tertib.

Adapun beberapa faktor yang mendukung ketercapaian sasaran tersebut antara lain kesigapan anggota dalam menerima dan menangani laporan dari masyarakat, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung kegiatan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada atau peraturan lainnya melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, program yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini memiliki tiga kegiatan, yaitu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 9 sub kegiatan, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan, serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani mencapai 100 persen, dengan rasio Linmas per 100 orang penduduk sebesar 41 persen. Terdapat 170 kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan. Selain itu, dilakukan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kapasitas terhadap 300 SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Penanganan juga dilakukan terhadap 53 kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa yang dilakukan penindakan. Di samping itu, terdapat 380 unit sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia ahli, di mana jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih di bawah standar ideal sehingga menghambat efektivitas penegakan regulasi dan peraturan daerah. Selain itu, rasio kompetensi personel juga masih menjadi kendala, dengan masih tingginya persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang belum menempuh Pelatihan Dasar (Latsar), yang secara langsung berdampak pada tingkat profesionalisme serta kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di lapangan. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penyelesaian tugas terhambat, antara lain jumlah personil PNS dan PPNS yang belum memadai serta jumlah sarana dan prasarana yang masih terbatas. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya optimalisasi jumlah PNS dan PPNS yang ada dalam penugasan serta pendayagunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif sesuai dengan situasi kerja.

Di sisi lain, faktor yang mendukung ketercapaian sasaran dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan antara lain kualitas anggota yang terlatih dalam penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta kecepatan waktu tanggap (response time) dari tahap penerimaan laporan hingga penanganan di lapangan yang telah menunjukkan performa yang baik, meskipun kepadatan lalu lintas di jalur menuju lokasi kejadian masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi waktu tempuh.

Selain itu, sarana dan prasarana dalam kondisi baik dalam mendukung kegiatan penanganan, meskipun secara kuantitas masih diperlukan penambahan untuk mencapai rasio ideal.

Program yang mendukung ketercapaian sasaran tersebut adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini memiliki tiga kegiatan, yaitu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 6 sub kegiatan, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang terdiri dari 1 sub kegiatan, serta Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terdiri dari 1 sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 606 unit sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar, serta 100 orang warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Sasaran

Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah pembangunan Kabupaten Cianjur diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kinerja tersebut diukur melalui indikator rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang menggambarkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana aktivitas usaha di bidang akomodasi dan konsumsi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur.

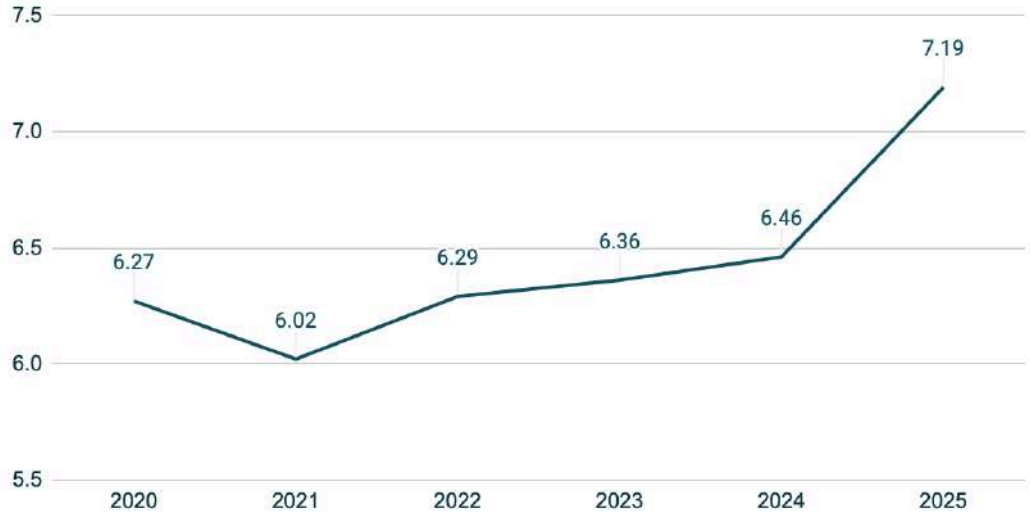


Pada tahun 2025, rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 7,19 persen berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik tahun 2026. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 6,48 persen, dengan realisasi kinerja mencapai 110,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah mengalami peningkatan yang lebih baik dari yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, rasio PDRB akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan dari 6,46 persen menjadi 7,19 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, khususnya pada usaha akomodasi dan jasa makan minum, yang berdampak positif terhadap peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah.

Secara tren, rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pergerakan rasio yang relatif meningkat dari tahun 2020 sebesar 6,27 persen, sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 6,02 persen, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 7,19 persen pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan.

Tren Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Jika dikaitkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029, capaian rasio PDRB akomodasi dan makan minum pada tahun 2025 telah mencapai 106,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar 6,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target akhir RPJMD lebih cepat dari yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penetapan target ke depan agar lebih relevan dan mencerminkan potensi kinerja yang dapat dicapai.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Cianjur	6.02	6.29	6.36	6.46	7.19
Kabupaten Sukabumi	2.40	2.56	2.61	2.66	2.63
Kabupaten Bandung Barat	4.96	5.26	5.38	5.23	5.03
Kota Tasikmalaya	5.30	5.77	6.02	6.26	6.32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Dari sisi perbandingan antar daerah, rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Cianjur juga menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2025, rasio Kabupaten Cianjur sebesar 7,19 persen lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sukabumi (2,63 persen), Kabupaten Bandung Barat (5,03 persen), dan Kota Tasikmalaya (6,32 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur memiliki kontribusi yang relatif lebih besar terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan beberapa daerah pembanding tersebut.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata pada tahun 2025. Peningkatan kunjungan wisatawan memiliki peran penting dalam mendorong perputaran roda ekonomi daerah, serta menjadi salah satu indikator kinerja pembangunan pariwisata dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor pariwisata. Namun demikian, peningkatan tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya. Pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Cianjur tercatat mencapai 3.307.355 orang.

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Tahun 2022-2025

Kunjungan Wisatawan	2022	2023	2024	2025
Wisatawan Domestik	2.175.145	2.593.664	2.424.513	3.122.786
Wisatawan Mancanegara	29.846	125.668	208.546	184.569

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2026

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengembangan daya tarik destinasi melalui penciptaan objek wisata baru, revitalisasi kawasan wisata, serta inovasi atraksi berbasis wisata alam, budaya, buatan, dan event menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, pemanfaatan promosi dan digital marketing yang efektif melalui media sosial, influencer, serta platform perjalanan turut meningkatkan kesadaran dan minat berkunjung wisatawan. Penyelenggaraan berbagai event dan festival, seperti festival budaya dan kuliner, juga mampu menarik lonjakan kunjungan dalam periode tertentu. Faktor lainnya meliputi peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi, ketersediaan amenitas seperti hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya, serta kondisi keamanan dan stabilitas yang memberikan rasa nyaman bagi wisatawan. Dukungan kebijakan pemerintah yang mempermudah investasi dan pengembangan ekonomi kreatif, serta tren perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertarik pada wisata alam, budaya, dan konsep “healing” juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

Meskipun demikian, dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan masih terdapat berbagai hambatan dan permasalahan. Keterbatasan infrastruktur seperti kondisi jalan yang belum optimal, transportasi umum yang terbatas, kapasitas parkir yang sempit, serta fasilitas umum dan sanitasi yang belum memadai dapat menurunkan minat wisatawan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya dalam hal pelayanan (hospitality) dan kemampuan bahasa asing, masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Faktor eksternal seperti potensi bencana alam, isu keamanan, dan kondisi sosial politik juga dapat memengaruhi tingkat kunjungan. Permasalahan lainnya adalah risiko overcrowding, pengelolaan sampah, dan degradasi lingkungan yang dapat merusak citra destinasi, serta masih terbatasnya informasi resmi dan terpercaya mengenai destinasi wisata yang dapat menimbulkan keraguan bagi calon wisatawan.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam upaya mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Cianjur semula merencanakan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARKAB). Namun, pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat terserap akibat kendala administratif dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

Sesuai ketentuan dari BPBJ, durasi minimal pengerjaan jasa konsultansi untuk dokumen perencanaan strategis seperti RIPPARKAB ditetapkan selama 150 hari kalender guna menjamin kualitas kajian yang komprehensif, mulai dari survei lapangan, analisis data, hingga uji publik. Sementara itu, instruksi tersebut diterima pada saat sisa waktu tahun anggaran sudah tidak mencukupi untuk memenuhi durasi minimal yang dipersyaratkan, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) hingga saat ini belum terbit, sehingga penyusunan RIPPARKAB juga belum dapat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hambatan dalam peningkatan kunjungan wisatawan mencakup aspek infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan destinasi, promosi, serta faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan agar sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur dapat tumbuh secara optimal, berdaya saing, dan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan investasi industri kreatif. Pertumbuhan investasi industri kreatif merupakan peningkatan nilai, jumlah, dan kualitas penanaman modal, baik dari pemerintah, swasta, maupun investor lainnya, ke dalam sektor berbasis kreativitas, inovasi, keterampilan, dan kekayaan intelektual. Dengan demikian, pertumbuhan investasi ini tidak hanya mencerminkan peningkatan modal semata, tetapi juga menjadi indikator berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, produktif, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, realisasi investasi di sektor industri kreatif di Kabupaten Cianjur tercatat mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Capaian ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain potensi lokal yang kuat, dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, akses pasar, serta kolaborasi antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Sinergi dari berbagai faktor tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri kreatif. Salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan investasi adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif, terampil, dan inovatif. Melalui pelatihan, pendidikan keterampilan, dan pengembangan kompetensi, produktivitas serta daya saing pelaku usaha kreatif dapat ditingkatkan sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan investor. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan berbasis ekonomi kreatif, khususnya melalui sub kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan kriya di Kecamatan Warungkondang dan kawasan Gunung Padang. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 14–15 Mei 2025 di Aula Desa Tegallega dan Budaya Pandanwangi, Kecamatan Warungkondang, dengan narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta lembaga pelatihan seperti LKP Batik Simkuring dan LKP CHICHI Warungkondang. Peserta kegiatan ini merupakan pelaku usaha pemula di bidang kriya, khususnya penganyaman dan merangkai bunga, yang berasal dari dua desa di wilayah tersebut dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.

Kegiatan pelatihan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 26–27 November 2025 di Aula Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, dengan narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta LKP CHICHI Warungkondang. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan terkait ekonomi kreatif yang mencakup 17 subsektor, khususnya pada bidang kriya dan strategi pemasaran produk. Peserta kegiatan ini juga merupakan pelaku usaha pemula di bidang kriya dengan jumlah sebanyak 25 orang.

Selain itu, dalam sub kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melaksanakan pelatihan digital marketing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam memasarkan produk atau jasa melalui media digital dan internet, sehingga dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur.

Realisasi investasi di sektor industri kreatif di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu faktor pendorong dalam peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, terdapat faktor vital yang tidak kalah penting, yaitu tenaga kerja industri kreatif. Tenaga kerja industri kreatif merupakan sumber daya manusia yang bekerja pada sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, ide, inovasi, bakat, dan keterampilan sebagai faktor utama dalam proses produksi barang dan jasa. Berbeda dengan sektor manufaktur atau ekstraktif yang lebih mengandalkan mesin dan sumber daya alam, sektor ini menempatkan kemampuan intelektual dan imajinasi sebagai modal utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Selain itu, tenaga kerja industri kreatif juga berperan dalam menghasilkan produk yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai estetika, budaya, dan identitas lokal.

Secara karakteristik, tenaga kerja industri kreatif memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta mampu mengolah potensi budaya dan kearifan lokal menjadi produk yang berdaya saing. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup keterampilan teknis (hard skills) seperti desain, editing, pemrograman, dan teknik produksi, serta keterampilan non-teknis (soft skills) seperti komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, dan kewirausahaan. Dalam era digital, penguasaan teknologi informasi dan pemasaran digital juga menjadi aspek penting agar tenaga kerja mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Dari sisi ekonomi, tenaga kerja industri kreatif berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan investasi, serta peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, tenaga kerja di sektor ini juga berperan dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui inovasi produk berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, tenaga kerja industri kreatif tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan budaya yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja pada sektor industri kreatif di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 2.512 orang. Capaian ini didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan keterampilan teknis, seperti desain, produksi, editing, dan pemrograman, serta keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kreativitas, manajemen, dan kewirausahaan. Selain itu, pelatihan berbasis kompetensi, workshop, sertifikasi profesi, serta inkubasi bisnis kreatif turut berperan dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di sektor ini.

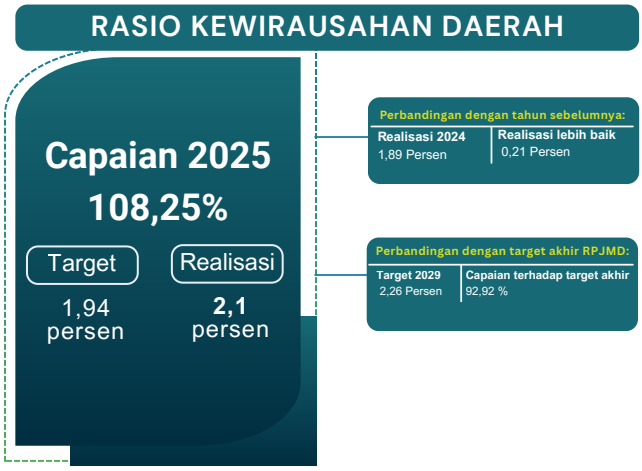
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pelaku industri pariwisata serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Peserta kegiatan terdiri dari anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) sebanyak 10 orang dengan skema Pemandu Wisata Lintas Daerah (overland), serta pelaku pariwisata bidang perhotelan sebanyak 10 orang dengan skema Food and Beverage Service, dengan penyelenggara sertifikasi oleh AMA Institute.

Hasil yang dicapai dari kegiatan sertifikasi kompetensi ini antara lain meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata, tersedianya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku, serta meningkatnya mutu pelayanan dan daya saing sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur.

Sasaran

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing

Sasaran strategis dalam meningkatkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing tidak hanya diukur melalui indikator tingkat koperasi berkualitas, tetapi juga melalui indikator rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Cianjur. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan kewirausahaan di daerah, yang tercermin dari perbandingan jumlah pelaku usaha terhadap jumlah penduduk angkatan kerja.



Rasio kewirausahaan daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai dinamika pertumbuhan usaha serta tingkat kemandirian ekonomi masyarakat. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, maka semakin besar pula potensi masyarakat dalam menciptakan usaha produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas kesempatan kerja.

Pada Tahun 2025, rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 2,1 persen dengan capaian realisasi kinerja sebesar 108,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahun berjalan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,94 persen, atau lebih tinggi 0,16 persen dari target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha di masyarakat yang turut berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio kewirausahaan daerah pada Tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen dari capaian Tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,89 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pertumbuhan kewirausahaan di Kabupaten Cianjur, seiring dengan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha dan pemberdayaan UMKM.

Namun demikian, tren kenaikan rasio kewirausahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang belum dapat dianalisis secara komprehensif, mengingat indikator rasio kewirausahaan daerah baru mulai dihitung pada periode awal sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian rasio kewirausahaan daerah pada Tahun 2025 telah mencapai 92,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,26 persen pada Tahun 2029. Dengan capaian tersebut, rasio kewirausahaan di Kabupaten Cianjur menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan diharapkan dapat terus meningkat hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan (persen)	2024	2025
Kabupaten Cianjur	1,89	2,1
Nasional	3,35	3,29

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, rasio kewirausahaan di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata nasional. Rasio kewirausahaan Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 2,1 persen, sedangkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,29 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kewirausahaan di Kabupaten Cianjur masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendekati rata-rata nasional.

Namun demikian, jika dilihat dari perkembangan dalam satu tahun terakhir, tren rasio kewirausahaan di Kabupaten Cianjur menunjukkan arah yang positif. Rasio kewirausahaan daerah meningkat dari 1,89 persen pada Tahun 2024 menjadi 2,1 persen pada Tahun 2025. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren nasional yang justru mengalami sedikit penurunan, dari 3,35 persen pada Tahun 2024 menjadi 3,29 persen pada Tahun 2025.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun rasio kewirausahaan Kabupaten Cianjur masih berada di bawah rata-rata nasional, laju pertumbuhan kewirausahaan di daerah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam periode terakhir. Hal ini menjadi indikasi bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan kewirausahaan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha di masyarakat.

Peningkatan rasio kewirausahaan daerah pada Tahun 2025 di Kabupaten Cianjur juga tercermin dari meningkatnya laju pertumbuhan wirausaha. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan wirausaha tercatat sebesar 13,80 persen, kemudian meningkat menjadi 16,22 persen pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio kewirausahaan di Kabupaten Cianjur didukung oleh pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang relatif positif. Secara kumulatif selama periode 2024–2025, tercatat pertumbuhan 1.733 wirausaha baru.

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Cianjur, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagin) menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah memperluas kesempatan bagi seluruh pelaku usaha mikro untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan dan pengembangan usaha. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemerataan penerima manfaat program di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur sehingga dapat menjadi stimulus bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang menjadi wirausaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Salah satu bentuk implementasi strategi tersebut adalah melalui pendampingan usaha yang terintegrasi, yang mencakup fasilitasi perizinan dan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikasi halal, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendampingan ini juga dilaksanakan secara daring untuk mengakomodasi pelaku usaha yang berada jauh dari lokasi pendampingan secara luring. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk, memperkuat kepercayaan pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha para pelaku wirausaha, khususnya pada sektor usaha mikro.

Selain itu, melalui program unggulan pengembangan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan alat usaha yang tepat guna kepada pelaku usaha mikro. Pelaksanaan program ini ditargetkan secara merata di berbagai wilayah sebagai bentuk pemerataan pemberdayaan sekaligus penguatan ekosistem usaha mikro di daerah. Dengan dukungan sarana produksi, pelatihan, serta pendampingan usaha, pelaku usaha mikro diharapkan mampu mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Cianjur masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya minat pelaku usaha mikro dalam memenuhi legalitas dasar usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang telah memiliki NIB namun belum terdata secara optimal sehingga belum menerima manfaat dari berbagai program yang dijalankan. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan ekosistem usaha, terutama dalam peningkatan produktivitas dan akses pemasaran.

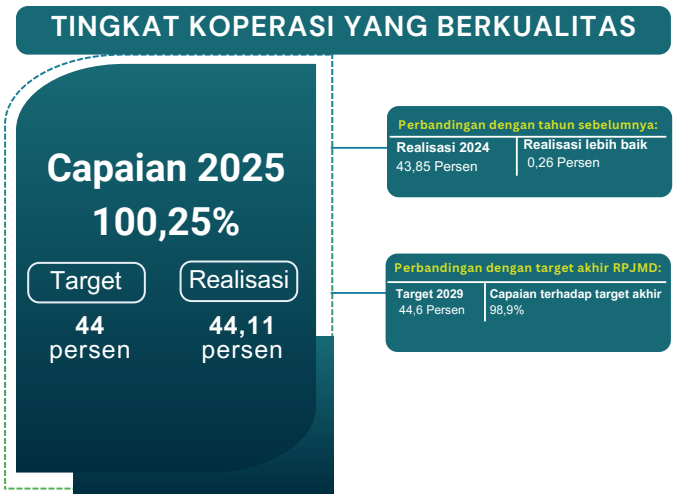
Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah terus mendorong pendampingan pemenuhan legalitas usaha disertai dengan peningkatan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha bagi pengembangan bisnis. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung pengembangan usaha juga disediakan, antara lain melalui pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitasi sertifikasi produk, dukungan pemasaran, serta pemberian bantuan sarana usaha.

Di sisi lain, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Cianjur juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kondisi wilayah. Kabupaten Cianjur memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, sehingga banyak usaha mikro berada di lokasi yang sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur jalan, jarak antar wilayah yang cukup jauh, serta keterbatasan akses transportasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan usaha secara merata.

Selain faktor geografis, dinamika usaha mikro yang cenderung bersifat informal juga menjadi tantangan dalam pengelolaan data usaha. Banyak usaha mikro yang berpindah lokasi, berubah jenis usaha, atau belum memiliki legalitas usaha yang jelas sehingga data yang tersedia sering kali cepat berubah dan menjadi kurang akurat. Perubahan status usaha seperti usaha yang berhenti beroperasi, berganti jenis usaha, atau usaha baru yang muncul di masyarakat seringkali belum tercatat secara optimal. Hal ini menimbulkan kendala dalam penyusunan perencanaan program bantuan, pembinaan, maupun kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis data.

Melalui berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha yang telah dilakukan, diharapkan tingkat pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Cianjur dapat terus meningkat sehingga tercipta ekosistem kewirausahaan yang semakin kuat sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Secara umum, pemberdayaan dan pengembangan usaha di Kabupaten Cianjur menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat dinamika dalam pencapaian target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu terus memfasilitasi para pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas

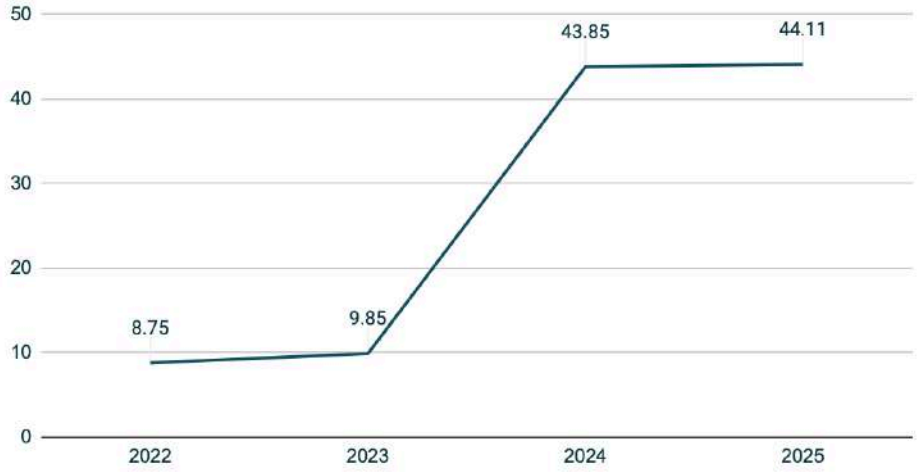


Keberlangsungan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian yang berkembang di wilayah Kabupaten Cianjur. Kinerja perekonomian daerah umumnya tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor-sektor ekonomi unggulan serta sektor pendukung lainnya. Dalam rangka mendorong penguatan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan strategi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat peran ekonomi kerakyatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan strategi tersebut diukur melalui indikator tingkat koperasi yang berkualitas di Kabupaten Cianjur, yang mencerminkan kemampuan koperasi dalam dikelola secara sehat dan memberikan manfaat bagi anggotanya.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mencapai 44,11 persen berhasil melampaui target yang ditentukan sebelumnya yaitu 44 persen dengan capaian realisasi kinerja 100,25 persen. Artinya ada 44,11 persen koperasi yang berkualitas pada tahun 2025 di Kabupaten Cianjur.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 tingkat koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen koperasi yang berkualitas pada tahun 2025. Semula tingkat koperasi yang berkualitas pada tahun 2024 yaitu hanya 43,85 persen.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas Kabupaten Cianjur



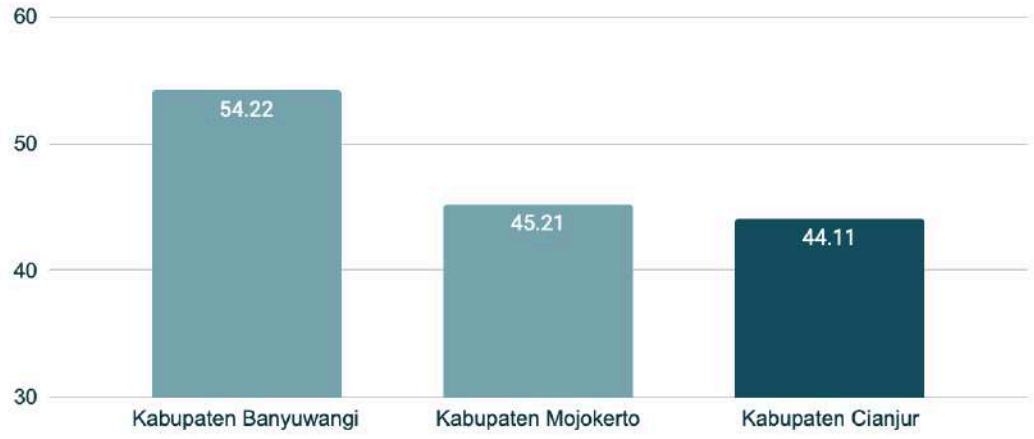
Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Tingkat koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2022, persentase koperasi berkualitas tercatat sebesar 8,75 persen, kemudian meningkat menjadi 9,85 persen pada Tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 43,85 persen, yang menunjukkan adanya percepatan dalam upaya pembinaan serta penataan kelembagaan koperasi.

Pada Tahun 2025, capaian tersebut kembali meningkat menjadi 44,11 persen, meskipun dengan kenaikan yang relatif moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Cianjur dapat terus dipertahankan, sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar dikelola secara lebih sehat dan profesional.

Realisasi kinerja tingkat koperasi berkualitas pada Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2029 telah mencapai 98,9 persen. Dengan capaian tersebut, diharapkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu 44,6 persen koperasi berkualitas pada Tahun 2029, dapat tercapai.

Tingkat Koperasi yang Berkualitas 2025



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026

Apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain, tingkat koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 masih berada sedikit di bawah capaian daerah pembanding. Persentase koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 44,11 persen, sedangkan Kabupaten Banyuwangi mencapai 54,22 persen dan Kabupaten Mojokerto sebesar 45,21 persen.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Cianjur telah berada pada level yang relatif mendekati beberapa daerah lain, khususnya Kabupaten Mojokerto yang memiliki selisih capaian yang tidak terlalu signifikan. Namun demikian, capaian Kabupaten Cianjur masih berada di bawah Kabupaten Banyuwangi yang telah menunjukkan tingkat penguatan kelembagaan koperasi yang lebih tinggi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Cianjur telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih diperlukan penguatan pembinaan koperasi secara berkelanjutan sehingga diharapkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria koperasi berkualitas dapat terus meningkat sehingga mampu memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan koperasi berkualitas di Kabupaten Cianjur, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada Tahun 2025, persentase koperasi aktif tercatat sebesar 39,61 persen, meningkat 15,63 persen dibandingkan Tahun 2024.

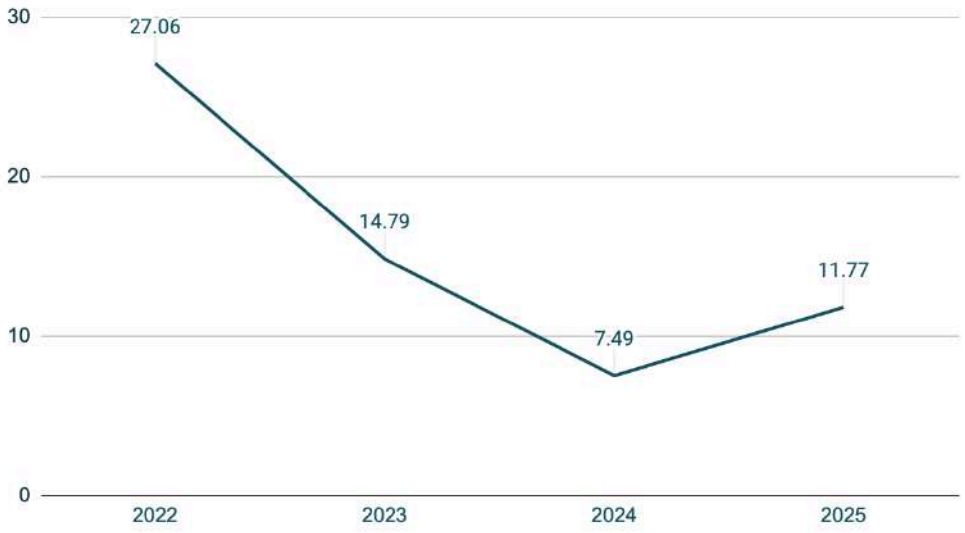
Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif dari sebelumnya 431 koperasi menjadi 795 koperasi pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, serta memenuhi aspek kelembagaan dan administrasi koperasi. Hal tersebut turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha koperasi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan volume usaha.

Selain itu, peningkatan jumlah koperasi aktif juga dipengaruhi oleh bertambahnya badan hukum koperasi baru di Kabupaten Cianjur.

Jika dilihat dari sisi kinerja usaha, laju pertumbuhan volume usaha koperasi di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 mencapai 11,77 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 7,49 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi di Kabupaten Cianjur semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.

Hal ini selaras dengan pelaksanaan program strategis pemerintah dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian, serta dukungan kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendorong percepatan aktivasi koperasi di daerah.

Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Kabupaten Cianjur



Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Hal ini selaras dengan pelaksanaan program strategis pemerintah dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian, serta dukungan kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendorong percepatan aktivasi koperasi di daerah.

Meskipun demikian, perkembangan koperasi bersifat dinamis. Dalam praktiknya, koperasi secara kelembagaan maupun kegiatan usaha dapat berubah status menjadi tidak aktif. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara berturut-turut, tidak berjalannya kegiatan usaha, serta tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas, masih terdapat sejumlah hambatan, khususnya dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan volume usaha dan omzet koperasi sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar serta diminati oleh masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia koperasi, rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola dan ketentuan kelembagaan, serta belum optimalnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, akses koperasi terhadap permodalan dan pembiayaan formal masih relatif terbatas akibat lemahnya administrasi dan laporan keuangan. Kondisi ini juga diperparah dengan masih rendahnya kapasitas koperasi dalam melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha yang adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan digitalisasi, serta partisipasi anggota yang belum optimal dalam mendukung aktivitas koperasi.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendorong terciptanya sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Cianjur. Dalam hal pemberdayaan dan pembinaan koperasi, perkembangan di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian secara berkelanjutan memfasilitasi koperasi agar memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga memperluas kesempatan bagi koperasi untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan dan pengembangan.

Langkah ini bertujuan untuk memperluas pemerataan penerima manfaat program di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan usaha koperasi. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemeriksaan kesehatan koperasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap standar kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan usaha, khususnya pada usaha simpan pinjam yang sehat dan akuntabel.

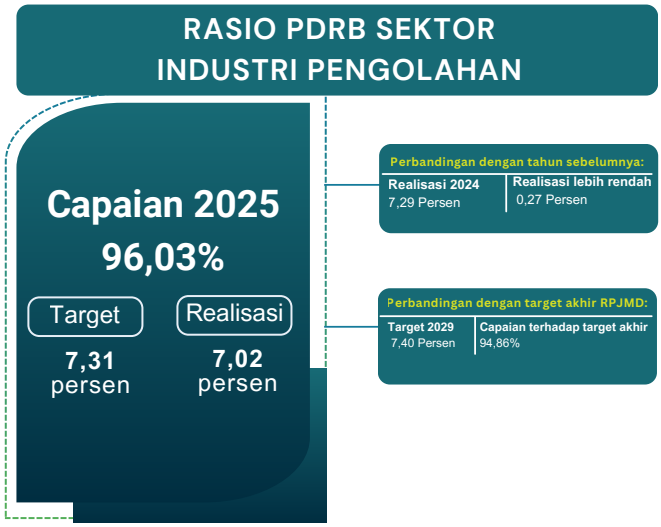
Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, seperti pelatihan dan uji kompetensi bagi pengelola koperasi, serta pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas sumber daya manusia koperasi agar mampu mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian serta standar tata kelola yang baik. Melalui pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil koperasi, diharapkan koperasi dapat semakin mandiri dalam mengelola usaha, mengambil keputusan organisasi, serta beradaptasi terhadap dinamika perkembangan ekonomi.

Di samping itu, melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun badan usaha yang tangguh dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sasaran

Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sektor perindustrian menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan pola ruang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024–2044 yang disusun melalui identifikasi sektor potensial serta potensi kontribusi terhadap PDRB daerah, terdapat wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan kawasan industri yaitu Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalongkulon ditetapkan sebagai wilayah prioritas pengembangan industri.

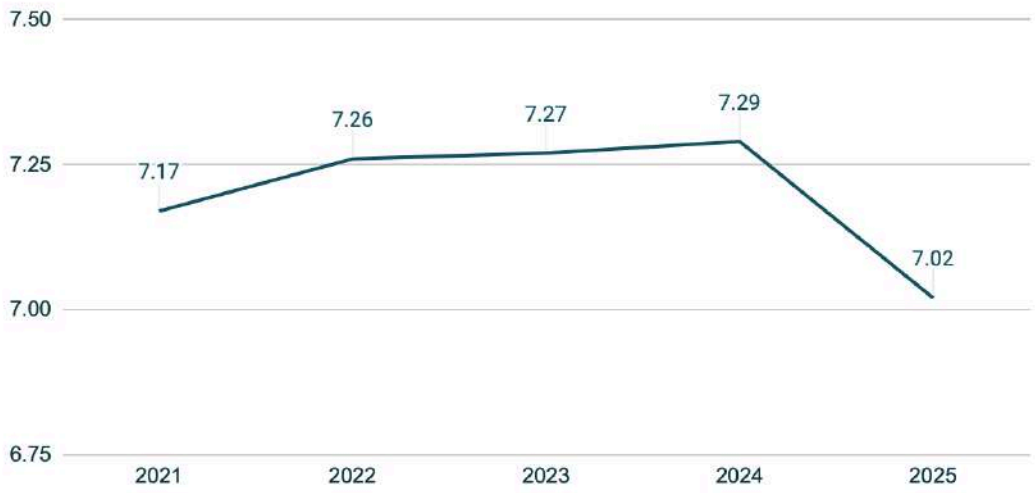


Dengan mempertimbangkan potensi wilayah tersebut, strategi pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor perindustrian di Kabupaten Cianjur. Peningkatan produktivitas ini diharapkan mampu mendorong kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah serta memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Cianjur. Untuk mengukur keberhasilan strategi tersebut, digunakan indikator Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan sebagai tolok ukur kinerja dalam menilai kontribusi sektor industri terhadap total PDRB daerah.

Rasio PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,02 persen berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik pada publikasi distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dengan catatan angka sangat sementara. Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 96,03 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,31 persen, sehingga masih terdapat selisih (gap) sebesar 0,29 persen antara realisasi dengan target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, rasio PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tercatat sebesar 7,29 persen, sedangkan pada tahun 2025 menjadi 7,02 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,27 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian daerah pada tahun 2025 sedikit melemah dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Cianjur

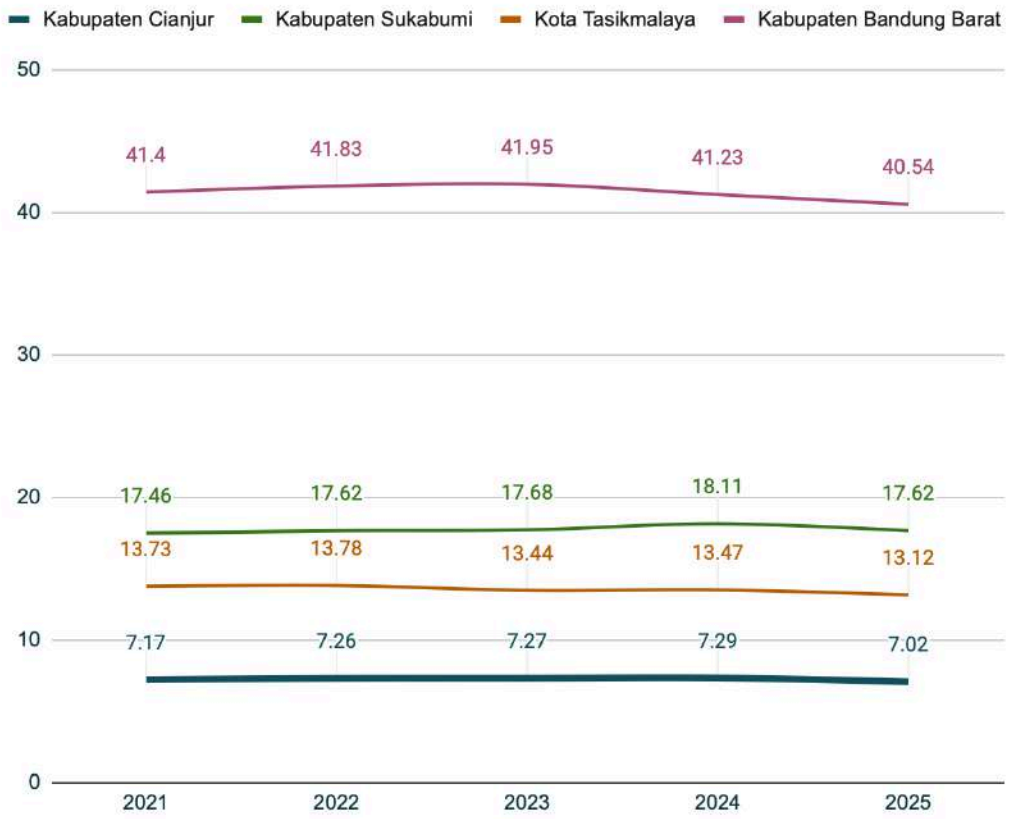


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Namun demikian, apabila dilihat dalam tren lima tahun terakhir, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Cianjur relatif stabil dengan kisaran nilai antara 7,02 persen hingga 7,29 persen. Pada Tahun 2021 rasio tercatat sebesar 7,17 persen, kemudian meningkat menjadi 7,26 persen pada Tahun 2022 dan kembali sedikit meningkat menjadi 7,27 persen pada Tahun 2023. Peningkatan kembali terjadi pada Tahun 2024 yang mencapai 7,29 persen, sebelum mengalami penurunan pada Tahun 2025 menjadi 7,02 persen. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa meskipun kontribusi sektor industri pengolahan masih relatif stabil dalam struktur PDRB daerah, peningkatan kontribusi sektor ini cenderung bergerak secara moderat. Penurunan pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penguatan sektor industri pengolahan masih perlu terus didorong agar kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Cianjur dapat meningkat secara lebih konsisten.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 7,40 persen, realisasi rasio PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2025 sebesar 7,02 persen menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap target akhir telah mencapai 94,86 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB daerah telah mendekati target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target tahunan, namun secara kumulatif capaian tersebut telah berada pada jalur yang mendekati target akhir pembangunan daerah pada tahun 2029.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Namun demikian, apabila dilihat dalam konteks perbandingan dengan beberapa kabupaten/kota lain, penurunan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Cianjur. Pada Tahun 2025, beberapa daerah pembanding juga mengalami penurunan rasio PDRB sektor industri pengolahan. Kabupaten Sukabumi yang pada Tahun 2024 memiliki rasio sebesar 18,11 persen tercatat menurun menjadi 17,62 persen pada Tahun 2025. Kota Tasikmalaya juga mengalami penurunan dari 13,47 persen pada Tahun 2024 menjadi 13,12 persen pada Tahun 2025. Demikian pula Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya memiliki rasio 41,23 persen pada Tahun 2024 menurun menjadi 40,54 persen pada Tahun 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kontribusi sektor industri pengolahan pada Tahun 2025 merupakan fenomena yang juga dialami oleh beberapa daerah lain, sehingga tidak hanya terjadi di Kabupaten Cianjur. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika yang lebih luas dalam perkembangan sektor industri pengolahan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, secara umum rasio PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Cianjur dalam lima tahun terakhir relatif berada pada kisaran yang stabil, yaitu antara 7,02 persen hingga 7,29 persen, yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi yang cukup konsisten terhadap perekonomian daerah.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur (persen)

Lapangan Usaha	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.77	27.74
Pertambangan dan Penggalian	0.26	0.24
Industri Pengolahan	7.29	7.02
Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04
Konstruksi	8.40	8.33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.09	15.60
Transportasi dan Pergudangan	9.84	10.24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.93	7.62
Informasi dan Komunikasi	5.61	5.65
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.18	2.10
Real Estat	2.79	2.75
Jasa Perusahaan	0.83	0.77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.16	2.13
Jasa Pendidikan	4.63	4.60
Jasa Kesehatan	0.96	0.96
Jasa Lainnya	4.12	4.13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Penurunan rasio PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2025 juga dapat dilihat dalam konteks perubahan struktur kontribusi antar lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Cianjur. Berdasarkan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha, beberapa sektor mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2025 sehingga memengaruhi proporsi sektor lainnya, termasuk sektor industri pengolahan.

Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi antara lain sektor transportasi dan pergudangan juga meningkat dari 9,84 persen menjadi 10,24 persen, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat cukup signifikan dari 6,93 persen menjadi 7,62 persen. Perubahan distribusi kontribusi antar sektor tersebut menunjukkan bahwa dinamika struktur ekonomi Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 mengalami pergeseran ke arah sektor-sektor jasa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan mobilitas serta konsumsi masyarakat. Dengan demikian, penurunan rasio sektor industri pengolahan menjadi 7,02 persen tidak sepenuhnya disebabkan oleh melemahnya aktivitas industri, melainkan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi beberapa sektor ekonomi lain yang tumbuh lebih cepat pada tahun tersebut.

Nilai PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Cianjur

Industri Pengolahan	2024	2025
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	4.697,83	4.943,95
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	2.786,62	2.837,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

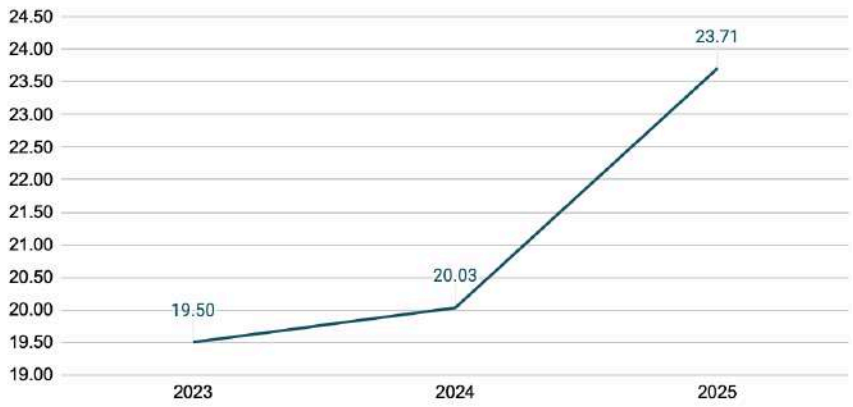
Meskipun rasio PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB pada tahun 2025 mengalami penurunan, namun secara nilai PDRB sektor industri pengolahan justru menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 4.697,83 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 4.943,95 miliar rupiah pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan nilai tambah sektor industri pengolahan sebesar 246,12 miliar rupiah dalam satu tahun.

Kondisi yang sama juga terlihat pada PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga konstan, yang mencerminkan pertumbuhan riil sektor tersebut. Pada tahun 2024 nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga konstan tercatat sebesar 2.786,62 miliar rupiah, dan meningkat menjadi 2.837,15 miliar rupiah pada tahun 2025. Dengan demikian, secara riil sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan sebesar 50,53 miliar rupiah.

Peningkatan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Cianjur tetap mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, penurunan rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi beberapa sektor ekonomi lainnya, sehingga proporsi sektor industri dalam struktur PDRB menjadi relatif lebih kecil meskipun secara nilai tetap mengalami kenaikan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam upaya meningkatkan rasio PDRB sektor industri pengolahan dengan berfokus pada meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan kecil menengah yang ada di Kabupaten Cianjur. Laju pertumbuhan industri pengolahan kecil menengah di Kabupaten Cianjur mengalami tren peningkatan dari tahun 2023 yang semula 19,50 persen kini pada tahun 2025 berhasil mencapai 23,71 persen.

Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Kecil Menengah Kabupaten Cianjur



Sumber: Diskumdagin, 2026 (diolah)

Tren peningkatan ini didorong oleh penguatan kemitraan dengan ritel modern serta optimalisasi teknologi tepat guna. Pencapaian tersebut juga didukung oleh sinkronisasi program yang lebih terfokus, di mana pelaksanaan di tahun 2026 tidak lagi menggunakan pembagian lokus per OPD seperti tahun 2022, melainkan mengacu pada Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Cianjur tahun 2025.

Namun demikian, peningkatan volume produksi Industri Kecil Menengah (IKM) masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, terutama bagi IKM yang sedang melakukan ekspansi usaha. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku juga sempat memengaruhi margin keuntungan pelaku usaha, sehingga diperlukan strategi pengelolaan bahan baku dan manajemen stok yang lebih baik. Di sisi lain, pergeseran kebijakan lokus pembangunan dari pendekatan berbasis instansi menjadi berbasis wilayah desa/kelurahan menuntut setiap Perangkat Daerah untuk lebih cermat dalam memetakan kebutuhan spesifik IKM di wilayah prioritas, sehingga intervensi program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya melalui pendekatan jemput bola dalam fasilitasi sertifikasi serta penguatan basis data IKM secara terintegrasi. Penguatan database ini bertujuan untuk memudahkan proses pemetaan kebutuhan bantuan, khususnya dalam penyaluran alat produksi bagi pelaku IKM. Ke depan, pemerintah daerah juga berfokus pada upaya memastikan bahwa peningkatan kuantitas produksi dapat diimbangi dengan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mengimplementasikan Program Pengembangan Wilayah Industri melalui penguatan industri potensial. Program ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan pelatihan keterampilan teknis dengan pendampingan manajerial, sehingga pelaku IKM tidak hanya memiliki kemampuan dalam proses produksi, tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka memperluas akses pasar bagi produk IKM, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan E-Katalog lokal serta penyelenggaraan berbagai pameran tematik sebagai sarana promosi produk unggulan daerah. Upaya ini menjadi salah satu katalisator penting dalam pencapaian target kinerja tahun 2025. Langkah tersebut turut diperkuat dengan pelaksanaan pelatihan peningkatan daya saing produk, yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi pemanfaatan teknologi industri melalui penyediaan bantuan alat produksi yang lebih efisien guna menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kapasitas produksi IKM.

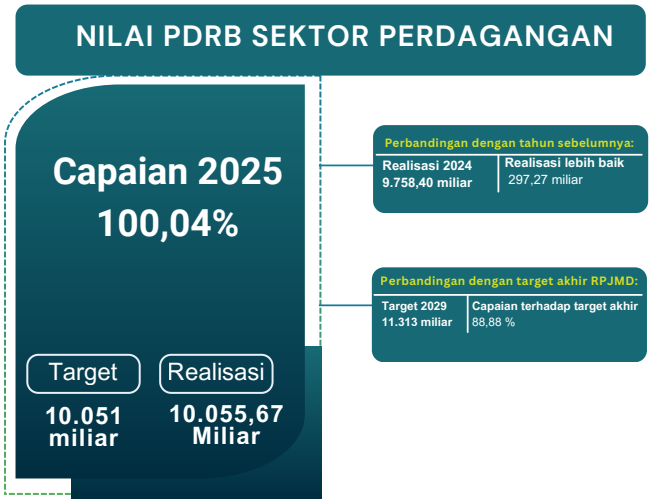
Kebijakan dinas juga diarahkan pada penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi yang mendukung kemudahan perizinan usaha, khususnya bagi industri rumah tangga. Kebijakan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya jumlah IKM baru yang terdata dalam sistem daerah. Upaya tersebut juga didukung melalui intensifikasi pelatihan penggunaan E-Katalog, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memperluas akses produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, pelatihan peningkatan daya saing secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperkuat kemampuan pelaku IKM dalam manajemen produksi, pengendalian kualitas, serta pengembangan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat di pasar formal.

Melalui kesinambungan berbagai program strategis tersebut, ekosistem industri di Kabupaten Cianjur diharapkan dapat berkembang menjadi lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung industri diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor non-pertanian serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat secara lebih luas.

Sasaran

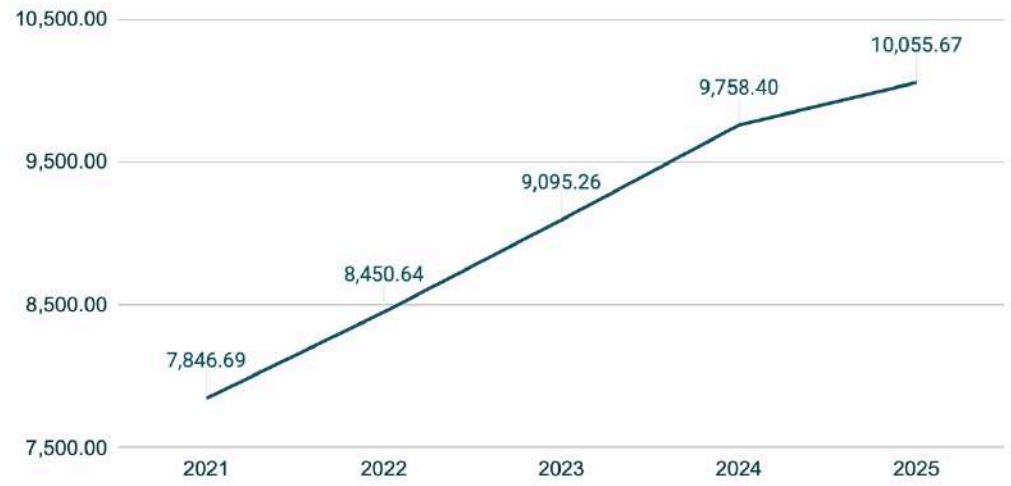
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan

Pembangunan Kabupaten Cianjur diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan produktivitas sektor perdagangan. Keberhasilan strategi ini diukur melalui indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan sebagai tolok ukur kinerja sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



Pada tahun 2025, realisasi Nilai PDRB sektor perdagangan tercatat sebesar 10.055,67 miliar rupiah berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik pada Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Cianjur, dengan catatan angka sangat sementara. Realisasi tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada awal perencanaan sebesar 10.051 miliar rupiah, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,04 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan pada tahun 2025 mampu memenuhi bahkan sedikit melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan.

Nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Cianjur



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tersebut menunjukkan arah perkembangan yang positif dengan adanya peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan sebesar 297,27 miliar rupiah, dari sebelumnya sebesar 9.758,40 miliar rupiah menjadi 10.055,67 miliar rupiah pada tahun 2025. Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan tidak hanya terjadi pada tahun 2025, tetapi juga menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2021, nilai PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 7.846,69 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 10.055,67 miliar rupiah pada tahun 2025. Dengan demikian, dalam kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar 2.208,98 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Kabupaten Cianjur mengalami perkembangan yang stabil dan terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Progres pencapaian kinerja pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 88,88 persen. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup tinggi, mengingat periode pelaksanaan RPJMD masih berada pada tahap awal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor perdagangan telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Apabila nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya, maka sangat dimungkinkan capaian pada akhir periode RPJMD tahun 2029 akan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 11.313 miliar rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Cianjur	7.846,69	8.450,64	9.095,26	9.758,40	10.055,67
Kabupaten Sukabumi	11.944,92	12.878,27	13,895,29	14.323,75	15.036,49
Kota Tasikmalaya	4.954,11	5.416,72	5.929,52	6.290,01	6.617,66
Kabupaten Bandung Barat	6.188,01	6.535,27	7.060,70	7.583,22	8.069,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain, nilai PDRB sektor perdagangan Kabupaten Cianjur berada pada posisi menengah. Pada tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat nilai PDRB sektor perdagangan sebesar 10.055,67 miliar rupiah, masih berada di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencapai 15.036,49 miliar rupiah. Namun demikian, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Kota Tasikmalaya sebesar 6.617,66 miliar rupiah dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 8.069,95 miliar rupiah.

Dilihat dari tren pertumbuhan selama periode 2021–2025, seluruh daerah menunjukkan peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan setiap tahunnya. Kabupaten Sukabumi masih menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar sekaligus menunjukkan akselerasi pertumbuhan paling tinggi secara absolut, dengan peningkatan sebesar 3.091,57 miliar rupiah dalam lima tahun terakhir. Kabupaten Cianjur berada pada posisi berikutnya dengan peningkatan sebesar 2.208,98 miliar rupiah dalam periode yang sama. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan sebesar 1.881,94 miliar rupiah dan Kota Tasikmalaya meningkat sebesar 1.663,55 miliar rupiah.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilai PDRB sektor perdagangan Kabupaten Cianjur belum sebesar Kabupaten Sukabumi, laju pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Cianjur tergolong cukup kuat dan kompetitif dibandingkan daerah lain. Dengan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, sektor perdagangan di Kabupaten Cianjur memiliki potensi untuk terus berkembang dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian daerah pada periode pembangunan berikutnya.

Upaya peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara terintegrasi melalui beberapa program strategis yang saling mendukung. Salah satu fondasi utama adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang mendorong pelaku usaha untuk memiliki legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai fasilitasi pemerintah. Legalitas usaha menjadi prasyarat penting bagi pelaku usaha agar dapat berkembang secara formal, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem perdagangan daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan Nilai PDRB sektor perdagangan.

Peningkatan daya saing pelaku usaha juga diperkuat melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan bertujuan untuk memperlancar arus barang, menekan biaya distribusi, serta memperluas jangkauan pemasaran produk pelaku usaha. Sementara itu, upaya stabilisasi harga dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan perdagangan serta mampu menjaga keberlanjutan usahanya di tengah dinamika pasar.

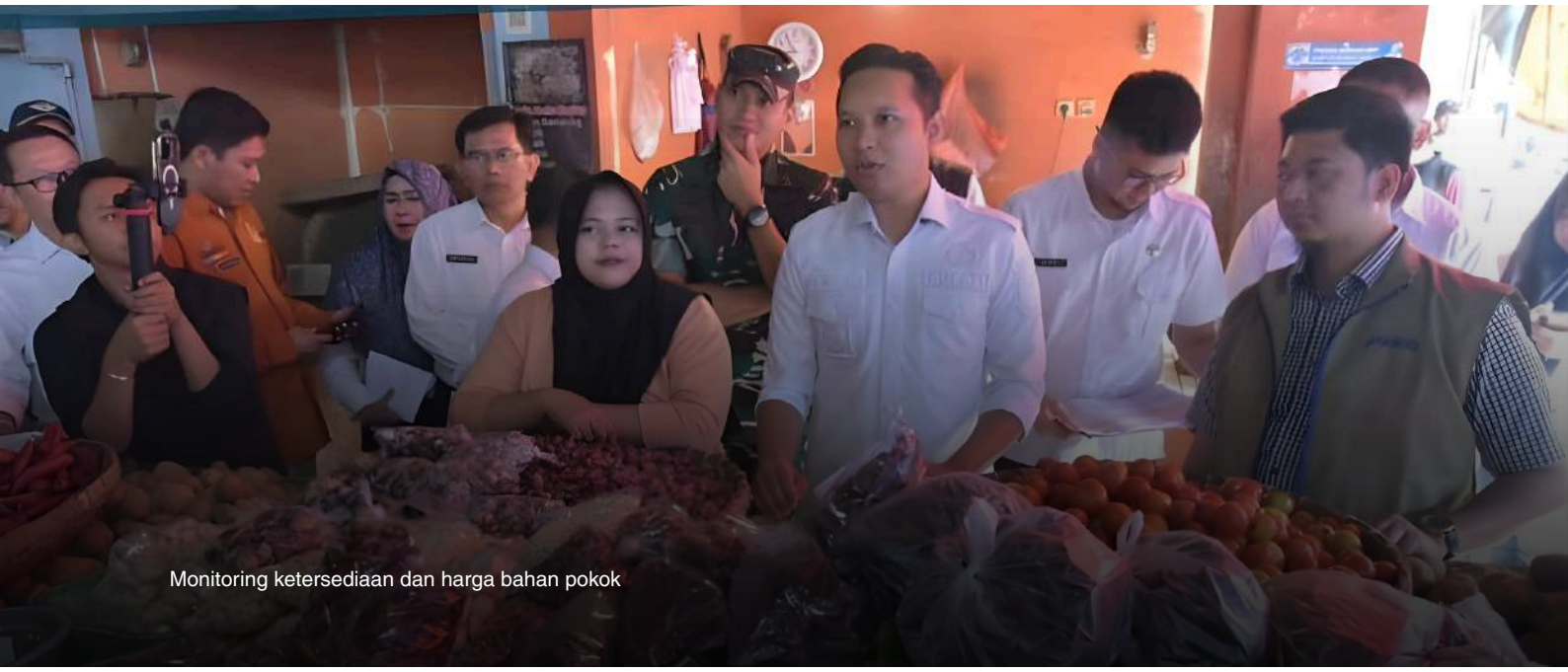
Selain itu, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan pasar terhadap produk yang diperdagangkan. Melalui penerapan standar, pengawasan, serta perlindungan konsumen, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan mutu barang dan menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab. Sinergi berbagai program tersebut diarahkan untuk membentuk pelaku usaha perdagangan yang legal, efisien, berkualitas, dan adaptif terhadap persaingan pasar, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Nilai PDRB sektor perdagangan serta pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan tercermin dalam LKIP Kabupaten Cianjur.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat legalitas pelaku usaha perdagangan, khususnya di pasar tradisional. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usaha yang dijalankan masih bersifat informal dan belum memperoleh pengakuan negara secara memadai. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses pelaku usaha terhadap fasilitas pembiayaan, pasar modern, serta peluang kemitraan yang lebih luas. Rendahnya legalitas usaha juga menyebabkan keterbatasan partisipasi pelaku usaha dalam rantai pasok formal dan berbagai program pengembangan usaha yang diselenggarakan pemerintah.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi rendahnya tingkat legalitas usaha adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat kepemilikan NIB. Banyak pelaku usaha masih memandang proses pembuatan NIB hanya sebagai kewajiban administratif, tanpa menyadari bahwa legalitas usaha memberikan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, pendampingan, serta peluang untuk berpartisipasi dalam program pemerintah maupun pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya tingkat sosialisasi dan literasi mengenai sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya memahami manfaat strategis dari legalitas usaha dalam meningkatkan reputasi dan daya saing usaha.

Hambatan lain yang dihadapi adalah keterbatasan literasi digital dan kemampuan teknis dalam mengakses sistem OSS, khususnya bagi pelaku usaha mikro, pedagang lanjut usia, serta pelaku usaha di wilayah perdesaan. Proses pendaftaran NIB melalui OSS memerlukan penggunaan perangkat elektronik serta pemahaman terhadap sistem digital, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha yang kurang terbiasa dengan teknologi. Keterbatasan literasi digital tersebut menyebabkan rendahnya inisiatif pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran NIB secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan pendampingan dan pelatihan teknis yang lebih intensif.

Di sisi lain, keterbatasan pendampingan dan pendekatan langsung kepada pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat luas wilayah serta besarnya jumlah pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Banyak pedagang tradisional memerlukan asistensi secara langsung dalam memahami proses perizinan, menyiapkan dokumen, hingga mengakses sistem OSS secara efektif. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga pendamping dengan kebutuhan pelaku usaha menyebabkan proses legalisasi usaha belum berjalan secara merata, terutama di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, penguatan pendekatan jemput bola dan peningkatan intensitas pendampingan menjadi langkah penting untuk mempercepat peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan serta kontribusinya terhadap Nilai PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Cianjur.

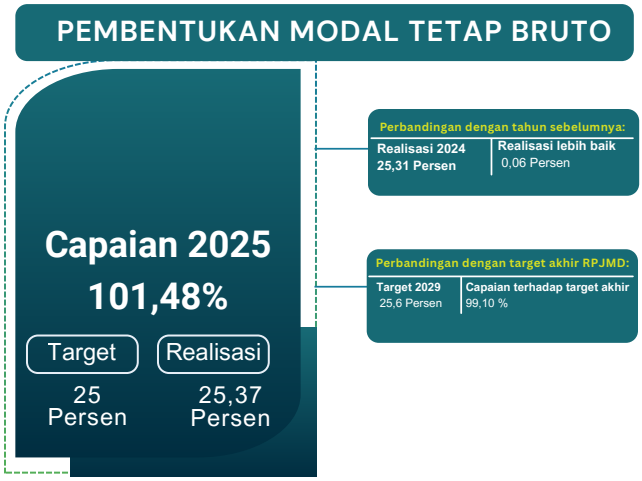


Monitoring ketersediaan dan harga bahan pokok

Sasaran

Meningkatnya Investasi

Arah pembangunan strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan investasi di Kabupaten Cianjur. Sumber daya alam menjadi salah satu hal yang diunggulkan di Kabupaten Cianjur, hal tersebut sebagai pendorong bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Cianjur yang juga telah tertuang pada dokumen RPJMD 2025-2029, terdapat lima prioritas kawasan yang potensial di Kabupaten Cianjur yaitu kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman dan kawasan pariwisata.



Dalam pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Investasi diukur dengan indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto. Realisasi tahun 2025 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Cianjur telah berhasil melampaui target yang sebelumnya ditetapkan 25 persen dengan realisasi sebesar 25,37 persen berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistika tahun 2026 pada Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cianjur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2021-2025 dengan catatan angka sangat sementara. Berdasarkan angka realisasi tersebut capaian kinerja peningkatan investasi di Kabupaten Cianjur tahun 2025 mencapai angka 101,48 persen telah melebihi ekspektasi yang diharapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen dari capaian Tahun 2024 yang tercatat sebesar 25,31 persen. Meskipun peningkatan tersebut relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang positif serta mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mendorong peningkatan investasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Progres perjalanan pencapaian kinerja hingga pada target akhir RPJMD telah berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 99,10 persen dengan ditetapkan target 2029 sebesar 25,6 persen. Artinya realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2025 hampir mencapai target akhir perencanaan serta telah mencapai target kinerja tahun 2026 dan tahun 2027 yang sebelumnya direncanakan pada dokumen RPJMD 2025-2029. Dengan demikian, penetapan target perencanaan pada tahun selanjutnya akan dievaluasi dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan penyesuaian target yang lebih progresif dan realistis, guna mendorong peningkatan investasi secara berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.

Perbandingan Pembentukan Modal Tetap Bruto

	2022	2023	2024	2025
Nasional	29,08	29,33	29,75	28,77
Provinsi Jawa Barat	24,18	24,55	24,70	24,46
Kabupaten Cianjur	24,22	25,56	25,31	25,37
Kabupaten Sukabumi	27,90	28,28	29,12	28,07
Kota Tasikmalaya	32,32	32,72	30,65	30,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Berdasarkan perbandingan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2022–2025, capaian Kabupaten Cianjur menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2025, PMTB Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 25,37 persen, berada di atas Provinsi Jawa Barat yang sebesar 24,46 persen, namun masih berada di bawah realisasi nasional sebesar 28,77 persen.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, posisi Kabupaten Cianjur lebih rendah dari Kabupaten Sukabumi dan Kota Tasikmalaya, namun menunjukkan konsistensi pertumbuhan yang cukup terjaga sejak Tahun 2022. Pada periode yang sama, capaian nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan Kabupaten Cianjur yang berhasil mencatat progres peningkatan PMTB. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja investasi di Kabupaten Cianjur berada pada level kompetitif di tingkat regional, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mendekati capaian nasional maupun daerah dengan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.

Dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Cianjur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendorong dengan meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Cianjur. Nilai realisasi penanaman modal pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.576.429.835.506. Berdasarkan data kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bahwa struktur investasi daerah didominasi oleh PMA dengan nilai kontribusi sebesar Rp3.101.566.910.001 atau setara dengan 86,72 persen dari total realisasi investasi. Sementara itu, PMDN memberikan kontribusi sebesar Rp474.862.925.505 atau 13,28 persen, yang tetap menunjukkan peran signifikan pelaku usaha dalam negeri dalam mendukung aktivitas penanaman modal.



Dari sisi dampak ketenagakerjaan, realisasi investasi tersebut telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.753 orang. Hal ini mencerminkan bahwa masuknya investasi, khususnya yang bersumber dari PMA, tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat sosial melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Laju investasi menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun 2024 ke tahun 2025, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara Nasional, nilai realisasi investasi tumbuh dari Rp1.714,2 triliun menjadi Rp1.931,2 triliun. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang terjaga dan meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia dalam skala makro.

Sejalan dengan tren nasional, Provinsi Jawa Barat terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi investasi utama di Indonesia. Realisasi investasi di wilayah ini mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni dari Rp251,14 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp296,8 triliun pada tahun 2025. Kontribusi Jawa Barat tetap menjadi pilar penting bagi pencapaian target investasi nasional.

Peningkatan yang membanggakan juga terlihat di level daerah, khususnya di Kabupaten Cianjur. Meskipun secara nominal lebih kecil dibandingkan angka provinsi, pertumbuhan persentase di Cianjur cukup impresif. Nilai investasi di Kabupaten Cianjur naik dari Rp2,8 triliun menjadi Rp3,5 triliun dalam kurun waktu satu tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi mulai terdistribusi dengan baik ke wilayah tingkat kabupaten, yang diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi lokal dan pembukaan lapangan kerja baru.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat, Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Cianjur menempati peringkat kelima sebagai daerah dengan realisasi investasi asing terbesar di Jawa Barat, dengan nilai PMA sebesar Rp3,1 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PMA Kabupaten Purwakarta sebesar Rp2,89 triliun dan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp2,71 triliun.

Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Cianjur berada pada peringkat ke-22 di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar Rp474 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PMDN daerah masih relatif terbatas dibandingkan dengan wilayah lain di tingkat provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Sukabumi yang mencapai Rp2,4 Triliun dan Kabupaten Majalengka sebesar Rp1,7 Triliun, sehingga diperlukan upaya penguatan daya tarik investasi domestik melalui peningkatan kemudahan berusaha, promosi peluang investasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah.

Secara keseluruhan, total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Cianjur menempati peringkat ke-15 di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp3,5 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total realisasi investasi Kabupaten Majalengka sebesar Rp3,36 triliun dan Kabupaten Indramayu sebesar Rp3,35 triliun. Dengan demikian, posisi Kabupaten Cianjur menunjukkan kinerja investasi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kedua daerah tersebut pada periode yang sama.

Dilihat dari sumber modalnya, terjadi dinamika yang menarik dalam struktur investasi di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2024, aktivitas investasi didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyumbang angka sebesar Rp2,4 Triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 382 Miliar. Hal ini menunjukkan kuatnya kepercayaan pelaku usaha lokal dalam melakukan ekspansi bisnis di wilayah Cianjur pada periode tersebut.

Namun, memasuki tahun 2025, terjadi pergeseran peta investasi yang sangat progresif. Kabupaten Cianjur berhasil menarik minat investor global secara masif, yang ditandai dengan lonjakan tajam Penanaman Modal Asing (PMA) hingga menyentuh angka Rp3,1 Triliun. Meskipun pada saat yang sama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terkoreksi menjadi Rp474 Miliar, dominasi PMA di tahun 2025 menjadi indikator kuat bahwa Kabupaten Cianjur telah naik kelas menjadi destinasi investasi yang kompetitif di tingkat internasional. Peningkatan total investasi ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Di sisi lain, dinamika realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang fluktuatif dipengaruhi oleh variasi kemampuan ekspansi pelaku usaha domestik, keterbatasan kapasitas permodalan, serta sensitivitas investasi domestik terhadap perubahan kondisi ekonomi dan permintaan pasar. Selain faktor tersebut, pergeseran prioritas investasi pelaku usaha lokal dan tingkat kesiapan proyek dalam negeri juga berpengaruh terhadap variasi nilai realisasi PMDN dari tahun ke tahun. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan dominasi PMA pada periode akhir sekaligus menjelaskan fluktuasi kontribusi PMDN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian kinerja investasi di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung menunjang iklim penanaman modal. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan terpadu dan digitalisasi layanan memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan proses investasi dan peningkatan kepastian berusaha. Kegiatan promosi peluang investasi daerah, penyusunan profil potensi investasi sektoral, serta fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal turut memperkuat daya tarik daerah bagi penanaman modal, khususnya dalam mendorong peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyediaan data peluang investasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pertumbuhan investasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mendorong peningkatan investasi daerah serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan pengawasan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan usaha, serta penguatan promosi dan kebijakan investasi.

Dalam aspek pengawasan penanaman modal, DPMPTSP melaksanakan pengawasan terhadap 73 pelaku usaha bersama tim teknis dengan melibatkan perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku, sehingga kegiatan investasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Selain itu, DPMPTSP juga melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal kepada pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perizinan, kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta tata kelola usaha yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng tenaga ahli dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh 85 pelaku usaha yang berasal dari asosiasi pengusaha dan pelaku UMKM. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih tertib dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan investasi daerah.

Upaya peningkatan investasi juga dilakukan melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, fasilitasi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Pada Tahun 2025, sebanyak 20 pelaku usaha telah difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan usahanya. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kabupaten Cianjur.

Dalam rangka memperluas peluang investasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melaksanakan berbagai kegiatan promosi investasi yang diinisiasi oleh DPMPTSP. Kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan pameran promosi investasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), serta asosiasi pengusaha di Kabupaten Cianjur. Selain itu, dilakukan pula pembuatan video promosi investasi yang berkolaborasi dengan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (DPKHP), Disbudpar, dan DTPHP, serta penyusunan Buku Profil Promosi Investasi yang disusun bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Berbagai media promosi tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cianjur.

DPMPTSP juga melaksanakan pengelolaan, penyajian, dan pemanfaatan data serta informasi perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pemanfaatan sistem berbasis elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, memperkuat transparansi proses perizinan, serta mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan perizinan di Kabupaten Cianjur.

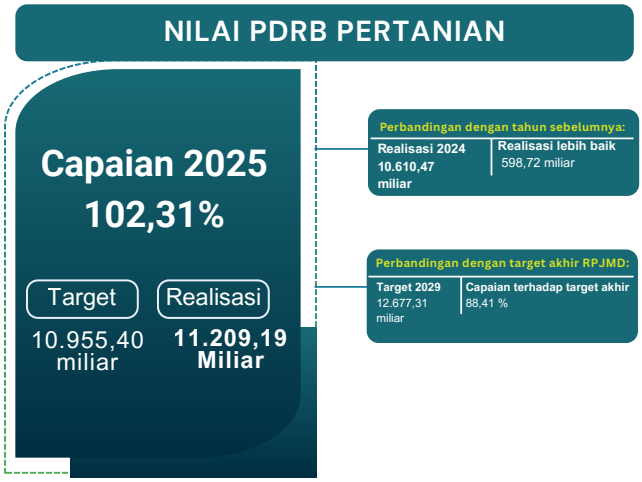
Sebagai bentuk penguatan dukungan kebijakan investasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga menyusun kebijakan terkait Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang disusun melalui kolaborasi dengan 19 perangkat daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil yang melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) serta DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh 20 pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi usaha, memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha kecil, serta mendorong terciptanya ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.

Di sisi lain, beberapa kendala programatik turut memengaruhi belum optimalnya pencapaian kinerja pada periode tertentu. Keterbatasan pengembangan kawasan investasi yang siap huni, belum meratanya dukungan infrastruktur ekonomi, serta kapasitas pelaku usaha domestik yang masih bervariasi menjadi faktor yang memengaruhi fluktuasi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain itu, efektivitas promosi investasi yang belum sepenuhnya terfokus pada proyek siap investasi dan keterbatasan integrasi data lintas sektor juga berdampak pada kecepatan realisasi investasi. Oleh karena itu, penguatan program pengembangan kawasan prioritas investasi, peningkatan kualitas promosi berbasis proyek, optimalisasi pelayanan perizinan, serta pembinaan pelaku usaha lokal menjadi langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja secara berkelanjutan.

Sasaran

Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Cianjur memiliki potensi sumber daya alam yang unggul dan cukup besar, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Terdapat 13 kecamatan yang memiliki potensi tanaman pangan serta 6 kecamatan dengan potensi perkebunan. Berdasarkan potensi tersebut, arah pembangunan Kabupaten Cianjur difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Produktivitas ini diukur melalui indikator nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian.

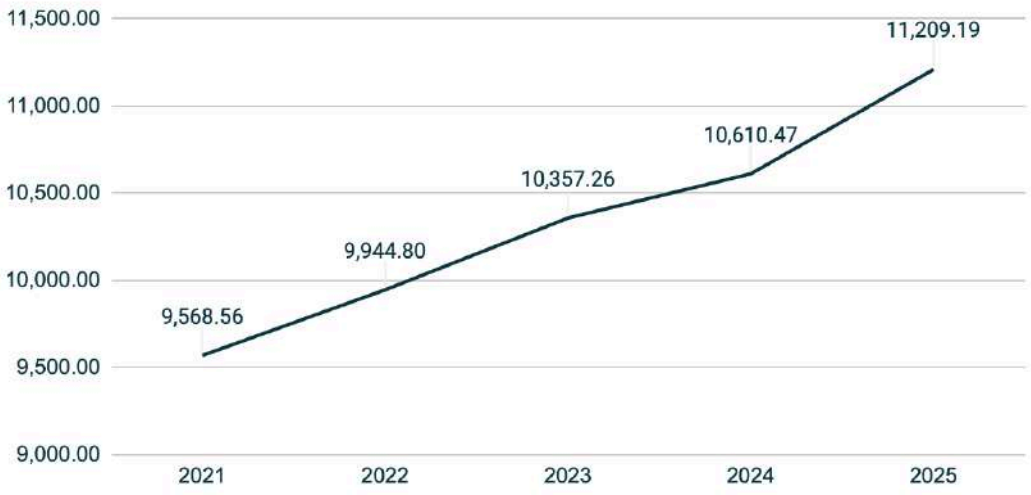


Realisasi PDRB Pertanian Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 yaitu mencapai 11.209,19 miliar rupiah berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik tahun 2026 pada Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha. Capaian kinerja tersebut mencapai 102,31 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 10.955,40 miliar rupiah, yang berarti realisasi tahun 2025 telah melampaui ekspektasi yang direncanakan.

Jika dikaitkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029, realisasi PDRB pertanian pada tahun 2025 telah mencapai 88,41 persen dari target sebesar 12.677,31 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian terus bergerak menuju pencapaian target jangka menengah daerah.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB sektor pertanian juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, nilai PDRB tercatat sebesar 10.610,47 miliar rupiah dan meningkat sebesar 598,72 miliar rupiah menjadi 11.209,19 miliar rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif pada sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cianjur (miliar rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Secara tren, perkembangan PDRB sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Nilai PDRB pada tahun 2021 sebesar 9.568,56 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 9.944,80 miliar rupiah pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 10.357,26 miliar rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 10.610,47 miliar rupiah, hingga akhirnya mencapai 11.209,19 miliar rupiah pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Cianjur terus mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Nilai PDRB Pertanian Harga Konstan	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Cianjur	9,568.56	9,944.80	10,357.26	10,610.47	11,209.19
Kabupaten Sukabumi	9,051.57	9,540.18	9,944.90	10,152.25	11,437.62
Kabupaten Bandung Barat	3,672.83	3,823.82	3,884.46	4,100.25	4,444.05
Kota Tasikmalaya	660.75	690.75	718.53	769.27	849.86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan daerah lain, pada tahun 2025 nilai PDRB pertanian Kabupaten Cianjur berada sedikit di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencapai 11.437,62 miliar rupiah, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bandung Barat sebesar 4.444,05 miliar rupiah dan Kota Tasikmalaya sebesar 849,86 miliar rupiah. Secara tren, Kabupaten Cianjur sempat memiliki nilai PDRB pertanian yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sukabumi pada periode 2021–2023, namun sejak tahun 2024 posisi tersebut mengalami pergeseran. Meskipun demikian, Kabupaten Cianjur tetap menunjukkan kinerja yang kompetitif dengan pertumbuhan yang stabil serta mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kontribusi sektor pertanian yang signifikan di antara wilayah pembanding.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)

Nilai PDRB Pertanian Harga Berlaku	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Cianjur	16,441.35	17,507.76	18,864.37	20,631.43	22,016.28
Kabupaten Sukabumi	15,772.07	17,238.62	18,681.49	19,904.36	23,152.33
Kabupaten Bandung Barat	6,140.22	6,812.50	7,247.21	7,732.00	8,584.30
Kota Tasikmalaya	1,100.18	1,202.36	1,319.55	1,490.28	1,673.55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, nilai PDRB pertanian Kabupaten Cianjur mencapai 22.016,28 miliar rupiah, meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2024 sebesar 20.631,43 miliar rupiah. Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya pertumbuhan volume produksi, tetapi juga adanya pengaruh kenaikan harga komoditas pertanian.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, pada tahun 2025 Kabupaten Cianjur berada sedikit di bawah Kabupaten Sukabumi yang mencatatkan nilai sebesar 23.152,33 miliar rupiah. Padahal pada periode 2021–2024, Kabupaten Cianjur masih unggul dibandingkan Kabupaten Sukabumi. Pergeseran posisi ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi pada tahun terakhir relatif lebih tinggi. Sementara itu, dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya, nilai PDRB pertanian Kabupaten Cianjur tetap jauh lebih tinggi, yang menunjukkan peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, tren PDRB atas dasar harga berlaku di seluruh wilayah pembanding sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, Kabupaten Cianjur tetap menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten, meskipun perlu meningkatkan akselerasi pertumbuhan agar dapat kembali melampaui Kabupaten Sukabumi pada periode selanjutnya.

Upaya pemerintah kabupaten cianjur khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam meningkatkan nilai PDRB Pertanian yaitu dengan mendorong upaya pada peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Pada tahun 2025 realisasi produksi tanaman pangan mencapai 1.131.563 ton.

Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Cianjur

No	Komoditas	2024	2025
1	Padi (GKG)	912,295	1,010,014
2	Jagung	74,793	82,764
3	Kedelai	6,089	1,009
4	Kacang Tanah	1,123	813
5	Ubi Kayu / Singkong	34,342	30,483
6	Ubi Jalar	6,048	6,442
7	Kacang Hijau	38	38
	Jumlah	1,034,728	1,131,563

Sumber: DTPHP, 2025

Produksi tanaman pangan Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan secara agregat, tercermin dari total produksi yang naik dari 1.034.728 ton pada tahun 2024 menjadi 1.131.563 ton pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 96.835 ton. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan produksi, dengan yang paling signifikan yaitu pada produksi kedelai yang pada tahun 2024 hasil produksinya mencapai 6.089 ton kini di tahun 2025 hanya 1.009 ton saja. Penurunan ini umumnya dipengaruhi oleh pergeseran preferensi petani ke komoditas yang lebih menguntungkan secara ekonomi, keterbatasan daya tarik budidaya kedelai lokal akibat harga dan ketergantungan dari program pemerintah, serta faktor iklim dan efisiensi pemanfaatan lahan.

Produksi Padi Tahun 2025

Cakupan Wilayah	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Nasional	60,207,101	11,320,986	5.32
Provinsi Jawa Barat	10,226,654	1,755,300	5.83
Kabupaten Cianjur	1,010,014	178,108	5.67

Sumber: DTPHP, 2025

Pada Tahun 2025, produksi padi Kabupaten Cianjur mencapai 1.010.014 ton atau berkontribusi sebesar 9,88% terhadap total produksi Provinsi Jawa Barat serta 1,68% terhadap produksi nasional. Kabupaten Cianjur menempati urutan ke-4 sebagai produsen padi terbesar di Jawa Barat. Dari sisi produktivitas Kabupaten Cianjur sebesar 5,67 ton/ha berada di atas rata-rata nasional (5,32 ton/ha), namun sedikit di bawah rata- rata Provinsi Jawa Barat (5,83 ton/ha). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis sebagai sentra produksi padi di tingkat provinsi, dengan kinerja budidaya yang relatif efisien dan masih memiliki ruang peningkatan produktivitas.

Bantuan Sarana (Alat dan Mesin Pertanian) Pra Panen Tahun 2025

No	Jenis Alsintan	Volume (Unit)
1	Cultivator	3
2	Hand Sprayer	912
3	IoT	7
4	Pompa Air	242
5	Rice Transplanter	13
6	Traktor Roda 2	66
7	Traktor Roda 4	25
8	Traktor Roda Crawler	8

Sumber: DTPHP, 2025

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melaksanakan berbagai upaya strategis pada tahun 2025, baik melalui penyediaan sarana produksi maupun penguatan prasarana pertanian. Dari sisi sarana, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen difokuskan untuk mendukung efisiensi dan modernisasi proses budidaya. Bantuan tersebut meliputi hand sprayer sebanyak 912 unit sebagai komponen dominan, pompa air sebanyak 242 unit, serta traktor roda 2 sebanyak 66 unit dan traktor roda 4 sebanyak 25 unit. Selain itu, juga disalurkan rice transplanter sebanyak 13 unit, cultivator sebanyak 3 unit, traktor roda crawler sebanyak 8 unit, serta dukungan teknologi pertanian berbasis Internet of Things (IoT) sebanyak 7 unit. Penyediaan alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi melalui mekanisasi pertanian.

Bantuan Prasarana Pertanian Tahun 2025

No	Kegiatan	Volume (Unit)	Coverage Area (Ha)
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tani	34	850
2	Sumur Bor	15	75
3	Irigasi Perpompaan	13	1,085
4	Irigasi Perpipaan	22	220
5	Damparit	3	30

Sumber: DTPHP, 2025

Di sisi prasarana, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melakukan penguatan infrastruktur pertanian guna menjamin ketersediaan air dan meningkatkan indeks pertanaman. Upaya tersebut antara lain melalui rehabilitasi jaringan irigasi tani sebanyak 34 unit dengan cakupan area seluas 850 hektare, pembangunan sumur bor sebanyak 15 unit dengan cakupan 75 hektare, serta pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 13 unit yang mampu melayani area hingga 1.085 hektare. Selain itu, dilakukan pula pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 22 unit dengan cakupan 220 hektar dan pembangunan damparit sebanyak 3 unit untuk area seluas 30 hektar.

Selain pada produksi tanaman pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) juga mendorong peningkatan produksi hortikultura. Pada tahun 2025, total produksi hortikultura Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 509.060 ton. Produksi hortikultura pada tahun tersebut menunjukkan dinamika yang beragam, ditandai dengan peningkatan pada beberapa komoditas utama serta penurunan pada komoditas lainnya.

Peningkatan produksi paling signifikan terjadi pada kelompok komoditas cabai (cabai keriting dan cabai besar/TW/teropong) yang meningkat sebesar 7.629 ton. Selain itu, produksi kubis juga mengalami peningkatan sebesar 1.811 ton, serta pisang yang mencatat kenaikan cukup besar secara volume yaitu sebesar 15.784 ton. Peningkatan pada komoditas-komoditas tersebut mencerminkan respon positif petani terhadap peluang pasar, dukungan teknis budidaya, serta relatif terkendalinya gangguan produksi pada sentra hortikultura tertentu.

Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Cianjur

No	Komoditas	2024	2025
1	Bawang Daun	43,235	32,935
2	Kubis	22,316	24,127
3	Tomat	36,932	31,068
4	Aneka Cabai	43,874	50,026
5	Durian	14,845	13,449
6	Manggis	1,771	1,750
7	Pisang	339,921	355,705
	Jumlah	502,894	509,060

Sumber: DTPHP, 2025



Kegiatan Penanaman dan Penyerahan Bantuan Benih Padi GOGO

Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi. Penurunan paling besar terjadi pada bawang daun yang turun sebesar 10.300 ton, diikuti oleh tomat yang menurun sebesar 5.864 ton. Penurunan juga terjadi pada cabai rawit sebesar 1.477 ton, durian sebesar 1.396 ton, serta manggis yang mengalami penurunan relatif kecil yaitu sebesar 21 ton. Penurunan produksi pada komoditas buah seperti durian dan manggis dipengaruhi oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengganggu fase generatif tanaman, khususnya pada proses pembungaan, penyerbukan, dan pembentukan buah. Kondisi kelembaban yang tinggi menyebabkan gugur bunga dan buah muda serta meningkatkan serangan penyakit, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas dan hasil panen.

Selain faktor cuaca, penurunan produksi pada beberapa komoditas sayuran juga dipengaruhi oleh adanya alih komoditas oleh sebagian petani ke tanaman sayuran eksotis dataran tinggi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, namun tidak termasuk dalam kelompok komoditas yang dilaporkan. Hal ini turut berkontribusi terhadap penurunan produksi pada komoditas sayuran tertentu.Secara keseluruhan, meskipun beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan, peningkatan signifikan pada komoditas cabai dan pisang berperan penting dalam menjaga kinerja subsektor hortikultura Kabupaten Cianjur pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengelolaan pola tanam dan distribusi produksi yang lebih terencana, agar fluktuasi produksi antar komoditas dapat diminimalkan dan keberlanjutan usaha hortikultura tetap terjaga.

Peningkatan produksi hortikultura di Kabupaten Cianjur tidak hanya dipengaruhi oleh adanya dorongan stimulan berupa bantuan sarana produksi dari pemerintah daerah, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan produktivitas di tingkat usaha tani. Hal ini sejalan dengan posisi Kabupaten Cianjur sebagai salah satu sentra hortikultura strategis di Jawa Barat. Faktor-faktor yang berperan penting antara lain penerapan teknologi budidaya yang tepat, penggunaan varietas unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu.

Selain itu, upaya pengurangan kehilangan hasil (losses) pada tahap panen dan pascapanen menjadi aspek yang krusial, mengingat karakteristik komoditas hortikultura yang mudah rusak dan rentan terhadap penurunan mutu. Penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi tawar petani, serta mendorong konsistensi kualitas dan kuantitas pasokan.

Di sisi hilir, kepastian akses pasar serta pengembangan pola kemitraan menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan produksi. Peningkatan produksi akan berjalan optimal apabila didukung oleh jaminan serapan hasil dan stabilitas harga. Oleh karena itu, strategi peningkatan produksi hortikultura di Kabupaten Cianjur diarahkan pada optimalisasi komoditas basis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi di tingkat provinsi, melalui pendekatan klaster atau kawasan sentra produksi, sehingga menghasilkan dampak yang lebih fokus, signifikan, dan terukur.

Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Hortikultura Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Volume
1	Bibit Buah-buahan	1.100 pohon
2	Plastik UV	12 roll
3	Handsprayer	4 unit
4	Pendaftaran Varietas Lokal dan Varietas Turunan Esensial	1 kegiatan
5	Greenhouse	2 unit
6	Pengembangan Bawang Merah	3 Ha
7	Pengembangan Aneka Cabai	12 Ha
8	Benih Sayuran	390 pack
9	Benih Bawang Merah	385 kg

Sumber: DTPHP, 2025

Sebagai bentuk dukungan konkret, pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memberikan bantuan sarana dan prasarana hortikultura yang meliputi bibit buah-buahan sebanyak 1.100 pohon, plastik UV sebanyak 12 roll, handsprayer sebanyak 4 unit, serta pembangunan greenhouse sebanyak 2 unit. Selain itu, dilaksanakan kegiatan pendaftaran varietas lokal dan varietas turunan esensial sebanyak 1 kegiatan, pengembangan bawang merah seluas 3 hektar, dan pengembangan aneka cabai seluas 12 hektar. Dukungan lainnya berupa penyaluran benih sayuran sebanyak 390 pack serta benih bawang merah sebanyak 385 kilogram. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan kualitas hasil, serta mendorong keberlanjutan pengembangan hortikultura di Kabupaten Cianjur.

Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cianjur

No	Komoditas	2024	2025
1	Aren	21,326	21,327
2	Cengkeh	736	778
3	Guttapercha	-	-
4	Jambu Mete	-	-
5	Jarak	-	-
6	Kakao	793	978
7	Kapok	29	28
8	Karet	2,771	2,993
9	Kayu Manis		
10	Kelapa dalam	4,737	4,754
11	Kelapa Hibrida	364	353
12	Kelapa sawit	11,519	11,530
13	Kemiri	24	24
14	Kemiri Sunan	-	-
15	Kenanga	-	-
16	Kina	148	241
17	Kopi Arabika	916	922
18	Kopi Robusta	324	324
19	Kumis Kucing	-	-
20	Lada	20	20
21	Pala	107	107
22	Pandan	-	-
23	Panili	8	8
24	Pinang	-	-
25	Teh	24,630	24,912
26	Tembakau	42	50
27	Serehwangi	108	109

Sumber: DTPHP, 2025

Jumlah produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dengan realisasi sebesar 69.349 ton. Komoditas unggulan seperti kopi dan teh memberikan kontribusi terhadap pasar regional serta memiliki potensi untuk dikembangkan ke pasar ekspor, meskipun skalanya masih dalam tahap berkembang jika dibandingkan dengan sentra utama nasional.

Peningkatan produksi tanaman perkebunan tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain kegiatan peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, serta penguatan kelembagaan pekebun. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti fluktuasi harga komoditas di pasar global dan kondisi tanaman yang telah berusia tua. Oleh karena itu, upaya pengembangan ke depan diarahkan pada hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah agar daya saing komoditas perkebunan semakin meningkat.

Secara umum, keberhasilan peningkatan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai program pembangunan pertanian. Program tersebut meliputi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, serta Program Penyuluhan Pertanian.

Implementasi program-program tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain pemberian bantuan sarana produksi pertanian berupa bibit, benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Selain itu, dilakukan pula pembangunan dan penguatan prasarana pertanian seperti jaringan irigasi, damparit, dan greenhouse. Di sisi lain, peningkatan kapasitas petani juga didukung melalui kemudahan akses terhadap informasi dan penerapan teknologi pertanian melalui kegiatan penyuluhan.

Selain subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, capaian nilai PDRB sektor pertanian di Kabupaten Cianjur juga didukung oleh kontribusi subsektor perikanan dan peternakan yang dikelola oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan. Pada tahun 2025, total produksi hasil perikanan mencapai 131.143 ton.

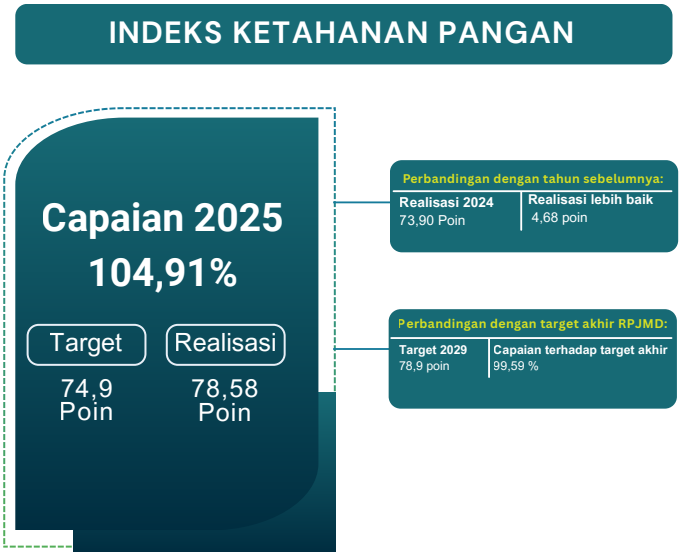
Produksi tersebut berasal dari berbagai sumber, baik perikanan tangkap di laut, perairan umum daratan, maupun kegiatan budidaya ikan yang dilakukan secara komersial dan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui dinas terkait telah melakukan berbagai upaya, antara lain pemberian bantuan stimulan berupa benih ikan dan pakan kepada pelaku usaha budidaya. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat pembudidaya dalam mengadopsi teknologi perikanan serta tingginya harga pakan. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penerapan teknologi budidaya perikanan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Sementara itu, pada subsektor peternakan, produksi hasil peternakan pada tahun 2025 tercatat sebesar 92.188 ton. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 107.668 ton. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan kekhawatiran peternak untuk kembali membeli ternak bakalan, serta meningkatnya harga bakalan dengan kualitas yang relatif sama. Selain itu, pada komoditas tertentu seperti telur, tingginya biaya operasional dan harga pakan juga menjadi kendala dalam peningkatan produksi.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba, serta dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas ternak. Oleh karena itu, upaya penanganan yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan vaksinasi secara berkala guna menekan penyebaran kasus PMK dan memulihkan kepercayaan peternak.

Indeks Ketahanan Pangan



Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, pembangunan di bidang pangan menjadi bagian penting dan strategis dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan tersebut diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan.

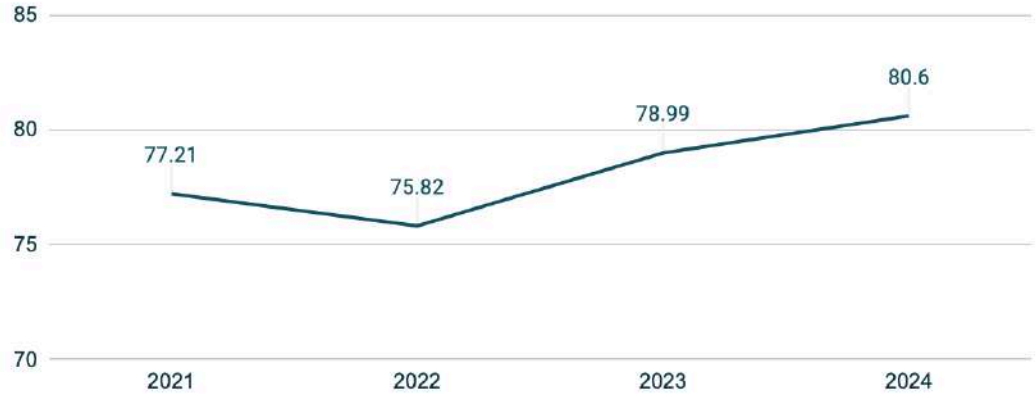
Pada tahun 2025, nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 78,58 dengan capaian kinerja sebesar 104,91 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 74,90. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 78,90, capaian tahun 2025 telah mencapai 99,59 persen, atau hampir menyentuh target akhir. Bahkan, realisasi tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan hingga tahun 2028 dalam dokumen perencanaan.

Dengan capaian tersebut, akan dilakukan evaluasi terhadap penetapan target pada tahun-tahun selanjutnya agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual, sehingga tetap relevan namun dapat dicapai secara optimal.

Perlu menjadi informasi tambahan bahwa pada indikator Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 terdapat pemutakhiran metodologi. Maka hasil penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) menggunakan metode lama tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan FSVA yang menggunakan metode termutakhirkan. Dampak perubahan metodologi berimplikasi terhadap perubahan status ketahanan pangan pada beberapa wilayah. Pada Tahun 2025 menggunakan metodologi yang telah dimutakhirkan. Berikut disajikan data perbandingan nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur dalam beberapa tahun berdasarkan metode lama dan berdasarkan metodologi yang dimutakhirkan.

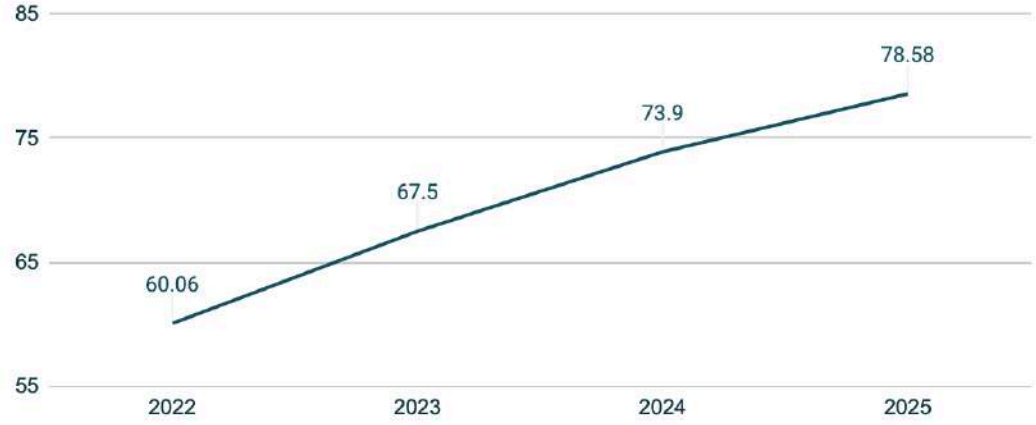
Indeks Ketahanan Pangan Berdasarkan Metode Lama



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 (diolah)

Berdasarkan pemutakhiran metodologi yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional pada tahun 2025, pengukuran Indeks Ketahanan Pangan mengalami penyesuaian sehingga menghasilkan nilai yang lebih komprehensif dalam menggambarkan kondisi ketahanan pangan. Dengan menggunakan metodologi yang telah dimutakhirkan, berikut disajikan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur.

Indeks Ketahanan Pangan Berdasarkan Metodologi yang Dimutakhirkan



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Secara tren, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 nilai indeks tercatat sebesar 60,06, kemudian meningkat menjadi 67,50 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 73,90 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, indeks mencapai 78,58. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Cianjur.

Peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut mencerminkan efektivitas berbagai program dan intervensi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, tren peningkatan ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas konsumsi pangan masyarakat serta meningkatnya akses terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan	Indeks Keterjangkauan	Indeks Pemanfaatan	Indeks Komposit	Prioritas Komposit
1	Kota Banjar	89,54	82,70	79,82	84,03	6
2	Sumedang	74,09	84,51	79,03	79,18	6
3	Garut	78,72	83,87	74,77	79,10	6
4	Kota Sukabumi	70,41	86,87	79,57	78,91	6
5	Sukabumi	79,40	87,26	69,50	78,68	6
6	Cianjur	69,25	86,87	79,74	78,58	6
7	Pangandaran	72,60	85,59	77,65	78,58	6
8	Kota Tasikmalaya	78,88	84,07	71,43	78,10	6
9	Bekasi	72,17	76,91	82,34	77,14	5
10	Karawang	66,66	84,56	79,13	76,74	5
11	Bandung	73,40	82,62	74,00	76,64	5
12	Bogor	73,84	85,85	69,54	76,36	5
13	Indramayu	72,98	80,15	75,49	76,19	5
14	Kota Cimahi	55,41	84,39	84,19	74,62	5
15	Subang	64,53	81,92	77,19	74,51	5
16	Purwakarta	63,67	83,08	76,70	74,44	5
17	Kota Bandung	54,57	84,72	84,14	74,43	5
18	Cirebon	66,74	83,29	69,63	73,17	5
19	Kota Bekasi	43,96	86,33	89,12	73,07	5
20	Majalengka	58,49	78,93	78,08	71,80	5
21	Ciamis	61,93	87,17	66,13	71,67	5
22	Tasikmalaya	60,28	82,52	70,78	71,14	5
23	Kota Depok	41,48	85,42	85,21	70,63	5
24	Bandung Barat	55,50	81,37	71,82	69,50	4
25	Kuningan	52,53	84,54	67,11	67,98	4
26	Kota Cirebon	38,69	81,88	77,04	65,79	4
27	Kota Bogor	27,40	83,22	77,72	62,68	4

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat nilai indeks ketahanan pangan sebesar 78,58 dan berada pada kategori prioritas komposit 6 yang menunjukkan kondisi sangat tahan. Capaian ini menempatkan Kabupaten Cianjur pada kelompok daerah dengan tingkat ketahanan pangan terbaik di Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Kabupaten Cianjur berada pada kelompok atas, sejajar dengan daerah seperti Kota Banjar (84,03), Sumedang (79,18), dan Garut (79,10). Meskipun demikian, nilai indeks ketahanan pangan Kabupaten Cianjur masih sedikit di bawah beberapa daerah tersebut, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja.

Dilihat dari komponen penyusunnya, Indeks Keterjangkauan Kabupaten Cianjur tergolong tinggi sebesar 86,87, menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pangan relatif baik dan kompetitif dibandingkan daerah lain. Sementara itu, Indeks Pemanfaatan juga cukup baik yaitu sebesar 79,74, yang mencerminkan kualitas konsumsi dan pemanfaatan pangan masyarakat yang sudah relatif optimal.

Namun demikian, Indeks Ketersediaan Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 69,25, yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain pada kelompok prioritas 6. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ketersediaan pangan masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dari sisi produksi maupun distribusi.

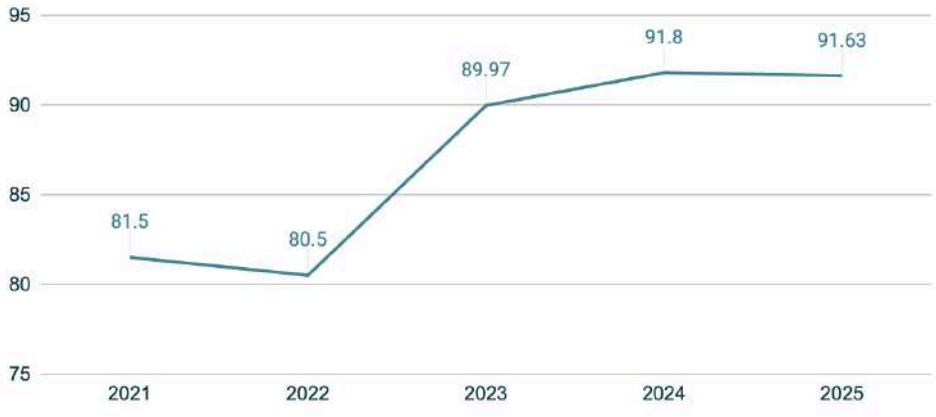
Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Cianjur yang berada pada kategori sangat tahan menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan ketahanan pangan. Meskipun demikian, untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lain yang memiliki nilai lebih tinggi, diperlukan upaya penguatan terutama pada aspek ketersediaan pangan, sehingga ketahanan pangan dapat terjaga secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan konsumsi pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan melaksanakan strategi peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan masyarakat.

Dalam memahami Indeks Ketahanan Pangan, perlu pula memperhatikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH dihitung melalui konversi konsumsi rata-rata penduduk terhadap 9 (sembilan) kelompok pangan, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman ke dalam satuan energi (kkal/kapita/hari), kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk skor dengan pembobotan tertentu. Skor PPH merupakan hasil penjumlahan dari seluruh skor kelompok pangan tersebut.

Pada tahun 2025, Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 91,63 poin. Perkembangan skor PPH Kabupaten Cianjur, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah, secara umum menunjukkan tren meningkat meskipun terdapat fluktuasi pada periode awal.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2025



Sumber: DTPHP, 2026

Peningkatan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Cianjur yang diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 menunjukkan arah yang positif. Perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui perangkat daerah terkait, khususnya pada urusan pangan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan diversifikasi konsumsi pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras. Selain itu, peningkatan pengetahuan juga mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya secara lebih optimal dalam memilih pangan yang bergizi dan terjangkau.

Peningkatan kesadaran tersebut dilakukan melalui berbagai media promosi, gerakan makan B2SA di sekolah, serta koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi lintas sektor. Edukasi B2SA juga diberikan kepada ibu-ibu PKK dan kader posyandu mengenai pengolahan pangan yang baik di tingkat rumah tangga, sehingga pemenuhan konsumsi B2SA dapat tercapai di tingkat keluarga.

Selain itu, upaya peningkatan akses dan ketersediaan pangan juga terus dilakukan, khususnya untuk kelompok pangan yang tingkat konsumsinya belum ideal. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan sistem rantai pasok dari hulu hingga hilir, antara lain melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pekarangan Sehat (PESAT). Sepanjang tahun 2025, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan sebanyak 22 kali dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan dilaksanakan pada 2 desa yang merupakan lokus prioritas stunting. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penurunan angka stunting serta meningkatkan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari belanja pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai perencanaan. Pengadaan CPPD yang direncanakan sebesar 200 ton hanya dapat direalisasikan sebanyak 123 ton. Hal ini disebabkan oleh perubahan Harga Pembelian Beras (HPB) di tengah tahun anggaran yang hingga akhir tahun belum ditetapkan, sehingga pengadaan CPPD tahap II tidak dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali perangkat daerah.

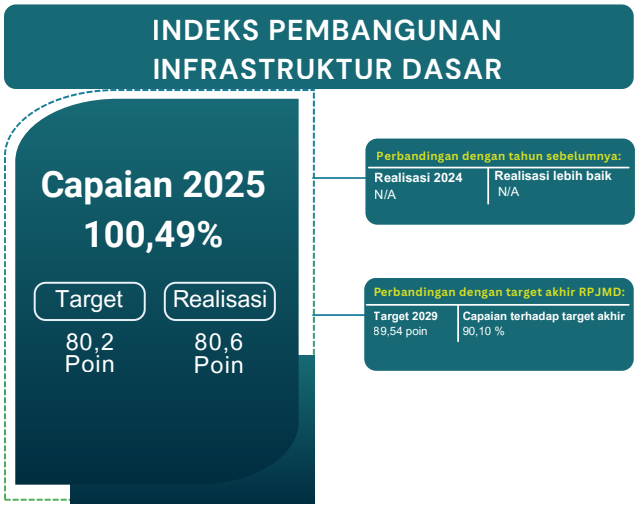


Kegiatan Panen Raya dan Serap Jagung Hibrida

Sasaran

Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Sesuai Tata Ruang

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan penyediaan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas infrastruktur yang selaras dengan tata ruang wilayah. Indeks ini merupakan nilai komposit yang mencerminkan kualitas fasilitas teknis, fisik, dan perangkat keras yang mencakup urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta lingkungan hidup, dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 80,68 poin. Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,28 poin, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 100,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dasar telah berjalan secara efektif dan mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi yang telah direncanakan pada tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 89,54 poin, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 90,10 persen dari target tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa progres pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Cianjur berada pada jalur yang positif dan relatif lebih cepat dari tahapan yang direncanakan, sehingga memberikan peluang yang cukup besar untuk mencapai target akhir RPJMD secara optimal.

Namun demikian, capaian tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar merupakan indikator baru, sehingga belum tersedia data historis untuk melihat tren perkembangannya. Selain itu, perbandingan dengan daerah lain juga belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat masih terdapat perbedaan dalam metode perhitungan dan ketersediaan data antar daerah, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya dapat disandingkan secara setara.

Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya meningkatkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar, salah satunya melalui peningkatan pelayanan infrastruktur jalan kabupaten yang terhubung dengan pusat-pusat kegiatan. Upaya ini bertujuan untuk mendukung konektivitas wilayah serta meningkatkan aksesibilitas jalur logistik dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pada tahun 2025, persentase aksesibilitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 78,70 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan telah berada dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat sekitar 21,30 persen yang perlu ditingkatkan kualitasnya ke depan.

Peningkatan kondisi jalan tersebut didorong oleh realisasi kinerja pada berbagai sub kegiatan, seperti rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pelebaran jalan menuju standar, serta rehabilitasi jalan yang melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan survei kondisi jalan secara rutin setiap tahun turut mendukung pemutakhiran data kondisi jalan secara aktual, sehingga perencanaan penanganan menjadi lebih tepat sasaran. Dari sisi pendanaan, program ini didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), DBH Sawit, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melaksanakan berbagai kegiatan fisik, di antaranya penggantian 3 unit jembatan, rekonstruksi jalan sepanjang 13,89 km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 3,7 km, serta pelebaran jalan menuju standar sepanjang 32,313 km. Selain itu, dilakukan rehabilitasi jalan sepanjang 33,61 km dan pemeliharaan rutin jalan dengan total panjang mencapai 695,47 km. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur.

Dalam pelaksanaannya, program penyelenggaraan jalan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain penurunan masa manfaat jalan akibat faktor usia, kondisi cuaca, serta tingginya beban lalu lintas kendaraan dengan muatan berlebih yang menyebabkan kerusakan pada lapisan jalan. Selain itu, sistem drainase yang belum optimal mengakibatkan genangan air yang dapat meresap ke dalam struktur jalan dan mempercepat kerusakan. Faktor cuaca hujan serta tingginya mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, juga kerap menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dilakukan sejumlah langkah strategis, antara lain penyesuaian penggunaan material konstruksi yang lebih kuat, seperti campuran hotmix dan beton pada ruas jalan dengan beban berat. Selain itu, dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal. Dalam menghadapi kendala cuaca dan tingginya mobilitas masyarakat, strategi yang dilakukan antara lain penambahan jam kerja serta peningkatan jumlah tenaga kerja di lokasi proyek, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain peningkatan kondisi jalan untuk mendukung aksesibilitas, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mendorong peningkatan layanan infrastruktur irigasi. Pada tahun 2025, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Cianjur mencapai 59,36 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh jaringan irigasi telah berfungsi dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan irigasi secara menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan layanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pada tahun 2025.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan bangunan perkuatan tebing sepanjang 0,445 km, pembangunan tanggul sungai sepanjang 0,0497 km, serta pembangunan 1 unit embung dan penampung air. Selain itu, dilakukan rehabilitasi embung dan penampungan air sebanyak 5 unit serta rehabilitasi bendung irigasi sebanyak 5 unit.

Upaya peningkatan jaringan irigasi juga dilakukan melalui peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 1,145 km dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 8,863 km. Di samping itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dilaksanakan dengan cakupan panjang mencapai 133,3 km, guna menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi yang ada.
Tidak hanya berfokus pada aspek fisik, penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian melalui peningkatan kapasitas 40 lembaga pengelola irigasi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, dalam mendukung pengelolaan tata air secara lebih komprehensif, dilakukan rehabilitasi terhadap 5 sistem drainase perkotaan serta penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase perkotaan.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selaras dengan tata ruang melalui upaya peningkatan akses serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman. Pada tahun 2025, cakupan lingkungan permukiman yang didukung oleh PSU di Kabupaten Cianjur mencapai 37,33 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya alokasi anggaran yang bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang berperan dalam pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang perumahan turut berkontribusi dalam meningkatkan cakupan layanan PSU di kawasan permukiman.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Luasnya wilayah Kabupaten Cianjur menyebabkan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan belum dapat dilakukan secara merata. Selain itu, kualitas jalan lingkungan atau jalan setapak yang dibangun kerap mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Penggunaan metode konstruksi beton, meskipun lebih kuat, juga berdampak pada terbatasnya panjang jalan yang dapat dibangun dibandingkan dengan metode hotmix.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan mengidentifikasi lokasi-lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan jalan lingkungan, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Cianjur. Selain itu, peningkatan kualitas pelaksanaan pekerjaan juga dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaksana kegiatan, sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur permukiman dapat lebih berkualitas dan berkelanjutan.



Rasio Konektivitas



Dalam pengukuran kualitas penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang, selain menggunakan Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar, juga digunakan indikator rasio konektivitas. Indikator ini menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan infrastruktur, khususnya jalan, dalam mendukung mobilitas antar wilayah serta akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan.

Pada tahun 2025, rasio konektivitas Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 0,74 dengan capaian kinerja mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun berjalan telah berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan. Jika dikaitkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 0,78, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 94,87 persen, yang mengindikasikan bahwa perkembangan konektivitas wilayah berada pada jalur yang cukup baik menuju target jangka menengah.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 sebesar 0,73, terjadi peningkatan sebesar 0,01 pada tahun 2025. Meskipun peningkatan tersebut relatif kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam konektivitas wilayah, sehingga mencerminkan arah kinerja yang positif dan konsisten.

Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas	2024	2025
Kabupaten Cianjur	0,73	0,74
Kota Bogor	0,8	0,79

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026

Namun demikian, jika dibandingkan dengan daerah lain, dalam hal ini Kota Bogor, rasio konektivitas Kabupaten Cianjur masih berada di bawah capaian Kota Bogor yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,79. Meskipun demikian, tren yang ditunjukkan kedua daerah berbeda, di mana Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Kota Bogor justru mengalami penurunan dari 0,80 pada tahun 2024 menjadi 0,79 pada tahun 2025. Untuk perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya belum dapat dilakukan secara komprehensif karena keterbatasan ketersediaan dan kesesuaian data.

Dalam upaya meningkatkan rasio konektivitas di Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan terus mendorong peningkatan pelayanan transportasi sebagai pendukung utama konektivitas wilayah. Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Transportasi Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 40,03 poin, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 36,71 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya, antara lain optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan Area Traffic Control System (ATCS) yang memungkinkan pemantauan kondisi lalu lintas secara real-time dan pengaturan siklus lampu lalu lintas secara adaptif. Selain itu, peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan di titik-titik strategis turut mendukung kelancaran lalu lintas. Upaya lainnya meliputi peningkatan jumlah penumpang angkutan umum melalui evaluasi trayek secara berkelanjutan, penataan juru parkir, sosialisasi program parkir berlangganan, serta penerbitan izin penyelenggaraan fasilitas parkir. Di sisi keselamatan, dilakukan intensifikasi sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat, audit dan inspeksi keselamatan angkutan umum secara berkala, serta peningkatan kepatuhan pemilik kendaraan dalam melaksanakan uji berkala yang didukung oleh layanan pengujian yang semakin efisien.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi kinerja ke depan. Pemanfaatan teknologi yang relatif baru, seperti Advanced Traffic Management System (ATMS) yang mulai diterapkan pada tahun 2025, belum dapat dioptimalkan secara maksimal karena masih memerlukan proses adaptasi, integrasi data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam melakukan uji berkala kendaraan masih bersifat fluktuatif, di mana sebagian pemilik kendaraan cenderung melakukan pengujian mendekati masa berlaku habis atau saat akan dilakukan razia, sehingga menyebabkan beban pelayanan tidak merata sepanjang tahun. Keterbatasan jangkauan pengawasan angkutan umum juga menjadi tantangan, mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang beragam, terutama di daerah pedesaan.

Selanjutnya dalam upaya mendorong kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur masih terdapat hambatan pada kesiapan implementasi Sistem BLUe Full Cycle – Sesuai arahan Kementerian Perhubungan, seluruh UPT PKB harus menerapkan aplikasi uji berbasis full cycle yang terintegrasi dengan pusat data. Proses transisi ke sistem baru ini memerlukan penyesuaian baik dari sisi perangkat keras maupun kompetensi petugas.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ATMS untuk analisis data lalu lintas secara lebih komprehensif dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, akan dilakukan intensifikasi kampanye keselamatan lalu lintas dengan pendekatan yang lebih adaptif, termasuk melalui media sosial dan kolaborasi dengan komunitas. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi publik melalui berbagai program, serta meningkatkan kualitas layanan transportasi secara berkelanjutan.

Secara operasional, Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai kegiatan pada tahun 2025, di antaranya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan seperti rambu, penerangan jalan umum, dan cermin tikungan dengan realisasi sebanyak 276 unit dari target 326 unit. Selain itu, dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 577 unit dari target 500 unit. Pengelolaan terminal penumpang tipe C juga dilaksanakan secara optimal melalui pengawasan rutin pada Terminal Rawabango, Pasir Hayam, dan Cipanas guna memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna.

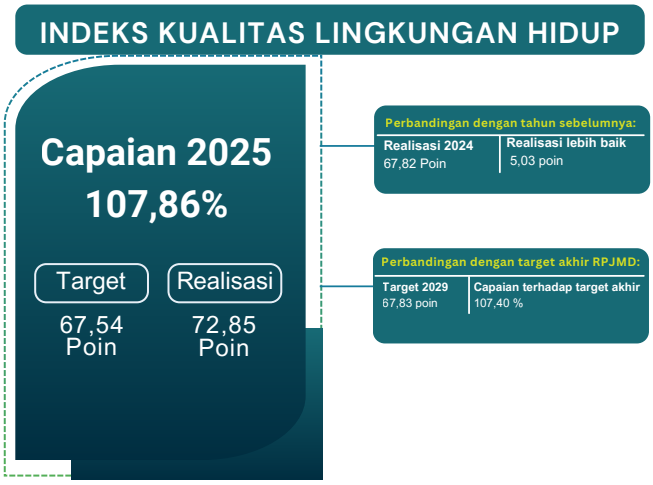
Kegiatan lainnya meliputi koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir, pembinaan juru parkir, dan sosialisasi program parkir berlangganan. Di bidang pengujian kendaraan bermotor, dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi petugas penguji serta registrasi kendaraan wajib uji berkala sebanyak 10.836 unit. Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk memastikan setiap pembangunan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas yang signifikan, serta pelaksanaan inspeksi dan audit sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum. Pengawasan terhadap operasional angkutan umum, evaluasi trayek, dan pendataan jumlah penumpang juga terus dilakukan secara berkala.

Dilakukan evaluasi trayek secara periodik untuk memastikan kapasitas angkutan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini mencegah kelebihan atau kekurangan kapasitas di setiap trayek. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung konektivitas wilayah, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada beberapa aspek untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal di masa mendatang.

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Cianjur difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar guna menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan dukungan kualitas lingkungan hidup yang baik sebagai salah satu faktor utama keberlanjutan pembangunan. Kualitas lingkungan hidup tersebut diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator yang mencerminkan kondisi serta daya dukung lingkungan dalam mendukung kehidupan masyarakat.

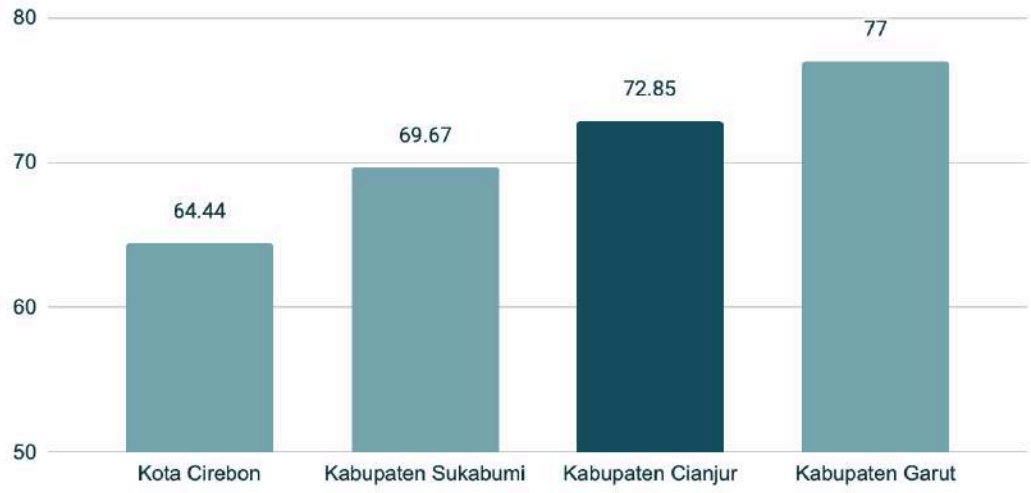


Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 72,85 poin dengan capaian kinerja mencapai 107,86 persen, sehingga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 67,54 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur berada pada tingkat yang lebih baik dari yang direncanakan pada tahun berjalan.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 67,83 poin, maka realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan capaian kinerja sebesar 107,40 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan perkembangan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kembali terhadap target pada tahun-tahun selanjutnya agar tetap relevan, realistis, dan mampu menggambarkan arah kebijakan pembangunan yang lebih progresif.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tren dari tahun sebelumnya terdapat peningkatan ke arah yang positif dari sebelumnya tahun 2024 67,82 poin kini meningkat sebesar 5,03 poin menjadi 72,85 poin pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2025

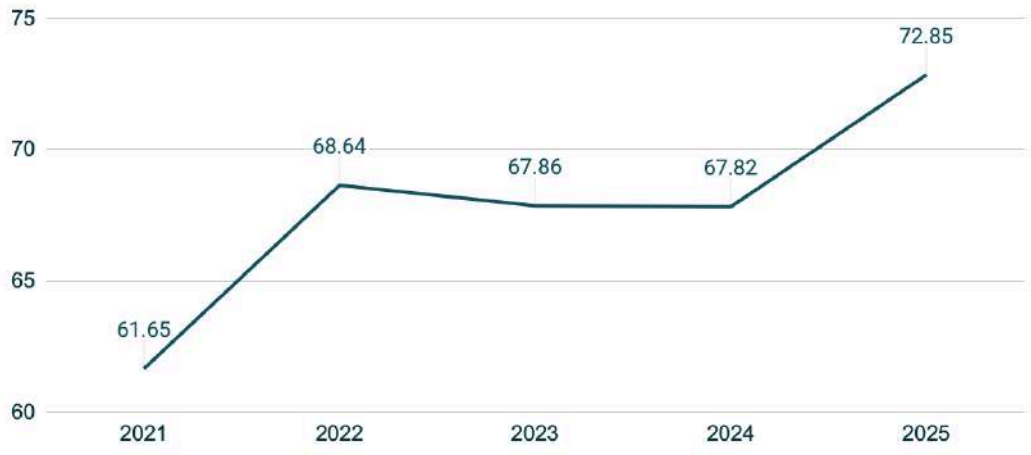


Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 72,85 poin. Jika dibandingkan dengan daerah lain, capaian ini berada di bawah Kabupaten Garut yang mencapai 77 poin, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sukabumi sebesar 69,67 poin dan Kota Cirebon sebesar 64,44 poin.

Posisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur tergolong cukup baik dan berada pada kelompok menengah atas di antara daerah pembanding. Meskipun belum menjadi yang tertinggi, capaian ini mencerminkan kondisi lingkungan yang relatif terjaga dengan baik serta adanya upaya pengelolaan lingkungan yang cukup efektif. Ke depan, masih terdapat ruang perbaikan agar Kabupaten Cianjur dapat meningkatkan kinerjanya dan mendekati bahkan melampaui capaian daerah dengan nilai IKLH yang lebih tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur



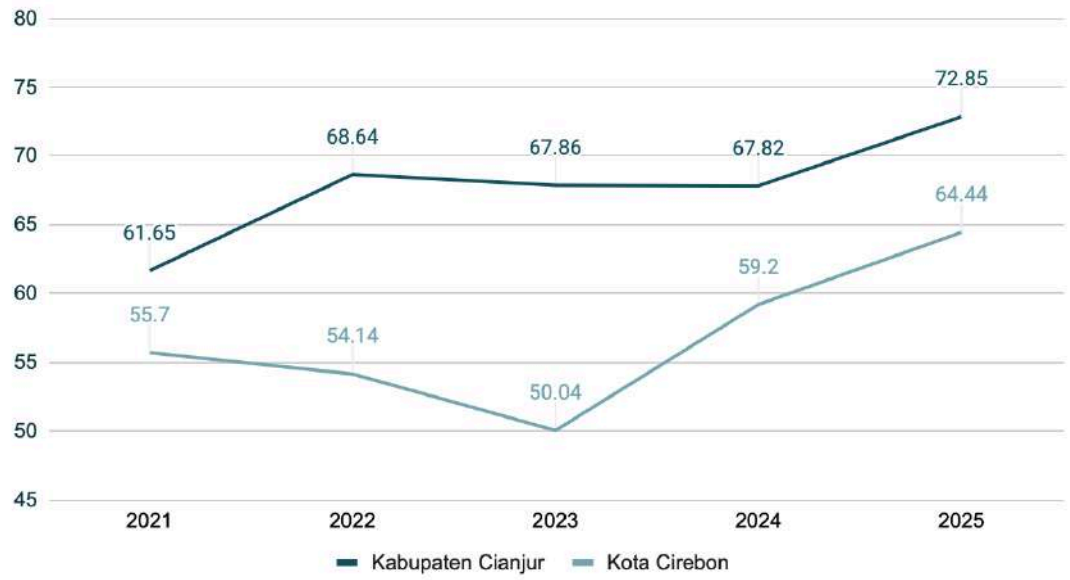
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan beberapa dinamika pada tahun tertentu. Pada tahun 2021, IKLH berada pada angka 61,65 poin, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 68,64 poin. Namun, pada tahun 2023 indeks tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 67,86 poin dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan capaian 67,82 poin.

Memasuki tahun 2025, IKLH Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 72,85 poin. Kenaikan ini menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren IKLH Kabupaten Cianjur menunjukkan arah yang positif, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode 2023–2024. Peningkatan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan mulai memberikan hasil yang lebih nyata, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025



Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2026 (diolah)

Perbandingan tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Cianjur dan Kota Cirebon selama periode 2021–2025 menunjukkan pola perkembangan yang berbeda. Kabupaten Cianjur cenderung mengalami tren peningkatan secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan tipis pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 72,85 poin.

Sebaliknya, Kota Cirebon menunjukkan tren yang lebih fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada periode 2021–2023, dari 55,70 poin menjadi 50,04 poin. Namun, pada tahun 2024 dan 2025, Kota Cirebon mulai mengalami pemulihan dengan peningkatan hingga mencapai 64,44 poin pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan, yang masing-masing didukung oleh berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pada aspek pengendalian pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan peningkatan pembinaan terhadap ketaatan pelaku usaha dan kegiatan dalam pengelolaan air limbah, termasuk optimalisasi fungsi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang diikuti oleh 32 pelaku usaha. Selain itu, dilakukan pemantauan kualitas air secara berkala pada badan air prioritas, serta pemantauan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan limbah domestik seperti IPAL komunal. Edukasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait pengolahan limbah cair juga dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 9 pelaku usaha. Penguatan regulasi dan kebijakan daerah turut dilakukan melalui penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan persetujuan teknis pembuangan emisi, dengan jumlah 32 pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan teknis. Upaya-upaya tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Kualitas Air dari 56,06 pada tahun 2024 menjadi 72,61 pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Air Kabupaten Cianjur

	2024	2025
Indeks Kualitas Air	56,06	72,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Selanjutnya Indeks Kualitas Udara Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 sebesar 75,89 dengan kategori sedang. Namun demikian, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 89,83, yang disebabkan oleh adanya perubahan formulasi perhitungan, kriteria, dan parameter indeks kualitas udara sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Cianjur

	2024	2025
Indeks Kualitas Udara	89,83	75,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Pada aspek pengendalian pencemaran udara, dilakukan pemantauan udara ambien secara berkala pada lokasi yang mewakili area permukiman, perkantoran, dan industri. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan dan pembinaan terhadap emisi sumber tidak bergerak (industri). Upaya lainnya meliputi pengendalian aktivitas pembakaran terbuka dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, serta penguatan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya alami dalam meningkatkan kualitas udara. Penguatan lintas sektor dan peran aktif masyarakat juga terus didorong dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pada aspek kualitas lahan, dilakukan inventarisasi data secara menyeluruh untuk memperoleh luasan nilai ruang terbuka hijau (RTH) secara masif, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis dalam perumusan kebijakan perbaikan. Selain itu, dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan taman kota dan RTH. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Kualitas Lahan dari 47,32 pada tahun 2024 menjadi 67,64 pada tahun 2025.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Cianjur

	2024	2025
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,32	67,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026 (diolah)

Dalam aspek kualitas tutupan lahan, kegiatan inventarisasi data sumber daya alam memerlukan kompetensi teknis bagi SDM yang mampu mengoperasikan aplikasi Google Earth dan ArcGIS. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mengalami keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi tersebut, mengingat penggunaan metode tersebut memerlukan pembelajaran khusus. Akibatnya, hanya 1 sampai 2 orang SDM yang memadai, sehingga kegiatan inventarisasi belum dapat dilaksanakan secara masif. Kondisi ini diperparah dengan adanya beban tugas lain yang memiliki tingkat urgensi tinggi pada SDM yang bersangkutan. Selain keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan inventarisasi tutupan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Ketersediaan PC atau laptop dengan spesifikasi yang memadai menjadi kebutuhan dasar, mengingat aplikasi atau metode yang digunakan cukup berat dan tidak dapat berjalan optimal pada perangkat dengan spesifikasi lama.

Kegiatan inventarisasi tutupan lahan tetap dilaksanakan meskipun belum secara masif. SDM terus dipersiapkan setiap tahunnya untuk mempelajari metode penggunaan Google Earth dan ArcGIS, sehingga diharapkan jumlah kegiatan inventarisasi tutupan lahan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu sampah juga menjadi permasalahan setiap daerah, strategi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, yang berdampak pada meningkatnya beban pengolahan di hilir. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan mengingat tingginya biaya operasional dan investasi teknologi yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan TPS, TPA, dan armada pengangkut, turut menghambat optimalisasi layanan. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar instansi yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan, sementara dari aspek teknologi masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian dengan karakteristik sampah serta tingginya biaya operasional dan pemeliharaan.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus. Aspek pengurangan sampah di hulu menjadi kunci dalam menekan timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pembatasan penggunaan bahan sekali pakai, pemanfaatan kembali, serta kegiatan daur ulang dengan target pengurangan sekitar 30 persen. Sementara itu, aspek penanganan sampah di hilir berfokus pada proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA dengan target penanganan sekitar 70 persen dari total timbulan sampah.

Aspek regulasi dan kebijakan menjadi landasan hukum melalui keberadaan peraturan daerah dan standar operasional dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Aspek kelembagaan berperan melalui keterlibatan dinas terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta kemitraan dengan pihak swasta dan komunitas. Aspek pembiayaan menjadi faktor penunjang utama yang bersumber dari APBD, retribusi, maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya. Dukungan teknologi dan infrastruktur seperti TPS3R, TPST, TPA, serta teknologi pengolahan modern juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan sampah menjadi PSEL.

Namun demikian, dalam pencapaian target tersebut masih terdapat berbagai kendala yang meliputi perilaku masyarakat, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, kelembagaan dan SDM, teknologi, serta penegakan hukum.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai solusi yang meliputi penguatan di hulu melalui kewajiban memilah sampah dari sumber, pengembangan bank sampah, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, dilakukan penguatan operasional melalui penambahan armada angkut, optimalisasi TPS3R dan TPST, serta modernisasi TPA dengan sistem sanitary landfill. Pengembangan teknologi juga dilakukan melalui komposting skala rumah tangga dan kawasan, penerapan RDF dan co-processing, serta pengolahan sampah menjadi energi (PSEL).

Di sisi regulasi, dilakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi serta insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi multipihak juga terus didorong melalui kerja sama dengan pihak swasta serta pelibatan UMKM daur ulang.

Dukungan dari akademisi dan komunitas diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi, kampanye secara masif melalui sekolah dan media sosial, serta pelatihan pengelolaan sampah. Selain itu, dilakukan digitalisasi dan monitoring melalui sistem pelaporan berbasis aplikasi serta dashboard capaian kinerja.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengelolaan pengaduan terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2025, terdapat 28 pengaduan yang diterima dan seluruhnya telah ditindaklanjuti serta diselesaikan.

Meskipun demikian, dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup masih terdapat beberapa hambatan, antara lain kepatuhan pelaku usaha yang belum optimal, terutama dalam pengoperasian IPAL dan pengendalian emisi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik serta fasilitas pemantauan kualitas lingkungan masih menjadi kendala, baik dari sisi jumlah maupun jangkauan. Sumber pencemar domestik yang cukup besar, seperti limbah rumah tangga dan kebiasaan pembakaran sampah, juga menjadi kontributor signifikan terhadap pencemaran. Di samping itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pemantauan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, perubahan tata guna lahan serta pertumbuhan aktivitas permukiman dan industri, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan turut menjadi tantangan dalam pengendalian pencemaran.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dilakukan sejumlah solusi dan strategi, antara lain peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan sanksi administratif secara konsisten, serta pembinaan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan IPAL dan pengendalian emisi. Penguatan sarana dan prasarana lingkungan juga dilakukan melalui pemantauan pembangunan dan optimalisasi IPAL komunal/domestik serta penyediaan fasilitas pendukung pengendalian pencemaran.

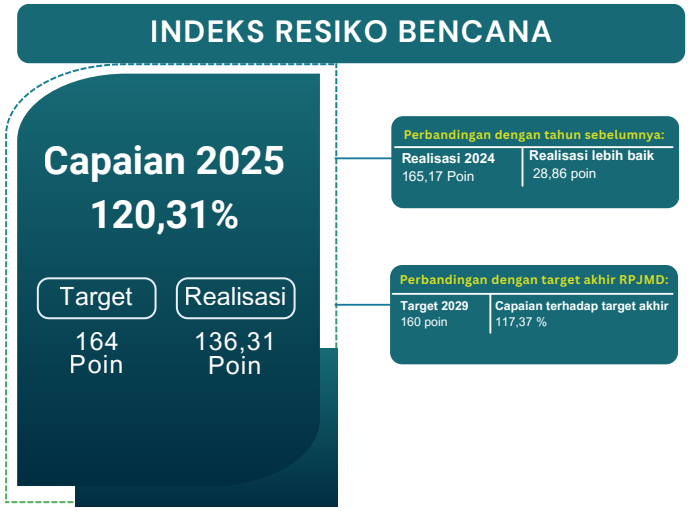
Selain itu, pengendalian sumber pencemar domestik dilakukan melalui peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik, edukasi pengurangan dan pengelolaan sampah termasuk larangan pembakaran terbuka, serta pemberdayaan masyarakat melalui program kampung iklim (Proklim). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran juga menjadi perhatian melalui pelatihan teknis bagi petugas pengawas dan laboratorium lingkungan serta optimalisasi alokasi anggaran dan dukungan pendanaan dari berbagai sumber.

Penguatan koordinasi lintas sektor dilakukan melalui sinkronisasi program antar perangkat daerah, pelibatan dunia usaha dan masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Di sisi lain, pengendalian tata ruang dan pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang serta pengendalian perizinan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terus didorong melalui kampanye dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan serta penguatan peran komunitas dan sekolah dalam perlindungan lingkungan.



Kegiatan Peninjauan Proses Perbaikan Saluran Air di Kampung Sukatani

Indeks Risiko Bencana



Arah kebijakan Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2025–2029 salah satunya difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar guna menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan kondisi wilayah yang aman dan tangguh terhadap potensi bencana, sehingga risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan pembangunan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Risiko bencana daerah tersebut dapat diukur melalui Indeks Risiko Bencana sebagai indikator yang menggambarkan tingkat kerentanan, kapasitas, dan potensi ancaman bencana di suatu wilayah.

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 136,31 berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui surat Nomor B-41/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Barat. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 164, dengan capaian kinerja mencapai 120,31 persen. Perlu diketahui bahwa nilai Indeks Risiko Bencana bersifat negatif, artinya semakin kecil nilai indeks menunjukkan kondisi yang semakin baik karena tingkat risiko bencana yang lebih rendah.

Apabila dikaitkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 160, maka capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut secara signifikan dengan capaian kinerja sebesar 117,37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Cianjur telah berjalan dengan baik dan melampaui ekspektasi yang direncanakan.

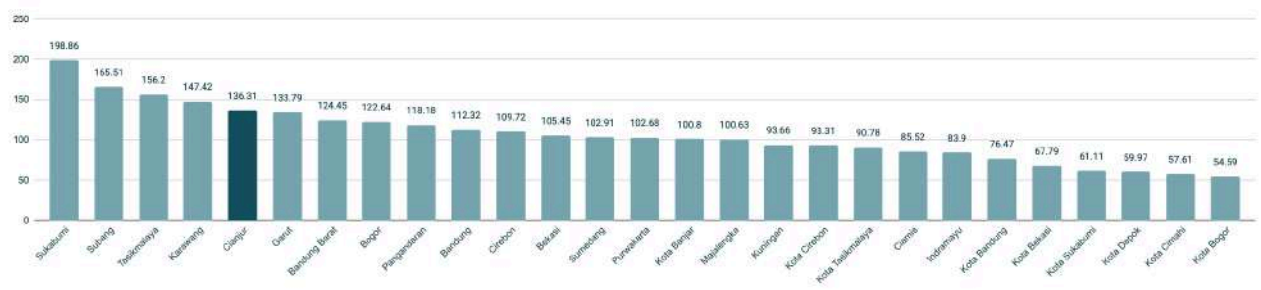
Namun demikian, capaian yang telah melampaui target ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target kinerja ke depan, agar tetap relevan dan mencerminkan kondisi aktual. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk terus meningkatkan kinerja atau setidaknya mempertahankan capaian yang telah diraih pada tahun-tahun berikutnya.

Apabila dilihat dari tren Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cianjur selama periode 2021–2025, nilai indeks menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 197,08, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 207,62. Selanjutnya, nilai indeks mengalami penurunan secara bertahap pada tahun 2023 sebesar 185,14, tahun 2024 sebesar 165,17, hingga mencapai 136,31 pada tahun 2025. Penurunan nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Cianjur secara umum semakin menurun, yang mengindikasikan arah kinerja yang positif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Perlu diketahui bahwa pada bulan November 2021, Kabupaten Cianjur mengalami bencana gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo dan kedalaman 10 km yang berpusat di wilayah perkotaan. Kejadian ini turut mempengaruhi tingkat risiko bencana pada tahun-tahun awal periode tersebut, sehingga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membaca dinamika nilai indeks risiko bencana.

Namun demikian, dalam menganalisis tren Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Cianjur tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersamaan dengan rilis data Indeks Risiko Bencana tahun 2025, terdapat perubahan dalam metode perhitungan. Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan kerentanan, sehingga hasil perhitungan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil perhitungan pada periode tahun 2015–2024.

Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: BNPB, 2026

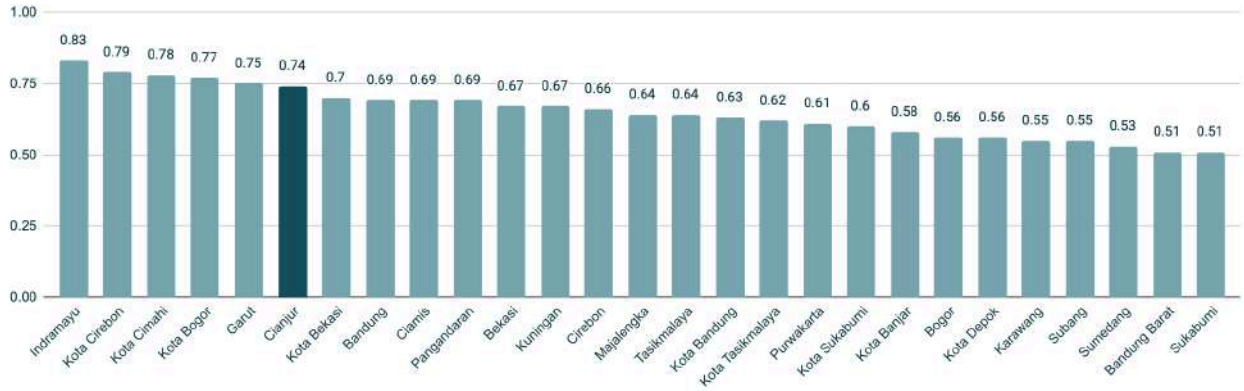
Berdasarkan hasil rilis Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2025 oleh BNPB, Kabupaten Cianjur mencatat nilai sebesar 136,31 dan berada pada peringkat ke-5 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Cianjur masih tergolong relatif tinggi dibandingkan sebagian daerah lain, namun tidak lagi berada pada kelompok dengan risiko tertinggi.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, Kabupaten Cianjur hampir selalu menempati peringkat pertama atau kedua sebagai daerah dengan nilai indeks risiko bencana tertinggi di Jawa Barat. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi pada periode sebelumnya. Namun, pada tahun 2025 terjadi pergeseran posisi yang cukup signifikan, di mana Kabupaten Cianjur tidak lagi berada pada peringkat teratas, meskipun masih berada dalam lima besar daerah dengan tingkat risiko bencana tertinggi.

Perubahan posisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan, baik dari sisi peningkatan kapasitas, pengendalian kerentanan, maupun pengelolaan potensi ancaman bencana. Meskipun demikian, posisi pada peringkat ke-5 tetap menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur masih perlu terus memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan agar tingkat risiko dapat ditekan lebih optimal di masa mendatang.

Upaya pengurangan risiko bencana di daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara lintas sektor melalui program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, dengan dukungan penganggaran yang terkoordinasi oleh Bappeda. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program lintas sektor tersebut diperkuat melalui berbagai instrumen kebijakan. Dalam menganalisa hal tersebut kita perlu melihat Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi di tingkat kabupaten.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: BNPB, 2026

Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 0,74, yang menunjukkan bahwa tingkat ketahanan daerah terhadap bencana berada pada kategori cukup baik. Capaian ini menempatkan Kabupaten Cianjur pada peringkat ke-6 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yang mengindikasikan bahwa kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah lainnya.

Dalam upaya menurunkan risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain penyempurnaan regulasi kebencanaan di tingkat daerah. Pada tahun 2025, integrasi rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen RPJMD semakin diperkuat, sehingga mendukung alokasi anggaran yang lebih berkelanjutan serta pembentukan struktur organisasi yang lebih responsif terhadap karakteristik ancaman bencana di wilayah Cianjur.

Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di wilayah rawan. Upaya ini berdampak pada meningkatnya literasi kebencanaan masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, serta penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) yang lebih modern dan terintegrasi secara digital. Selain itu, peningkatan ketangguhan infrastruktur dan logistik juga menjadi fokus, dengan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana serta standarisasi prosedur distribusi bantuan yang mampu mempercepat waktu tanggap. Ketersediaan logistik di titik-titik strategis (buffer stock) turut mendukung peningkatan ketahanan fisik daerah.

Di sisi pemulihan pascabencana, Pemerintah Kabupaten Cianjur menerapkan prinsip “Build Back Better, Safer, and Sustainable” dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan stimulan dan pendampingan usaha, sehingga ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga. Keberhasilan ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, termasuk partisipasi aktif relawan serta dukungan sektor swasta melalui program CSR.

Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 32 kecamatan memiliki potensi kebencanaan yang tinggi dengan karakteristik yang beragam. Berdasarkan data kejadian bencana, tren kejadian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. BPBD Kabupaten Cianjur telah melakukan pengelolaan data dan informasi kejadian bencana secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak sebagai sumber informasi yang kredibel. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan pengurangan risiko bencana, penanganan darurat secara cepat dan tepat, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Data yang tidak akurat dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 248 kejadian bencana di Kabupaten Cianjur yang tersebar di 32 kecamatan. Jenis bencana yang terjadi didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, serta kejadian gempa bumi. Ke depan, data dan informasi tersebut diharapkan dapat terintegrasi dalam sistem "Satu Data Bencana" antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025

Jenis Bencana	Jumlah
Banjir	44
Tanah Longsor	130
Gelombang Pasang dan Abrasi	-
Cuaca Ekstrim	74
Kekeringan	-
Kebakaran Hutan dan Lahan	-
Gempa Bumi	141

Sumber: BPBD, 2026

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Namun demikian, terhadap setiap kendala tersebut perlu dilakukan berbagai upaya penanganan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana. Uraian mengenai kendala dan langkah penanggulangannya disajikan sebagai bagian dari evaluasi kinerja untuk mendukung perbaikan berkelanjutan ke depan:

1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Permasalahan: Kurangnya antusiasme peserta dalam sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), keterbatasan durasi pelaksanaan kegiatan, serta adanya pergantian personel relawan. Solusi: Meningkatkan dukungan dari berbagai pihak serta menyediakan fasilitas, peralatan, dan anggaran yang memadai agar keberlanjutan program DESTANA dapat berjalan optimal.

2. Penyusunan Rencana Kontijensi. Permasalahan: Keterbatasan sumber daya (waktu, tenaga, dan anggaran), rendahnya pemahaman mengenai pentingnya rencana kontijensi, serta keterbatasan data dan informasi yang akurat. Solusi: Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, serta memperkuat pengumpulan data dan informasi secara komprehensif.

3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Permasalahan: Jarak lokasi kegiatan yang jauh, khususnya bagi peserta dari wilayah Cianjur Selatan, serta perbedaan tingkat pemahaman sumber daya manusia. Solusi: Memberikan dukungan transportasi bagi peserta dan mengembangkan metode penyampaian materi yang lebih inovatif dan mudah dipahami.

4. Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana. Permasalahan: Luasnya wilayah Kabupaten Cianjur, keterbatasan sarana dan prasarana (kendaraan operasional), penanganan yang masih bersifat responsif, koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal, serta keterbatasan personel siaga. Solusi: Menambah anggaran, meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan, menambah dan meningkatkan kapasitas personel, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui pertemuan rutin.

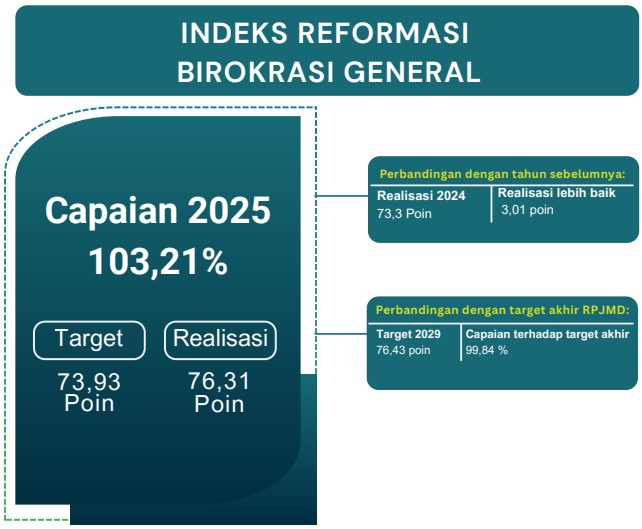
5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Permasalahan: Keterbatasan anggaran untuk penyediaan logistik, stok bantuan yang belum memadai, serta keterbatasan armada transportasi distribusi bantuan. Solusi: Mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai tingkat risiko bencana, serta membangun kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga terkait untuk mendukung efektivitas distribusi logistik.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pascabencana. Permasalahan: Luasnya wilayah yang menyulitkan sosialisasi, rendahnya minat dan kesadaran masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antar perangkat desa. Solusi: Mengoptimalkan metode sosialisasi yang lebih interaktif, mengefektifkan jadwal kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi antar perangkat desa.

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang vital dalam pelaksanaan pembangunan daerah, karena tata kelola pemerintahan yang berkualitas akan mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



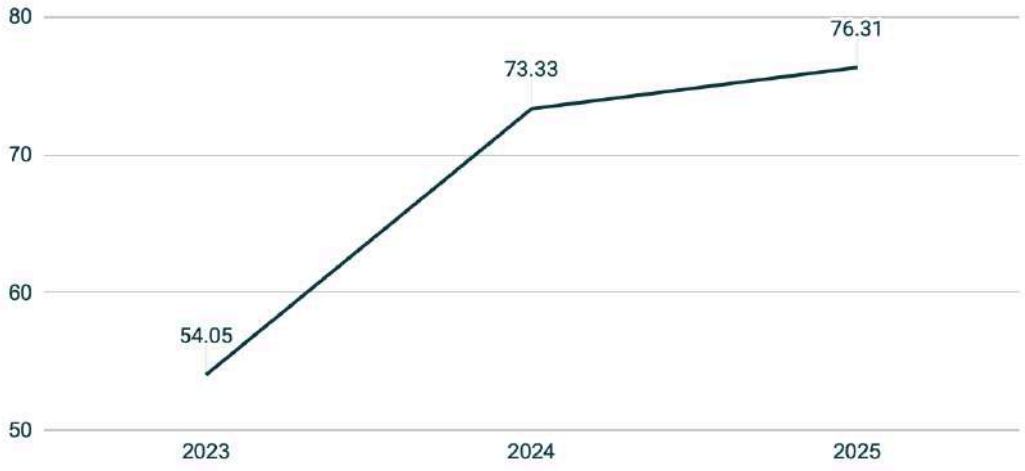
Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029, penguatan tata kelola pemerintahan diharapkan dapat dioptimalkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Strategi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (General).

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,31 dengan capaian kinerja sebesar 103,21 persen dari target yang ditetapkan sebesar 73,93. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 berhasil melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Perlu menjadi perhatian bahwa angka tersebut masih bersifat sementara, sebagaimana tercantum pada Portal Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan sesuai dengan hasil penetapan akhir.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 76,43, capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 99,84 persen. Dengan demikian, realisasi tersebut hampir mencapai target akhir perencanaan jangka menengah. Selain itu, capaian tahun 2025 juga telah melampaui target yang direncanakan hingga tahun 2028. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target pada tahun-tahun selanjutnya agar lebih relevan, adaptif, dan mencerminkan kondisi serta dinamika kinerja yang berkembang.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General Kabupaten Cianjur

	Bobot	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi General	100	54,05	73,33	76,31

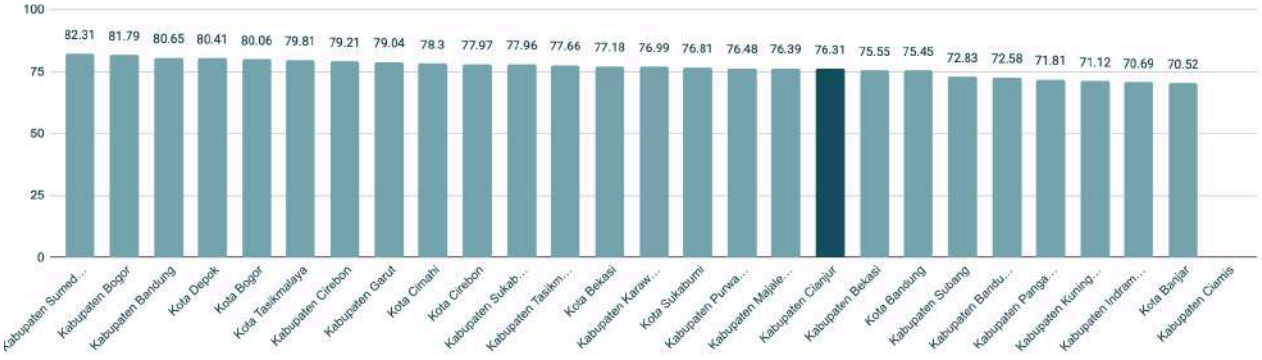


Sumber: Kementerian PANRB, 2026 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi (RB) General Kabupaten Cianjur, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, nilai indeks tercatat sebesar 54,05, kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 73,33, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 76,31. Kenaikan sebesar 19,28 poin pada periode 2023–2024 menunjukkan adanya akselerasi yang kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara itu, peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 2,98 poin mengindikasikan bahwa upaya perbaikan tetap berlanjut, meskipun dengan laju yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Secara tren, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur menunjukkan pola peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan, serta semakin kuatnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dengan tren yang terus meningkat, capaian ini menjadi indikator positif bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kementerian PANRB, 2026 (diolah)

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Kabupaten Sumedang	79.00	82.31
2	Kabupaten Bogor	74.70	81.79
3	Kabupaten Bandung	76.88	80.65
4	Kota Depok	76.52	80.41
5	Kota Bogor	78.55	80.06
6	Kota Tasikmalaya	76.62	79.81
7	Kabupaten Cirebon	74.83	79.21
8	Kabupaten Garut	77.70	79.04
9	Kota Cimahi	76.30	78.30
10	Kota Cirebon	75.75	77.97
11	Kabupaten Sukabumi	73.92	77.96
12	Kabupaten Tasikmalaya	71.83	77.66
13	Kota Bekasi	71.92	77.18
14	Kabupaten Karawang	73.28	76.99
15	Kota Sukabumi	72.74	76.81
16	Kabupaten Purwakarta	75.09	76.48
17	Kabupaten Majalengka	72.39	76.39
18	Kabupaten Cianjur	73.26	76.31
19	Kabupaten Bekasi	72.78	75.55
20	Kota Bandung	75.80	75.45
21	Kabupaten Subang	69.41	72.83
22	Kabupaten Bandung Barat	69.04	72.58
23	Kabupaten Pangandaran	67.00	71.81
24	Kabupaten Kuningan	66.84	71.12
25	Kabupaten Indramayu	71.58	70.69
26	Kota Banjar	75.36	70.52
27	Kabupaten Ciamis	-	-

Sumber: Kementerian PANRB, 2026 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi (RB) General Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kabupaten Cianjur mencatat nilai sebesar 76,31, meningkat dari tahun 2024 sebesar 73,26 atau naik 3,05 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja reformasi birokrasi yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, posisi Kabupaten Cianjur berada pada peringkat ke-18 dari 27 daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan, daya saing kinerja reformasi birokrasi Kabupaten Cianjur masih berada pada kelompok menengah ke bawah.

Dibandingkan dengan daerah dengan capaian tertinggi, seperti Kabupaten Sumedang (82,31), Kabupaten Bogor (81,79), dan Kabupaten Bandung (80,65), nilai RB General Kabupaten Cianjur masih terpaut cukup jauh. Bahkan beberapa daerah lain seperti Kota Depok (80,41) dan Kota Bogor (80,06) juga telah berada pada level kinerja yang lebih tinggi. Di sisi lain, capaian Kabupaten Cianjur masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan nilai lebih rendah, seperti Kabupaten Subang (72,83), Kabupaten Bandung Barat (72,58), dan Kabupaten Pangandaran (71,81). Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Cianjur masih relatif kompetitif di tingkat menengah.

Secara tren, peningkatan nilai RB General Kabupaten Cianjur dari tahun 2024 ke 2025 sejalan dengan mayoritas kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang juga mengalami kenaikan. Namun, laju peningkatan tersebut belum cukup untuk mendorong pergeseran posisi secara signifikan dalam peringkat provinsi. Dengan demikian, meskipun kinerja reformasi birokrasi Kabupaten Cianjur menunjukkan arah yang positif, masih diperlukan upaya yang lebih terarah dan konsisten, terutama pada indikator-indikator dengan kontribusi besar, agar dapat meningkatkan posisi dan mendekati capaian daerah-daerah dengan kinerja terbaik di Jawa Barat.

Keberhasilan peningkatan nilai RB General ini merupakan hasil dari langkah-langkah manajerial yang terukur, antara lain melalui intensifikasi koordinasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun 2025 terbukti efektif dalam menyelaraskan persepsi, memperkuat pemahaman teknis, serta meningkatkan fungsi pengendalian terhadap pemenuhan indikator reformasi birokrasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mendorong pemahaman reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga ke seluruh perangkat daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya dipahami oleh perangkat daerah pengampu, tetapi juga diinternalisasikan pada seluruh unit kerja. Pada tahun 2025, upaya perbaikan tidak hanya dilakukan pada 31 (tiga puluh satu) perangkat daerah teknis, tetapi juga mulai diperluas hingga tingkat kecamatan. Terdapat empat kecamatan yang telah melaksanakan penilaian reformasi birokrasi, yaitu Kecamatan Cianjur, Cipanas, Cugenang, dan Cibeber.

Di samping penguatan aspek manajerial, transformasi digital menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) yang diinisiasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Implementasi aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan penyampaian standar penilaian kepada seluruh perangkat daerah. Proses pengumpulan bukti dukung (eviden) menjadi lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap unit kerja dapat memenuhi parameter penilaian secara optimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum optimalnya konsistensi dalam pengendalian dan koordinasi lintas sektor. Sebelum adanya penguatan pada tahun 2025, monitoring terhadap progres indikator cenderung bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. Selain itu, terdapat ketimpangan capaian antar indikator, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan fokus antar perangkat daerah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan langkah strategis melalui akselerasi transformasi digital dengan implementasi aplikasi SURABI, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman terhadap indikator penilaian, serta mendorong kemandirian perangkat daerah dalam memenuhi target reformasi birokrasi.

Selain itu, penguatan fungsi koordinasi dan pengendalian terus dilakukan melalui penyelenggaraan rapat konsultasi yang terjadwal dan berkelanjutan. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi ego sektoral serta memastikan bahwa proses evaluasi kinerja berjalan secara konsisten sepanjang tahun. Ke depan, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur akan terus diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan. Diharapkan pada tahun 2029, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Nilai Masing-masing Indikator Reformasi Birokrasi General Kabupaten Cianjur

Indikator Penilaian	Nilai Max	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Progres Realisasi	Penanggung jawab
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.30	2.50	0.20	Bagian Organisasi
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	100	100.00	99.00	-1.00	Inspektorat
Tingkat Implementasi Sistem Kerja dengan Model Fleksibel Pegawai ASN	5	4.00	4.00	0.00	Bagian Organisasi
Tingkat Maturitas SPIP	5	3.06	2.83	-0.23	Inspektorat
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.5	0.00	0.5	0.50	Inspektorat
Nilai SAKIP	100	67.08	68.13	1.05	Bapperida, Inspektorat, Bagian Organisasi
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	5	3.00	3.00	0.00	Diskominfo
Tingkat Digitalisasi Arsip	100	89.58	92.18	2.60	Dinas Arpusda
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	5	3.00	5.00	2.00	Diskominfo
Indeks Kualitas Kebijakan	100	86.32	74.90	-11.42	Bapperida, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Indeks Reformasi Hukum	100	97.48	99.26	1.78	Bagian Hukum
Indeks Pembangunan Statistik	5	2.71	2.71	0.00	Diskominfo
Indeks Tata Kelola Pengadaan	100	72.57	78.89	6.32	Barjas
Indeks Sistem Merit	410	280.50	280.50	0.00	Bkpsdm
Indeks Pelayanan Publik	5	4.16	4.02	-0.14	Bagian Organisasi
Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	100	93.61	93.61	0.00	Bagian Organisasi
Indeks SPBE	5	3.75	4.18	0.43	Diskominfo
Capaian IKU Makro	100	100.00	96.24	-3.76	Bapperida
Capaian IKU Non Makro (IKU Kepala Daerah)	100	100.00	100.00	0.00	Bapperida
Opini BPK	3	3.00	3.00	0.00	BKAD
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100	73.63	78.22	4.59	Inspektorat
Indeks BerAkhlak	100	69.27	69.27	0.00	Bkpsdm
Survei Penilaian Integritas	100	64.78	66.71	1.93	Inspektorat
Survei Kepuasan Masyarakat	100	85.95	86.42	0.47	Biro Organisasi
NILAI RB GENERAL	100	73.3	76.31		

Sumber: Kementerian PANRB, 2026 (diolah)

Berdasarkan nilai masing-masing indikator Reformasi Birokrasi (RB) General Kabupaten Cianjur, secara umum terjadi peningkatan kinerja yang mendorong kenaikan nilai RB General dari 73,33 pada tahun 2024 menjadi 76,31 pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan pada sejumlah indikator strategis, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan.

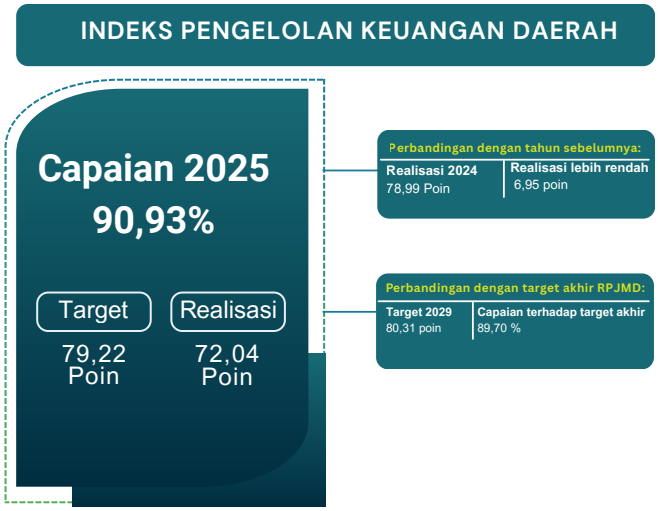
Indikator dengan peningkatan paling signifikan antara lain Indeks Tata Kelola Pengadaan yang naik sebesar 6,32 poin, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebesar 4,59 poin, serta Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang meningkat sebesar 2,00 poin. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada Indeks Reformasi Hukum (1,78 poin), Nilai SAKIP (1,05 poin), serta Digitalisasi Arsip (2,60 poin). Capaian ini menunjukkan adanya penguatan pada aspek tata kelola, akuntabilitas, serta pemanfaatan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami penurunan, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan yang turun cukup signifikan sebesar 11,42 poin, Capaian IKU Makro sebesar 3,76 poin, serta Tingkat Maturitas SPIP sebesar 0,23 poin. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas kebijakan, pengendalian internal, serta capaian kinerja makro.

Selain itu, terdapat beberapa indikator yang relatif stagnan atau tidak mengalami perubahan, seperti Indeks Sistem Merit, Indeks Pembangunan Statistik, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, serta Opini BPK berhasil dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut telah stabil, namun tetap memerlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai RB General Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 didorong oleh perbaikan pada aspek tata kelola, pelayanan publik, dan akuntabilitas. Namun demikian, diperlukan perhatian lebih terhadap indikator yang mengalami penurunan, khususnya pada kualitas kebijakan dan pengendalian internal, agar peningkatan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 tercatat sebesar 72,041 berdasarkan tahun anggaran 2024. Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 90,93 persen dari target yang ditetapkan sebesar 79,22 poin, sehingga terdapat selisih (gap) sebesar 7,18 poin. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 belum dapat tercapai secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2029, capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 89,7 persen. Meskipun belum mencapai target tahunan, capaian tersebut menunjukkan bahwa secara kumulatif kinerja pengelolaan keuangan daerah masih berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IPKD pada tahun 2025 mengalami penurunan dari 78,99 poin pada tahun 2024 menjadi 72,041 poin, atau turun sebesar 6,95 poin. Penurunan ini juga berdampak pada perubahan predikat dari sebelumnya “Baik” menjadi “Cukup Baik”.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur

IPKD	Kategori Predikat	Tahun	Tahun Pengukuran
69,03	Perlu Perbaikan	2020	2021
49,45	Sangat Perlu Perbaikan	2021	2022
78,69	Baik	2022	2023
78,7	Baik	2023	2024
72,041	Cukup Baik	2024	2025

Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat, 2026 (diolah)

Secara tren dalam periode 2021–2025, perkembangan IPKD Kabupaten Cianjur menunjukkan pola yang fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan signifikan dari kategori “Sangat Perlu Perbaikan” pada tahun 2021 menjadi “Baik” pada tahun 2022 dan 2023, capaian IPKD pada tahun 2025 mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perbaikan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan, konsistensi dalam mempertahankan kinerja masih perlu diperkuat.

Dengan demikian, diperlukan upaya evaluasi dan penguatan pada aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, agar capaian kinerja dapat kembali meningkat dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah.

Namun, perlu menjadi perhatian bahwa pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun ukur 2025 dengan tahun anggaran 2024 mengalami pembaharuan signifikan, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pembaharuan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi, relevansi, serta kualitas penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan tersebut mencakup beberapa aspek utama, di antaranya penggantian indikator Mandatory Spending Alokasi Anggaran Kesehatan menjadi indikator Alokasi Belanja Pegawai dengan batas paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, dilakukan penyesuaian kriteria penilaian pada Mandatory Spending Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan ketentuan minimal sebesar 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Dalam rangka memperkuat orientasi kinerja, juga ditambahkan penilaian pada indikator pengalokasian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menitikberatkan pada kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan serta capaian output. Di sisi lain, dilakukan penyederhanaan sekaligus penambahan dokumen transparansi pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan akuntabilitas.

Beberapa indikator juga dihapus, antara lain indikator Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga dan indikator Solvabilitas Layanan, sebagai bagian dari penyederhanaan instrumen penilaian. Selanjutnya, terdapat perubahan pada rumus penghitungan indikator Fleksibilitas Keuangan serta penyesuaian terhadap jenis data yang harus diinput oleh pemerintah daerah.

Perubahan metodologi juga dilakukan pada sistem penilaian, dari sebelumnya menggunakan pendekatan komparasi antar pemerintah daerah dalam satu kategori kemampuan keuangan, menjadi metode skoring yang lebih objektif. Hasil pengukuran IPKD kini dikelompokkan berdasarkan kategori kemampuan keuangan daerah, yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Selain itu, metode pengkategorian hasil pengukuran juga mengalami perubahan, dari yang semula menggunakan standar deviasi menjadi pendekatan pembobotan.



Kegiatan Anugrah Pajak Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Kategori Predikat	IPKD	Tahun Data	Tahun Pengukuran
1	Kota Depok	Baik	88,822	2024	2025
2	Kabupaten Karawang	Cukup Baik	79,618	2024	2025
3	Kabupaten Sukabumi	Cukup Baik	78,364	2024	2025
4	Kabupaten Bekasi	Cukup Baik	77,916	2024	2025
5	Kabupaten Tasikmalaya	Cukup Baik	75,678	2024	2025
6	Kabupaten Indramayu	Cukup Baik	75,261	2024	2025
7	Kabupaten Garut	Cukup Baik	72,093	2024	2025
8	Kabupaten Cianjur	Cukup Baik	72,041	2024	2025
9	Kota Tasikmalaya	Cukup Baik	71,394	2024	2025
10	Kabupaten Subang	Cukup Baik	71,361	2024	2025
11	Kabupaten Sumedang	Cukup Baik	71,115	2024	2025
12	Kota Bogor	Cukup Baik	71,034	2024	2025
13	Kabupaten Bandung Barat	Cukup Baik	70,364	2024	2025
14	Kabupaten Purwakarta	Cukup Baik	70,216	2024	2025
15	Kota Cimahi	Cukup Baik	70,045	2024	2025
16	Kabupaten Cirebon	Cukup Baik	69,606	2024	2025
17	Kabupaten Bogor	Cukup Baik	67,974	2024	2025
18	Kabupaten Majalengka	Cukup Baik	67,591	2024	2025
19	Kota Sukabumi	Cukup Baik	66,801	2024	2025
20	Kota Bekasi	Cukup Baik	66,751	2024	2025
21	Kota Banjar	Cukup Baik	66,746	2024	2025
22	Kabupaten Bandung	Cukup Baik	66,388	2024	2025
23	Kota Cirebon	Cukup Baik	65,895	2024	2025
24	Kabupaten Ciamis	Cukup Baik	60,497	2024	2025
25	Kota Bandung	Cukup Baik	57,708	2024	2025
26	Kabupaten Kuningan	Cukup Baik	55,737	2024	2025
27	Kabupaten Pangandaran	Cukup Baik	53,641	2024	2025

Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat, 2026 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kabupaten Cianjur memperoleh nilai sebesar 72,041 dengan kategori predikat “Cukup Baik”. Capaian ini menempatkan Kabupaten Cianjur pada posisi ke-8 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, posisi Kabupaten Cianjur berada pada kelompok menengah atas dalam kategori “Cukup Baik”. Nilai IPKD Kabupaten Cianjur relatif sebanding dengan Kabupaten Garut (72,093) yang berada tepat di atasnya, serta lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kota Tasikmalaya (71,394), Kabupaten Subang (71,361), dan Kabupaten Sumedang (71,115).

Namun demikian, capaian Kabupaten Cianjur masih berada di bawah beberapa daerah dengan kinerja lebih tinggi, seperti Kota Depok yang memperoleh nilai 88,822 dengan predikat “Baik”, serta Kabupaten Karawang (79,618) dan Kabupaten Sukabumi (78,364) yang memiliki nilai IPKD mendekati kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih kompetitif di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Cianjur yang berada pada posisi menengah atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, diperlukan upaya penguatan pada berbagai aspek pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan peringkat dan mencapai kategori “Baik” di masa yang akan datang.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Cianjur dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pada seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengelolaan aset daerah.

Dalam konteks tersebut, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2020 hingga tahun 2025. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Opini BPK atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Cianjur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BKAD, 2026 (diolah)

Pada aspek perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memastikan tersedianya dokumen perencanaan anggaran secara lengkap dan tepat waktu, antara lain penyusunan KUA-PPAS, perubahan KUA-PPAS, verifikasi RKA-SKPD, serta penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait APBD dan perubahan APBD. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen tersebut didukung oleh komitmen eksekutif dan legislatif, koordinasi antar perangkat daerah, serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi kepatuhan terhadap jadwal.

Pada aspek pelaksanaan, pengelolaan penyaluran bantuan keuangan telah dilaksanakan secara optimal, mencakup penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa pada 354 desa. Selain itu, pengelolaan dana darurat dan mendesak serta dana bagi hasil juga telah dilaksanakan dengan baik untuk mendukung penanganan kondisi darurat serta pemerataan pembangunan di tingkat desa.

Dalam aspek penatausahaan keuangan, seluruh proses pencairan anggaran melalui penerbitan SP2D telah terealisasi 100%, dengan total 13.769 SP2D pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi keuangan. Penguatan kualitas penatausahaan dilakukan melalui koordinasi pengelolaan kas daerah, penyusunan anggaran kas dan SPD, serta implementasi transaksi non-tunai yang semakin optimal. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada aparatur pengelola keuangan juga terus ditingkatkan guna memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi.

Pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kualitas pelaporan didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengendalian intern. Upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui rekonsiliasi data secara berkala, konsolidasi laporan keuangan, serta penyusunan kebijakan dan pedoman teknis akuntansi yang terstandar.

Selanjutnya, pada aspek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), tingkat kepatuhan terhadap regulasi mencapai 100%. Pengelolaan BMD dilaksanakan secara sistematis melalui perencanaan kebutuhan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, serta pengawasan dan pengendalian aset. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain penyusunan standar harga dan standar barang milik daerah, pelaksanaan rekonsiliasi data, serta penyusunan laporan BMD secara berkala guna mendukung akuntabilitas laporan keuangan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cianjur telah dilaksanakan secara terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek koordinasi, konsistensi pelaksanaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah perbaikan strategis yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya.

Upaya pertama dilakukan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya melalui pelaksanaan probity audit.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan, serta meminimalisir potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Selanjutnya, dilakukan penguatan mitigasi fraud dan manajemen risiko guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kecurangan serta memastikan setiap proses pengelolaan keuangan memiliki mekanisme pengendalian yang memadai. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih andal dan berintegritas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan juga menjadi fokus utama, melalui pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Dengan SDM yang kompeten, diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Selain itu, penataan aset tetap dan investasi akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas penatausahaan, inventarisasi, serta pengawasan aset daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan aset serta mendukung akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Terakhir, optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) akan terus ditingkatkan. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mendorong integrasi data, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Dengan pelaksanaan berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cianjur dapat terus meningkat serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Selain opini BPK, kondisi keuangan daerah yang tercermin dari realisasi pendapatan serta tingkat kemandirian keuangan juga turut mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2025, persentase peningkatan PAD mencapai 18,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 12,15 persen. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang positif dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Peningkatan PAD tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain penetapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai jenis pajak daerah, serta pelaksanaan evaluasi secara rutin terhadap target dan realisasi kinerja. Selain itu, penetapan timeline kegiatan yang terukur turut mendukung pencapaian target secara bertahap.

Upaya lain yang dilakukan meliputi pengumpulan data realisasi retribusi daerah secara berkala serta pelaksanaan rekonsiliasi dengan perangkat daerah penghasil retribusi setiap bulan. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melaksanakan inovasi pelayanan melalui kegiatan Pelayanan Pajak Keliling (PEPELING), pembentukan tim penertiban pajak daerah lintas instansi, serta penyediaan kemudahan pembayaran pajak secara digital melalui berbagai kanal seperti fintech, e-commerce, retail modern, QRIS, dan virtual account.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Di antaranya adalah masih adanya penggunaan air tanah yang belum memiliki izin (SIPA), sehingga menyulitkan pemungutan pajak. Selain itu, pergeseran media promosi ke platform digital yang tidak dikenakan pajak reklame serta belum optimalnya kepemilikan izin penyelenggaraan reklame turut mempengaruhi penerimaan daerah.

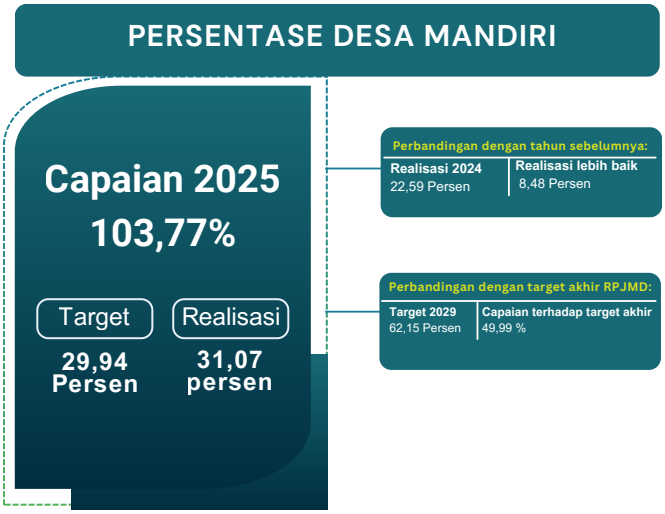
Kendala lainnya meliputi kebijakan yang berpotensi menimbulkan potential loss, seperti pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program diskon listrik. Selain itu, belum terlaksananya kerjasama pemungutan parkir berlangganan dengan instansi terkait, kondisi objek retribusi yang memerlukan biaya pemeliharaan tinggi, serta keterbatasan operasional sarana prasarana pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi PAD.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan mengakomodir kebijakan pemerintah pusat terkait tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

Selain itu, ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga menetapkan kebijakan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Keputusan Bupati, serta pemberian insentif dan pengurangan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai upaya dan kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Persentase Desa Mandiri

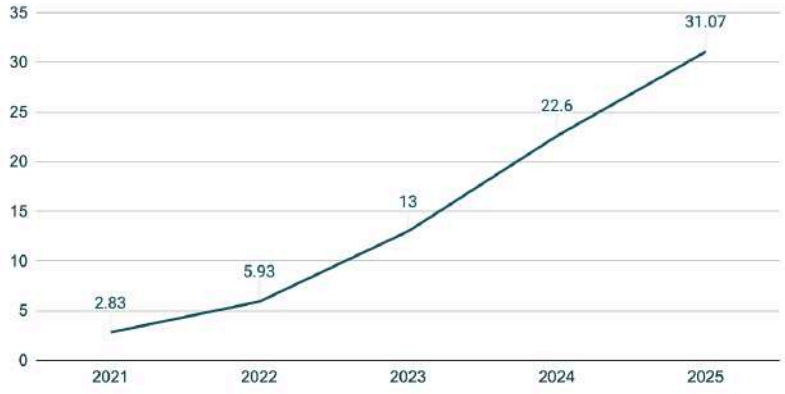


Pemerintahan desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten. Dalam menghadapi dinamika lingkungan yang berkembang dengan cepat dan penuh ketidakpastian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan kebijakan dan langkah strategis melalui kemampuan beradaptasi, merespons, serta berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam mendukung hal tersebut, peran desa perlu terus diperkuat secara aktif sehingga mampu berkembang menjadi desa yang mandiri. Kemandirian desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa diukur dengan indikator Persentase Desa Mandiri. Tahun 2025 Persentase Desa Mandiri realisasinya tercatat sebesar 31,07 persen dengan capaian kinerja mencapai 103,77 persen. Realisasi tahun 2025 berhasil melebihi ekspektasi 1,13 persen dari target yang ditentukan di awal yaitu 29,94 persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Desa Mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2024 awalnya hanya sebesar 22,59 persen desa mandiri, kini meningkat menjadi 31,07 persen desa mandiri yang tercatat pada tahun 2025 di Kabupaten Cianjur. Terdapat peningkatan sebesar 8,48 persen desa mandiri atau ada sebanyak 30 desa yang berhasil meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

Persentase Status Desa Mandiri Kabupaten Cianjur



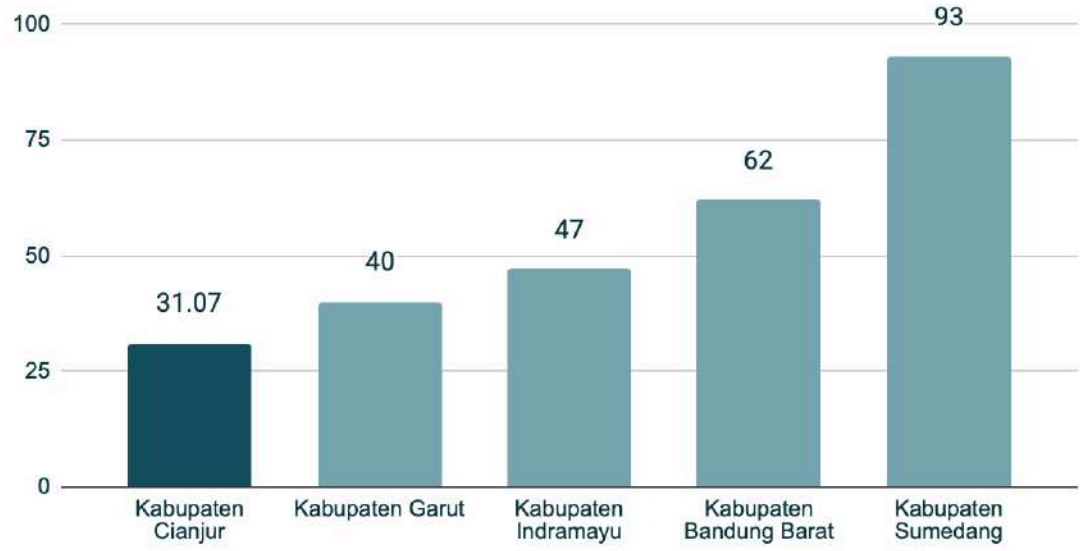
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

Persentase desa dengan status mandiri di Kabupaten Cianjur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2021, persentase desa mandiri tercatat sebesar 2,83 persen, kemudian meningkat menjadi 5,93 persen pada Tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 13 persen pada Tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 22,60 persen dan terus meningkat pada Tahun 2025 menjadi 31,07 persen. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir persentase desa mandiri di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari 2,83 persen menjadi 31,07 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam upaya mendorong kemandirian desa di Kabupaten Cianjur. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya kapasitas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang berkontribusi terhadap peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

Progres capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 62,15 persen desa mandiri menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada Tahun 2025, capaian realisasi telah mencapai 49,99 persen dari target akhir RPJMD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mampu mencapai hampir setengah dari target yang direncanakan.

Perbandingan Persentase Desa Mandiri Tahun 2025



Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Tahun 2025, persentase desa mandiri di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 31,07 persen. Apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat, capaian tersebut masih berada di bawah Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 62 persen, Kabupaten Garut sebesar 40 persen, Kabupaten Sumedang sebesar 93 persen, serta Kabupaten Indramayu sebesar 47 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian desa di Kabupaten Cianjur masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, optimalisasi pemanfaatan potensi desa, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan desa agar mampu mendorong percepatan peningkatan status desa mandiri di masa yang akan datang.

Upaya untuk mencapai peningkatan kemandirian desa di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam bentuk penguatan terhadap Tim Evaluasi Kecamatan yang berperan melaksanakan evaluasi terhadap alur pengelolaan keuangan desa serta pembinaan pengelolaan keuangan desa kepada aparatur pemerintah desa termasuk diantaranya hal yang spesifik terkait dengan penganggaran terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cianjur.

DPMD memfasilitasi Penyediaan Sistem Informasi Keuangan Desa dengan versi terbaru yang didistribusikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pembinaan awal tahun kepada kepala desa untuk memastikan APBDES serta substansi perencanaan keuangan desa sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku selanjutnya penyiapan instrumen monitoring dan pembinaan seperti SIKD temandesa dan instrumen pelaporan penggunaan APBDES yang tersedia dalam aplikasi pendukung seperti Kampung Pinter.

Terlaksananya pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pendataan aset desa di seluruh desa baik dokumen maupun aset-aset fisik guna mendorong desa agar memenuhi tertib administrasi dengan hasil akhir adanya kenaikan tingkat kepatuhan terhadap realisasi pendataan aset desa atau dapat disimpulkan bahwa seluruh desa sudah memenuhi standar pemenuhan tertib administrasi karena sudah melaporkan aset desanya secara berkala.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi Perangkat Desa sebanyak 4150 orang berikut pembayarannya sebagai bagian dari layanan yang disediakan dan telah menyelesaikan pembayaran 4% dari kewajiban iuran selama 1 tahun dengan serapan anggaran mencapai Rp. 5.904.231.080,00 atau sebesar 92.69% dari total anggaran pada DPPA sebesar Rp. 6.370.212.000,00, selisih belanja sebesar Rp.465.980.920,00 merupakan selisih yang terjadi akibat dari penyesuaian jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dibayar iuran BPJS Kesehatannya sepanjang tahun 2025 baik yang berhenti karena batas usia, mengundurkan diri dan diberhentikan.

Upaya mendukung peningkatan kemandirian desa juga diimplementasikan oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Program ini merupakan salah satu program strategis dalam mendorong kemandirian desa khususnya aspek peningkatan pemberdayaan masyarakat dan mendorong perekonomian desa menuju peningkatan status desa. Hasil akhir pelaksanaan program berupa terbinanya kader-kader Posyandu, KPM dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yaitu : RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, dengan dilakukannya pembinaan serta pemberian insentif bagi kinerja Ketua RT, RW dan dana operasional bagi kader posyandu, pokjanal kabupaten & kecamatan dan pokja kelurahan diharapkan adanya penguatan peran, monitoring dan evaluasi agar meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di desa.

Peran Tim Penggerak PKK dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur telah mendorong keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Cianjur.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 354 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa berdasarkan sumber daya lokal yang tersedia, sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha desa sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan desa cukup signifikan, baik melalui dukungan kebijakan, pembiayaan, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Dukungan tersebut diantaranya diwujudkan melalui bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur, khususnya pada alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja hibah. Melalui dukungan tersebut, diharapkan kelembagaan desa dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mendorong kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Peningkatan persentase desa mandiri di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur desa dalam mengelola kegiatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan status desa. Selain itu, berdasarkan resume APBDes Tahun Anggaran 2025 masih ditemukan pelaksanaan belanja desa yang belum sepenuhnya tepat sasaran serta belum tertib dalam penatausahaan. Tantangan lainnya adalah masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta mengelola pemerintahan dan keuangan desa secara akuntabel.

Di samping itu, kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan data juga masih perlu ditingkatkan, sehingga pelaporan serta pemutakhiran data desa belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa guna mendorong percepatan peningkatan status desa menuju desa mandiri.

Demi mendorong perbaikan pada masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut.

Pertama, penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan dengan mengedepankan kewenangan dan fungsi masing-masing pihak, disertai dukungan regulasi dalam pelaksanaan pembinaan, penataan keuangan desa, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan desa. Kolaborasi yang terarah akan mendorong sinergi antar lembaga sehingga proses pembinaan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi upaya bersama yang terkoordinasi.

Kedua, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran APBDes perlu terus diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu mendukung pengelolaan data dan sistem penatausahaan keuangan desa secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem transaksi non tunai yang mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pemerintah Desa. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Ketiga, pembinaan dalam rangka peningkatan status desa masih memerlukan evaluasi secara berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan metode pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif. Selama ini, pendekatan pembinaan yang dilakukan cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing desa. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembinaan agar lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

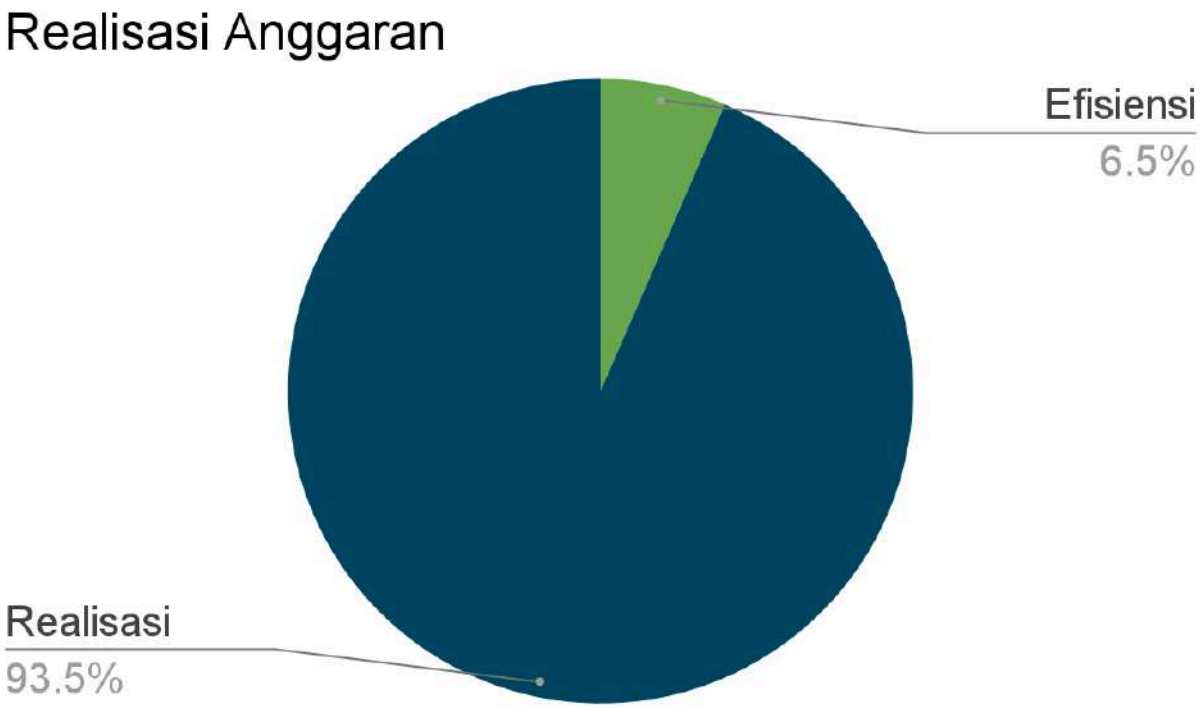
Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting dalam memperkuat pengendalian internal terhadap pengelolaan APBDesa maupun sumber anggaran lainnya yang mendukung pembangunan desa dan pelaksanaan program prioritas. Melalui monitoring dan evaluasi yang konsisten, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi permasalahan sejak dini sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kelima, koordinasi dan kolaborasi pembinaan bersama stakeholder serta pemerintah kecamatan perlu terus diperkuat guna memastikan pemerintah desa secara aktif melakukan asesmen terhadap perkembangan desa secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkala pada sistem Prodeskel dan Epdeskel, sehingga data perkembangan desa yang tersedia dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pembinaan desa secara lebih terstruktur, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, serta mendorong peningkatan status dan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Realisasi Anggaran

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selama Tahun 2025 didukung berbagai program strategis yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Secara umum, pelaksanaan program berjalan dengan baik dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran pembangunan sebesar Rp5.047.290.553.811,61. Hingga akhir tahun 2025, anggaran ini telah terealisasi sebesar Rp4.718.434.122.435,10 atau mencapai 93,48 persen.



Sumber : RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2021-2026

Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Efisiensi
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas	537,351,297,037.00	535,262,528,142.00	0.39%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1,159,729,957,450.70	1,007,406,456,257.10	13.13%
3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Bertakwa dan Berakhlak Mulia	51,987,995,406.00	51,069,033,547.00	1.77%
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	8,597,962,661.00	8,258,165,525.00	3.95%
5	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	19,748,269,727.50	19,169,346,078.00	2.93%
6	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian	5,008,581,140.00	4,951,960,120.00	1.13%
7	Meningkatnya Nilai Investasi	462,570,570.00	455,420,815.00	1.55%
8	Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian	1,910,776,310.00	1,696,514,529.00	11.21%
9	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	10,839,358,640.00	10,742,167,034.00	0.90%
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	3,934,406,196.00	3,913,138,221.00	0.54%
11	Berkembangnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,357,353,196.02	3,751,286,250.00	13.91%
12	Terwujudnya infrastruktur dasar daerah yang memadai	479,608,690,545.73	447,931,957,853.00	6.60%
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2,853,253,565.00	2,627,876,285.00	7.90%
14	Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas	2,760,900,081,366.66	2,621,198,271,779.00	5.06%

Sumber : RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2021-2026

BAB 4

PENUTUP

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 merupakan bentuk pelaporan kinerja Kabupaten Cianjur dalam komponen manajemen kinerja yang didalamnya terdapat informasi mengenai keselarasan antara perencanaan kinerja dan pelaksanaannya dalam sebuah konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan pelayanan publik, setiap organisasi melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja atas kinerja institusi organisasi menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil, karena pada tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026 terdapat 15 indikator kinerja utama berhasil dicapai dari keseluruhan 16 indikator kinerja utama, dan berdasarkan RPJMD 2025-2029 terdapat 19 indikator kinerja utama berhasil dicapai dari keseluruhan 28 indikator kinerja utama, dengan rincian :

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026)
    a. terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100 persen;
    b. terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target kinerja atau capaiannya di bawah 100 persen.
2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029)
    a. terdapat 19 (sembilan belas) indikator kinerja telah mencapai target atau dengan capaian lebih dari 100 persen;
    b. terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang tidak mencapai target kinerja atau capaiannya di bawah 100 persen;
    c. terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang realisasi kinerja nya belum tersedia.

Dilakukan evaluasi dan analisis dari data atas hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam BAB III dapat dilihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya dalam memenuhi capaian prioritas pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2021-2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2025-2029 dalam upaya pemenuhan sasaran strategis dan capaian indikator kinerja utama yang didorong oleh berbagai Program serta Kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 masih banyak kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu kami harapkan masukan, saran serta kritik yang membangun guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan laporan kinerja kedepannya agar bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam peningkatan kinerja kemudian hari.

LKIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Cianjur
Tahun 2025

Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur

